



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

S K R I P S I

**HUBUNGAN ANTARA PERS DAN
PEMERINTAH DI INDONESIA :
STUDI KASUS HARIAN *INDONESIA RAYA*
TAHUN 1972 – 1974**

o l e h :

**Ignatius Haryanto
NPM : 0987010182**


**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Komunikasi
1994**


UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

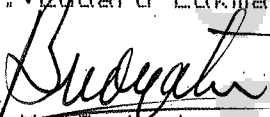
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ignatius Haryanto
Nomor Pokok Mahasiswa : 0 9 8 7 0 1 0 1 8 2
Judul Skripsi : HUBUNGAN PERS DAN PEMERINTAH
DI INDONESIA : STUDI KASUS
HARIAN INDONESIA RAYA 1972-1974

PANITA PEMBIMBING SKRIPSI


Pembimbing I ,
Drs. Fauzie Rachmadi Tanggal : 5/7-1994


Pembimbing II ,
Drs. Eduard Lukman, MA Tanggal : 5/11/1994


Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi ,
DR. H. Budyatna Tanggal : 5/1/94



SEPERTI

*kapal di pantai tak sendirinya bercerita
tentang kedalaman samudra, seperti
jubah kita tak sendirinya bercerita
tentang cinta*

seperti

*buku sejarah tak pernah bercerita
tentang rakyat yang kalah, seperti
setiap penguasa tak pernah bercerita
tentang luka*

(Herry Priyono, Manila Maret 1966)

K A T A P E N G A N T A R

Awal mula tulisan panjang ini adalah keingintahuan penulis yang 'terlalu besar' akan hal-hal, yang akhirnya tertuang dalam lembar-lembar berikut ini. Hal itu dimulai pada pertengahan tahun 1990.

Peristiwa 15 Januari 1974, atau yang kerap dikenal sebagai Malari, rupanya mengganggu penulis untuk mencari tahu lebih dalam, ada apa sebenarnya di balik peristiwa yang sering disebut-sebut dalam peristiwa masa lalu Indonesia. Peristiwa ini dibicarakan dalam membahas fenomena modal asing di Indonesia, fenomena gerakan mahasiswa di Indonesia, konflik elite pasca 1966, dan sederet fenomena lain.

Di lain pihak penulis juga berkehendak untuk lebih mengetahui sosok koran **Indonesia Raya**, yang pertama sekali dikenal penulis dalam buku karya Abdurrachman Surjomihardjo dan kawan-kawan. Bagian yang ditulis oleh Atmakusumah dalam buku tersebut, menurut penulis tidak bercerita banyak, justru saat-saat terakhir surat kabar *crusader* tersebut. Sosok Mochtar Lubis yang lekat dalam koran ini juga semacam flamboyan yang tidak dapat dilepaskan perhatiannya dalam meneropong sejarah Pers Indonesia.

Ternyata fenomena 15 Januari 1974, dan koran **Indonesia Raya** ada kaitannya, yaitu koran ini ditutup setelah terjadinya Peristiwa tersebut, atau gamblangnya koran **Indonesia Raya** ditutup

karena dianggap mendalangi terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974, atau juga Peristiwa 15 Januari 1974 membuahakan penutupan sejumlah surat kabar pada saat itu, termasuk di dalamnya adalah koran **Indonesia Raya**. Dan ternyata titik ini bisa dijadikan suatu objek studi tersendiri, dan itulah saat dimana pilihan penulis ditentukan.

Sejak saat itu, kira-kira paruh kedua tahun 1990, dimulailah pengumpulan sejumlah naskah tertulis, buku-buku penunjang, artikel-artikel, dan yang terutama sekali adalah mencari teks asli koran **Indonesia Raya** tersebut. Dan di sini penulis pun mengakui bahwa karya Francois Raillon, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia (terj. Nasir Tamara), memberikan inspirasi juga dalam penulis semakin menekuni tulisan ini.

Dengan 'keberuntungan' yang ditemui di sana-sini, dan bantuan pemberian bahan tertulis dari sejumlah rekan yang tertarik dengan topik yang akan ditulis ini, maka kepingan-kepingan naskah yang berserakan ini mulai tersusun. Barulah tampak hasilnya setelah masuk dalam tahun kedua titik perhatian ditolehkan pada studi ini.

Sejumlah nara sumber yang relevan dalam objek studi ini dihubungi, dan keberuntungan pulalah yang penulis temui, karena tenggang waktu yang hampir 20 tahun lewat membuahakan penuturan-penuturan yang belum pernah tercatat tertulis sebelumnya.

Salah satu bagian yang harus juga dijalani penulis adalah dengan menimba ilmu di Fakultas sebelah, Fakultas Sastra, di jurusan Sejarah, khusus untuk kuliah Metode Sejarah. Dan pengajar mata kuliah tersebut mengakui bahwa penulis adalah mahasiswa

FISIP yang pertama mengambil mata kuliah tersebut. Sebagai salah satu bagian dari penelitian sejarah, maka topik ini amat kontemporer, dengan dominannya nara sumber yang masih hidup, yang disertai catatan tentang bias informasi yang akan diperoleh dari sumber-sumber tersebut. Namun untuk penelitian dari ilmu komunikasi, maka tulisan ini merupakan bagian dari studi tentang Pers Indonesia, yang mau dilihat dalam kerangka yang cukup makro, dengan melibatkan bidang-bidang ilmu lainnya, seperti ekonomi makro, politik, sosiologi dan juga filsafat. Semakin meningkat topik ini, semakin penulis sadar bahwa masih amat banyak lubang yang belum dijawab dalam wawancara perjalanannya sejarah Pers Indonesia. Banyaknya kajian tentang Pers Indonesia, yang justru dilakukan sarjana asing, membuat penulis semakin terpacu untuk menyelesaikan tulisan ini, walau akhirnya memakan waktu yang demikian panjang. Tulisan ini memang hanya mau menambal salah satu lubang dalam penulisan sejarah Pers Indonesia, yang mudah-mudahan bisa sedikitnya menjelaskan apa yang sebenarnya dialami oleh Pers Indonesia pada pertengahan tahun 1970-an, dengan seluruh dinamika yang dilaluinya baik dari dalam dirinya sendiri, maupun dinamika yang lebih keras dari luar dirinya. Sungguh ironis bahwa sebagai salah satu catatan sejarah, karya Abdurrachman Surjomihardjo itu pun kini sudah tidak dapat dijumpai lagi pada khajayak umum, atau gambelannya di larang untuk didaftarkan karena mengganggu kebijakan instansi penerbit buku itu sendiri. Padahal penulisan tentang sejarah Pers Indonesia secara

sistematis, oleh penulis Indonesia sendiri, boleh dikatakan dimulai pada karya Abdurrachman dan kawan-kawannya itu.

Suatu bangsa yang tidak cukup baik mengenali sejarahnya tentu mendapat tantangan untuk menjawab fenomena kekiniannya, dan menoleh ke belakang, mungkin dapat memperoleh salah satu jawabannya.

Akhirnya penulis membuka tangan selebar-lebarnya terhadap kritik atas isi dan metode yang dipakai, yang walaupun mendapatkan bantuan komentar dari sejumlah rekan dan penggunaan pemikiran karya-karya lain, penulis hendak mempertanggungjawabkannya secara pribadi.



Jakarta, 2 Desember 1993

Ignatius Haryanto

U C A P A N T E R I M A K A S I H

Ucapan terima kasih ini khusus dituliskan, untuk tidak mencampurkannya dengan kata pengantar, karena penulis merasa amat berhutang budi, dan juga ingin mendedikasikan tulisan ini kepada sejumlah orang yang amat berjasa untuknya. Katakan saja ucapan terima kasih ini adalah catatan kaki dari kata pengantar di depan.

Pertama sekali penulis hendak menghunjak karya ini demi semakin tinggi kemuliaan namaNya, *Ad Maiorem dei Gloriam*, karena atas segala anugrahNya sajalah karya ini dapat terselesaikan. Kemudian penulis juga hendak mendedikasikan karya ini kepada kedua orangtua penulis, yang mungkin sekali sudah lama menunggu anaknya yang satu ini segera menyelesaikan studinya. Dengan segala jatuh bangunnya hidup yang telah dan sedang kita sama-sama jalani, berikut dengan pelajaran tentang hidup itu sendiri *by practise* penulis ingin mengucapkan terima kasih lewat karya ini.

Tak kalah pentingnya di sini adalah para pembimbing penulis yaitu Bapak F. Rachmadi, dengan semangatnya memacu penulis yang dua generasi di bawahnya untuk tetap bersemangat, dan juga kepada Bapak Eduard Lukman, MA, yang tidak saja mengajarkan tentang materi kuliah kepada penulis serta sejumlah diskusi tentang topik ini, namun juga kebersamaannya sebagai rekan berdialog.

Kepada Bapak Masmimar Mangiang, yang bersedia menjadi *reader* untuk sidang skripsi ini, dan juga Bapak Abdurrachman Surjomihardjo yang mendukung sepenuhnya 'satu lagi karya yang melengkapi sejarah pers Indonesia'.

Juga tak lupa kepada beberapa senior penulis, Ade Armando MA, yang menjadi *reader* pada masa sidang outline serta juga Furqon Hanief, MA yang memberikan tanggapan serta komentar kritis kritis atas tulisan ini. Juga kepada ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI, DR M. Budyatna, yang kerap menegur penulis dengan caranya sendiri, untuk segera menyelesaikan tulisan ini.

Penulis pun merasa harus mencantumkan sejumlah rekan, dan sahabat yang memberikan bantuan materi atau bahan penunjang tulisan ini, yaitu Lisa Dwi Ratna, Nur Iman Subono, I. Ismartono, Mudji Sutrisno, Ibu Kustiniyati Mochtar, dan Bapak Atmakusumah, serta para stafnya di Wisma Indra, Cempaka Putih.

Penulis juga merasa berhutang budi pada dua buah lembaga pendidikan tinggi, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta segala kelengkapannya, terutama Perpustakaan, dan juga kepada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, yang membantu penulis mensistematisir pokok-pokok dalam benak ini. Di luar pendidikan formal, maka penulis pun merasa amat dibantu dengan kelembagaan non formal yang penulis temui dalam kelompok-kelompok diskusi yang mempertajam wawasan penulis serta juga arah tulisan ini. Mereka itu adalah Kelompok Kepodang; Lefidus Malau, Nugraha Katjasungkana, Pitono Adhi dan Riri, Wilson, Fay dan juga teman-teman lain dari jurusan Sejarah FS UI. Tak ketinggalan perbincangan sejenak yang sempat dilakukan dengan Prof. Herb Feith dari Monash University, dan David T. Hill dari Murdoch University, Australia, masing-masing dalam salah satu kunjungannya ke Indonesia.

Tak lupa pula support kawan-kawan dari Tabloid GOSIP (GO FISIP GO), "hey it's a nice thing to work together with you all", seluruh wadya bala yang giat menanyakan, "Kapan Kum ?". Dengan teman-teman satu jurusan penulis tak kurangnya terucap terima kasih atas segala persahabatannya; Nita, *my best friend*, juga Antik, Gita, Santi Sierra, Arni, Susi, Audrey, serta Nova yang mengenalkan 'dunia baru; dunia komputer' pada penulis.

Para para sumber; Bapak Mashoeri Saleh, Soekarno SH, J. Soedjati Djiwandono, Krissantono, Harry Tjan Silalahi, Jend. (Purn) Soemitro, Jend. (Purn) Sutopo Juwono, Bapak Mochtar Lubis, Ibu Kustiniyati Mochtar, Bapak Atmakusumah, dan Bapak Jakob Oetama, yang sudah mau meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis. Tanpa mereka semua sulit dibayangkan tulisan ini akan lengkap.

Dan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Mas Iksan, dan juga Yani, yang dengan caranya masing-masing memberikan perhatian kepada penulis. Khususnya Yani untuk segala curahan perhatian dan kasih sayangnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dalam mendorong penulis menyelesaikan karya ini.

Pastilah banyak orang yang masih tidak disebutkan, namun penulis pun mengucapkan terima kasih atas segala dukungan moral untuk rekan-rekan yang tak dapat ditulis satu per satu di sini.

Akhirnya penulis sendirilah yang bertanggung jawab atas isi tulisan ini, dan kritik-kritik amatlah dinantikan oleh penulis.

Ignatius Haryanto

x

A B S T R A K

Ignatius Haryanto, 098701082

**HUBUNGAN PERS DAN PEMERINTAH DI INDONESIA :
STUDI KASUS HARIAN INDONESIA RAYA TAHUN 1972-1974**

*xvi + 246 halaman; 3 tabel; 5 lampiran;
bibliografi 75; 47 artikel (1956-1993)*

Perjalanan sejarah Pers Indonesia, selalu menunjukkan bahwa Pers selalu berhadapan dengan masalah kekuasaan. Kekuasaan yang sebenarnya juga dimiliki oleh Pers, rupanya tidak terlalu mengimbangi kekuasaan lain di luar dirinya.

Hubungan Pers dan Pemerintah pada masa awal Orde Baru diwarnai dengan variasi hubungan, di satu masa, tahun-tahun awal Orde Baru, ada kepentingan yang berjalan beriringan antara Pers dan Pemerintahan Orde Baru. Tetapi pada masa selanjutnya, Pers merasa ia harus kembali kepada fungsinya semula yaitu, menjadi media informasi, dan di sinilah terjadi perbedaan kepentingan antara Pers di satu pihak dengan Pemerintah di lain pihak.

Rupanya fungsi informasi, amat ditonjolkan efek politisnya oleh Pemerintah. Hal ini bisa dilihat pada penanganan-penanganan kasus yang tidak melalui prosedur hukum yang wajar, dan ditambah pembenaran atas kondisi darurat yang dipahami oleh Pemerintah pada masa awal Orde Baru.

Surat kabar **Indonesia Raya** adalah koran yang memiliki visi yang amat jelas dalam keberpihakannya pada kepentingan masyarakat, dan menolak segala bentuk korupsi atau manipulasi yang terjadi di awal masa Orde Baru itu. Sebagai salah satu implikasi kebijakan ekonomi yang menarik modal asing ke Indonesia, maka koran ini adalah salah satu yang paling kritis menanggapi kebijakan tersebut. Sikap tersebut tercermin jelas dalam pemberitaan dan editorial yang dipimpin oleh Mochtar Lubis.

Di satu pihak kondisi keadaan negara yang masih menuju konsolidasi kekuatan baru, setelah terjadinya peralihan kekuasaan pada tahun 1966, maka institusi pers mengalami dilema. Ada tuntutan untuk menjadi 'Pers Pembangunan', dengan segala konsekuensinya, namun di sisi lain ada perbedaan pandangan tentang fungsi dasar institusi pers yaitu fungsi informasi.

Dilihat dari perkembangan teori Pers itu sendiri, maka terlihat bahwa pengamatan terhadap Pers Indonesia sering jatuh dalam kesalahpahaman, bahwa teori Pertanggungjawaban Sosial, yang sering didengung-dengungkan merupakan milik Pers Indonesia, harus dilihat perkembangan historis serta juga konteks kemunculan teori tersebut. Sulit untuk mengatakan teori Pertanggungjawaban Sosial bisa langsung dipakai di sini tanpa mengerti arah perkembangan teori sebelumnya.

Keunikan Pers Indonesia, seperti yang juga sering didengungkan, harus diamati dalam kerangka tarik menariknya institusi pers dengan kelembagaan atau sistem-sistem lain yang melingkupinya. Ada hal-hal tentang ekonomi makro, perebutan pengaruh kekuasaan

di tingkat elite, serta gelombang arus bawah (mahasiswa) yang juga mempengaruhi sikap Pers, khususnya **Indonesia Raya**.

Salah satu episode dalam sejarah Pers Indonesia telah berlalu, dan tulisan ini hendak melihatnya setelah 20 tahun terjadinya peristiwa tersebut. Yang sulit untuk dikatakan adalah, apakah kejadian tersebut harus diterima demikian saja sebagai bagian dari episode kelabu dalam sejarah, ataukah memang pembangunan ekonomi memang membutuhkan demikian sebagai 'harga yang harus dibayar' ?



DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
Tujuan dan Signifikansi Penelitian	13
Kerangka Pemikiran	14
Metodologi	25
Tehnik Pengumpulan Data	29
Sistematika Penulisan	31
BAB II : HUBUNGAN PERS DAN PEMERINTAH DI INDONESIA :	
TINJAUAN LITERATUR	32
Surat Ijin Cetak dan Surat Ijin Terbit	37
Undang-undang Pokok Pers	42
Kemunculan SIUPP dan Kontroversinya	47
Peristiwa 15 Januari 1974 dan Dampaknya terhadap Hubungan Pers - Pemerintah	52
BAB III : SURAT KABAR INDONESIA RAYA	58
Posisi <i>Indonesia Raya</i> dalam Sejarah Pers Indonesia	58
<i>Indonesia Raya</i> Periode Pertama	59
<i>Indonesia Raya</i> Periode Kedua	70

	Indonesia Raya dan Pemberitaan tentang	
	Proyek Miniatur Indonesia	73
	Pemberitaan Tentang Korupsi dan Manipulasi ..	78
	Pemberitaan Tentang Pemuda dan Mahasiswa ...	84
	Pemberitaan Tentang Politik Nasional	92
	Pemberitaan Tentang Kesenjangan Sosial	
	dan Strategi Pembangunan Ekonomi	96
	Peliputan Atas Peristiwa 5 Agustus 1973	
	di Bandung	105
	Pemberitaan Tentang Modal Jepang di	
	Indonesia	111
	Pemberitaan Tentang Hubungan Pers dan	
	Pemerintah	121
	Sosok Pribadi Mochtar Lubis	128
BAB IV	: PERISTIWA 15 JANUARI 1974	134
	Permulaan Pembangunan Ekonomi Indonesia ...	137
	Perbedaan Pandangan Strategi Perekonomian	
	Orde Baru	140
	Dilema Modal Asing di Indonesia	144
	Konflik Elite Kekuasaan (?)	149
	Kronologi Peristiwa 15 Januari 1974	154
	Liputan <i>Indonesia Raya</i> atas Peristiwa	
	15 Januari 1974	164

BAB V	:	HUBUNGAN PERS DAN PEMERINTAH SETELAH	
		PERISTIWA 15 JANUARI 1974	180
		Nasib <i>Indonesia Raya</i> Setelah Peristiwa	
		15 Januari 1974	187
		Alasan Penutupan Menurut Pemerintah	195
BAB VI	:	D I S K U S I	198
		Teori-teori Pers	203
		Pers dan Dampak Modernisasi	218
BAB VII	:	P E N U T U P	223
DAFTAR PUSTAKA		226
Tabel 1	:	Oplag Surat Kabar <i>Indonesia Raya</i> 1949-58 ...	234
Tabel 2	:	Oplag Surat Kabar <i>Indonesia Raya</i> 1968-74 ...	235
Tabel 3	:	Penanaman Modal Asing di Indonesia	
		Menurut Negara Asalnya 1967-78	236
Lampiran 1	:	Susunan Redaksi <i>Indonesia Raya</i>	237
Lampiran 2	:	Pemberian Surat Ijin Terbit untuk	
		<i>Indonesia Raya</i>	238
Lampiran 3	:	Pemberian Surat Ijin Cetak untuk	
		<i>Indonesia Raya</i>	240
Lampiran 4	:	Pencabutan Surat Ijin Cetak	
		<i>Indonesia Raya</i>	242
Lampiran 5	:	Pencabutan Surat Ijin Terbit	
		<i>Indonesia Raya</i>	244

BAB I

PENDAHULUAN

Bentuk hubungan antara pers dan pemerintah adalah sebuah studi yang menarik perhatian banyak orang. Beberapa studi yang bisa disebutkan di sini misalnya adalah seperti yang dilakukan oleh E. Lyold Sommerlad,¹ juga karya klasik Fred S. Siebert dan kawan-kawan,² adalah karya yang secara eksplisit mengkaji hubungan pers dan pemerintah. Studi tentang pers Indonesia secara khusus, juga banyak membahas bagaimana interaksi yang berlangsung antara kedua institusi tersebut.

Studi yang dilakukan Oey Hong Lee,³ Edward C. Smith,⁴

1. E. Lloyd Sommerlad, Press in Developing Countries, Sydney University Press, 1966

2. Fred S. Siebert, Theodore Peterson and Wilbur Schramm, Four Theories of the Press, University of Illinois Press, 1956

3. Oey Hong Lee, Indonesian Government and Press During Guided Democracy, England: University of Hull, 1971. Lihat juga dari pengarang yang sama, "Indonesian Freedom of the Press and the 1971 Elections" dalam Indonesia after 1971 Elections, England: University of Hull, 1971.

4. Edward C. Smith, Sejarah Pembreidelan Pers di Indonesia, terjemahan Atmakusumah dan kawan-kawan, Jakarta: Grafiti Press, 1983

Kerry Groves,⁵ Francois Raillon,⁶ dan Daniel Dhakidae,⁷ adalah sebagian dari studi yang menyoroti hubungan pers dan pemerintah di Indonesia.

Dari sejumlah studi tersebut, maka terlihat adanya pembagian waktu dalam mengamati interaksi antara pers dan pemerintah, berkaitan dengan situasi ekonomi, sosial, politik dan budaya. Sehingga antara satu periode dengan periode lainnya terjadi perbedaan bentuk interaksi.

Tulisan ini akan didasarkan pada pembagian waktu dalam melihat hubungan pers dan pemerintah di Indonesia, dan nanti akan dijelaskan juga bagaimana setting ekonomi, sosial, politik pada waktu tertentu tersebut.

Periodisasi kehidupan pers Indonesia bisa dilihat dalam beberapa periode:

1. Periode perkembangan awal 'pers Indonesia' sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan, tahun 1945.
2. Periode Kemerdekaan, tahun 1945 sampai dengan tahun 1949.
3. Periode 1949 sampai dengan 1959.
4. Periode 1959 sampai dengan 1966
5. Periode 1966 sampai dengan 1974
6. Periode 1974 sampai dengan 1978

5. Kerry Groves, The Press under Indonesia's New Order, tesis BA dari Australian National University, Canberra, 1978, tidak dipublikasikan.

6. Francois Raillon, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia, terjemahan Nasir Tamara, Jakarta: LP3ES, 1985.

7. Daniel Dhakidae, The State, The Rise of Capital and The Fall of Political Journalism in Indonesia: Political Economy of Indonesian News Industry, tesis doktor dari Cornell University, Ithaca, New York, 1991.

7. Periode 1978 sampai dengan sekarang ⁸

Periode awal pers Indonesia ada pada masa pemerintahan kolonial Belanda, yang menduduki Indonesia sejak akhir abad 16. ⁹ Surat kabar pertama yang dikenal di Hindia Belanda adalah Bata-viasche Nouvelles yang terbit mulai tahun 1744.

Pada saat penjajahan kolonial banyak koran, menjadi corong pemerintah Hindia Belanda, dan baru beberapa saat kemudian dikenal koran-koran pribumi, antara lain Medan Prijaji yang didirikan oleh Raden Mas Tirta Adhi Soerjo. ¹⁰ Koran-koran inilah yang memperjuangkan suara kelompok bumi putera di Hindia Belanda. Selain itu juga dikenal pers Melayu Tionghoa, yang salah satu kelompoknya juga memperjuangkan kemerdekaan dan nasionalisme saat itu. ¹¹

8. Tentang pembagian ini bandingkan dengan Amir Effendi Siregar, Pers Mahasiswa Indonesia: Patah Tumbuh Hilang Berganti, Jakarta, Karya Unipress, 1983, h.36-37. Juga lihat pembagian yang dilakukan oleh Tjipta Lesmana, khusus pada masa Orde Baru yang diwarnai dengan ketegangan-ketegangan antara pers dan pemerintah. Lihat Tjipta Lesmana, "Pers Indonesia dalam Teori dan Praktek" dalam Soebagijo PR et al, Persuratkabaran Indonesia dalam Era Informasi: Perkembangan, Permasalahan dan Perspektifnya, Pustaka Sinar Harapan, 1986, h.373

9. Tentang masa awal perkembangan pers Indonesia bisa melihat pada buku Abdurrachman Surjomihardjo (ed), Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, Jakarta: LEKNAS LIPI dan Departemen Penerangan RI, 1980

10. Khusus tentang Raden Mas Tirta Adhi Soerjo dan Medan Prijaji-nya, lihat Pramoedya Ananta Toer, Sang Pemula, Jakarta: Hasta Mitra, 1985.

11. Lihat Abdurrachman Opcit, dan juga lihat Leo Suryadinata, "Sejarah Singkat Pers Tionghoa di Indonesia" dalam Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia, terjemahan Dede Oetomo, Jakarta: Gramedia, 1988, h.74-93

Periode Kemerdekaan yang berlangsung pada 1945 sampai dengan 1949, lekat dengan situasi Indonesia mempertahankan proklamasi-nya.

Tokoh pers Indonesia saat itu lekat dengan pergerakan kemerdekaan, dan pers memang alat yang dipakai untuk menyuarakan kepentingan bangsa Indonesia, dalam upaya meraih kemerdekaan sekaligus mempertahankannya. Tak heran jika tokoh pergerakan saat itu pasti lekat hubungannya dengan salah satu koran pada masanya.

Salah satu yang dapat disebutkan di sini adalah surat kabar **Merdeka** yang dipimpin oleh BM Diah, muncul sebagai koran pertama Indonesia pada masa setelah kemerdekaan.¹²

Maklumat Wakil Presiden, Mohammad Hatta, tanggal 3 November 1945, tentang pembentukan partai-partai politik, memberikan warna dominan pada masa hubungan pers dan pemerintah pada periode 1949 sampai 1959.

Kemunculan sejumlah partai politik pada awal kemerdekaan itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menuangkan aspirasinya, sejauh memperkuat perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat.¹³

12. Tentang jatuh bangunnya koran ini lihat JR Chaniago et al, **Ditugaskan Sejarah: Perjuangan Merdeka 1945-1985**, Jakarta: Pustaka Merdeka, 1987.

13. Lihat buku **30 Tahun Indonesia Merdeka buku 1 1945-1949**, Sekretariat Negara RI, 1981, cetakan ke-4, h.55-56

Dalam perkembangannya banyak partai memiliki surat kabar, yang menjadi corong kepentingan partainya. Bisa disebutkan di sini adalah harian Pedoman yang berafiliasi kepada Partai Sosialis Indonesia, Harian Rakyat, milik Partai Komunis Indonesia, Suluh Indonesia milik Partai Nasional Indonesia, dan Abadi milik Masjumi. Surat kabar inilah yang tertinggi oplagnya saat itu.

Dalam penilaian Herbert Feith, disebutkan bahwa pers pada periode ini terasa hidup, informatif dan bebas. Ia mengatakan walaupun beberapa surat kabar punya kedekatan dengan partai tertentu, tetapi secara relatif surat kabar tersebut bebas dari pengaruh partai.¹⁴ Perkembangan pada masa Demokrasi Konstitusional tersebut,¹⁵ memperlihatkan bahwa pada masa inilah dilaksanakan Pemilihan Umum pertama Negara Republik Indonesia, pada tanggal 29 September 1955.

Situasi politik dasawarsa 1950-an diwarnai dengan banyaknya pergolakan di daerah-daerah, yang mengakibatkan pemerintah pusat kelabakan dalam menghadapi gejolak yang muncul di beberapa tempat, seperti di daerah Sumatera dan Sulawesi. Masa ini pun ditandai dengan jatuh banggunya kabinet dan kabinet rata-rata berumur kurang dari satu tahun.

Situasi politik yang demikian juga terasa dalam kehidupan

14. Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy, Ithaca: Cornell University Press, 1962, h.323

15. Istilah *Demokrasi Konstitusional* lebih dipakai di sini, ketimbang istilah *Demokrasi Liberal*, dalam pertimbangan bahwa kata 'Liberal' dalam budaya politik di Indonesia, setara dengan 'Komunis' yang ditolak oleh paham 'Pancasila'. Dikatakan bahwa "Demokrasi Pancasila, bukan Liberal, dan bukan pula Komunis". Setidaknya *Demokrasi Konstitusional* lebih netral untuk pengertian tersebut.

pers. Banyak polemik terbuka antara surat kabar satu dengan surat kabar lain, dan sedikit banyak hal itu mewakili kepentingan masing-masing ideologinya. 16

Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, dapat dikatakan melatari kehidupan politik Indonesia pada periode akhir 50-an. Isi dekret tersebut menyatakan pembubaran Konstituante, 17 penetapan kembali dipergunakan Undang-undang Dasar 1945, dan pembentukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara).

Situasi saat itu juga menunjukkan penguatan kelompok Komunis, dan terjadi persaingan dengan kelompok militer, khususnya Angkatan Darat. Di sinipun terjadi konflik ideologis yang mengimbis pada kehidupan pers saat itu. Terjadi perbedaan pandangan

16. Salah satu misalnya adalah polemik antara Harian Merdeka yang Nasionalis, dengan Harian Rakyat, surat kabar Partai Komunis Indonesia. Lihat pada BM Diah, Meluruskan Sejarah, Jakarta: Pustaka Merdeka, 1987, h.89-268.

17. Dalam pengertian Presiden Soekarno, Konstituante hasil Pemilihan Umum 1955, gagal untuk menetapkan Undang-undang Dasar setelah mengalami *dead lock*. Adnan Buyung Nasution lewat studinya mencoba menguraikan apa yang sebenarnya terjadi dalam sidang Konstituante tersebut. Dari hasil studinya itu disimpulkan bahwa Konstituante tidak gagal menetapkan Undang-undang Dasar. Memang terjadi beberapa perbedaan pandangan dalam menetapkan Dasar Negara, yang kemudian menyebabkan kemacetan, tetapi perkembangan menunjukkan bahwa Soekarno membubarkan Konstituante karena dianggap gagal. Studi Adnan Buyung berjudul, The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia (A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959). Studi hasil disertasi doktor dari Universitas Utrecht ini dibukukan oleh penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1993.

20. Tentang hal ini lihat pada Ulf Sundhussen, Politik Militer Indonesia 1945-1965, terj. Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, 1988, khususnya halaman 341-365. Di situ pun dikemukakan oleh Sundhussen tentang perbedaan pendapat tentang siapa yang sebenarnya ada di belakang peristiwa Gerakan 30 September 1965 tersebut. Para analis Indonesia dari Universitas Cornell menyangsikan gerakan tersebut dilakukan oleh PKI. Lihat footnote 96 & 97 dalam Sundhussen tersebut.

19. Smith Op cit. h.206

18. Lihat Triwana Said dan DS Moeljanto, Perlawanan Pers Indonesia BPS terhadap Gerakan PKI, Fustaka Sinar Harapan, 1983.

ditandai juga dengan penataan pembangunan ekonomi di sana-sini Era Orde Baru - begitu sebutan untuk pemerintahan pasca 65 - mengalami pengusiran.

pok mahasiswa dan cendekiawan saat itu. Pers komunis, sebaliknya tupan kini dihidupkan kembali, dibarengi dengan pers dari kelompok. Sejumlah pers yang pada periode sebelumnya mengalami penurunan pers pun mengalami pergeseran kembali.

dengan Angkatan Darat mengambil alih pucuk pimpinan negara. Dan Sejak masa itulah kelompok non komunis yang bekerja sama

tember 1965. 20
pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1965, seiring dengan tuduhan mengkhianati negara, menyusul Periode tahun 1965 ditandai dengan jatuhnya Partai Komunis

revolusi yang dibolehkan hidup." 19
Istilah ini tidak boleh ada kebebasan pers. Hanya pers yang mendukung (Soekarno-pen.) dengan tegas menyatakan bahwa dalam suatu revolusi saat itu begitu besar, bahkan Soekarno pernah mengatakan, "Saya antara golongan komunis dan non komunis. 18 Kekuasaan presiden

dan pemerintah yang baru harus berjuang keras untuk menutupi tingginya inflasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kehidupan pers pada awalnya dirasa 'cukup ideal' karena ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan pers, bahkan banyak orang menyebutnya sebagai masa 'bulan madu' antara pers dan pemerintah. ²¹

Namun saat itu juga terjadi penutupan sejumlah pers pada masa awal Orde Baru ini dalam dua kategori. Pertama, adalah pers yang disebut sebagai 'pers porno' yang banyak ditutup pada awal 70-an, ²² dan kedua, adalah 12 surat kabar dan majalah yang ditutup menyusul terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974.

Periode tahun 1978 pun diwarnai dengan pembreidelan sementara sejumlah surat kabar berkaitan dengan liputannya terhadap Pemilu 1977, dan terhadap gerakan mahasiswa yang kembali menghangat saat itu.

Lucian W. Fye ²³ pernah mengemukakan konsepsinya antara pers dan kelompok kekuasaan dalam suatu negara :

Even in the most weak and unstable country, the mass

21. Salah satu yang menyebut demikian adalah Christanto Wibisono, dalam artikel "Dilema Pers Negara Berkembang", Sinar Harapan 26 Agustus 1986.

22. Tentang hal ini bisa dilihat pada, Alex A. Rachim ed. Pornografi dalam Pers Indonesia: suatu orientasi, Dewan Pers, 1977.

23. Lucian W. Fye, "Communication, Institution Building and the Reach of Authority" dalam Communication and Change in Developing Countries, Daniel Lerner and Wilbur Schramm eds., Honolulu: East West Centre, 1967, h.37.

media must still retain to some degree one of their most basic functions: that of serving as an inspector general to the entire political system of political integrity among the power holders. The problems, however, are immense and inordinately complex, for there is also some substance in the argument that reckless and irresponsible criticism of authority can destroy any hope of building up constructive patterns of government.

Itulah dilema yang dialami juga oleh pers Indonesia. Di satu sisi pers merasa bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan atau sistem politik negaranya. Namun di sisi lain, rupanya penguasa atau pemerintah tidak menghendaki fungsi yang demikian. Fungsi yang dikehendaki dari pers, adalah sebagai mitra pembangunan; menjadi partisipan pembangunan masyarakat.

Fersoalannya bagi pers kini menjadi: seberapa kebebasan yang dimiliki pers dalam suatu negara baru atau negara yang sedang berkembang? Tentu di sini juga harus diperhitungkan relativitas kondisi masing-masing negara, karena dinamika masing-masing negara memperlihatkan kondisi yang berbeda bagi kehidupan persnya.

Di Indonesia misalnya, peran kemitraan dalam pembangunan terlihat jelas dalam konsepsi Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), yang merupakan program pembangunan pemerintah Orde Baru. Sejak dimulainya Pelita I, pada tahun 1969, pers dimasukkan dalam bagian penerangan, dan fungsi penerangan bagi pemerintah ditujukan untuk, "lebih menjamin pelaksanaan Repelita dengan menyebarkan pengertian serta apresiasi terhadap Repelita tersebut, sehingga dengan demikian terdapat partisipasi aktif seluruh

masyarakat".²⁴

Studi ini sendiri akan berfokus pada kehidupan pers di awal masa Orde Baru, dari permulaan hingga pertengahan tahun 1970-an, dengan melihat bagaimana terjadinya interaksi antara pers dan pemerintah, dan mengambil surat kabar Indonesia Raya sebagai obyek studinya.

Surat kabar Indonesia Raya ditutup menyusul terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974. Koran ini bukanlah satu-satunya koran yang ditutup saat itu, tetapi satu dari 12 surat kabar dan majalah yang mengalami nasib serupa, yaitu harian Nusantara,²⁵ Harian KAMI, Abadi, The Jakarta Times, Pedoman, Mingguan Wenang, Pemuda Indonesia, serta mingguan berita Ekspres - seluruhnya berlokasi di Jakarta - juga harian Suluh Berita di Surabaya, mingguan Mahasiswa Indonesia²⁶ di Bandung dan Mingguan Indonesia Pos di Ujung Pandang.

Surat kabar Indonesia Raya dalam tulisan-tulisan tentang pers Indonesia boleh dikatakan mempunyai tempat khusus, karena

24. Lihat buku Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama, 1969-1974, h.429.

25. Tentang Harian Nusantara, secara khusus pernah ditulis sebagai hasil skripsi oleh Haryono AW Sofinas, "Hidup dan matinya Harian Nusantara", skripsi dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia, 1979.

26. Lihat Raillon Opcit.

surat kabar ini cukup banyak disorot oleh sejumlah pengamat. 27

Sejarah koran ini juga memperlihatkan bahwa pembreidelan dialaminya berkali-kali dalam dua periode pemerintahan yang berbeda: pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Bahkan beberapa redaktornya pun sempat mengalami ditahan untuk waktu yang cukup lama.

Mochtar Lubis sebagai pemimpin redaksi Indonesia Raya mempunyai pengaruh besar dalam koran ini. Karena itu muncul sebutan *personal journalism*, yang menunjuk pada kepemimpinan Mochtar Lubis dan sikap pribadinya seperti tercermin dalam koran tersebut.

Disebutkan pula bahwa Indonesia Raya adalah :... "surat kabar yang kontroversial, karena cara penyajian beritanya yang sering tanpa tedeng aling-aling, karena kritik-kritiknya yang tajam, terbuka dan langsung dan bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang populer tanpa banyak berusaha mempergunakan eufi-

27. Misalnya adalah David T. Hill, Mochtar Lubis: Author, Editor and Political Actor, tesis doktor dari Australian National University, Canberra: 1988. Juga dari penulis yang sama, "Press Challenges and Government Responses" dalam Paul Tickell ed. The Indonesian Press: Its Past, Its People and Its Problems, Annual Lecture Series no.12 Monash University, 1987. Peneliti Perancis, Henri Chambert-Loir juga menyinggung tentang koran Indonesia Raya dalam karya doktoralnya Mochtar Lubis: Une Vision de l'Indonesie Contemporaine, Paris: Publication de l'Ecole Francaise D'Extreme-Orient, 1974. Atmakusumah juga menulis, "Kasus Indonesia Raya" dalam Abdurrachman Surjomihardjo ed. Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, Jakarta: Leknas LIPI dan Departemen Penerangan RI, 1980. Lihat juga Atmakusumah ed. Mochtar Lubis: Wartawan Jihad, Jakarta: Harian KOMPAS, 1992, tulisan "Mochtar Lubis dan Indonesia Raya". Buku terakhir ini adalah kumpulan tulisan untuk merayakan ulang tahun ke 70 Mochtar Lubis, bekas pemimpin redaksi Indonesia Raya.

misme." 28

Bentuk hubungan pers dan pemerintah yang menjadi tema studi ini, ingin dilihat dalam suatu kerangka waktu dan tempat tertentu, bagaimana fungsi informasi yang dilakukan oleh pers sering mendapat penilaian politis oleh penguasa yang sering tidak menguntungkan bagi pers itu sendiri. 29

Di sini akan dibahas bagaimana pertukaran gagasan, dalam arti keberanekaan dalam pemberitaan dan opini surat kabar, ditanggapi oleh penguasa negara. Serta akan dilihat pula kerangka macam apa yang melatari isu-isu tertentu dalam media massa;

Tidak dapat disangkal di sini adalah hubungan antara pers dan pemerintah juga berkaitan dengan *power struggle* yang terjadi saat itu, antara kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh, baik langsung maupun tidak langsung.

28. Abdurrachman S. Dpcit h.181. Oey Hong Lee (1971) menyebutnya sebagai *muckracing papers*. Atau ada juga yang mengistilahkannya sebagai *advocacy journalism*.

29. Charles R. Wright mengemukakan 4 fungsi komunikasi massa yang dilakukan pers. Dengan mengutip Harold Lasswell dikatakan 3 fungsi komunikasi massa adalah: "... surveillance of the environment, correlation of the parts of society in responding to the environment, and transmission of the social heritage from one generation to the next." Wright sendiri menambahkan fungsi komunikasi massa yang keempat yaitu "entertainment", lihat Charles R. Wright Mass Communication: A Sociological Perspective, 2nd Edition, New York: Random House, 1975, h.8-9.

TUJUAN DAN SIGNIFIKANSI PENELITIAN:

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan fenomena ekonomi, sosial, politik dan budaya sebagaimana yang ditampilkan oleh Indonesia Raya pada tahun 1972-1974, serta menganalisa bagaimana sikap koran itu atas fenomena yang ditampilkannya tersebut.
2. Melihat hubungan antara pers dan pemerintah pada masa awal Orde Baru berkaitan dengan fenomen-fenomen yang terjadi saat itu dan juga pemberitaan dan opini yang ditampilkan Indonesia Raya.

Signifikansi Penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan penelitian mengenai pers Indonesia, terutama studi kontemporer berkaitan dengan hubungan pers dan pemerintah di negara berkembang.
2. Secara metodologis ingin memperluas pemakaian metodologi sejarah dalam disiplin ilmu Komunikasi, di mana metodologi sejarah lebih banyak menggunakan penelitian kepustakaan dan wawancara mendalam.
3. Mencoba memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Peristiwa 15 Januari 1974, dengan memberikan deskripsi yang multi dimensional, khususnya dalam perspektif hubungan pers dan pemerintah, yang menjadi obyek studi ini.

KERANGKA PEMIKIRAN

Studi tentang pers Indonesia dapat dikatakan sebagai studi yang integral dengan studi tentang Indonesia sebagai suatu kawasan, yang berarti bahwa studi ini tidak melulu bicara tentang efek pemberitaan, mekanisme hukum pers yang berlaku, tetapi studi ini juga dikaitkan dengan dinamika ekonomi, politik dan sosial budaya pada kawasan di mana pers itu muncul. Jakob Oetama menyebutkan bahwa pers adalah juga suatu institusi yang memiliki pengaruh dan memberikan efek tertentu kepada pembacanya, dan juga mampu mempengaruhi sikap politik pembacanya.³⁰

Kaitan pers dengan masalah politik atau masalah sosial lainnya - dengan kata lain: masalah-masalah kekuasaan - sudah bisa dilihat sejak kemunculan pertama pers 'Indonesia'. Kelahiran pers bumi putera adalah suatu bentuk perlawanan dari kalangan pribumi di Indonesia yang menjadikan pers sebagai corong perlawanannya (baca: perjuangannya) terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tak heran jika dari sini terlihat kaitan erat antara pengelola pers bumi putera dengan kalangan pergerakan kemerdekaan. Hampir semua tokoh pejuang kemerdekaan pasti memiliki surat kabar sebagai corong untuk mengemukakan pendapatnya, entah sebagai penulis saja, ataupun memimpin surat kabarnya sendiri. Oleh karena itu pemerintah kolonial amat berhati-hati dengan suara yang dikemukakan oleh pers bumi putera saat itu.

Situasi yang kurang lebih sama terlihat juga pada pertain-

30. Lihat Jakob Oetama, "The Indonesian Press and Development", Indonesian Quarterly Vol I no.3 April 1973, h.75-86.

ngahan tahun 1960-an, ketika terjadi pertarungan politik tingkat tinggi, antara kelompok komunis dan kelompok non komunis; yang terdiri dari para cendikiawan serta mahasiswa, dan didukung oleh kelompok militer. ³¹

Sejumlah pemimpin media massa juga ikut dalam pertarungan tersebut, dan beberapa di antaranya memperkuat kelompok yang berideologi non komunis.

Sejumlah pers generasi baru pun muncul saat itu, misalnya surat kabar seperti Berita Yudha, yang lahir pada tanggal 9 Februari 1965, juga Angkatan Bersenjata yang lahir pada tanggal 15 Maret 1965. Ditulis oleh Roger K. Paget ³² bahwa kehadiran dua surat kabar militer ini digunakan sebagai perlawanan terhadap kelompok komunis lewat media massa.

Di samping itu juga muncul koran Kompas, yang lahir pada tanggal 28 Juni 1965. Kehadiran koran ini awalnya disebutkan dekat dengan Partai Katolik. ³³ Koran lain yang juga dekat dengan kelompok agama, adalah Sinar Harapan dengan kelompok Kristen Protestan ³⁴ yang pertama kali terbit pada tanggal 27 April 1961. Selain itu masih ada juga Duta Masyarakat yang berafiliasi kepada Nahdliatul Ulama (NU).

31. Lebih jauh tentang kerjasama antara kelompok cendikiawan, mahasiswa dan militer, bisa melihat pada "Dialog Orang Muda: Gelombang Nan Tak Kunjung Mencapai Pantai", PRISMA no.12 Desember 1977, h.25-47.

32. Data tentang penerbitan surat-surat kabar tersebut diambil dari Roger K. Paget, "Jakarta Newspapers, 1965-1967", INDONESIA no.4 Oktober 1967.

33. Lihat pada Daniel Dhakidae, *Opcit.* h.230-244.

34. *Ibid.* h.218-223.

Pada saat yang tidak lama pula muncul kembali sejumlah koran, seperti Merdeka, Abadi, dan Indonesia Raya yang pada masa Orde Lama mengalami pembreidelan. ³⁵

Dengan demikian pers Indonesia tidak lepas kaitannya dengan dinamika kemunculan dan perkembangan *nation* ini. Kehadiran pers juga lekat perannya sebagai pembawa semangat dan manifestasi perjuangan ide atau kelompok pembaharu.

Nilai ideologis ³⁶ yang termuat dalam sejumlah surat kabar memang semarak di masa tahun 1950-1970an, dan penjelasan tentang tersingkirnya suatu surat kabar bisa dilihat dalam pengertian ideologi yang dibawa surat kabar tersebut rupanya kalah dalam pertarungan gagasan pada masanya itu, terlebih ketika juga bersinggungan dengan kekuasaan, yang berarti bahwa pers yang tersingkir adalah pers yang tidak cukup punya kekuasaan untuk tetap bertahan.

Pada masa pertengahan tahun 1960-an itu juga terjadi dinamika dalam gerakan mahasiswa. Kemunculan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) didasari tujuan agar para aktivis mahasiswa non

35. Raillon Opcit. h.20.

36. Sedikit pengertian yang dipakai di sini untuk menerangkan kata "ideologi" adalah pra penilaian daripada kesadaran yang timbul karena pengaruh lingkungan hidup. Dalam arti ini ideologi mencerminkan latar belakang sosial dan karena itu ikut mewarnai pandangan bahkan obyektivitas (ilmu pengetahuan) orang-orang yang bersangkutan. Pengertian ini diambil dari Ensiklopedi Populer Pembangunan Politik Pembangunan Pancasila buku2 edisi V, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1973, h.122.

komunis: menjadi lebih terkoordinir dan mudah dipimpin. 37

Dalam geraknya KAMI menjadi motor utama dari kegiatan-kegiatan mahasiswa angkatan 1966 dengan menghimpun organisasi-organisasi mahasiswa baik yang berdasarkan keagamaan maupun non keagamaan.

Para aktivis mahasiswa saat itu juga menerbitkan sejumlah media yang mendukung sikap mereka yang anti komunis. Di Jakarta, sebelum meletusnya Peristiwa 30 September 1965, terbit Mahasiswa Indonesia, disusul kemudian oleh Harian KAMI, pada tanggal 26 Juni 1966, yang seluruh pengasuhnya adalah pengurus IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia) Pusat. Di Bandung terbit Mahasiswa Indonesia edisi Jawa Barat, pada 19 Juni 1966, juga Mimbar Demokrasi juga di Bandung. Di Jogjakarta muncul Mahasiswa Indonesia edisi Jawa Tengah dan sejumlah tempat lain di luar Jawa. 38

Dasar ideologi non komunis saat itulah yang kemudian dalam perjalanannya dilihat banyak orang sebagai masa bulan madu pers dengan pemerintah Orde Baru. Ada tekad yang sama untuk melaksanakan praktek Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, lewat pembangunan ekonomi dan sektor lainnya.

Tekanan pada masalah pembangunan ekonomi ini bisa dilihat dari Repelita yang dimulai sejak tahun 1969. Sejak itu dimulailah pendekatan oleh pemerintah Orde Baru kepada negara-negara asing

37. Raillon Opcit. h.13.

38. Siregar Opcit. h.47.

yang diharapkan menjadi investor di Indonesia. 39

Surat kabar Indonesia Raya muncul pertama kali pada tanggal 29 Desember 1949. Ia mengalami dua periode penerbitan, karena sempat mengalami vakum ketika koran ini dibreidel oleh pemerintahan Orde Lama, dan pada saat itu Mochtar Lubis, pemimpin redaksinya, juga dipenjarakan. 40

Indonesia Raya dikenal sebagai koran yang independen, atau setidaknya begitu yang diakui oleh pengasuh surat kabar ini. Dalam tajuk rencana nomor pertamanya, tanggal 29 Desember 1949 ditulis demikian :

Dalam badan penerbitan ini tergabung wartawan-wartawan Indonesia yang berpendirian merdeka, wartawan-wartawan yang tidak diikat oleh pendirian partai atau sesuatu golongan. Yang dikejar oleh mereka hanya tujuan-tujuan jurnalistik semata-mata, yaitu mempertahankan kemerdekaan pers nasional yang kuat dan bebas, dan mempertinggi mutu jurnalistik Indonesia sejalan dengan kemajuan di lain lapangan yang kini diperjuangkan dengan hebat oleh segenap bangsa Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia Raya berdiri di luar segala partai politik atau aliran politik.

Bagi kami terutama sekali kebenaran dan obyektivitas

39. Tentang investasi asing di Indonesia ini bisa dilihat pada Hal Hill, Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia, terjemahan Burhanuddin Abdullah, Jakarta: LP3ES, 1991. Juga Richard Robison, The Rise of Capital, Sydney:ASSA-Allen and Unwin, 1986, Yahya A. Muhaimin, Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980, Jakarta: LP3ES, 1991. Khusus tentang investasi dari Jepang dan implikasi politisnya, bisa melihat pada Nindarsari, Implikasi Politik Peranan Modal Jepang di Indonesia tahun 1970-1979, skripsi sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 1984.

40. Catatan harian Mochtar Lubis dalam penjara pada masa Orde Lama akhirnya dibukukan dan diberi judul: Catatan Subversif (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1980). Diberi judul demikian - lihat kata pengantarnya - karena, "...tiada lain, hanya untuk melukiskan realitas penahanan kami yang di luar hukum oleh rezim Orde Lama, Soekarno. Saya dan kawan-kawan ditahan, dan dipenjarakan atas tuduhan melakukan subversi terhadap rezim Orde Lama..."

akan terus menjadi obor dan pegangan dalam usaha. Kami akan menghindarkan diri dari politik pemberitaan yang beral sebelah, yang menguntungkan satu golongan dan merugikan golongan lain. Agitasi yang bisa meluapkan perasaan dan pikiran rakyat dengan cara membabi buta sedapat-dapatnya akan dibatasi dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendidik rakyat umum berpikir dan berpandangan secara *nuchter, riell* dan *zakelijk*. Ini tidak berarti bahwa kami akan berdiam diri terhadap kelakuan dan tindakan-tindakan yang tidak adil, tidak senonoh dan dianggap merugikan kepentingan umum. Terhadap kelakuan-kelakuan yang demikian dari pihak mana pun datangnya kami akan selalu bertindak awas, memberi peringatan dan menghantam jika dianggap tindakan-tindakan mereka sudah tidak bisa dibiarkan. Sebab paham pers merdeka, bukan berarti bahwa mesti menarik diri jika melihat hal-hal yang merugikan. ⁴¹

Koran ini menunjukkan sikap partisan dan tanpa kompromi terhadap "hal-hal yang merugikan kepentingan umum". Sehingga LIPI pun menyebutnya sebagai surat kabar yang menganut *advocacy journalism*; suatu gaya jurnalistik yang amat teguh dalam mendesakkan pendiriannya untuk suatu perbaikan keadaan. ⁴²

Kehadiran kembali Indonesia Raya pada masa Orde Baru merupakan bagian dari gerakan kelompok non komunis yang saling bekerja sama. Mochtar Lubis pun dikenal dekat dengan mahasiswa yang rajin mengunjunginya di penjara, dan setelah keluar dari penjara Mochtar pun ikut dalam Gerakan Pembaharu Indonesia. ⁴³

Sikap mendukung Orde Baru dicerminkan Mochtar Lubis dalam tajuk rencana terbitan pertama periode keduanya koran ini. Ditulisnya:

Harian ini memberikan dukungannya pada pemerintah

41. Dikutip dari Abdurrachman S. Opcit. h.187

42. Ibid.

43. David T. Hill Opcit. h.123

Suharto dan akan memberikan sumbangan sebesar mungkin menciptakan iklim yang sehat dan konstruktif di negeri kita, agar program-program pembangunan ekonominya untuk kemakmuran rakyat yang merata dan adil mendapat sukses sebesar mungkin.

Akan tetapi kami juga akan memberikan kritik-kritik di mana dan apabila kami anggap perlu dengan tujuan senantiasa supaya pemerintah kita yang sekarang, pimpinan nasional kita yang baru, berhasil dalam tugas berat mereka memperbaiki kehancuran dan kerusakan di segala bidang kehidupan bangsa kita, yang telah ditimbulkan oleh bekas rejim Sukarno.

Kami akan bekerja menyadarkan pendapat umum rakyat kita pada kenyataan bahwa pekerjaan yang berat ini akan meminta waktu yang cukup lama, akan meminta disiplin sosial dan nasional yang tinggi, rasa tanggung jawab sosial dan nasional sebesar-besarnya, kerja keras dan pengabdian yang seluhur-luhurnya dari setiap kita, pemimpin maupun rakyat umum...

Kehadiran Indonesia Raya adalah juga pernyataan kepercayaan dan keyakinan kami pada pimpinan nasional bangsa kita yang baru, serta kepercayaan dan keyakinan kami pada mungkin seluruh keadaan di negeri (ini) diperbaiki dan dimajukan... Kami mengulurkan tangan persahabatan dan persaudaraan pada setiap golongan di negeri kita yang sama-sama bercita-cita untuk membina masyarakat yang adil dan makmur merata dan yang menjamin hak-hak asasi manusia. Tiada seorang pembesar, seorang jendral, seorang pemimpin politik, seorang menteri, harus merasa khawatir atau takut dengan munculnya kami ke tengah gelanggang. Kami akan menyokong dan memberi pujian kepada mereka selama mereka melakukan tugas dan kewajiban untuk membela kepentingan rakyat dan bangsa. Kami akan menjadi pembela mereka yang paling gigih selama mereka berjalan dalam kebenaran dan keadilan. 44

Surat kabar ini pada periode keduanya tidak berumur lama, karena pada akhirnya ia mengalami pembreidelan yang terakhir kali, dan mematikan riwayat koran ini. 45.

44. Abdurrachman Opcit. h.242.

45. Bulan Juni 1993, muncul Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1993, berkenaan dengan tatacara melakukan *Judicial Review*, sebagaimana yang diminta oleh Surya Paloh, bekas pemimpin redaksi Prioritas almarhum, atas Peraturan Menteri Penerangan nomor 1 tahun 1984 yang dianggap bertentangan dengan jiwa Undang-undang Pokok Pers nomor 21 tahun 1982, tentang pencabutan SIUPP. Mochtar Lubis pun, seperti diberitakan dalam media massa, juga ingin menggugat Menteri Penerangan sehubungan dengan penutupan yang menimpa korannya, Indonesia Raya. Lihat Media Indonesia edisi 17 dan 18 Juni 1993.

Indonesia Raya terbit untuk terakhir kalinya pada tanggal 21 Januari 1974, dengan dicabut Surat Ijin Cetak dan Surat Ijin Terbitnya pada tanggal 21 dan 22 Januari 1974. Alasan pencabutan SIC disebutkan, "telah memuat tulisan yang dapat merusak kewibawaan dan kepercayaan kepemimpinan nasional" serta "membuka peluang yang dapat mematangkan atau memperuncing situasi ke arah terjadinya kekacauan-kekacauan seperti pada tanggal 15 dan 16 Januari 1974, dan yang dapat mengadu domba antara pimpinan satu dengan yang lain." 46

Peristiwa 15 Januari 1974 itu sendiri adalah suatu peristiwa kerusuhan yang terjadi sehubungan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, di Jakarta. Kerusuhan itu ditandai dengan pengrusakan sejumlah produk buatan Jepang dan meluas menjadi kerusuhan lainnya.

Di balik Peristiwa 15 Januari 1974, begitu banyak hal yang harus dipakai untuk menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Persoalan kesenjangan ekonomi, pro kontra soal modal asing, khususnya modal Jepang, 47 juga soal radikalisme

46. Lihat Abdurrachman Opcit. Lampiran yang menyertakan salinan dari surat pencabutan Surat Ijin Cetak tersebut, h.332.

47. Lihat Hal Hill (1991), Robison (1986), Muhaimin (1991), Nindarsari (1984). Lihat juga pembahasan modal Jepang secara kasusistik pada proyek Asahan di Sumatera, Francisca SSE Seda, The Politics of Development: A Case Study of Asahan Project in North Sumatera, Indonesia, New York: Cornell University, 1989.

mahasiswa,⁴⁸ dan persoalan pertikaian elite kekuasaan.⁴⁹

Harian Indonesia Raya saat itu ada dalam konstalasi besar sistem ekonomi, sosial, politik dan budaya pada masanya. Harian ini pada kelahirannya kembali, menunjukkan karakter tidak berbeda dengan masa sebelumnya, lewat pemberitaan korupsi atau penyelewengan yang terjadi saat itu.

Harian ini juga ikut mempertanyakan kelayakan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang dianggap sebagai pemborosan. Dan kemudian yang paling fenomenal adalah keberanian Indonesia Raya dalam mengungkap korupsi yang terjadi pada Pertamina (Perusahaan Tambang Minyak Nasional). Sikapnya juga jelas menolak akses modal asing, di Indonesia dalam pemberitaan masa akhir hidupnya.

Studi ini ingin melihat kondisi pada awal sampai pertengahan tahun 1970-an, apa yang mendorong ditutupnya sejumlah surat kabar dan majalah dalam konstelasi ekonomi, sosial dan politik saat itu. Secara khusus ingin menyorotinya apa yang terjadi terhadap diri surat kabar Indonesia Raya; mengapa sampai terjadi perbedaan

48. Lihat Bambang Sulistomo, Aktivitas Politik Mahasiswa dalam Peristiwa 15 Januari 1974, skripsi sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia, 1980. Lihat juga Raillon (1985), dan juga Andrew H. Gunawan, "The Role of Students in the 15 Januari 1974 incidents" dalam Southeast Asian Affair, Singapore: Institute of Southeast Asian Affair, 1975.

49. Lihat Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia, Ithaca: Cornell University Press, 1978, juga Crouch, "The 15th Januari Affair in Indonesia", Dyason House Papers, 1974. Bandingkan dengan Marzuki Arifin, Peristiwa 15 Januari 1974, Jakarta Publishing House Indonesia, 1974, dan juga Heru Cahyono, Peranan Ulama dalam Golkar: Dari Pemilu sampai Malari, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992, khususnya "GUPPI dan Malari" h.98-176.

pengertian dalam melihat kejadian-kejadian saat itu ? Mengapa bobot politis atas fungsi informasi media massa menjadi demikian kental, dan mendudukkan media massa pada kondisi yang sama sekali tidak berdaya menghadapi kekuasaan saat itu ?

Dugaan sementara di sini adalah, bahwa periode tahun 70-an adalah suatu titik balik bentuk hubungan pers dan pemerintah, yang kemudian mengimbas pada masa kini. Setidaknya keinginan pers untuk memosisikan dirinya sejajar ketika berhadapan dengan pemerintah, rupanya tidak terwujud. Pemerintah seperti yang diungkapkan di bagian awal, menghendaki bentuk hubungan kemitraan dari pihak pers, kemitraan dalam pembangunan.

Konsepsi yang tertuang dalam Repelita II, 1974-1979, yang keluar pada bulan April 1974, tiga bulan setelah terjadinya peristiwa 15 Januari, mengemukakan hal tentang perlunya komunikasi dua arah, komunikasi yang timbal balik antara masyarakat dan pemerintah, dan komunikasi di antara masyarakat itu sendiri. Konsepsi ini dimaksudkan untuk mencegah bahaya timbulnya salah pengertian, salah tafsir dan kesimpangsiuran tentang materi pembangunan.

Konsepsi tersebut secara tersirat ingin mengatakan bagaimana seharusnya interaksi yang terjadi dalam masyarakat, dan pers termasuk di dalamnya, paling kurang dimengerti pers adalah perantara antara pemerintah dan masyarakat.

Presiden Soeharto sendiri dalam kesempatan peresmian Monumen Pers Nasional di Surakarta, 9 Februari 1978 mengemukakan pendapatnya tentang Pers Nasional :

...hendaknya Pers Nasional baik-baik dalam mengembangkan kebebasan yang bertanggung jawab. *Pers Nasional* hendaknya membuang jauh-jauh lamunan "kebebasan hanya untuk kebebasan". Sebab hal itu terlalu mewah buat kita dan mungkin akibat-akibat buruknya bagi keselamatan bangsa dan negara harus kita tebus dengan mahal. (garis miring dari penulis) Marilah kita merenungkan baik-baik bahwa kebebasan pers itu terkandung dua arah.

Pertama, adalah bebas dalam memuat sesuatu berita; dan yang lain adalah juga bebas dalam tidak memuat suatu berita. Dalam tahap perkembangan bangsa kita dewasa ini maka patokan-patokan dasar yang hendaknya digunakan dalam mengembangkan stabilitas nasional yang dinamis, tetapi kokohnya persatuan bangsa dan kelancaran pembangunan. Dan semuanya itu hendaknya kita kembangkan di atas landasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sama dengan pers sendiri maka Pemerintah berkepentingan untuk ikut mengembangkan pers yang bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab adalah jalan utama untuk ikut mengembangkan gagasan baru dan kreativitas, ialah unsur-unsur yang mutlak diperlukan bagi Bangsa yang sedang membangun. 50

Dalam sistim pers Indonesia, Pancasila diakui sebagai landasan idiil, sementara UUD 1945 beserta dengan ketetapan-ketetapan MPR diakui sebagai landasan konstitusional. 51

Sumber dari peraturan yang menjelaskan tentang hubungan pers dan pemerintah adalah pasal 28 ayat 1 UUD 45, yang berbunyi: "Kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis."

Dari pasal tersebut muncullah Undang-undang Pokok Pers, yang pertama kali diundangkan pada tahun 1966, yaitu UU no. 11/1966.

50. Soeharto, "Pers sebagai Kekuatan dan Alat Perjuangan" dalam T. Atmadi ed. Bunga Rampai Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistim Pers Indonesia, Jakarta: Pantja Simpati, 1985, h.20.

51. Lihat ML Gandhi, Undang-undang Pokok Pers, Proses Pembentukan dan Penjelarasannya, Jakarta: Rajawali Press, 1985, h.152. Lihat juga Lampiran "Keputusan Dewan Pers no.79/XIV/1974 tentang Pedoman Pembinaan Idiil Pers".

Kemudian dilengkapi menjadi undang-undang no.4/1967, dan terakhir diperbaiki menjadi UU no.21/1982. 52

METODOLOGI

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang bersifat kualitatif dan deskriptif.

Metodologi Sejarah dipilih untuk penelitian ini karena adanya implikasi praktis sebagai berikut:

1. Memperlihatkan mentalitas tertentu pada setiap jaman, yang ada relevansinya jika dikaitkan dengan kondisi masa kini.
2. Dengan melihat preseden atau peristiwa di masa lampau, akan ditarik semacam benang merah untuk meramalkan perkembangan masyarakat di masa mendatang.
3. Pendekatan sejarah terhadap peristiwa masa lampau berkaitan dengan sejarah kekuatan-kekuatan politik. Pendekatan sejarah ingin menguraikan mitos-mitos yang ada dalam masyarakat, dengan kepercayaan bahwa sejarah nasional, atau sejarah yang lain misalnya, lebih mengarah pada propaganda ketimbang sejarah itu sendiri. Dengan kata lain pendekatan sejarah ingin memberikan sebuah penelitian yang obyektif tanpa harus terikat dengan mitos yang sudah diterima dalam masyarakat. 53

52. Ibid. h.1-11.

53. John Tosh, The Pursuit of History, England: Longman House, 1984, h.12-16.

Femitosan dalam masyarakat akan berbahaya karena di balikinya bersembunyi kepentingan tertentu, yang untuk kepentingan masa kini perlu ditelaah ulang. Femitosan bahwa surat kabar atau media massa pada umumnya punya pengaruh tertentu yang 'meramalkan' terjadinya suatu peristiwa kerusuhan, atau berita-berita yang ditulis oleh Indonesia Raya, dikatakan 'memanas-manasi' kejadian pada 15 Januari 1974 tersebut, haruslah ditelaah secara lebih mendalam.

Juga anggapan bahwa surat kabar ini adalah surat kabar yang berafiliasi dengan PSI (Partai Sosialis Indonesia), sehingga turut ditutup karena baik PSI dan Masjumi, dituduh mendalangi terjadinya peristiwa 15 Januari tersebut.⁵⁴ Tuduhan tersebut tidaklah sesederhana demikian, dan boleh dikatakan bahwa kesimpulan demikian terlalu gegabah.

Studi ini ingin mencoba melihat dengan kritis⁵⁵ apa yang terjadi pada dekade awal 70-an, masa awal pemerintahan Orde Baru,

54. Lihat Arifin (1974) h.20-94), juga lihat Berita Yudha 22 Januari 1974.

55. Sebagai suatu cara pandang, kekritisian dalam melihat fenomena sejarah dibutuhkan, untuk melihat suatu peristiwa dalam konteks masa lalu, yang disebabkan oleh struktur-struktur tertentu dalam masyarakat, entah itu ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain. Secara singkat tentang metode penelitian kritis bisa dilihat pada Donald E. Comstock, A Method for Critical Research: Investigating The World to Change It, Red Feather Institute for Advanced Studies in Sociology, 1980. Tulisan ini mengemukakan pandangan tentang metode penelitian kritis, yang merupakan turunan atau operasionalisasi dari cara berpikir kritis yang dibawa oleh mazhab Frankfurt. Asumsi-asumsi dasar berkaitan dengan hakikat manusia, hakikat ilmu, format ilmu diterangkan dengan baik oleh Comstock, yang mempengaruhi penelitian macam apa yang akan dihasilkan oleh si peneliti.

lewat pendekatan yang multi dimensional. Dengan menguraikan banyak aspek dalam kejadian di masa lampau, disadari sepenuhnya kelemahan bahwa pendekatan multi dimensional sering mengarah pada ketidakdalaman pembahasan suatu masalah. Tetapi dipercayai di sini bahwa suatu fenomena tidak mungkin dijelaskan oleh satu sudut pandang tertentu saja, tetapi juga berkaitan dengan sudut-sudut pandang lainnya.

Demikian juga dalam membahas tentang hubungan pers dan pemerintah. Tidaklah mungkin hubungan tersebut semata-mata dijelaskan aspek hukumnya saja, tetapi juga berkaitan dengan situasi ekonomi, sosial, politik dan budaya saat itu sebagai suatu dimensi ekstern. Dan dinamika yang terjadi di dalam, baik pers maupun pemerintah, juga patut diperhitungkan dalam pembahasan ini.

Louis Gottschalk secara sederhana mengemukakan 4 kegiatan pokok dalam metode penulisan sejarah:

1. pengumpulan obyek yang berasal dari jaman itu dan pengumpulan bahan-bahan tercetak, tertulis dan lisan yang relevan.
2. menyingkirkan bahan-bahan atau bagian-bagian yang tidak otentik.
3. mengumpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan-bahan yang otentik.
4. penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu

kisah atau penyajian yang berarti. 56

Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan dalam peristilahannya. 57

Dalam penelitian ini akan dilakukan perpaduan metodologi dalam ilmu sejarah dan ilmu-ilmu sosial, dalam hal ini adalah ilmu Komunikasi. Hal ini dipahami bukan sebagai dua metode yang saling bertentangan, namun saling mendukung, karena bila penelitian dilakukan tanpa salah satunya, hasil yang otentik belum dapat diperoleh.

Gottschalk sendiri menyebutkan bahwa sejarah dapat memiliki juga sifat-sifat ilmu sosial, dan dalam perkembangannya hal ini menjadi sangat berguna, serajawan sebagai ilmuwan sosial dan sejarawan sebagai ilmuwan humaniora, bukanlah dua orang yang terpisah, melainkan mereka dengan mudah menjadi satu. 58

Sejarawan Indonesia, Sartono Kartodirjo, menyebutkan sudut pandang lain dalam melihat ilmu sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Ia

56. Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 1986, h.18.

57. Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990, h.2

58. Gottschalk Opcit. h.20.

mengatakan:

Bidang ilmu sejarah meliputi seluruh aktivitas manusia. Ilmu sosial dalam pembagian pekerjaannya mencakup lapangan yang sama. Pada satu pihak sejarawan pada umumnya memperhatikan proses dan struktur yang tunggal dalam ruang dan waktu, pada pihak lain ahli-ahli ilmu sosial lebih memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang konstan serta berulang tetap atau kepada tendensi yang teratur dalam masyarakat. Kedua golongan tadi mungkin mempelajari fakta yang sama, akan tetapi dengan tujuan serta cara penggunaan yang berbeda.⁵⁹

TEHNIK PENGUMPULAN DATA

Ada beberapa cara yang akan ditempuh dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini:

1. Sumber primer di sini adalah surat kabar Indonesia Raya periode tahun 1972 sampai dengan 1974, tepatnya dari tanggal 2 Januari 1972 sampai dengan edisi 21 Januari 1974.
2. Sumber lain adalah buku, artikel, majalah, tulisan lain ataupun dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah, yang relevan dengan permasalahan studi ini.
3. Wawancara dengan sejumlah nara sumber yang terbagi dalam klasifikasi:
 - a. Pengasuh Surat kabar Indonesia Raya
 - b. Kelompok pengambil keputusan saat itu
 - c. Pengamat permasalahan di atas

59. Sartono Kartodirdjo, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen" dalam Koentjaraningrat ed. Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1977, h.61. Lihat juga Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, Jakarta: Gramedia, 1992.

Pemilihan periode waktu 2 tahun terakhir koran Indonesia Raya dipilih dengan pertimbangan bahwa periode tersebut sudah cukup dapat menggambarkan karakter koran itu, dengan mengutipkan laporan ataupun opini yang tercermin dari koran tersebut. Periode ini juga adalah periode krusial, saat mana adalah 2 tahun terakhir hidupnya koran tersebut, sehingga penggambaran liputannya mungkin dapat menjelaskan penyebab kematian koran ini.

Pemilihan nara sumber dalam klasifikasi demikian, disesuaikan dengan pertanyaan mana yang hendak dijawab dalam penelitian ini.

Fakta-fakta non teks, yang akan didapat dari para pengasuh Indonesia Raya, dibutuhkan untuk lebih melengkapi keterangan yang tidak tersajikan pada koran tersebut. Misalnya reaksi macam apa yang dirasakan oleh para pengasuhnya setelah penutupan korannya dan juga bagaimana dinamika internal yang terjadi dalam surat kabar tersebut.

Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya, maka dibutuhkan keterangan dari sejumlah orang yang berkaitan dengan pengambilan keputusan saat itu.

Pengamat masalah di atas juga diperlukan keterangan untuk menjadi pembanding dalam melihat permasalahan yang dibahas di sini. Sejauh hal tersebut dapat terekam dalam bentuk teks, maka keterangan lain diambil di luar keterangan yang tertulis tersebut. Keterangan tertulis dari pengamat ini maksudnya adalah hasil analisa pengamat dalam suatu tulisan di media massa, atau dalam bentuk buku, atau juga dalam bentuk suatu wawancara dengan salah satu media massa.

SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan, dimulai dengan uraian singkat tentang tujuan studi ini dilakukan, dan juga iktisar permasalahan yang akan dijelaskan serta metodologi yang digunakan.

Bab II akan menjelaskan perjalanan historis dokumen-dokumen yang berkenaan dengan hubungan pers dan pemerintah, dan munculnya sejumlah peraturan yang membicarakan tentang pers.

Bab III memaparkan kehidupan dan perkembangan surat kabar Indonesia Raya, serta situasi macam apa yang melatari hidup sampai matinya harian ini. Akan digambarkan bagaimana koran ini menulis tentang peristiwa-peristiwa pada saat itu yang juga menunjukkan karakter koran ini. Juga ditampilkan pada bab ini adalah uraian sosok Mochtar Lubis, yang tidak dapat dimungkiri memiliki pengaruh besar terhadap koran ini.

Bab IV akan menguraikan tentang terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974, yang tidak berdiri sendiri sebagai suatu peristiwa, namun erat kaitannya dengan lingkup makro sistem ekonomi, sosial, politik dan budaya Indonesia, pada saat awal masa Orde Baru.

Bab V akan meninjau implikasi macam apa yang terjadi setelah peristiwa 15 Januari tersebut terhadap kehidupan pers, khususnya koran Indonesia Raya.

Bab selanjutnya akan diisi dengan diskusi teoritis berkaitan dengan permasalahan di atas, dan juga dikaitkan dengan penemuan-penemuan dari studi ini. Dan akhirnya penutup akan disampaikan pada Bab VII.

BAB II

HUBUNGAN PERS DAN PEMERINTAH DI INDONESIA:

TINJAUAN LITERATUR

Mengkaji bentuk hubungan antara pers dan pemerintah di Indonesia pada dasarnya adalah bagaimana melihat inti yang tersirat dalam pasal 28 UUD 45 dan juga Undang-undang Pokok Pers nomor 11 yang disahkan menjadi Undang-undang pada tahun 1966. Undang-undang ini dalam perjalanannya kemudian disempurnakan sampai pada akhirnya menjadi Undang-undang nomor 21 tahun 1982.

Bab ini akan mencoba menguraikan tinjauan literatur yang memperlihatkan bagaimana hubungan antara pers dan pemerintah dari masa ke masa, dan melihat historisitasnya khusus peraturan-peraturan yang muncul di sekitar tahun 1970-an.

Dicatat oleh tim LIPI bahwa peraturan pertama mengenai pers di jaman Hindia Belanda dituangkan tahun 1856 dalam *Reglement op de Drukwerken in Nederlandsch-Indie* yang ditahun 1906 diperbaiki "sesuai dengan tuntutan keadaan" karena dirasakan peraturan tersebut lebih preventif sifatnya dibandingkan dengan peraturan yang muncul 50 tahun berikutnya yang lebih represif. ¹

1. P. Swantoro dan Atmakusumah, "Garis Besar Kebijakanaksanaan Pemerintah terhadap Pers" dalam Abdurachman S. (ed) Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, Jakarta: 1980. h.145

Dalam peraturan tadi antara lain disebutkan bahwa semua karya cetak sebelum diterbitkan, satu eksemplar harus dikirimkan dulu kepada kepala pemerintahan setempat, pejabat justisi dan *algemeene Secretarie*. Bila ketentuan ini tidak dipatuhi maka karya cetak tadi bisa disita, bahkan bisa disertai dengan penyegelan percetakan atau tempat penyimpanan cetakan tersebut.²

Pada tanggal 7 September tahun 1931 pemerintah kolonial melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai *Persbreidel Ordonnantie*, dan disebutkan bahwa Gubernur Jendral diberi hak untuk melarang terbit, terbitannya tertentu yang dinilai bisa "mengganggu ketertiban umum".

Pasal 2 peraturan ini menegaskan bahwa Gubernur Jendral berhak melarang pencetakan, penerbitan dan penyebaran sebuah surat kabar paling lama delapan hari. Tetapi jika sesudah terbit surat kabar yang bersangkutan dinilai kembali "mengganggu ketertiban umum" maka larangan terbit bisa menjadi lebih lama, walau tidak lebih dari 30 hari berturut-turut.³

Selain *Persbreidel Ordonnantie* pada jaman pemerintahan Belanda juga dikenal tindakan terhadap pers yang dikenal sebagai *Haatrai Artikelen*, yaitu pasal-pasal itu mengancam hukuman terhadap siapa pun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Nederland atau Hindia Belan-

2. *ibid.*h.146

3. *Ibid.*h.146. Untuk dokumen-dokumen tentang perdebatan masalah *persbreidel* bisa melihat pada "Lampiran: Dokumen-dokumen yang Melatarbelakangi Masalah *Persbreidel* Pers" dalam Abdurachman (1980):283-312

da, yang diatur dalam pasal 154-157 dari *Wetboek van Strafrecht*.

4

Pada masa setelah kemerdekaan maka ada usaha dari pemerintah Indonesia untuk mencabut *Persbreidel Ordonnantie*, tepatnya pada tanggal 2 Agustus tahun 1954 lewat Undang-undang No. 23 tahun 1954, yang didasarkan pertimbangan bahwa pembreidelan pers bertentangan dengan pasal 19 dan 33 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.⁵ Pasal 19 UUDS menyebutkan:

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.

Sedangkan pasal 33 UUDS isinya adalah:

Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketentraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis.⁶

Penghapusan *Persbreidel Ordonnantie* itu juga diperjuangkan lewat wadah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berkongres di Denpasar pada bulan Agustus 1953. Dalam keputusannya disebutkan: Menuntut kepada pemerintah supaya segera mengeluarkan Undang-undang Pers, yang bersumber pada hak kemerdekaan berpikir dan kebebasan mempunyai serta mengeluarkan pendapat, sesuai

4. Ibid.h.147

5. Lihat Tribuana Said, Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila, Jakarta: Haji Masagung, 1988, h.100

6. P.Swanoro dan Atmakusumah Opcit. h.150

dengan pasal 18 dan 19 Undang-undang Dasar Sementara. Kongres juga memutuskan untuk membentuk panitia bersama-sama dengan pengurus pusat PWI memperjuangkan segera dikeluarkannya UU Pers, yang mencakup hak ingkar, larangan pers asing dan penghapusan *Persbreidel Ordonantie*.⁷

Dicatat oleh Demar Seno Adji, Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 7 Mei 1954, atas usul Menteri Penerangan, menyampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sebuah rancangan Undang-undang tentang pencabutan *Persbreidel Ordonnantie* untuk dibicarakan dalam DPR, dan kemudian mendapatkan persetujuannya. Rancangan Undang-undang yang kemudian mengalami sedikit perubahan akhirnya diterima secara bulat oleh DPR tersebut pada tanggal 23 Juni 1954.⁸

Namun tiga tahun setelah PWI mengemukakan tuntutan pencabutan peraturan yang mengekang pers, justru muncul peraturan yang mendudukan pers dalam posisi yang tidak menguntungkan. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, selaku Penguasa Militer, pada tanggal 14 September 1956 No. PKM/001/0/1956 yang isinya antara lain melarang mencetak, menerbitkan dan menyebarkan serta memiliki tulisan-tulisan, gambar-gambar, klise atau lukisan-lukisan yang memuat atau mengandung kecaman, persangkaan atau penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, sesuatu kekuasaan atau majelis umum atau seorang

7. Soebagijo IN et al Lintasan Sejarah PWI, Jakarta: PWI Pusat dan Departemen Penerangan, 1977, h.30

8. Demar Seno Adji, Pers: Aspek-aspek Hukum, Jakarta: Erlangga, 1977 (cetakan kedua), h.213 dan 221

pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaan dengan sah'.

Di bagian lain peraturan tersebut juga diberlakukan bagi tulisan-tulisan yang dinilai 'memuat atau mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk' dan juga 'tulisan-tulisan yang memuat berita-berita atau pemberitahuan-pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat'.⁹

Walaupun toh akhirnya peraturan tadi dicabut pada tanggal 28 November 1956, karena ada protes keras dari kalangan surat kabar dan juga PWI serta SPS: tekanan terhadap pers justru semakin terasa ketika diberlakukannya masa darurat, atau SOB (*Staat van Oorlog en Beleg*, keadaan darurat militer dan keadaan perang) pada tanggal 14 Maret 1957.¹⁰

Sebelum diberlakukan SOB pihak Angkatan Darat pada tanggal 14 September tahun 1956 mengeluarkan pengumuman keadaan darurat dan khusus menyangkut pers dikeluarkan ketentuan:

Dilarang mencetak, menerbitkan, menyajikan, mengedarkan, menempelkan, membacakan, atau memiliki tulisan-tulisan, gambar-gambar atau foto-foto yang berisi atau mengimplikasikan atau bermaksud mengecam, menuduh atau menghina presiden, wakil presiden, suatu sidang pengadilan, pejabat pemerintah yang masih berfungsi atau sebagai akibat dari pembebasan tugasnya, atau apa saja yang mengandung pernyataan-pernyataan yang bersifat permusuhan, kebencian ataupun penghinaan yang ditujukan kepada pemerintah atau golongan-golongan orang tertentu, ataupun apa saja yang mengandung berita atau pengumuman yang dapat menimbulkan kekacauan di kalangan

9. Abdurachman S. *opcit.* h.151

10. Tentang SOB lihat 30 Tahun Indonesia Merdeka buku 2 (1950-1964), Jakarta: Tira Pustaka, 1981 cetakan ke empat, h.109

rakyat. 11

Bulan September 1957, saat kondisi negara dalam keadaan darurat, tindakan keras terhadap pers tidak dapat dihindari dan tidak kurang dari 13 penerbitan pers di Jakarta terkena pembredel-an sekaligus selama 24 jam. Mereka adalah Harian Rakyat, Pedoman, Indonesia Raya, Bintang Timur, Keng Po, Djiwa Baru, Merdeka, Pemuda, Java Bode, Abadi, dan kantor berita Antara INPS, serta Aneta.

Awal Desember 1957 semua koran berbahasa Belanda dilarang terbit dan kemudian pada bulan April 1958 pemerintah melarang semua koran berbahasa Cina. Sebulan kemudian larangan tersebut dicabut, namun pemerintah mengeluarkan ketentuan hanya mengizinkan terbitnya 11 koran berbahasa Cina di Indonesia, sedang beberapa koran dikenai ketentuan untuk mengganti namanya. 12

Surat Ijin Cetak dan Surat Ijin Terbit

Awal bulan Oktober 1958, keluarlah peraturan dari Penguasa Militer Daerah Jakarta Raya tentang surat ijin terbit bagi koran dan majalah di Jakarta.

11. Tribuana Said Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila, Jakarta: CV Haji Masagung, 1988, h.107-108

12. Ibid. h.109-110. Kasus yang dialami pers sepanjang tahun 1949-1959 begitu banyak dan menyangkut berbagai aspek, yang salah satunya ketika pers berhadapan dengan pemerintah bisa melihat lebih rinci pada sumber yang sama (Said 1988:100-116), lihat juga Edward C. Smith (1983:91-dst).

Sebagai perbandingan, pemerintah Hindia Belanda dalam ketentuan mengenai pers tidak pernah mengadakan izin terbit. Masalah ini sebenarnya sempat menghangat juga di kalangan pemerintahan kolonial, muncul keberatan terhadap sistem lisensi karena sistem tersebut bisa dikatakan sebagai sensor preventif yang sudah ditinggalkan, seturut dengan adanya pembaharuan kebijaksanaan tentang pers pada tahun 1906. 13

Ketentuan yang berlaku pada tahun 1959 itu dimaksudkan untuk mencegah publikasi yang 'sensasional' dan yang dinilai 'bertentangan dengan moralitas'.

Setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 ditetapkan, muncul program Manipolisasi Pers. Hal ini tampak dalam konsepsi buatan Dewan Perancang Nasional yang diketuai Muhammad Yamin. Dalam lampirannya dikutip Ketetapan MPRS no.II/MPRS/1960 tentang Penerangan Massa yang menjadi landasan bagi pelaksanaan Manipolisasi Pers Nasional dalam sistem Demokrasi Terpimpin. 14

Ketetapan tersebut menggariskan bahwa media massa harus diarahkan untuk mendorong aksi massa revolusioner di seluruh Indonesia. Rakyat harus didorong untuk memiliki keyakinan yang teguh tentang sosialisme agar dukungan bagi kelangsungan revolusi dan peranannya dalam pembangunan nasional dapat terwujud. Semua media komunikasi massa, seperti pers, radio dan film harus digerakkan sebagai satu kesatuan secara terpadu secara terpimpin,

13. Oey Hong Lee, Indonesian Government and Press during Guided Democracy, University of Hull, Monographs on Southeast Asia, Inter Documentation Company AGZUG, Switzerland: 1971, h.7

14. Ibid. h.110-116, juga lihat Said Opcit. h.122

berencana dan terus menerus ke arah kesadaran mengenai Sosialisme Indonesia dan Pancasila. 15

Setelah itu muncullah serangkaian peraturan berkisar soal izin terbit, pemakaian huruf non Latin, juga pengawasan terhadap percetakan swasta dan lain-lain. Di sini memang hendak ditunjukkan demikian banyaknya peraturan muncul pada masa ini 1960-1965.

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi nomor 3/1960 melarang penerbitan yang tidak memakai huruf Latin, Arab atau daerah. Dengan demikian surat kabar beraksara Cina dilarang. Namun untuk memberikan bahan bacaan kepada masyarakat Cina yang belum bisa berbahasa Indonesia, pemerintah mengizinkan beberapa penerbitan pers Cina yang sudah disesuaikan seperti Hua Chi Pao (Api Revolusi), Che Chi Pao (Obor Revolusi) dan sebagainya. 16

Tidak lama kemudian muncul peraturan lain yaitu peraturan Peperti nomor 10 tertanggal 12 Oktober 1960 yang harus ditaati oleh peminta izin terbit, berupa 19 pasal yang harus disetujui oleh penerbit surat kabar saat itu, yang perinciannya adalah:

1. Kami sanggup mematuhi pedoman-pedoman yang telah dan atau akan dikeluarkan/diberikan oleh Penguasa Perang Tertinggi dan lain-lain instansi pemerintah yang berwenang mengenai penerbitan.
2. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Manifesto Politik RI secara keseluruhan.
3. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela program pemerintah.
4. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
5. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela UUD 45.
6. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Pancasila.
7. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Sosialisme Indonesia.

15. Said Ibid.

16. Ibid. h.122-123, juga Oey Hong Lee Opcit. h.117-119

8. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Demokrasi Terpimpin.
9. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Ekonomi Terpimpin.
10. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Kepribadian Nasional Indonesia.
11. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela martabat Negara Republik Indonesia.
12. Penerbitan kami wajib menjadi alat untuk memberantas imperialisme dan kolonialisme, liberalisme, federalisme/ separatisme.
13. Penerbitan kami wajib menjadi pembela/pendukung dan alat pelaksana dari politik bebas aktif Negara RI.
14. Penerbitan kami wajib menjadi alat untuk memupuk kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Pancasila.
15. Penerbitan kami wajib menjadi alat untuk memupuk kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Manifesto Politik RI.
16. Penerbitan kami wajib untuk membantu usaha penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum serta ketenangan politik.
17. Penerbitan kami tidak akan memuat tulisan-tulisan atau lukisan-lukisan/gambar-gambar yang bersifat sensasional dan merugikan ahlak.
18. Penerbitan kami tidak akan memuat tulisan-tulisan, lukisan-lukisan atau gambar-gambar yang mengandung penghinaan terhadap Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan dari Negara Asing yang bersahabat dengan Republik Indonesia.
19. Penerbitan kami tidak akan memuat tulisan-tulisan, lukisan-lukisan atau gambar-gambar yang mengandung pembelaan terhadap organisasi yang dibubarkan atau dilarang berdasarkan Penetapan Presiden no.7 tahun 1959 dan Peraturan Presiden no.13 tahun 1960. 17

Peraturan Pemperti nomor 2/1961 khusus mengatur tentang pengawasan dan pembinaan atas perusahaan percetakan swasta. Prinsip dasarnya adalah percetakan harus menjadi alat untuk menyebarluaskan Manipol dan untuk memberantas Imperialisme, Kolonialisme, Liberalisme dan Federalisme serta Separatisme. Percetakan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan dicabut izinnya atau ditutup. 18

17. Abdurachman S. opcit.h.154-155

18. Said Opcit. h.126

Dalam Manipolisasi Pers saat itu, maka pemerintah pun 'campur tangan dalam kemelut yang terjadi dalam tubuh Kantor Berita Antara, sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan Keputusan Presiden no. 307/1962, yang memutuskan penguasaan Antara oleh Peperti. 19

Tentang ijin terbit juga muncul dalam Penetapan Presiden no. 6/1963, pasal 6, yang menegaskan perlunya ijin terbit bagi harian dan majalah. Dan percetakan tidak diperbolehkan mencetak harian atau majalah yang tidak mendapat ijin terbit. 20

Kemudian juga muncul Keputusan Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang no. D/450/64 yang mewajibkan seluruh penerbitan pers untuk memuat tulisan-tulisan lama Presiden Soekarno, tanpa menambahkan interpretasi atasnya. Artikel-artikel tersebut merupakan bagian dari buku "Di Bawah Bendera Revolusi". 21

Munculnya Keputusan ini menyusul pembubaran sejumlah koran yang tergabung dalam BPS (Badan Pendukung Sukarnoisme), sebagai kelompok yang mendukung Sukarno, namun anti dengan kelompok PKI. 22

19. Mengenai perpecahan dalam tubuh Kantor Berita Antara lihat Said Opcit. h.126-128, dan juga Oey Hong Lee Opcit. khusus pada Chapter 12 "The National News Agency ANTARA" h.160-177

20. Abdurrachman ed. Opcit. h.155

21. Oey Hong Lee Opcit. h.124-125

22. Mengenai konflik ideologis dan politis antara kelompok BPS dan PKI, khususnya pada bidang surat kabar, bisa melihat pada tulisan Tribuana Said, Perlawanan Pers Indonesia BPS terhadap Gerakan PKI, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983. Tribuana Said sendiri adalah anggota BPS.

Penetapan Presiden tentang Surat Ijin Terbit baru dicabut setelah munculnya Undang-undang Pokok Pers yang disahkan pada tanggal 12 Desember 1966, khususnya pasal 8 yang berbunyi: Setiap warga negara mempunyai hak penerbitan pers yang bersifat kolektif sesuai dengan hakikat Demokrasi Pancasila (ayat 1), dan Untuk itu tidak diperlukan Surat Ijin Terbit (ayat 2).²³

Namun dalam Undang-undang yang sama dimungkinkan adanya surat ijin dikaitkan dengan masa peralihan sampai ada keputusan pencabutannya oleh Pemerintah dan DPR GR.²⁴

Selain adanya Surat Ijin Terbit, adapula ketentuan Surat Ijin Cetak yang dikeluarkan oleh Laksus Kopkamtibda (Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah), sejak pecahnya Gerakan 30 September 1965. Dengan adanya SIC tersebut Laksusda berhak penuh melakukan pemanggilan terhadap wartawan yang dinilai melakukan kesalahan atau yang dianggap perlu dimintai keterangan. Dan bila sebuah surat kabar tidak diperbolehkan terbit, maka yang pertama dicabut adalah SIC-nya, baru kemudian SIT-nya.

Undang-undang Pokok Pers

Undang-undang Pokok Pers yang pertama disahkan pada tahun

23. Lihat J.C.T. Simorangkir, Undang-undang Pokok Pers, Jakarta: Penerbit Bhratara, 1967, h.12

24. Lihat pasal 20 dalam Bab IX Peraturan Peralihan, ibid. h.16

1966, sebagai Undang-undang no. 11/1966. Kehadiran Undang-undang ini merupakan akhir suatu penantian oleh para penerbit pers saat itu yang sebelumnya hidup dalam kesimpangsiuran, terutama nasib surat kabar atau majalahnya berkaitan dengan situasi politik pada masa sebelumnya. Seperti disebutkan dalam konsiderans Undang-undang ini dikatakan (butir f) : bahwa perlu adanya Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan pokok pers yang menjamin kedudukan hukum persuratkabaran dan kewartawanan, agar Pers Nasional dapat memenuhi fungsi yang sebaik-baiknya menuju terwujudnya Pers Sosialis Pancasila.

Dalam Undang-undang ini pers dimengerti sebagai lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya...²⁵, mempunyai fungsi sebagai alat revolusi dan merupakan mass media yang bersifat aktif, dinamis, kreatif, edukatif, informatif dan mempunyai fungsi kemasyarakatan pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis dan progresif meliputi segala perwujudan kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia.²⁶

Untuk itu pers nasional berkewajiban:

- a. mempertahankan, membela, mendukung dan melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen.
- b. memperjuangkan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat berlandaskan Demokrasi Pancasila.
- c. memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan

25. Lihat Pasal 1 ayat 1, dari Bab I Ketentuan Umum.

26. Pasal 2 ayat 1, dari Bab II Fungsi, Kewajiban dan Hak Pers.

- pers.
- d. membina persatuan dan kekuatan-kekuatan progresif revolusioner dalam perjuangan menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, feodalisme, liberalisme, komunisme dan fasisme-diktatur.
 - e. menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif dan progresif revolusioner. ²⁷

Mengenai hak, pers mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat korektif dan konstruktif, lalu kepada pers nasional tidak dikenakan sensor dan pembreidelan, karena kebebasan pers sesuai dengan hak asasi warga negara, namun pers tetap memiliki tanggung jawab seperti tercantum pada pasal 2 dan 3 di atas. ²⁸

Pada bagian lain Undang-undang ini, muncul pasal yang melegakan hati pers karena untuk menerbitkan pers yang bersifat kolektif sesuai dengan hakikat Demokrasi Pancasila, merupakan hak setiap warga negara, dan untuk ini *tidak diperlukan Surat Ijin Terbit* (garis miring dari penulis). ²⁹

Namun bertolak belakang dari pasal 8 itu, pasal 20 Undang-undang yang sama menyebutkan : dalam masa peralihan keharusan mendapatkan Surat Ijin Terbit masih berlaku sampai ada keputusan pencabutannya oleh Pemerintah dan DPR (GR), dan ketentuan tentang SIT dalam masa peralihan diatur oleh *Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers* (garis miring dari penulis). ³⁰ Namun apa yang

27. Pasal 2 ayat 2

28. Pasal 3-5.

29. Pasal 8 Bab IV Hak penerbitan dan Fasilitas Pers, garis miring dari penulis.

30. Pasal 20 ayat 1 a dan b.

diartikan sebagai 'masa peralihan' tersebut tidak terumuskan secara jelas, dan tidak definitif ditentukan kapan 'masa peralihan' itu berakhir.

Pada tahun 1967, Undang-undang Pokok Pers itu dilengkapi dengan satu pasal yang mencabut larangan peredaran Pers Nasional, berupa buletin, surat kabar harian, majalah dan penerbitan berkala lainnya. Pencabutan larangan ini merupakan suatu perjuangan untuk melawan Penetapan Presiden no. 4 tahun 1963 yang menyatakan bahwa Jaksa Agung berwenang melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.³¹ Dengan penambahan ini maka Undang-undang tersebut diperbaharui menjadi Undang-undang nomor. 4 tahun 1967.

PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia, sebagai wadah kelompok profesi wartawan, mempunyai penilaian tersendiri atas hadirnya UU Pokok Pers nomor 11 tahun 1966, yang kemudian diperbaharui menjadi UU nomor 4 tahun 1967.

Dengan mengutip dari Laporan Umum Pengurus Pusat PWI dalam kongresnya yang ke-13 di Banjarmasin, pada tanggal 17-21 Juni 1968³² dikemukakan sifat positif adanya pasal 4 dalam Undang-undang tersebut yang menegaskan tidak adanya sensor dan pembrei-

31. Lihat penjelasan atas Undang-undang nomor 4 tahun 1967 tentang penambahan undang-undang nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, pada M.L. Gandhi, Undang-undang Pokok Pers, Proses Pembentukan dan Penjelasanannya, Rajawali Press: 1985, h.5

32. Soebagijo IN, Abdurrachman Surjomihardjo dan P. Swantoro, Lintasan Sejarah PWI, Jakarta: PWI Pusat dan Departemen Penerangan, 1977, h.48-50

delan terhadap pers nasional, namun dikemukakan statemen "Apa hendak dikata, undang-undang berbunyi begitu, dalam praktek berkembang lain". 33

Walau akhirnya ada penambahan pasal yang meniadakan Penetapan Presiden nomor 4 tahun 1963, seperti yang dikemukakan di atas, tetapi "Apa boleh buat, toh masih ada juga penerbitan pers yang ditutup, kali ini dengan menggunakan alat pemukul pasal 11 UU yang berbunyi: 'Penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila seperti halnya yang bertolak dari paham Komunisme / Marxisme / Leninisme dilarang' ". 34

Lebih jauh dinyatakan: "Ini masalah yang perlu ketegasan lebih lanjut, sehingga orang tidak serampangan menamakan ini bertentangan dengan Pancasila, itu bertentangan dengan Pancasila. Janganlah kita sampai terperosok lagi ke dalam rawa-rawa subjektivisme, bergantung pada like and dislike, melakukan tindakan yang tergapoh-gapoh hanya karena tidak bisa bersepakat di dalam suatu hal." (garis miring dari penulis)

Hal lain yang juga merupakan perhatian dari PWI adalah dualisme yang muncul dalam UU tersebut berkenaan dengan masalah SIT, di mana pasal 8 menyebutkan tidak diperlukan SIT, tetapi dalam aturan peralihan SIT tetap diberlakukan sampai ada keputusan pencabutan oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Pers.

Sikap yang diambil PWI amat jelas, "PWI telah memilih po-

33. ibid. h.48

34. ibid. h.49 Tentang sejumlah pers beraliran komunis yang dilarang saat itu bisa dilihat pada Said (1988) h.161-171

sisinya yang jelas dalam persoalan SIT ini, yaitu meniadakan SIT. Posisi ini dikemukakan di tiap kesempatan termasuk di Dewan Pers, yang di dalam rapat plenonya yang ke-3 tanggal 2 Februari 1968 telah memasukkan sikap PWI itu ke dalam bentuk rekomendasi kepada Presiden untuk meniadakan SIT sesuai dengan bunyi pasal 8 UU Pokok Pers. Dan dalam hubungan dengan alasan 'masa transisi' haruslah dijaga jangan sampai alasan ini senantiasa dipergunakan untuk maksud-maksud yang subjektif, sehingga secara halus bisa menghalangi pesatnya pekerjaan mencapai cita-cita kemerdekaan pers." 35

Pada intinya Keberatan PWI terhadap SIT dapat dikatakan bahwa tiadanya SIT itu lebih mendekati jiwa dari pasal 28 UUD 45 dan lebih mendekati cita-cita kemerdekaan pers. 36

Kemunculan SIUPP dan Kontroversinya

Lima belas tahun setelah penyempurnaan Undang-undang Pokok Pers tersebut, dilakukan peninjauan kembali atas Undang-undang yang lama sehubungan dengan "beberapa istilah yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan tingkat perkembangan masyarakat" serta juga berkaitan dengan "pasal-pasal yang mengatur masalah-masalah prinsip yang tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan masyarakat setelah berlakunya Ketetapan MPR no.

35. Ibid. h.49-50

36. Ibid. h.50.

Dengan demikian dalam Undang-undang yang baru tersebut, Undang-undang nomor 21 tahun 1982, tugas dan kewajiban Pers Nasional dimaksudkan untuk:

- a. melestarikan dan memasyarakatkan Pancasila sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-undang 1945 dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
- b. memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat berlandaskan Demokrasi Pancasila.
- c. memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggung jawab.
- d. menggelorakan semangat pengabdian perjuangan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional, membantu meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa serta menggairahkan partisipasi rakyat dalam pembangunan.
- e. memperjuangkan terwujudnya tata internasional baru di bidang informasi dan komunikasi atas dasar kepentingan nasional dan percaya pada kekuatan diri sendiri dalam menjalin kerjasama regional, antar regional dan internasional khususnya di bidang pers. 38

Pada bagian lain dari Undang-undang baru tersebut, yang esensial adalah dihapuskannya Surat Ijin Terbit dan Surat Ijin Cetak. Hal ini juga berarti menghapuskan ketentuan peralihan Undang-undang yang lama (pasal 20) yang menyebutkan perlunya SIT dalam masa peralihan.

Peniadaan SIT ini secara tidak langsung juga mengakhiri perdebatan tentang 'masa peralihan', seperti yang disebutkan dalam undang-undang lama. Dan ternyata masa peralihan tersebut

37. Lihat Sukarno, "Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pers: SIUPF dan Implementasinya" dalam Soebagijo PR et al (ed.) Persuratkabaran Indonesia dalam Era Informasi, kumpulan tulisan menyambut 25 tahun Harian Umum Sinar Harapan, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, tahun 1986, h.224

38. Lihat Undang-undang nomor 21 tahun 1982, pasal 2 ayat 2.

memakan waktu sekitar 16 tahun, dihitung sejak undang-undang pokok pers pertama muncul.

Tetapi dalam undang-undang yang baru, muncul suatu konsep baru dalam kehidupan pers nasional yaitu Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).³⁹

Sukarno, Direktur Jendral Pembinaan Pers dan Grafika pada tahun 1972-1987, pernah menulis bahwa ketentuan SIUPP diadakan dilandasi itikad dan dalam rangka mengadakan pembinaan yang lebih mantap terutama dalam pengusahaan pers.⁴⁰ Lebih lanjut dikatakan bahwa, Ketentuan SIUPP secara lebih pasti akan mengarah pada terwujudnya penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers yang berbentuk Badan Hukum dan mengutamakan sifat idiil, dan yang diatur secara bersama atas asas kekeluargaan.

Penerbitan pers di sini dimengerti sebagai produk kolektif antara pimpinan usaha, wartawan dan karyawan lainnya, dan kemandirian perusahaan pers tersebut tercermin dengan sehatnya pengelolaan usaha, menyangkut hal permodalan dan juga isi redaksionalnya. Lalu perusahaan penerbitan pers dikelola secara gotong royong dengan mengikutsertakan karyawan pers dalam kepemilikan modal perusahaan. Disebutkan angka 20 persen sebagai angka mini-

39. Pasal 13 ayat 5 Undang-undang nomor 21 tahun 1982 menyebutkan, "Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Ijin Penerbitan Pers yang selanjutnya disingkat SIUPP yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Ketentuan-ketentuan tentang SIUPP akan diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers".

40. Sukarno Opcit. h. 231

mal dalam kepemilikan saham oleh karyawan pers. 41

Dengan kemunculan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers, muncul kekhawatiran bahwa SIUPP adalah bentuk baru dari pengontrolan terhadap surat kabar.

Fraksi Persatuan Pembangunan pada saat pembahasan Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-undang Pokok Pers tersebut mempertanyakan SIUPP sebagai suatu lembaga baru, apakah tidak merupakan suatu SIT versi baru. 42

Dari kalangan lain pun terdapat ketidakpuasan terhadap keberadaan SIUPP, salah satunya adalah Mochtar Lubis. Ia mengatakan:

Sebagai seorang wartawan dan warga negara Indonesia, saya ingin menghimbau pemerintah agar memulihkan kembali kebebasan pers Indonesia sepenuhnya sesuai dengan pasal 28 UUD 1945. Pemerintah telah menghapus SIT dan menggantinya dengan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers), dan mengatakan tidak akan terjadi lagi pembredialan pers lewat pencabutan SIT. Memang benar harian Sinar Harapan telah dilarang terbit tanpa lewat pencabutan SIT tetapi hanya lewat pembatalan SIUPP. Apa bedanya? Kenyataan memperlihatkan bahwa Sinar Harapan telah lenyap dari masyarakat, seperti surat-surat kabar lain yang lebih dahulu telah dicabut SIT-nya. 43

Di luar perdebatan apakah SIUPP merupakan versi baru dari SIT, pihak pemerintah sendiri dalam sambutan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Rancangan Undang-undang Perubahan

41. Sukarno Ibid. 231-232

42. Lihat pada J.C.T. Simorangkir, Pers, SIUPP dan Wartawan, Jakarta: Gunung Agung, 1986, h.98

43. Mochtar Lubis, "Etos Pers Indonesia", makalah yang disajikan pada pertemuan Dewan Pers bulan Januari 1987, dan dimuat ulang dalam Atmakusumah (ed), Mochtar Lubis: Wartawan Jihad, Jakarta: Harian KOMPAS, 1992, h.475

an Undang-undang nomor 11 tahun 1966, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1967, menegaskan:

bahwa keberadaan SIUPP dilandasi itikad dan dalam rangka mengadakan pembinaan yang lebih mantap terutama dalam *pengusahaan pers* (garis miring dari penulis). Ketentuan SIUPP secara lebih pasti akan mengarah pada terwujudnya penerbitan pers yang diselenggarakan oleh *perusahaan pers* yang berbentuk Badan Hukum dan mengutamakan sifat idiil, dan diatur secara bersama berdasar atas asas kekeluargaan. ⁴⁴

Untuk kalangan pengasuh surat kabar itu sendiri, keberadaan SIUPP akhirnya memang diterima sebagai prasyarat penerbitan media cetak. Tetapi salah satu butir pasal Peraturan Menteri Penerangan nomor 01 tahun 1984 tentang Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers, dianggap tidak sesuai dengan jiwa Undang-undang nomor 21 tahun 1982 tersebut.

Pada pasal 33 Peraturan Menteri tersebut pada butir h, disebutkan bahwa SIUPP dapat dibatalkan oleh Menteri Penerangan setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers jika penyelenggaraan penerbitan tidak lagi mencerminkan kehidupan pers yang sehat, bebas dan bertanggungjawab.

Pada pertengahan tahun 1991, ketika sejumlah redaktur surat kabar melakukan dengar pendapat dengan Komisi I DPR, pembicaraan tentang SIUPP muncul lagi ke permukaan, terutama mempersoalkan pasal 33 butir h yang menyangkut pembatalan SIUPP oleh Menteri Penerangan dan Dewan Pers. Muncul tuntutan untuk menghapus ketentuan butir h tersebut, atau mengusulkan perubahan mekanisme, bahwa pembatalan tidak atas pertimbangan Dewan Pers, melainkan

44. J.C.T. Simorangkir Opcit. h.113

menunggu hasil keputusan dari pengadilan. 45

A. Muis, seorang guru besar dari Universitas Hasannudin, Ujung Pandang mengemukakan pandangannya tentang kontroversi dalam perundang-undangan pers :

Sebenarnya masalah SIUPF tidak perlu selalu muncul, manakala pasal 13 ayat 5 UU Pers sanggup mempertahankan fungsinya sebagai Undang-undang yang khusus mengatur perusahaan pers (code of enterprise) saja. Seperti halnya ketentuan-ketentuan dalam pasal 33 a s/d g Permenpen nomor 01/1984, yang juga merupakan pelaksanaan pasal 13 ayat 5 UU Pers. Sebab perlindungan dan tanggung jawab hukum bagi kebebasan pers sudah cukup terjamin dengan kehadiran pasal 4 dan pasal 8 ayat 2 UU Pers tersebut (tidak adanya sensor, pembreidelan, dan diharuskannya SIT). Sayang sekali pasal 33 Peraturan Menteri menukik pula ke huruf h.

Maka SIUPF harus menerima tugas ganda. Yaitu, sebagai code of enterprise sekaligus code of publication (UU penerbitan tentang berita, tulisan dan gambar dalam surat kabar). Akibat lebih jauh yang ditimbulkan oleh pasal 33 h tersebut adalah bahwa ketentuan mengenai tidak adanya sensor, pembreidelan dan tidak diperlukannya SIT menjadi tidak berarti. Sebab ketentuan pasal 33 h Permenpen 01/1984 pada hakikatnya sudah mencakup secara implisit pengertian SIT, pembreidelan dan bahkan sensor (dalam arti luas). 46

Peristiwa 15 Januari 1974 dan Dampaknya terhadap Hubungan Pers dan Pemerintah

Setelah terjadi peristiwa 15 Januari 1974, Menteri Pertahanan Keamanan saat itu, Jendral M. Panggabean, dalam menyampaikan keterangan di depan Dewan Perwakilan Rakyat, mengungkapkan hasil sidang kabinet mengenai langkah-langkah yang diambil peme-

45. "Perlu direvisi, Ayat h Pasal 33 Peraturan Menpen tentang SIUPF", KOMPAS 13 Juni 1991

46. A. Muis "Memahami Hukum Pers Indonesia", KOMPAS 20 November 1992

rintah berkaitan dengan peristiwa tersebut. 47

Salah satu tindakan yang diambil adalah dengan menertibkan pelaksanaan hak-hak demokrasi, yang mencakup:

1. Demonstrasi yang menurut pengalaman menimbulkan kekacauan-kekacauan dalam masyarakat tidak dibenarkan lagi.
2. Menertibkan pemberitaan dalam pers/surat kabar.
(garis miring dari penulis)
3. Menertibkan kehidupan dalam Universitas-universitas / sekolah-sekolah agar tidak digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik. 48

Secara tidak langsung pers dituntut pemerintah ikut bertanggung jawab atas terjadinya Peristiwa 15 Januari tersebut, sehingga dalam rangka "penertiban hak-hak berdemokrasi" pemberitaan pers ditertibkan.

Dalam pandangan Tjipta Lesmana, paling tidak pers dianggap turut memantapkan situasi politik yang kemudian menimbulkan aksi huru-hara yang menelan korban jiwa dan materi yang tidak kecil. Maka wajar kalau sejak peristiwa itu, pemerintah memperlihatkan sikap yang keras terhadap pers, karena pers dianggap kurang memiliki rasa tanggung jawab, khususnya terhadap stabilitas nasional. 49

Peristiwa 15 Januari 1974, yang berdampak pada penutupan 12 surat kabar dan majalah dalam waktu yang singkat, memang merupa-

47. Lihat Marzuki Arifin, Peristiwa 15 Januari 1974, Jakarta: Publishing House Indonesia, 1974, h.339

48. Ibid.

49. Tjipta Lesmana, "Pers Indonesia dalam Teori dan Praktek" dalam Soebagijo PR et al (ed.), Persuratkabaran Indonesia dalam Era Informasi, kumpulan tulisan menyambut 25 tahun Harian Umum Sinar Harapan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986, h.374

kan suatu pukulan tersendiri bagi Pers Indonesia. Suatu angka yang amat besar, dan hanya kalah jumlahnya ketika sejumlah pers beraliran komunis ditutup pada masa awal Orde Baru. Jelas secara psikologis, muncul kehati-hatian di kalangan pers, ketika akhirnya mereka sadar bahwa pemerintah tetap memiliki kekuatan untuk meredam suara-suara pers.

Sebaliknya dari pihak pemerintah dari peristiwa 15 Januari itu membuahkan pelajaran tersendiri, sehingga dirasakan perlunya konsepsi khusus untuk mengatur pemberitaan dalam surat kabar.

Hasil keputusan Dewan Pers pada awal Desember 1974⁵⁰ dikeluarkan dalam rangka "mengembangkan kehidupan (pers) yang sehat". Dalam konsideransnya diakui sering terjadi kesulitan-kesulitan menerjemahkan pengertian "kebebasan" dalam praktek jurnalistik sehari-hari.

Secara panjang lebar pedoman idiil tersebut menguraikan falsafah kebebasan pers menurut Pancasila, dan menyebutkan bahwa pers harus pula menjunjung tinggi azas-azas pembangunan nasional seperti yang telah dirumuskan dalam GBHN sebagai konsensus nasional, sehingga kebebasan pers menimbulkan adanya tanggung jawab dalam melaksanakan kebebasan tersebut.⁵¹

Cukup menarik jika dalam pedoman idiil tersebut juga disinggung peristiwa di Jakarta pada tanggal 15 Januari 1974, dan

50. Keputusan Dewan Pers no.79/XIV/1974 tentang Pedoman Pembinaan Idiil Pers. Lihat pada Almanak Pers 1978: Dewan Pers, Departemen Penerangan, 1978, h.74-83

51. Ibid. h.76

peristiwa di Bandung pada tanggal 5 Agustus 1973.⁵² Di situ dikatakan:

...Kita (Dewan Pers) pun tidak perlu menutup mata bagi terjadinya peristiwa-peristiwa seperti 5 Agustus 1973 dan 15 Januari 1974.

Namun dengan memahami fungsi dan kedudukan pers nasional sebagai media pendukung suksesnya pembangunan melalui komunikasi harapan, pers nasional perlu mengambil hikmah dari kejadian-kejadian tersebut yakni bahwa aspirasi-aspirasi masyarakat tidak mungkin dapat terkabulkan apabila aspirasi-aspirasi tersebut ingin diwujudkan dengan jalan kekerasan dan melanggar konsensus nasional. Sekalipun kontrol sosial perlu dalam membawakan aspirasi-aspirasi masyarakat dan memberikan koreksi-koreksi yang konstruktif, namun pelaksanaan kontrol sosial tersebut tetap harus memperhatikan terpeliharanya ketenangan atau stabilitas.⁵³

Nasrudin Hars, seorang wartawan senior yang lama bekerja pada harian Angkatan Bersenjata, dalam suatu artikelnya mengungkapkan bahwa tidaklah cukup beralasan untuk mengatakan bahwa setelah Peristiwa 15 Januari 1974 tidak ada lagi kebebasan pers di Indonesia. Penindakan terhadap beberapa penerbitan pers dan sejumlah tokoh pers oleh Pemerintah saat itu tidak identik dengan pengekangan terhadap kebebasan pers, katanya.⁵⁴

Artikel tersebut mengungkapkan perjalanan pers mulai sejak tahun 1950-an, pada masa Demokrasi Liberal, sampai pada masa tahun-tahun pertama Orde Baru. Menyinggung tentang sikap Pemerintah Orde Baru terhadap pers, Nasrudin mengatakan bahwa kebebasan

52. Secara lebih lengkap tentang Peristiwa 15 Januari 1974 bisa dilihat pada bab IV, dan tentang Peristiwa 5 Agustus 1973, silakan membaca pada bab III tentang surat kabar Indonesia Raya

53. Departemen Penerangan Opcit. h.78

54. Nasruddin Hars, "Pers Indonesia setelah 15-16 Januari" dalam PERS INDONESIA no.1 tahun II Januari 1976, h.19

pers sama sekali tidak tertekan, bahkan sebaliknya dalam beberapa kasus pemerintah dibuat kalang kabut oleh kebebasan pers yang "agak keterlaluan waktu itu".⁵⁵ Malah dikatakan pula bahwa secara sepintas kebebasan pers pada tahun-tahun menjelang Peristiwa 15 Januari 1974 hampir tidak berbeda dengan pers pada tahun 1950-an, suatu masa yang lebih disebut sebagai masa Demokrasi Liberal.⁵⁶

Diungkapkan pula usaha pemerintah lewat persuasi kepada sejumlah pers, yang "kecuali sudah terpaksa sekali maka terhadap beberapa penerbitan yang dilakukan pembreidelan, berhubung dalam menjalankan kebebasannya pers yang bersangkutan misalnya sampai merusak martabat Kepala Negara atau dapat mengganggu stabilitas keamanan".

Beberapa penerbitan sebaliknya, tulis Nasrudin Hars, ada yang tetap kurang memperhatikan ataupun barangkali kurang dapat menghayati maksud pemerintah tersebut. Ini terlihat dari masih adanya penerbitan pers yang secara langsung atau tidak turut menghangatkan suasana menjelang Peristiwa 15 Januari 1974. Malahan berkenaan dengan peristiwa tersebut ada penerbitan-penerbitan yang tidak mengurangi sikapnya, baik disengaja maupun tidak.⁵⁷

Bagaimana dan apa yang sebenarnya terjadi dengan Pers Indonesia pada saat terjadinya peristiwa 15 Januari 1974, khususnya

55. *ibid.* h.17

56. *Ibid.* Perhatikan pemakaian istilah *Liberal* di sini.

57. *Ibid.* h.18

harian Indonesia Raya, sehubungan dengan sejumlah pendapat di atas, akan coba dibahas pada bab-bab selanjutnya.

Tentang profil surat kabar Indonesia Raya yang termasuk dalam 12 surat kabar dan majalah yang dicabut SIT dan SIC-nya menyusul terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974, akan diuraikan pada bab berikut ini.

Lalu apa yang terjadi dengan Peristiwa 15 Januari 1974 itu sendiri, serta apa yang terjadi di balik peristiwa itu, yang erat kaitannya dengan suasana politik, ekonomi dan sosial awal tahun 70-an, serta implikasi macam apa yang kemudian dapat dilihat dari perspektif hubungan pers dan pemerintah pada saat itu, juga akan dijabarkan pada bagian selanjutnya.

Rangkaian yang ditulis pada bab ini lebih ingin menunjukkan bagaimana setting yang melatari hubungan pers dan pemerintah terutama dengan melihat perkembangan sejarahnya, yang sedikit banyak berhubungan dengan peraturan perundang-undangan atau keputusan lain pada periode waktu tersebut.

BAB III

SURAT KABAR INDONESIA RAYA

Posisi Indonesia Raya dalam sejarah Pers Indonesia

Surat kabar Indonesia Raya dalam sejarah Pers Indonesia menduduki tempat yang unik. Dikatakan unik karena ia hidup dalam dua periode waktu yang berlainan dan diseling oleh masa vakum cukup panjang, kurang lebih selama 10 tahun. Sehingga perhitungan hidupnya harian Indonesia Raya adalah sejak 29 Desember 1949 sampai dengan 2 Januari 1959 untuk periode pertama, dan pada periode kedua, sejak 30 Oktober 1968 sampai dengan 21 Januari 1974.¹

Dua periode waktu tersebut menunjukkan perbedaan masa hidup Indonesia Raya berkaitan dengan dinamika politik nasional yang

1. Lihat Atmakusumah dalam Abdurachman S. ed, (1980) h.183, 221,249. Juga David T. Hill (1988) h. 139. Mengenai awal penerbitan periode kedua Indonesia Raya Atmakusumah menulis, "Gagasan menerbitkan kembali surat kabar ini sudah timbul sejak Mochtar Lubis dibebaskan dari tahanan, bulan Mei 1966. Tetapi permintannya untuk memperoleh Surat Ijin Terbit (SIT) kepada Menteri Penerangan Ds. WJ Rumambi dan kemudian juga kepada penggantinya, BM Diah - keduanya dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno - tidak membawa hasil. Baru pada pemerintahan Presiden Soeharto, Menteri Penerangan, Marsekal Muda Udara Boediarjo memberikan SIT tertanggal 24 Juli 1968, tiga bulan sebelum Indonesia Raya mulai terbit. Disusul dengan Surat Ijin Cetak (SIC) tertanggal 10 Agustus 1968 dari Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah (Laksus Pangkopkamtibda) Jakarta Raya dan sekitarnya.

berbeda, untuk dua periode hidupnya itu.

Keunikan surat kabar ini tidak semata-mata soal masa hidupnya dalam dua periode tersebut, tetapi juga unik karena karakter surat kabar itu sendiri, yang mencerminkan karakter pengasuhnya juga.

Ia disebut sebagai surat kabar yang "kontroversial karena cara penyajian beritanya yang sering tanpa tedeng aling-aling, karena kritik-kritiknya yang tajam dan langsung" dan juga "berbagai berita yang disuguhkannya sering mencerminkan sikap untuk 'berjihad' menentang apa yang dipandang sebagai korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan dan ketidakbenaran serta feodalisme dalam sikap".²

Apa yang disebutkan di atas akan terlihat dari cuplikan peliputan berita yang dilakukan Indonesia Raya dan juga kolom editorial yang mencerminkan sikap koran ini mengenai berbagai hal yang berkembang dalam masyarakat.

Mochtar Lubis sebagai pemimpin redaksi yang dominan mencerminkan sikap Indonesia Raya tidak bisa dipungkiri, bahkan untuk banyak orang: "Indonesia Raya adalah korannya Mochtar Lubis", dan LIPI mengistilahkan kondisi ini sebagai *personal journalism*, sehingga pembahasan tentang pribadi Mochtar Lubis juga perlu diberikan dalam bab ini.

Indonesia Raya periode pertama

2. Abdurachman S. ed (1980) h.181

Indonesia Raya terbit sebagai surat kabar di Jakarta pertama kali pada tanggal 29 Desember 1949, atau dua hari setelah peristiwa penandatanganan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, tanggal 27 Desember 1949.³

Pemimpin redaksi yang pertama dijabat oleh Hiswara Darmaputra bersama-sama dengan Mochtar Lubis yang saat itu masih bekerja di Kantor Berita Antara sebagai redaktur Hubungan Luar Negeri sampai delapan bulan Indonesia Raya terbit. Pemimpin Umum dijabat oleh Jullie Effendie, bersama-sama dengan Hiswara.

Susunan pimpinan ini beberapa waktu kemudian mengalami perubahan ketika Hiswara dan Jullie Effendie mengundurkan diri. Mochtar Lubis menjadi Pemimpin Redaksi yang baru sejak Agustus 1950, setelah meninggalkan Antara, dan Hiswara pindah ke Merdeka tahun berikutnya. Sedangkan Hasjim Mahdan, yang menjabat juru bicara Gubernur Jendral Militer pada saat koran ini terbit, menjadi Pemimpin Umum sejak Oktober 1951.⁴

Kehadiran surat kabar ini tidak lepas kaitannya dengan kelompok militer saat itu yang berupaya untuk menghadapi kekuatan-kekuatan Belanda yang kehadirannya masih kuat, terutama para tentara dari divisi Siliwangi.

Misalnya ide kelahiran Indonesia Raya datang dari sejumlah tentara dari divisi tersebut, untuk membangkitkan semangat republik bagi rakyat dan juga tentara, terutama upaya untuk mengisi

3. Ibid. h.183

4. Ibid. h.185

kekosongan setelah alih kekuasaan dilaksanakan. ⁵

Ide pendirian surat kabar ini disebut oleh Hill ⁶ muncul 3 bulan sebelum pengakuan kedaulatan oleh Belanda, dan Mochtar Lubis didekati 2 minggu sebelum terjadinya pengakuan kedaulatan. Disebutkan oleh Atmakusumah bahwa beberapa tentara yang ikut memberikan dukungan terhadap hadirnya surat kabar yang membawa semangat republik adalah, Mayor Brentel Susilo dari Angkatan Darat, Gubernur Militer Daan Jahja (pejabat panglima divisi IV Siliwangi sampai akhir 1948), Basarudin Nasution (Direktur Sekolah Hukum AD), Kolonel Tahi Bonar Simatupang (pejabat KSAP), Kolonel Abdul Haris Nasution (KSAD), Letkol S. Parman, perwira staf gubernur militer Jakarta, jurubicara AD Major Bachtar Lubis (kakak dari Mochtar Lubis), dan Letkol Sutojo Siswomihardjo komandan batalyon V CPM. Bantuan lain juga diberikan oleh Sjahsam (adik Sutan Sjahrir, perdana menteri pertama Indonesia).

Hubungan erat dengan kelompok tentara inilah yang menyebabkan sampai bertahun-tahun kemudian Indonesia Raya mendapat julukan sebagai "koran tentara". Tetapi Indonesia Raya bukanlah suara resmi atau milik tentara, walau ia sering disebut "surat kabar komando angkatan darat", tidak seperti yang terjadi dengan Berita Yudha atau Angkatan bersenjata yang terbit pada awal 1965. ⁷

Namun diakui bahwa pemberian bantuan keuangan untuk membeli kertas, biaya percetakan dan gaji karyawan, menyertai dukungan

5. Ibid. juga lihat Hill (1988) h.58 dan seterusnya.

6. Hill (1988) h.59

7. Atmakusumah opcit. h.186

moral dan perlindungan tentara kepada koran ini. Hal ini tidaklah dipungkiri oleh pengasuhnya. Di samping itu juga pimpinan tentara melangani semua surat kabar nasional dengan maksud untuk memperkuat kedudukan mereka dan agar para prajurit memperoleh bahan bacaan dari kalangan pers republikain. Langganan tetap pihak tentara kepada Indonesia Raya terus berlanjut sampai akhir tahun 1953. ⁸

Bagi Mochtar Lubis sendiri kerjasama yang demikian ia nilai lebih sebagai kesamaan kepentingan dalam arti personal, bukan institusional sifatnya, artinya bantuan yang diberikan di atas, lebih karena kedekatan sebagai seorang kawan, bukan kerjasama antar lembaga. ⁹

Selain itu juga bantuan tersebut juga dikarenakan Indonesia Raya adalah koran baru, sehingga ia belum cukup mampu bersaing dengan koran-koran Belanda yang dicetak pada perusahaan cetak besar, juga dengan koran-koran Tionghoa yang dicetak di pusat-pusat penerbitan peninggalan sebelum perang. ¹⁰

Nama Indonesia Raya tercipta dari saran Teuku Sjahril ketika suatu hari ia bertandang ke rumah Mochtar Lubis, tetangganya, pada saat surat kabar ini hendak diterbitkan. "Daripada susah-

8. Ibid. h.185-186

9. Hill opcit.h.62

10. Atmakusumah opcit. h.188

susah, ambil saja nama lagu kebangsaan kita," kata Sjahril. 11

Pada tahun-tahun pertamanya Indonesia Raya tampil sebagai surat kabar yang terutama menyajikan berita-berita politik, baru kemudian dalam perkembangannya berita-berita budaya diberikan tempat sejak Agustus 1950, namun berita-beritanya banyak diarahkan kepada kehidupan di bidang politik, ekonomi dan sosial. 12

Harian Indonesia Raya baru melengkapi penerbitannya dengan sebuah mingguan berisi tulisan-tulisan feature pada tanggal 16 Oktober 1955 dengan nama yang berlainan: *Masa dan Dunia*. Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksinya sama seperti harian, Hasjim Mahdan dan Mochtar Lubis. Pelaksanaan teknis dilakukan oleh Sam Soeharto sebagai Redaktur Pelaksana. Mingguan ini terdiri dari delapan halaman dengan format lebih kecil dari harian yang mempunyai empat halaman, tetapi sedikit lebih besar dari ukuran surat kabar tabloid yang umum dikenal. Umur *Masa dan Dunia*, yang cara berlangganannya terpisah dari harian, hanya enam setengah bulan dan berakhir pada nomor 28, tanggal 29 April tahun berikutnya (1956).

Tiga bulan kemudian, 29 Juli 1956 muncul penggantinya,

11. Ibid. h.189. Namun menurut Hill (1988:60, footnote 7) Brentel Susilo menamai demikian setelah berdirinya Partai Indonesia Raya, dimana pamannya Raden Sutmo menjadi salah satu pendirinya. Namun koran ini tidak ada kaitan apa-apa dengan partai tersebut, juga suatu tabloid dengan nama yang sama, yang pernah diterbitkan oleh Partai Masyumi di Jogjakarta pada tahun 1947-48. Lihat Soebagijo IN, Jagat Wartawan Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1981, h.479-80.

12. Henri Chambert-Loir, Indonesia Raya: Suatu Gambaran Keaktuilan, terjemahan salah satu bab dari tesis penulis yang sama, Mochtar Lubis: Une Vision de L'Indonesie Contemporaine, oleh LEKNAS LIPI, tanpa tahun, h.5-6

Minggu Indonesia Raya, tetapi tanpa melepaskan identitas lama dengan tetap mencantumkan logo *Masa dan Dunia* di halaman II. Cara berlangganan penerbitan baru ini dijadikan satu dengan harian. Berbeda dengan surat kabar mingguan umumnya, *Minggu Indonesia Raya*, bukan semata-mata media hiburan karena di halaman pertamanya dimuat berita-berita aktual. Hanya dua halaman tengah diisi feature. Sedangkan halaman IV diisi dengan iklan, seperti juga yang dilakukan pada harian. Formatnya mula-mula sebesar harian dan juga terdiri dari empat halaman. Tetapi sejak Januari 1958 format itu berubah kecil dengan delapan halaman, logo *Masa dan Dunia* ditiadakan dan isi keseluruhan pada umumnya berupa feature. Redaktur Pelaksananya adalah Kartaningtyas Sidharta. 13

Dengan mengutip angka-angka yang ditulis Henri Chambert-Loir 14 disebutkan bahwa Indonesia Raya memulai penerbitannya dengan oplag 5000 eksemplar. Bulan Oktober 1951, pada saat pergantian Pemimpin Umum dari Jullie Effendie kepada Hasjim Mahdan, oplag merosot menjadi 3500. Tetapi kemudian meningkat terus, terutama pada akhir 1956 sewaktu terjadi pergerakan di daerah-daerah luar Jawa yang pemberitaannya memenuhi halaman surat kabar ini. Akhirnya oplag mencapai angka stabil sekitar 47500 eksemplar menjelang surat kabar ini ditutup akhir 1958. 15

Dengan mengutip sumber yang sama, Daniel Dhakidae menunjukkan bahwa puncak oplag yang dicapai oleh Indonesia Raya pada

13. Atmakusumah opcit. h.189-190

14. Chambert-Loir opcit.

15. Atmakusumah opcit. h.188.

tahun 1957 sampai dengan pertengahan tahun 1958, namun setelah periode tersebut oplagnya merosot drastis, dan dikatakan bahwa koran ini sejak pertengahan tahun 1958 mengalami kesulitan internal dan eksternal. 16

Kesulitan eksternal yang menyebabkan terjadinya 6 kali pembreidelan terhadap koran ini 17 membawa kesulitan finansial bagi para pengasuhnya. Dari sinilah mulai terjadi perselisihan antara Hasjim Mahdan dan Mochtar Lubis. Hasjim Mahdan ingin agar Mochtar Lubis memperlunak editorial koran tersebut, namun hal tersebut ditolak oleh Mochtar Lubis.

David Hill berpendapat bahwa pada periode pertama Indonesia Raya ada 5 isu pokok yang dibawakan oleh koran ini dan menonjol dalam sorotan editorialnya. 18

Hill menyebutkan bahwa 5 isu tersebut dipilih karena 3 isu berkaitan dengan masalah hubungan sipil dan militer pada jaman itu: yaitu Peristiwa 17 Oktober 1952 19, Penahanan Roeslan Abdul

16. Daniel Dhakidae, The State, The Rise of Capital and The Fall of Political Journalism in Indonesia: Political Economy of Indonesian News Industry, tesis doktor dari Cornell University (Ithaca, New York) 1991:167

17. Tentang pembreidelan ini bisa dilihat pada Atmakusumah opcit. h.195-dst. Juga Edward C. Smith, Pembreidelan Pers di Indonesia, terj., Jakarta: Grafiti Pers, 1983, h.118-dst.

18. Hill Opcit. h:68 dst.

19. Tentang peristiwa ini sendiri bandingkan: biografi AH Nasution "Memenuhi Panggilan Tugas" jilid 3: Masa Pancaroba Pertama, Jakarta: Gunung Agung, 1983:1-214, David Hill (1988:69-75), juga Harold Crouch (1978:29-31), Ulf Sundhaussen (1986:124-130). Lihat juga Memoar "Djatikusumo: Prajurit dari Kraton", TEMPO NO. 20 tahun XXII, h.65, serta Peter Kasenda, "Tahi Bonar

gani dan peristiwa pergerakan di daerah luar Jawa²⁰. Dua isu lain yang disebut Hill sebagai "...tidak sepenting 3 isu yang lain, namun cukup untuk menggambarkan karakter wartawan Indonesia Raya", yaitu peristiwa pernikahan Presiden Soekarno dengan Hartini, serta akses dari penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika, berupa penyediaan "Komite Ramah Tamah", yang ditulis oleh Indonesia Raya sebagai prostitusi terselubung.²¹

Atmakusumah sambil mengutip Herbert Feith menyebutkan bahwa Indonesia Raya dibesarkan pada tahun-tahun ketika pelaksanaan demokrasi parlementer boleh dikatakan cukup efektif. Kabinet bisa diminta tanggung jawabnya oleh parlemen, walaupun dewan perwakilan rakyat itu bukan hasil pemilihan umum. Pers sangat bebas, badan-badan peradilan menjalankan tugasnya secara amat independen, tanpa campur tangan pemerintah.²²

Disebutkan pula bahwa selama setengah tahun terakhir tahun 1956 antara bulan Agustus dan Desember ada tiga peristiwa yang terjadi pada Indonesia Raya sebelum surat kabar ini masuk dalam

...Continued...

Simatupang: Pejuang, Prajurit dan Pemikir", PRISMA NO.2 1991, h.68-70.

20. Bandingkan: Barbara Silars Harvey, Permesta: Pemberontakan Setengah Hati (terjemahan), Jakarta: Grafiti Pers, 1983; R.Z. Leirissa, PRRI Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991; 30 TAHUN INDONESIA MERDEKA buku 2, h.103,104,124-131

21. Hill ibid h.68-93

22. Herbert Feith, "Dynamics of Guided Democracy" dalam Ruth Mc Vey ed. Indonesia, Southeast Asian Studies, Yale University, by arrangement with HRAF Press, New Heaven: 1967, seperti yang dikutip oleh Atmakusumah (1980:190).

rentetan pembreidelan dan penahanan terhadap para redaktornya. 23

Peristiwa pertama berkenaan dengan Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani sehubungan dengan peristiwa penggelapan uang yang dilakukan oleh Lie Hok Thay, wakil direktur Percetakan Negara Kementerian Penerangan. Hal itu terjadi pada tanggal 13 Agustus 1956, dan segera Indonesia Raya menerbitkan buletin kilat yang memuat berita utama bahwa Menteri Luar Negeri terlibat korupsi bersama Lie Hok Thay. Dan keesokan harinya, 14 Agustus 1956 surat kabar ini memuat pernyataan Wakil KSAD Letkol Zulkifli Lubis yang menuduh perdana menteri dan KSAD "membela kebatilan" dengan membebaskan Roeslan Abdulgani dari rencana penahanan.

Pada bulan Agustus 1956, jaksa agung berbalik menuduh Indonesia Raya melanggar pasal 154 KUHP, yaitu "...menyatakan kebencian dan permusuhan terhadap pemerintah atau karena menghina pemerintah" karena menerbitkan berita tentang tuduhan korupsi tersebut dan memuat tajuk rencana yang menuduh kabinet melakukan komplotan politik.

Peristiwa kedua adalah pemuatan surat-surat pembelaan diri Letkol Zulkifli Lubis dalam koran ini, yang isinya menolak tuduhan pemerintah yang diumumkan tanggal 28 November 1956 bahwa ia telah mempersiapkan dan melakukan percobaan kudeta. Zulkifli Lubis diberhentikan dari semua tugasnya tetapi ketika dikeluarkan surat perintah penangkapan, ia menghilang. Surat-surat pembelaannya itu juga disiarkan oleh surat kabar lain.

23. Lihat Atmakusumah opcit.h.195-200

Peristiwa ketiga ialah ketika Letkol Ahmad Husein, komandan resimen Angkatan Darat Sumatera Tengah dan Ketua Dewan Banteng, mengambil alih pemerintahan sipil dari gubernur Ruslan Muljohardjo yang diangkat oleh pemerintah pusat. Husein menuntut pembentukan kabinet baru untuk merubah keadaan negara yang tidak mengembirakan. Peristiwa tanggal 20 Desember 1956 itu disiarkan sebagai berita besar dalam Indonesia Raya dan dua surat kabar lainnya di ibukota edisi pagi berikutnya.

Malam harinya pemimpin redaksi Indonesia Raya ditangkap oleh Corps Polisi Militer (CPM). Ia disangka terlibat dalam "gerakan Zulkifli Lubis". Ia juga dituduh memuat tulisan yang menyokong dan membenarkan gerakan Dewan Banteng di Sumatera Tengah, serta mengecam pemerintah dalam persoalan ini.

Siang hari menjelang penangkapan Mochtar Lubis tanggal 21 Desember 1956, ia menulis tajuk rencana yang menyatakan bahwa pengambilalihan kekuasaan gubernur sipil oleh tentara di Sumatera Tengah akan membawa akibat di daerah-daerah lain. Baik kabinet Ali-Roem-Idham Chalid maupun Presiden Soekarno atau KSAD Nasution dikatakan tidak akan dapat mengatasi masalah ini tanpa bantuan Bung Hatta. Dianjurkannya agar kabinet bahkan kalau perlu Presiden dan KSAD bersedia mengundurkan diri. 24

Sejumlah pembredelan yang dialami koran ini antara waktu tahun 1957 dan 1958 akhirnya membawa pada konflik antara Mochtar Lubis dan Hasjim Mahdan.

24. Atmakusumah opcit.h.195-200, lihat juga Mochtar Lubis, Catatan Subversif, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987 h.1 pada tanggal 22 Desember 1956.

Pada tanggal 4 November 1958, terjadilah peristiwa yang jarang terjadi dalam pers Indonesia, yaitu terbitnya sebuah surat kabar dalam dua versi, yang merupakan wujud pertikaian intern koran ini. Kelompok Hasjim Mahdan menerbitkan korannya di pagi hari, sementara kelompok Mochtar Lubis menerbitkannya pada sore hari, keduanya tetap dengan memakai nama Indonesia Raya.²⁵

Koran dalam dua versi tersebut hanya muncul pada hari itu saja, karena menurut ijin yang diberikan Peperda pada tanggal 16 Oktober hanya Hasjim Mahdan yang diberi ijin terbit, namun dari situ terlihat bahwa para pembaca koran tersebut lebih suka jika Indonesia Raya dipegang oleh Mochtar Lubis, dan terbukti lewat jumlah oplag koran ini kemudian yang semakin merosot, bahkan para agennya pun menolak untuk mengedarkan koran ini karena kehilangan pelanggannya. Bisa jadi penarikan diri para agen ini adalah bentuk kesetiakawanan yang ditunjukkan kepada kelompok Mochtar Lubis, malah ketika kelompok ini masih memegang pimpinan surat kabar, ada pernyataan dari perwakilan/agen dari Jawa Timur untuk menolak keagenannya bila surat kabar ini tidak lagi dikelola Mochtar Lubis.²⁶

25. Sebelumnya, pada akhir bulan Agustus 1958, kelompok Mochtar Lubis sudah mengiklankan penerbitan baru yang akan dikelola kelompok mereka, yaitu Suara Indonesia Raya, namun menurut Atmakusumah akhirnya koran baru itu tidak pernah muncul karena tidak mendapatkan ijin terbit.

26. Ibid. h.221. Lihat juga perkembangan oplag Indonesia Raya Periode Pertama pada tabel di belakang.

Indonesia Raya periode kedua

Periode kedua koran ini ditandai dengan dikeluarkannya Mochtar Lubis dari tahanan, dan penyelesaian damai antar Hasjim Mahdan dan Mochtar Lubis. Disebutkan bahwa penyelesaian yang bersifat pribadi antara keduanya hanya sekitar 2 bulan menjelang surat kabar ini diterbitkan kembali pada tanggal 30 Oktober 1968. Dan surat perjanjian damai baru mereka buat pada tanggal 15 Oktober 1970. 27

Pada penerbitan kedua ini Indonesia Raya mendapat bantuan material berupa alat-alat pencetakan dari berbagai kalangan swasta di luar negeri. Dari Filipina bekas penerbit surat kabar Manila Times Don Ramos Roces menghadiahkan satu mesin cetak. Surat kabar Straits Times di Kuala Lumpur dan perusahaan pers Mirror Group dari Australia memberikan mesin-mesin set untuk menyusun huruf-huruf cetak dari bahan timah. Menteri Utama bidang Politik dari kabinet Ampera, Adam Malik kemudian memberikan izin untuk menerima pemberian yang tidak mengikat itu. 28

Nomor pertama edisi kedua ini terbit pada 30 Oktober 1968, yang terdiri dari 8 halaman, dengan ukuran kecil, 30 x 40 cm. Mulai tanggal 1 September 1969 jumlah halaman hanya 4 namun dengan ukuran yang lebih besar, yaitu 44 x 58 cm.

Untuk meneruskan penerbitan periode kedua ini Mochtar Lubis mengajak kembali sejumlah staf yang membantunya pada periode

27. Atmakusumah Ibid. h.228

28. Ibid.h.231

sebelum koran ini dibreidel, yaitu: Kustiniyati Mochtar, D.H. Assegaff, Enggak Bahau'ddin, Mohamadnoer, K. Sidharta, dan Sam Soeharto. 29

Penyajian isi periode kedua ini seperti periode pertama dibagi per rubrik, seperti untuk halaman pertama dipakai untuk menempatkan berita-berita utama, baik dalam negeri maupun luar negeri, kemudian halaman kedua untuk berita-berita ekonomi, perdagangan dan berita tentang ibukota dan daerah. Halaman ketiga dipakai untuk tulisan-tulisan opini, juga termasuk editorial korannya, serta pojoknya yang khas "Mas Kluyur" dan surat pembaca. Sementara halaman empat khusus untuk iklan. 30

Oplag Indonesia Raya dimulai dengan 20.000 eksemplar per harinya pada awal penerbitan periode kedua, kemudian meningkat menjadi 22.000 pada tahun 1969. Kenaikan oplag yang mencolok terjadi pada saat surat kabar ini tengah gencar melancarkan kritik terhadap masalah korupsi di perusahaan minyak negara, Pertamina yang telah membangun berbagai anak perusahaan di luar kegiatan perminyakan.

Dengan data oplag tersebut maka untuk tahun 1970, Indonesia Raya menduduki urutan keenam dari sejumlah koran yang beredar di Jakarta. Data sirkulasi surat kabar di ibukota saat itu adalah: Merdeka dicetak sebanyak 82.000 eksemplar, Yudha Minggu dicetak 80.000, Kompas 75.500, Harian Berita Yudha 75.000, Sinar Harapan

29. Hill opcit.h.139

30. Chambert-Loir opcit.h.47

65.000, Indonesia Raya 40.000, harian Angkatan Bersenjata 35.000, harian Pedoman 25.000, harian Suluh Marhaen dan Abadi masing-masing 20.000 ³¹

Data oplag Indonesia Raya pada tahun-tahun berikutnya adalah 26.000 untuk tahun 1971, lalu turun menjadi 23.000 pada tahun 1972, dan 20.000 pada bulan Januari-Mei 1973. Angka ini disebutkan oleh Atmakusumah berdasarkan angka penjualan surat kabar, bukan berdasarkan jumlah yang tercetak, karena jumlah yang tercetak pasti lebih besar dari jumlah hasil penjualan. Kemerosotan oplag tersebut pada umumnya karena menurunnya mutu cetak surat kabar ini, karena dicetak dengan alat-alat yang sudah tua, dan tidak jarang juga mengalami keterlambatan terbit karena aliran listrik dari PLN sering terputus. ³² Kustiniyati Mochtar, wakil pemimpin umum Indonesia Raya mengatakan oplag terendah koran ini adalah 12.000 ³³

Ketika di Jakarta dilanda dengan "demam cetak offset", yang merupakan penemuan muktahir dalam grafika pers, Indonesia Raya pindah percetakan sejak awal Agustus 1973, sehingga perwajahan surat kabar ini dapat diperbaiki. Sejak itu terlihat kenaikan angka oplag seturut dengan teknologi cetak baru ini. Disebutkan bahwa kenaikan jumlah oplag sejak pindah percetakan hingga menjelang surat kabar ini ditutup pada bulan Januari 1974, adalah

31. Cipta Loka Caraka Kritis Mengupas Surat Kabar, Jakarta: 1970:69-70.

32. Atmakusumah Opcit.h.232

33. Wawancara tertulis dengan Kustiniyati Mochtar, 14 Desember 92.

41.000 34

Pergantian tehnik cetak menjadi offset hanyalah salah satu dari sekian langkah perbaikan manajemen dalam tubuh surat kabar ini, selain juga membenahi bagian tata usaha, pemasaran, distribusi dan iklan. Dari sini juga kemudian direkrut tenaga-tenaga muda serta kerjasama dengan kelompok yang ahli dalam hal promosi surat kabar, termasuk dengan cara *canvassing*, *door to door* dan pelayanan kepada langganan lebih ditingkatkan. 35

Indonesia Raya dan Pemberitaan tentang Proyek Miniatur Indonesia

Dukungan surat kabar ini terhadap sikap mahasiswa yang mempertanyakan soal proyek pembangunan Miniatur Indonesia Indah diangkat menjadi tajuk rencana di awal tahun 1972. Indonesia Raya menulis :

Generasi muda kita kelihatan sangat paham arti pembangunan bagi hari depan mereka. Mereka mengerti bahwa tak boleh sesuatu dana dibuang percuma atau dipergunakan untuk proyek-proyek yang tidak langsung merangsang produksi dan kemakmuran rakyat banyak. Mereka pun paham sekali pentingnya pendidikan dalam usaha akselerasi modernisasi 25 tahun yang dicanangkan selama ini. Mereka kini penuh keyakinan dan semangat untuk menyelamatkan program pembangunan pemerintah. Mereka yakin bahwa kita di Indonesia tidak boleh lagi berbo-

34. Atmakusumah opcit. h.233

35. Sejak bulan April 1973 Kustiniyati Mochtar diangkat menjadi direktur PT Badan Penerbit Indonesia Raya dalam suatu rapat pemegang saham. Susunan pengurus direksi selengkapnya dimuat dalam Indonesia Raya edisi 15 Juni 1973. Wakil Pemimpin Umum ini mengaku ia adalah orang yang paling sering mengkritik managerial koran ini sebelumnya, sehingga ketika ia diminta untuk menjadi direktur, ia terima jabatan tersebut dengan syarat bahwa ia punya kekuasaan penuh untuk menentukan policynya, dan dijamin dengan akte notaris khusus. Kustiniyati Opcit.

ros-boros dengan uang. Mereka bergairah untuk mendekati segala rupa hal dengan pikiran-pikiran rasional dan ilmiah.

Karena itu mereka bangkit memprotes proyek miniatur yang penelitian tentang kemungkinan-kemungkinan teknis dan ekonomisnya sangat mentah. Mereka bangkit memprotes pemakaian dana-dana maha besar yang tidak diarahkan tepat pada sasaran-sasaran pembangunan ekonomi. Mereka menolak proyek-proyek kurang rasional, yang tidak sesuai dengan skala prioritas dan tidak tepat waktunya...

Akan dipatahkanakah kegairahan generasi muda hendak membangun serupa ini yang bertekad untuk menanamkan segenap daya upaya pembangunan kemakmuran rakyat dulu, sebelum menyimpang pada proyek-proyek lain yang tidak termasuk dalam daftar prioritas ? ³⁶

Proyek miniatur atau yang kini dikenal sebagai Taman Mini Indonesia Indah (TMII) adalah suatu tempat yang menampilkan maket negara Indonesia berikut khasanah budaya masing-masing daerah yang dimaksudkan untuk lebih memperkenalkan kekayaan kebudayaan nasional.

Keberadaan Taman Mini ini juga erat kaitannya sebagai obyek pariwisata di mana aspek-aspek kebudayaan daerah dipertemukan dalam lingkup nasional, dan dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada pengunjungnya betapa besar dan kaya negeri Indonesia ini.

37

Pendirian Proyek Miniatur ini ditangani oleh Yayasan Harapan Kita yang diketuai oleh Ibu Siti Hartinah, isteri Presiden Soeharto.

Dalam acara rapat pengurus Yayasan tersebut pada tanggal 13

36. "Harus Gembira Generasi Muda Gairah Membangun", Indonesia Raya 3 Januari 1972

37. Lihat Sejarah Taman Mini Indonesia Indah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1989, h.1

Maret 1970 telah dikemukakan gagasan untuk mendirikan suatu tempat rekreasi yang mampu menggambarkan kebesaran dan keindahan tanah air Indonesia dalam bentuk mini di atas sebidang tanah yang cukup luas, yang akan tercakup di dalamnya pembangunan kolam dengan pulau-pulau yang mewujudkan wilayah Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari lautan dan kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia berikut segenap Flora dan faunanya, segenap penduduk dengan berbagai suku bangsa, adat istiadat, agama dan kebudayaan daerahnya. 38

Para mahasiswa mengkritik proyek tersebut karena proyek tersebut dianggap 'mercusuar', karena menurut keterangan Ibu Tien Soeharto proyek ini memakan biaya sebesar Rp. 1,5 milyar. Sementara itu Ali Sadikin, gubernur DKI saat itu bersikukuh untuk tetap meneruskan proyek Miniatur ini walaupun ia harus menerima protes dari mahasiswa saat itu. Bang Ali berpendapat:

Waktu saya berdialog dengan mereka (mahasiswa-pen.) saya terangkan, rencana pembuatan taman seperti itu sudah lama ada dalam master plan Jakarta. Itu sudah merupakan amanat rakyat... Mengapa saya waktu itu kukuh membenarkan pembangunan Taman Mini ?

Dalam Master Plan DKI yang disusun sewaktu Pak Marno (gubernur DKI sebelum Ali Sadikin-pen.) jadi gubernur, sudah ada rencana untuk mendirikan satu proyek seperti Taman Mini Indonesia. Tapi waktu itu namanya Taman Bhinneka Tunggal Ika. Sebab saya anggap Proyek Taman Mini itu sudah merupakan amanat DPRD, amanat rakyat. Bagaimana pun juga saya harus bisa mewujudkannya... 39

Pernyataan setuju dari Gubernur DKI ini tertuang dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota no. 1328/A/K/BKD/

38. Ibid. h.9

39. Ramadhan KH, Bang Ali, Demi Jakarta: 1966-1977, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992, h.307-308

70 tertanggal 5 September 1970 yang memberikan ijin kepada yayasan Harapan Kita untuk membangun Proyek Miniatur Indonesia di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Namun setelah meninjau lokasi seluas 14 hektar maka dinilai tempat tersebut kurang luas sehingga Gubernur mengusulkan untuk memindahkan lokasi rencana tersebut ke daerah Pondok Gede, Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang luasnya kurang lebih 100 hektar. Untuk itu Gubernur mengeluarkan surat keputusan baru mengenai penggantian lokasi rencana tersebut dengan surat keputusan Gubernur KDKI no. 528/A/BKD/1972 pada tanggal 7 Maret 1972. 40

Rupanya protes mahasiswa terhadap proyek tersebut terus berkembang sejak tahun 1971, dan ketika masuk ke tahun 1972 protes masih berlanjut, yang mengakibatkan banyak pejabat negara yang merasa perlu mengambil tindakan tertentu sehubungan dengan protes yang bermunculan.

Indonesia Raya menuliskan laporan bahwa Soemitro, Pangkopkamtib menyebutkan bahwa perasaan tidak puas di kalangan masyarakat umumnya dan pemuda khususnya dapat disalurkan melalui forum universitas dan surat kabar. Malah ia mengeluarkan ancaman jika terjadi usaha 'pemanasan situasi sehingga timbul kondisi revolusioner', akan dibasminya. 41

Menanggapi apa yang dinyatakan Jendral Soemitro tersebut

40. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan opcit. h.10

41. "KORKAMTIB Larang Parlemen Jalanan", Indonesia Raya 18 Januari 1972.

Indonesia Raya menulis tajuk rencana 2 hari kemudian:

Setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, Kopkamtib telah mengeluarkan peraturan permainan dalam menyatakan pendapat dan pikiran di tanah air kita. Yang jelas dilawan adalah segala tindakan extra parlementer alias gerakan-gerakan di luar parlemen dan lebih dikenal dengan parlemen jalanan alias demonstrasi-demonstrasi...

Larangan ini berdasarkan pertimbangan bahwa ia mudah dapat mengganggu ketertiban umum dan mudah pula dapat ditunggangi oleh berbagai unsur yang hendak mengacaukan keadaan...

Kami mengajukan kepada setiap orang supaya bersikap bijaksana dan mencoba pula memahami, memandang persoalan dari pihak Kopkamtib yang mendahulukan pertimbangan-pertimbangan ketertiban dan keamanan dalam bertindak.

Di samping ini kami mengajak pula pihak penguasa negara kita untuk memahami pula masalah-masalah yang dihadapi golongan muda bangsa kita dan supaya pemerintah juga lebih responsif lagi terhadap apa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kita.

Demonstrasi-demonstrasi ke jalan yang ramai menentang Proyek Mini Indonesia tidak perlu terjadi seandainya pembe-sar kita cepat memberikan sambutan dan perhatian mereka pada kritik dan protes golongan muda ini.⁴²

Dalam posisi seperti yang ditunjukkan dalam tajuk tersebut Indonesia Raya mengambil posisi 'bijak', di satu sisi ia tidak menyalahkan rencana proyek tersebut, namun di sisi lain juga tetap memberikan dukungan terhadap protes yang dikemukakan oleh mahasiswa, dan dukungan koran ini terhadap kaum muda terlihat jela untuk isu-isu lainnya seperti yang akan terlihat pada bagian lain.

Ketika salah satu tokoh penggerak mahasiswa saat itu, Arief

42. "Aturan Main", Indonesia Raya 20 Januari 1972.

Budiman, ⁴³ ditahan berkaitan dengan protes tersebut maka koran ini memuat tulisan bernada membela Arief. Salahsatunya adalah Goenawan Mohamad ⁴⁴, dan ketika Arief dan juga orang seperti Princen, ⁴⁵ dikait-kaitkan dengan masalah rasial 'Cina' dan 'Belanda', maka Indonesia Raya pun membelanya dalam sebuah tajuk rencana. ⁴⁶

Pemberitaan Tentang Korupsi dan Manipulasi

Dalam periode kedua koran ini masih lekat dalam diri Indonesia Raya karakter yang menolak penyelewengan, korupsi atau segala bentuk penyalahgunaan jabatan. Liputan koran ini tetap tajam, dan banyak menyoroti masalah-masalah penyelewengan ini. Yang paling besar sorotannya adalah ketika PERTAMINA disinyalir koran ini mengalami ketidakberesan dalam hal pengelolaannya.

Sebuah kampanye besar dilakukan koran ini, dalam bentuk

43. Arief Budiman yang sebelumnya bernama Soe Hok Jien adalah kakak kandung dari Soe Hok Gie, yang juga aktivitis mahasiswa. Arief adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UI, sedangkan Soe Hok Gie adalah mahasiswa jurusan Sejarah, Fakultas Sastra UI. Soe Hok Gie meninggal dalam sebuah kecelakaan di gunung Semeru akhir tahun 1969. Refleksi Soe Hok Gie sebagai seorang aktivis mahasiswa dibukukan dengan judul Catatan Seorang Demonstran, Jakarta: LP3ES, 1983. Arief Budiman menuliskan salah satu kata pengantarnya dalam buku tersebut.

44. Goenawan Mohamad, "Memahami Arief Budiman" Indonesia Raya 28 Januari 1972.

45. Princen adalah seorang aktivis masalah Hak-hak Asasi Manusia, dan ia pun terlibat dalam protes terhadap Proyek Miniat-ur Indonesia ini.

46. "Jangan Rasialis", Indonesia Raya 29 Januari 1972.

laporan utama serta *headline*-nya, juga tajuk rencana dan sejumlah karikatur yang menyindir ketidakberesan dalam perusahaan minyak negara ini.

Muncul kontroversi pada surat kabar lain ketika koran ini giat mengungkapkan praktek-praktek korupsi yang terjadi di PERTAMINA, apakah saat itu Indonesia Raya sebagai sebuah surat kabar tidak sedang berpolitik ?

Nyata sekali ada perbedaan pandang dalam beberapa surat kabar lain antara menyetujui apa yang dilakukan oleh Indonesia Raya dan ada pula yang memberikan penilaian bahwa apa yang dilakukannya tidak etis.

Dhakidae menyebut apa yang terjadi antara Pertamina dan Indonesia Raya adalah situasi dikotomis kepentingan mana yang harus dilayani surat kabar, dan di dalamnya tersangkut kepentingan ekonomi politik tertentu serta diskusi apakah surat kabar harus berpolitik atau apolitis terhadap masalah-masalah yang menyangkut pejabat pemerintah. 47

Harian Pedoman misalnya, mempertanyakan motif Indonesia Raya di balik liputannya terhadap Pertamina. Pedoman menulis "apakah hal ini merupakan bagian dari keinginan buruk di belakangnya ? Atau kita ada di tengah-tengah situasi pertarungan antara kepentingan raksaksa atau konflik kepentingan di antara kekuatan finansial yang luar biasa besar ?" 48

47. Dhakidae opcit. h.184-185

48. Ibid. h.185 mengutip dari Pedoman 24 Desember 1969. kutipan diterjemahkan bebas oleh penulis.

Sementara itu Kompas menunjukkan sikapnya yang ragu-ragu antara simpati kepada Indonesia Raya namun juga mempertanyakan siapakah yang sebenarnya memiliki wewenang untuk menyelidiki masalah korupsi dan siapa yang berhak melakukan kampanye menentang korupsi. Kompas menulis:

"ada beberapa posisi yang diambil berkaitan dengan perjuangan Indonesia Raya. Ada perasaan untuk mendukung dan berharap bahwa usaha untuk memberantas korupsi akan berhasil.

Inilah sikap untuk mengerti penyelidikan besar-besaran dari Indonesia Raya...⁴⁹

Namun di bagian lain dikatakan oleh Daniel Dhakidae bahwa Kompas sadar akan perubahan ekonomi politik Indonesia saat itu dan ia pun mengerti di mana surat kabar harus meletakkan dirinya dalam perubahan lingkungan dan era "penguatan dan sentralisasi oleh militer" dan perkembangan kekuatan ekonomi negara.⁵⁰

Selain Pertamina, BULOG juga mendapat sorotan tajam oleh Indonesia Raya berkaitan dengan ketidakberesan penanganan beras oleh badan tersebut, terutama kepemimpinan Jendral Tirtosudiro, sampai akhirnya dia diganti oleh Bustanil Arifin.

Kolom yang diberi nama *Komentar Dalam Negeri Sepekan* yang ditulis oleh Enggak Bahau'ddin mengemukakan komentarnya tentang mismanagement di BULOG:

49. Ibid. mengutip Kompas 27 Desember 69, diterjemahkan bebas oleh penulis dari kutipan Daniel Dhakidae.

50. Ibid. h.188. Istilah yang diterjemahkan di sini, seperti yang dipakai Dhakidae mengutip Richard Robison, "entrenchment and centralization of authoritarian rule by the military" Lihat Indonesia, The Rise of Capital, Canberra: Asian Studies Association of Australia, 1986, h.105

Pemerintah Orde Baru sekarang rupanya tidaklah seperti yang kita cita-citakan setelah kita bersama-sama menumbangkan rezim Soekarno/Orla/PKI tahun 66 dulu. Cara-cara Orla mungkin secara tidak sadar telah diambil alih oleh pihak penguasa sekarang ini, mengutip tulisan-tulisan pembaca IR sehubungan dengan kampanye kebobrokan BULOG yang tahun-tahun sebelumnya juga pernah disorot namun dari yang bersangkutan tidak ada reaksi apapun...⁵¹

Menyambung tulisan tersebut, beberapa hari kemudian koran ini juga meneruskan kecamannya terhadap Bulog. Ditulisnya:

Kami menganjurkan bahwa jika ada orang mau memanipulasi suatu barang dagangan untuk mengorek keuntungan besar, maka carilah hal-hal lain dan jangan pakai beras dan bahan-bahan pokok kehidupan rakyat. Mainlah dengan barang-barang lux, mobil, kain sutera halus, perumahan dan entah apa lagi.

Tetapi jangan memakai beras dan bahan-bahan pokok penghidupan rakyat untuk mengejar keuntungan dan memperkaya diri. Rasanya terlalu tidak bermoral dan melanggar nilai-nilai budaya yang baik.⁵²

Koran ini juga mempertanyakan kemana larinya dana Bulog jika 6 bulan sebelumnya hanya berhasil membeli 150 ribu ton beras, sementara seharusnya dilakukan penyimpanan sejumlah 450 ribu ton. Dan dua hari kemudian baru muncul pernyataan dari Ketua team operasi pasar Bulog, yang mengakui Bulog belum berhasil menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai stabilisator harga. Pejabat tersebut juga mengakui bahwa ada penyimpangan di dalam tubuh lembaga tersebut, "karena tidak semuanya (pejabat Bulog-pen.) bersih".⁵³

Di sepanjang akhir tahun 1972 banyak dilaporkan suasana

51. Indonesia Raya 19 Oktober 72.

52. "Kalau Mau Kaya Jangan dari Beras", tajuk rencana Indonesia Raya 25 Oktober 1972.

53. "Kelemahan-kelemahan Bulog diakui", Indonesia Raya 4 November 1972.

krisis pangan di pelbagai daerah, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan juga Sumatera Barat.

Laporan yang diturunkan juga menyebutkan eksekusi yang terjadi dalam masyarakat, terutama sekali demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa untuk mendesak pemerintah agar segera melakukan penanganan serius terhadap masalah beras ini. Tingginya harga pangan di berbagai tempat, kurangnya persediaan di tempat-tempat lain, serta para cukong yang mempermainkan harga beras, adalah bagian dari eksekusi krisis pangan tersebut.

Begitu banyak muncul kelompok demonstran yang mempermasalah-kan krisis pangan ini rupanya dilihat Indonesia Raya sebagai mubasir, jika pejabat yang dikehendaki untuk berdialog justru menghindari kelompok-kelompok mahasiswa tersebut, dan dengan nada keras koran ini mengemukakan :

Dengan penuh simpatik kita ikuti berbagai kelompok pemuda dan mahasiswa mendatangi DPR dan berbagai instansi pemerintah menanyakan soal beras dan meminta harga beras agar diturunkan.

Dan sampai kini belum seorang juga pembesar yang mereka temui, yang mau berterus terang dengan mereka soal tadi itu, yakni bahwa harga beras untuk sementara waktu tidak akan dapat diturunkan ke tingkat harganya sebelum menanjak naik karena memang persediaan beras di pasar dalam negeri dan luar negeri tidak memadai lagi...

Percumalah mengirim delegasi biar seratus kali meminta harga beras diturunkan. Sebaiknyalah pemerintah memberikan penjelasan yang penuh pada pemuda-pemuda ini dan pada rakyat umum mengenai situasi beras agar jangan banyak orang menda-pat keterangan yang saling simpang siur mengenai apa sebe-narnya yang terjadi dengan beras ini. ⁵⁴

Kemelut pangan ini akhirnya juga langsung ditangani oleh

54. "Buat apa Delegasi-delegasian ?" tajuk rencana Indonesia Raya 5 Desember 1972.

Presiden, kabinet, dan juga dewan stabilisasi ekonomi. Dan akhirnya pada pertengahan tahun 1973 secara diam-diam terjadi pergantian kepengurusan Bulog, Achmad Tirtosudiro digantikan oleh Bustanil Arifin.

Koran ini menjadikan berita tersebut sebagai headline dan mengulasnya dalam tajuk rencana beberapa hari kemudian. 55

Di luar dua perusahaan besar di atas, Pertamina dan Bulog, sejumlah praktek manipulasi serta korupsi menjadi kritikan tajam koran ini, tanpa pandang bulu siapa pelakunya dan di mana pun hal tersebut berlangsung. Sebuah contoh misalnya adalah kasus penyelundupan mobil mewah yang dilakukan oleh oknum ABRI yang telah diringkus oleh BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen Negara).

Pengusutan kasus serupa sudah dilakukan pada masa Kepolisian Negara saat itu dipegang oleh Hoegeng, namun justru setelah Hoegeng membongkar penyelundupan mobil mewah, ia diganti dan harus menyerahkan jabatannya pada bulan Oktober 1971.

Indonesia Raya memuji tindakan BAKIN karena menurutnya "...alat-alat negara yang lain yang bertugas memberantas penyelundupan telah tidak berdaya sama sekali selama bertahun-tahun." 56

Dalam tajuknya yang lain, masih membahas hal penyelundupan tersebut, ditulis :

55. Indonesia Raya 2 dan 4 Juni 1973.

56. "Syukur syukur..." tajuk rencana Indonesia Raya 1 November 1972

Pengumuman tindakan-tindakan yang diambil BAKIN untuk mem-berantas komplotan penyelundupan mobil secara besar-besaran selama beberapa tahun bagi pengamat keadaan di Indonesia sebenarnya mengherankan. Mengapa baru kini diambil tindakan besar-besaran serupa ini? Orang juga masih ingat bahwa peristiwa yang digarap BAKIN kini tak lain adalah peristiwa yang sama yang hendak digarap oleh bekas Kepala Polisi RI, Hoegeng, dan tak lama kemudian ia dipensiunkan...

Kesan lain yang timbul adalah tak berdayanya pemerintah selama ini menghadapi tingkah laku oknum di dalam batang tubuh administrasi negara kita ini. Betapa telah amat menda-lamnya kebiasaan-kebiasaan mengeruk keuntungan dengan menyala-gunakan kekuasaan di dalam berbagai badan pemerintah. Karena penyelundupan mobil-mobil demikian yang dilakukan selama rangka waktu bertahun-tahun memerlukan kerjasama yang rapi antara banyak penguasa dalam berbagai rupa instansi...

Harian ini tidak bosan-bosannya...menyerukan pembersihan dalam badan alat negara. Karena suksesnya pembangunan kemakmuran rakyat bergantung banyak sekali dari terciptanya pemerintahan yang bersih di tanah air kita. Tanpa pemerintah yang bersih, segala usaha dan kemauan-kemauan baik pemimpin pemerintah yang baru akan kandas... 57

Pemberitaan tentang Pemuda dan Mahasiswa

Surat kabar ini memberikan perhatian yang besar terhadap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan pemuda, terutama aksi-aksi protes yang dilakukan sejak Pemilihan Umum tahun 1971. Saat itu mahasiswa mencetuskan adanya kelompok Golput (Golongan Putih), 58 kemudian juga protes mahasiswa terhadap proyek Minia-

57. "Mencapai Pemerintah yang Bersih", tajuk rencana Indone-sia Raya 9 November 1972.

58. Golongan Putih adalah sikap politik yang tidak memilih salah satu partai pun dalam Pemilihan Umum. Golput memang baru muncul pada Pemilu tahun 1971 ini. Sikap ini muncul karena maha-siswa merasakan ada mekanisme yang kurang fair dalam Pemilu tersebut, terutama Golkar (Golongan Karya) yang melakukan macam-macam cara untuk memenangkan Pemilu tersebut. Lihat Seri Berita dan Pendapat: Pemilihan Umum 1971, yang disusun oleh Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia, Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers, 1972, h.125-136.

tur Indonesia Indah, dan pada isu-isu lain, yang akan diperlihatkan pada bagian ini.

Tentang simpatinya yang besar kepada kelompok mahasiswa dan pemuda, Mochtar Lubis mengatakan:

Saya selalu mengatakan kepada staf saya di Indonesia Raya agar memberikan tempat buat kegiatan-kegiatan kaum muda, karena harusnya mereka ini menjadi barisan terdepan dari perubahan suatu bangsa, masyarakat atau negara. Di mana-mana jika mereka punya kesungguhan untuk bergerak yah, kami akan dukung. Saya selalu katakan kepada generasi muda, kalian ini harus yakin bahwa setiap generasi punya hak yang penuh untuk menentukan sendiri arah nasib bangsanya....⁵⁹

Pada bulan September 1973, muncul ketentuan yang mensinyalkan larangan terhadap mahasiswa atau pemuda untuk berambut gondrong. Larangan ini dikeluarkan karena pada peristiwa kerusuhan di Bandung pada tanggal 5 Agustus 1973, pelaku kerusuhan disinyalir sebagai pemuda berambut gondrong.⁶⁰ Sejak itu muncul desas-desus tentang razia rambut gondrong di Bandung walaupun hal tersebut dibantah oleh kepolisian Bandung.⁶¹

Untuk menengahi polemik tentang rambut gondrong, apalagi sudah dikait-kaitkan dengan masalah kebudayaan nasional, koran ini menurunkan tajuknya:

Kita harus menganggap hal ini sebagai suatu mode musim-musiman yang suatu waktu akan menghilang pula. Jika ada pembesar-pembesar kita yang mengidentikkan rambut gondrong

59. Wawancara dengan Mochtar Lubis, 7 Januari 1993.

60. Mengenai Peristiwa 5 Agustus 1973, lihat bagian lain pada bab ini. Bandingkan dengan Marzuki Arifin, Peristiwa 15 Januari 1974, Jakarta: Publishing House Indonesia, 1974, h.174-186.

61. Indonesia Raya, 18 Agustus 1973.

dengan segala hal yang negatif...penulis juga tidak setuju.

Sifat jahat toh bergantung mental dan watak seseorang insani...dan tidak ada hubungannya dengan rambut gondrong. Itulah sebabnya mengapa harian ini tidak begitu setuju dengan sikap pembesar kita yang kini asyik memikirkan dan mengurus soal-soal rambut gondrong. Korupsi dan penyelewengan yang masih merajalela di instansi-instansi pemerintah kita ini yang sudah begitu merugikan negara dilakukan oleh pejabat-pejabat dan petugas negara yang tidak pakai rambut gondrong.

Daripada mengurus suatu mode yang mungkin dalam waktu singkat berakhir...lebih baik mengurus penyelewengan-penyelewengan atau memikirkan suatu rencana pengawasan sehingga korupsi bisa dikurangi di masa mendatang...dan cukong-cukong yang menggaet sampai bermilyar-milyar tidak ada yang berambut gondrong. ⁶²

Namun perkembangan yang terjadi justru menunjukkan bahwa protes dari kalangan mahasiswa tentang rambut gondrong makin meningkat dan muncul opini disana-sini mengomentari larangan tersebut. Pangkoptik saat itu, Jendral Soemitro mengomentari dalam suatu kesempatan wawancara di televisi bahwa rambut gondrong menimbulkan sikap acuh tak acuh di kalangan generasi muda. Dan protes semakin mengalir, sehingga Indonesia Raya kini justru berbalik mempertanyakan mengapa perlu gondrong jika semakin menimbulkan persoalan yang sebenarnya tidak perlu, dan lebih baik mengurus hal lain yang jauh lebih penting:

Rasanya konfrontasi antara mahasiswa dan Kopkamtib mengenai soal rambut gondrong adalah konfrontasi yang tidak berguna untuk kedua belah pihak. Banyak soal-soal besar lain yang perlu kita selesaikan bersama di tanah air daripada menghabiskan energi soal rambut gondrong.

Dengan ini kami tidak hendak mengatakan bahwa kami tidak melihat adanya manfaat tidak berambut gondrong...alasan pertama adalah soal ekonomi...berarti pengeluaran yang lebih banyak untuk biaya tukang cukur, kedua jika memakai minyak rambut juga diperlukan minyak rambut yang lebih banyak...kemudian untuk mencuci rambut diperlukan

62. "Buat apa ribut-ribut soal rambut gondrong ?", tajuk rencana Indonesia Raya 11 September 1973.

bahan cuci rambut yang lebih banyak lagi. 63

Di pertengahan tahun 73, kritik mahasiswa banyak ditujukan pada masalah modal asing yang dianggap memperbesar jurang perbedaan dalam masyarakat, akibat pembangunan ekonomi yang dipilih adalah tipe pertumbuhan ekonomi yang banyak ditopang dengan modal asing, yang dianggapnya sebagai 'penjajahan model baru'.

Terlebih lagi sejak tahun 1971 modal asing yang mendominasi di Indonesia adalah modal dari negara Jepang, menggeser kedudukan modal Amerika Serikat. Modal Jepang di Indonesia rupanya tidak terlalu disukai, disebabkan oleh perilaku modal yang demikian ekspansif, dan cenderung mengabaikan kehidupan masyarakat di mana modal tersebut ditanam. Dengan demikian akses modal Jepang tersebut yang menjadi sasaran dari protes mahasiswa saat itu.

Mulai sejak itu sejumlah delegasi mahasiswa silih berganti mengadakan protes, dengan mendatangi DPR, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kedutaan besar Jepang, Bappenas, dan juga perusahaan besar Jepang di Indonesia, Toyota dan Sanyo.

Diberitakan pula mahasiswa UI yang dengan kelompok GDUI-nya (Group Diskusi Universitas Indonesia) mengadakan kuliah tamu yang dibawakan oleh Drs. Dorodjatun Kuntjorojakti, yang menerangkan perkembangan dan pergeseran ekonomi internasional yang sedang berlangsung amat mengkhawatirkan. Dikatakan Dorodjatun bahwa modal asing khususnya Jepang merupakan bahaya dalam pola konsumsi

63. "Mengapa lebih baik tidak gendrong?", tajuk rencana Indonesia Raya 16 Oktober 1973

barang mewah di dalam negeri, dan untuk itu ketua jurusan FE UI ini mengusulkan pembagian pendapatan di atas golongan-golongan, juga di antara daerah-daerah dan antar generasi. 64

Kegiatan mahasiswa terus berlanjut ketika menyambut kedatangan Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda, sekaligus ketua IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia) Jan Pieter Pronk, pada bulan November 1973. Pronk diundang untuk berdiskusi dengan mahasiswa yang tergabung dengan GMII (Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk Indonesia) dan menyerahkan memorandum yang isinya mengungkapkan kekhawatiran pertumbuhan ekonomi Indonesia yang nantinya akan sangat bergantung pada modal asing, padahal seharusnya modal asing hanyalah faktor pelengkap saja. Kekhawatiran lain adalah berkaitan dengan kondisi pengusaha pribumi yang perlu diberi kesempatan bertumbuh yang lebih banyak, serta kesempatan kerja dan perbaikan pendidikan. 65

Komentar Dalam Negeri Sepekan mengomentari perlunya dialog seperti yang dilakukan oleh Kopkamtib Jendral Soemitro untuk menjembatani pemikiran antara para pejabat dengan kalangan mahasiswa, khususnya berkaitan dengan perkembangan terakhir menyangkut masalah korupsi, penanaman modal asing, masalah cukong, dan rambut gondrong. 66

Ungkapan keprihatinan mahasiswa saat itu tercetus dalam

64. Indonesia Raya, 8 November 1973.

65. Indonesia Raya, 12 November 1973.

66. "Dialog Terbuka Pangkoptib dengan para mahasiswa sangat bermanfaat", *Komentar Dalam Negeri Sepekan*, Indonesia Raya 12 November 1973.

bentuk Petisi 24 Oktober 1973 dan dikeluarkan oleh Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, yang isinya :

PETISI 24 OKTOBER 1973

Kami pemuda-pemudi Indonesia - milik dan pemilik Nusa Bangsa tercinta - dari tempat berbaringnya kusuma-kusuma bangsa yang telah memberikan milik mereka yang paling berharga bagi kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia, menyatakan kecemasan kami atas kecenderungan keadaan kini yang menjurus pada keadaan yang makin jauh dari apa yang menjadi harapan dan cita-cita seluruh bangsa.

Bahwa dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab di hari depan - yang keadaannya akan sangat ditentukan oleh masa kini di mana kami sebagian daripadanya - merasa berkewajiban untuk mengingatkan pemerintah, militer, intelektual / teknokrat, politisi untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Meninjau kembali strategi pembangunan dan menyusun satu strategi yang di dalamnya terdapat keseimbangan di bidang-bidang sosial, politik dan ekonomi yang anti kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan.
2. Segera bebaskan rakyat dari cekaman, ketidakpastian dan pemerkosaan hukum, merajalelanya korupsi dan penyelewengan kekuasaan, kenaikan harga dan pengangguran.
3. Lembaga-lembaga penyalur pendapat rakyat harus kuat dan berfungsi serta pendapat masyarakat harus mendapat kesempatan dan tempat yang seluas-luasnya.
4. Yang paling berkepentingan akan masa depan adalah kami, oleh karena itu penentuan masa depan - yang tak terlepas dari keadaan masa kini - adalah juga hak dan kewajiban kami.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. ⁶⁷

Beberapa hari kemudian menanggapi kekhawatiran mahasiswa dan pemuda terhadap kondisi tersebut Indonesia Raya menunjukkan simpatinya kepada generasi muda. Pelita pertama yang sudah hampir habis namun target tidak begitu berhasil dan mencapai sasaran yang diinginkan. Target produksi pangan misalnya, tidak tercapai dan inflasi rupiah makin memberatkan rakyat, sementara pinjaman luar negeri tidak dapat membendung inflasi dan hasil ekspor

67. Dikutip dari teks aslinya.

dinilai tidak dapat dirasakan oleh masyarakat luas :

Kita tidak usah heran jika generasi muda jadi mendongkol terhadap gejala ini dan misalnya, melakukan demonstrasi ketika menyambut ketua IGGI JP Pronk... Sikap mahasiswa ini dapat dimengerti karena pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah sekarang generasi yang akan datanglah yang harus membayar kembali...

Kita harapkan saja pemerintah akan memperhatikan suara mereka yang keluar dari hati nurani yang bersih, karena mereka ingin melihat semua yang berjalan baik di dalam Republik Indonesia ini, tidak ada korupsi, tidak ada penyelewengan dan usaha untuk memperkaya hanya sekelompok kecil ...

Mereka sudah bosan dengan slogan-slogan "pahlawan pembangunan", "nasib rakyat kecil dan golongan lemah akan diperhatikan" dsb dsb, karena semua itu dianggap oleh generasi muda sekarang hanya hiasan bibir yang tidak punya arti apa-apa. ⁶⁸

Munculnya banyak kelompok mahasiswa dan pemuda saat itu menunjukkan perhatian kaum muda saat itu pada permasalahan ekebi-jakan ekonomi Indonesia beserta aksesnya, di samping juga meng-kritik aktor-aktor politik dan ekonomi yang dominan saat itu. Tokoh Asisten Pribadi Presiden (Aspri) bidang Ekonomi dan Operasi khusus, yaitu Soedjono Hoemardani dan Letjen Ali Moertopo, menja-di bulan-bulanan mahasiswa dalam demonstrasi yang dilakukannya. ⁶⁹

Di mata mahasiswa kedudukan Aspri dinilai melangkahi men-teri-menteri dalam kabinet, dan mahasiswa mencurigai bahwa Ali Moertopo punya ambisi tertentu untuk menjadi presiden. Inilah latar belakang yang oleh banyak pengamat dinilai sebagai rivali-

68. "Pengawasan Sosial dari generasi muda", tajuk rencana Indonesia Raya 13 November 1973

69. Mengenai munculnya Aspri di awal Orde Baru, bisa melihat pada Harold Crouch (1978) *Opcit.* h.243-244.

tas antara kelompok Ali Moertopo dengan kelompok Jendral Soemitro. 70

Jendral Soemitro sendiri oleh mahasiswa dianggap sebagai angin segar dalam kondisi politik tahun 70-an itu. Mahasiswa juga terkesan dengan safari kampus yang dilakukan oleh Soemitro sejak akhir tahun 1973. Pangkopkamtib ini populer di kalangan mahasiswa karena dialah yang melontarkan konsepsi tentang *two way traffic* atau komunikasi dua arah, dan gagasannya tentang pola kepemimpinan nasional yang baru. 71 Gagasan terakhir ini sering disalahartikan mahasiswa sebagai tokoh pemimpin nasional yang baru, dan dari situ muncul anggapan bahwa Soemitro pun mempunyai ambisi untuk menjadi presiden. 72

Pengelompokan mahasiswa dan pemuda sebenarnya dapat dipilah dalam dua bagian, seperti yang dikelompokkan oleh Heru Cahyono dalam kelompok kampus dan non-kampus. 73

Kelompok kampus berasal dari kalangan mahasiswa, sementara kelompok non-kampus dari luar mahasiswa, dan terakhir ini banyak yang merupakan eksponen angkatan 1966, terutama dari kalang-

70. Lihat Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia, Ithaca: Cornell University Press, 1978, dan juga Crouch, The 15 th Januari Affair in Indonesia, Dyason House Papers, 1974.

71. Indonesia Raya, 16 November 1973.

72. Dalam wawancara dengan Harry Tjan Silalahi, salah seorang direktur CSIS (Centre for Strategic and International Studies), yang dekat dengan Ali Moertopo, mengakui dugaan tersebut. Wawancara tanggal 11 Maret 1993.

73. Heru Cahyono, Peranan Ulama dalam Golkar 1971-1980: Dari Pemilu sampai Malari, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992, h.148-153.

Pemberitaan Tentang Keadaan Politik Nasional

Kritik-kritik Indonesia Raya juga ditujukan pada praktek-praktek kehidupan politik nasional saat itu.

Pemilihan Umum tahun 1971, yang merupakan Pemilihan Umum kedua dalam sejarah bangsa Indonesia, dan Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru, menunjukkan bagaimana pergeseran sikap yang terjadi dalam diri koran ini, terutama yang merupakan pendapat pribadi Mochtar Lubis.

Awalnya koran ini memberikan dukungan penuh terhadap Golkar yang diharapkan dapat memenuhi janjinya untuk membawakan aspirasi masyarakat kebanyakan, sehingga dengan demikian munculnya kelompok Golongan Putih (Golput) dikecam oleh Mochtar Lubis. Tetapi ketika koran ini mengetahui adanya praktek-praktek tidak wajar dalam kemenangan Golkar maka sikap koran ini pun berubah dan untuk Mochtar Lubis sendiri hal ini merupakan 'akhir dari bulan madunya dengan Orde Baru'. 75

Asisten Pribadi (Aspri) Presiden juga tak urung disoroti oleh Indonesia Raya. Secara umum dikatakan Mochtar Lubis bahwa

74. Ibid. Keterangan ini pun ditambahkan oleh Mochtar Lubis dalam wawancara tanggal 7 Januari 1993.

75. Lihat Hill (1988) h.158-162 dan juga David T. Hill, *Press Challenges, Government Responses: The Campaigns in 'Indonesia Raya'* dalam Paul Tickell ed. The Indonesian Press: Its Past, Its People, Its Problems Annual Indonesian Lecture Series no. 12, Monash University, 1987 h.28.

asisten pribadi memang diperlukan oleh Presiden saat itu, namun perkembangannya menunjukkan bahwa Aspri lebih banyak berbuat untuk kepentingan dirinya sendiri dan melakukan tindakan yang melewati wewenang menteri yang ada. 76

Salah satu cerminan pendapat di atas bisa dilihat dalam sebuah tajuk rencana yang ditulis Indonesia Raya :

Sejak lahirnya Orde Baru, kedudukan Aspri Presiden tetap menjadi buah pembicaraan dan bahan diskusi dalam masyarakat, baik di kalangan DPR, kalangan sarjana, mahasiswa dsb.

Ini disebabkan karena sungguhpun kedudukan ini inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuasaan eksekutif, tapi dalam prakteknya mempunyai kekuasaan yang cukup besar dan pernah menimbulkan satu super-kabinet.

Tapi lama kelamaan kesan ini hilang juga, tetapi di daerah-daerah misalnya sampai sekarang lembaga Aspri ini masih dapat menimbulkan kesan adanya dualisme dalam pemerintahan pusat. Sebagai yang terjadi di Kalimantan Timur pekan lalu, Aspri Presiden Soedjono Humardani memberikan ceramah mengenai soal ekonomi. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ceramahnya ini akan relevan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekuin yang biasanya diberikan oleh menteri/teknokrat kita yang umumnya mempunyai kesatuan bahasa dalam bidang ini.

Sebab jika ceramah seorang Aspri tidak sinkron dengan kebijakan yang dijalankan teknokrat kita, maka orang-orang di daerah akan sulit melaksanakan instruksi dari pusat, apalagi yang menyangkut kebijakan mengenai bantuan yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha golongan ekonomi lemah atau pribumi.

Bantuan terhadap mereka harus bersifat konsepsional dan terencana, bukan bersifat tambal sulam.

Bantuan itu harus riil dan menyeluruh, dan bukan hanya sebagai *lip service* (hiasan bibir) untuk mengenakan para pendengar yang termasuk golongan pribumi. Semoga Aspri presiden Soedjono Humardani dapat mewujudkan ini di masa datang, sehingga pengusaha-pengusaha golongan pribumi tidak lagi merasa dianaktirikan seperti sekarang. 77

76. Wawancara dengan Mochtar Lubis 7 Januari 1993.

77. "Bukan bersifat tambal sulam", tajuk rencana Indonesia Raya 18 September 1973

Pada bulan Agustus 1973 dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat dibahaslah Rancangan Undang-undang Perkawinan. Pembahasan terhadap RUUP ini menjadi demikian hangat pada masa itu karena menyangkut isu yang cukup krusial; mengenai pemahaman antar agama terhadap masalah perkawinan.

Kelompok agama Islam menolak RUUP tersebut karena dianggap banyak bertentangan dengan ajaran agama mereka. Persoalan pembahasan ini menjadi makin panas sampai akhirnya gedung DPR diserbu oleh sekelompok mahasiswa Islam yang merasa tidak puas dengan pembahasan RUU tersebut. 78

Indonesia Raya pun memberikan perhatian besar dalam pemberitaan seputar pembahasan RUU Perkawinan ini. Saat itu banyak pula opini masyarakat yang menyoroti RUU tersebut dimuat harian ini, termasuk di antaranya adalah Syafruddin Prawiranegara, bekas tokoh Masjumi. Dengan hati-hati Indonesia Raya menulis tajuknya

...Kini sudah ada sebuah RUU Perkawinan yang disiapkan pemerintah buat dibicarakan di DPR, tapi dalam pers sebelum sampai diperbincangkan oleh DPR telah timbul semacam 'perang dingin' pro kontra RUU Pemerintah itu...

Setelah mendengar pendapat beberapa pemuka islam dalam pers maka kami berpendapat sebaiknya RUU ditarik kembali oleh pemerintah dan pembicaraan mengenai masalah ini diundurkan sampai suasana agak tenang kembali... Kita harus akui bahwa masalah perkawinan sangat peka di kalangan masyarakat kita, sehingga memerlukan pekerjaan yang tekun dan teliti

78. tentang RUU Perkawinan pembahasan dan ekksesnya lihat TEMPO 18 Agustus, 8 September, 22 September, 6 Oktober dan 13 Oktober 1973

untuk menyiapkan RUU ini... 79

Sidang Umum MPR yang berlangsung pada bulan Maret tahun 1973 melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden, berikut penetapan susunan kabinet Pelita II. Indonesia Raya menulis dalam tajuknya sehubungan dengan masalah pemilihan presiden dan wakil presiden :

Yang menjadi pertanyaan kini di kalangan masyarakat ramai ialah apakah SU MPR hasil Pemilu yang sedang berjalan ini ada membuat peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan mengenai berapa kali seorang warga negara Indonesia berturut-turut boleh menduduki kursi presiden Republik Indonesia...

Jika soal ini tidak ditegaskan dalam sebuah peraturan atau Tap MPR maka kita takut satu waktu kita akan menjurus pada praktek lama di zaman Orla yang dahulu pernah kita tentang yaitu "soal pengangkatan presiden seumur hidup".

Di dalam negara demokrasi pengangkatan semacam ini akan merugikan rakyat karena bagaimanapun juga rakyat suatu waktu menginginkan perubahan dalam pemerintahan, ingin adanya udara segar bertiup pada pimpinan negara sungguhpun suatu perubahan belum tentu akan membawa perbaikan atau kemajuan... 80

Yang menarik adalah pada susunan kabinet baru yang diumumkan pada Sidang Umum tersebut, Menteri Penerangan Boediarjo, dalam kabinet baru namanya tidak tercantum lagi. Bisa jadi terdorong oleh rasa hutang budi kepada Boediarjo, karena dialah yang memberikan ijin terbit untuk Indonesia Raya pada periode kedua

79. "RUU Perkawinan", tajuk rencana Indonesia Raya 23 Agustus 1973

80. "Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden", tajuk rencana Indonesia Raya 20 Maret 1973. Pertanyaan kritis ini termasuk sangat dini dikemukakan koran ini, suatu persoalan yang hingga 20 tahun kemudian pun tetap menjadi polemik.

ini, ⁸¹ maka koran ini pun menurunkan tajuk khusus yang ditujukan kepada Boediarjo.

Indonesia Raya mengakui bahwa Boediarjo sering dikritiknya sewaktu menjadi Menteri Penerangan, juga ketika terjadi perpecahan dalam tubuh PWI pada konggres di Palembang ⁸² tetapi Indonesia Raya tetap mengingat Menteri Boediarjo banyak jasanya untuk koran-koran seperti dirinya, juga Abadi, dan lain-lain pada masa awal Orde Baru yang kesulitan mendapat ijin terbit kembali. Koran ini lebih jauh menulis :

sebagai Menpen dia tak pernah melakukan penekanan langsung atau tak langsung terhadap kebebasan menyatakan pendapat dan pikiran dalam pers...

Juga harus kita catat bahwa Boediarjo sebagai Menteri Penerangan amat hemat memakai wewenang untuk mencabut SIT. Malahan menghadapi penerbitan-penerbitan porno dia bersikap amat hati-hati dalam menggunakan wewenang mencabut ijin terbit.... ⁸³

Pemberitaan tentang Kesenjangan Sosial dan Strategi

Pembangunan Ekonomi

Konsern koran ini sudah jelas; memberikan perhatian terhadap kepentingan umum, kepentingan rakyat, kepentingan si kecil dalam masyarakat serta menegakkan hukum, hak asasi, kemuliaan, martabat

81. Lihat catatan kaki no.1 pada bab ini.

82. Mengenai hal ini lihat pada , Soebagijo IN, Abdurachman S., P. Swantoro, Lintasan Sejarah PWI Jakarta: PWI Pusat dan Departemen Penerangan, 1977 h.39-41, juga lihat pada Rosihan Anwar, Menulis dalam Air: Sebuah Otobiografi, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983, h.249-255.

83. "Penghargaan pada Boediarjo", tajuk rencana Indonesia Raya 30 Maret 1973

strategi pembangunan macam apa yang dibayangkan oleh para pengasuh surat kabar ini.

Pembangunan ekonomi Orde Baru, yang saat itu baru masuk pada tahun-tahun awalnya memang banyak mengundang kritik. Lalu dalam posisi koran ini sendiri, apakah kritik yang disampaikan cukup proporsional dalam perjalanan sejarah suatu bangsa yang sedang membangun, ataukah dalam kepentingan yang mana terjadi perbedaan kepentingan antara pengelola surat kabar dan pemegang pemerintahan saat itu. Hal tersebut kiranya akan didiskusikan pada bagian lain tulisan ini.

Yang jelas pengasuh surat kabar ini menunjukkan pilihan pembangunan ekonomi macam apa yang diyakini mereka. Pandangan ini bisa dilihat dalam salah satu tajuk rencana Indonesia Raya. Disebutkan bahwa ada 2 aliran pemikiran tentang perkembangan ekonomi Indonesia :

Satu, ahli ekonomi yang belajar di Amerika Serikat. Mereka menganjurkan pemakaian teknologi yang capital intensif yang paling modern berdasarkan perhitungan economics of scale. Dalil yang mereka ajukan adalah bahwa industri-industri serupa ini, meskipun tidak akan menghirup banyak tenaga buruh tetapi akan dapat mendorong kemajuan ekonomi yang cepat akibat daya produksinya yang besar dan juga dapat bersaing dengan industri-industri internasional.

Ada kelompok-kelompok ahli ekonomi lain yang ingin mengembangkan yang labor intensif, tanpa meninggalkan mesin-mesin sama sekali karena akan meringankan beban penderitaan rakyat akibat pengangguran yang luas...⁸⁴

Dalam pilihan di atas, Indonesia Raya lebih memilih perkembangan ekonomi tipe kedua karena dikatakannya, lebih tepat

84. "Strategi Pembangunan", tajuk rencana Indonesia Raya 27 September 1972

rakyat akibat pengangguran yang luas... 84

Dalam pilihan di atas, Indonesia Raya memilih perkembangan ekonomi tipe kedua karena dikatakannya; lebih tepat untuk strategi perkembangan ekonomi kita, karena ia lebih mengabdikan pada kehidupan dan nasib manusia Indonesia. Alasannya adalah, karena banyak sumber-sumber negara kita belum dipergunakan intensif, termasuk tenaga kerjanya. 85

Pada bagian lain koran ini pun menunjukkan kecaman pedasnya terhadap kelompok teknokrat, khususnya kelompok Widjojo Nitisastro dan kelompok Bappenasnya. Kebijakan perkembangan ekonomi yang disusun ekonom lulusan Amerika ini dikritik karena membawa situasi *free market forces* dan membawa Indonesia menjadi kapitalis. Indonesia Raya mengontraskan hal ini dengan kehidupan dalam negeri di mana golongan ekonomi kuat mendominasi kehidupan ekonomi Indonesia dan di lain pihak pengusaha pribumi terdesak karenanya. Koran ini menulis dalam tajuknya :

Kaum teknokrat yang menyusun rencana pembangunan ekonomi negara kita patut merubah sikap mereka yang keluar seakan memberi gambaran maha tahu sendiri, maha pintar sendiri, tidak pernah berbuat salah, padahal jika mau mudah sekali menyusun daftar kesalahan-kesalahan dan tindakan sembrono yang mereka lakukan dan banyak menimbulkan kerugian bagi bangsa kita selama ini (Bimas, Penanaman Modal Asing, BUUD, Korupsi...)

Kesalahan pokok yang dilakukan oleh teknokrat Berkeley itu tentu saja rencana pembangunan ekonomi mereka yang menjuruskan masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun tambah bergantung dengan modal asing dan penanaman modal asing membuka peluang bagi perkembangan suatu kelompok karena

84. Ibid.

85. "Strategi Pembangunan", tajuk rencana Indonesia Raya 27 September 1972.

modal asing dan turunan asing di dalam negeri.

Mereka telah gagal mendorong mobilisasi kekuatan-kekuatan rakyat Indonesia dengan cara yang paling efisien, mereka telah gagal memobilisasi dana-dana dalam negeri sebaik mungkin, mereka akhirnya berbuat seperti orang politik biasa bersedia berbuat apa saja untuk menyelamatkan kedudukan kursi menteri mereka.

Mereka akhirnya membuktikan mereka bukan pemimpin rakyat, tetapi tetap tidak lebih dari tukang saja. ⁸⁶

Secara pribadi Mochtar Lubis, pemimpin redaksi Indonesia Raya, mengemukakan bahwa dahulu orang seperti Emil Salim, Widjojo Nitisastro sering berkumpul dengannya, bersama-sama dengan mahasiswa UI pada awal kelahiran Orde Baru.

Lalu kemudian mereka masuk kabinet dan Bappenas, kita selalu mendorong mereka masuk saja bila betul-betul mau bertanggungjawab, tapi kemudian saya kecewa dengan mereka ini, karena mereka tidak punya kekuatan politik yang cukup besar untuk menjaga pembangunan ekonomi ini lebih adil, merata, dan pada akhirnya mereka cuma menjadi kacung saja... ⁸⁷

Dua tipe pemikiran ekonomi yang ada saat itu, terwakili dalam dua lembaga besar saat itu, Bappenas dan CSIS, ⁸⁸ Mochtar Lubis mengaku akhirnya ia tidak suka pada keduanya :

...karena dengan teman-teman di Bappenas terlalu banyak terjadi penyelewengan dalam pembangunan tetapi mereka diam saja, banyak korupsi terjadi. Mereka diam saja itu saya tidak setuju. Dengan Tanah Abang (istilah ini dikenal oleh umum untuk sekedar membedakan letak lokasi kedua lembaga ini, Bappenas berlokasi di depan Taman Suropati, sedang CSIS berlokasi di jalan Tanah Abang III-penulis) juga saya

86. "Indonesia untuk Indonesia", tajuk rencana Indonesia Raya 20 November 1973.

87. Wawancara dengan Mochtar Lubis, 7 Januari 1993.

88. Tentang garis besar policy kedua lembaga ini berkaitan dengan pemikiran ekonomi Indonesia, lihat pada Richard Robison, The Rise of Capital, Sydney: ASAA-Allen and Unwin, 1986, khususnya Chapter V "The State, International Capitalism and Economic Nationalism: 1965-1975" h.131-175. Pembahasan tersebut bisa dilihat dalam bab IV tulisan ini.

tidak setuju karena kelihatannya lebih banyak mengutamakan kekuasaan politik daripada masalah ekonomi mendasar dari rakyat kita. Lalu kami mengkritik keduanya... 89

Apa yang tampil dalam tajuk di bawah ini bisa dipakai untuk melihat pemahaman pengasuh surat kabar ini dengan masalah strategi pembangunan di pada awal tahun 70-an :

Pemerintah dan rakyat Indonesia sudah sama-sama menyatakan tekad untuk melakukan apa yang kini populer disebut "akselerasi modernisasi". Mengapa kita harus memakai kata akselerasi dan tidak mempergunakan kata Indonesia "mempercepat modernisasi" tentulah karena kesukaan kita dengan istilah-istilah manis.

Mempercepat modernisasi mengandung arti dan akibat yang amat besar dalam perkembangan pemikiran jiwa manusia Indonesia juga akan membawa perubahan-perubahan besar dalam susunan perekonomian, dan dalam struktur perpolitikan kita.

Semua ini mau tidak mau akan menimbulkan berbagai rupa ketegangan dan kejutan yang populer dikenal sebagai "cultural shocks".

Reaksi-reaksi terhadap proyek mini, aksi terhadap SPP, ketegangan mengenai daerah bebas becak di kalangan tukang becak dan kelompok masyarakat yang merasa bahwa becak masih merupakan alat transportasi yang murah yang dapat mereka pakai. Semua adalah bagian dari kejutan perubahan yang sedang terjadi dalam masyarakat kita.

Dengan ditingkatkannya proses modernisasi oleh pemerintah maka kita dapat menujumkan akan terjadi kejutan-kejutan yang lebih banyak dan lebih kuat di masa depan. Perpindahan jumlah besar rakyat dari penghidupan pertanian ke dunia industri mengandung perubahan sikap, jiwa, kebiasaan yang besar dan yang menimbulkan ketegangan akibat dislokasi nilai-nilai lama.

Masalah-masalah besar yang ditimbulkan proses urbanisasi dan industrialisasi di atas pola penghidupan tradisional dalam satu masyarakat yang lagi berkembang juga mengandung proses perubahan yang perih.

Setiap jerit keperihan yang diteriakkan oleh berbagai kelompok masyarakat menghadapi perubahan yang ditimbulkan akibat proses modernisasi janganlah dengan mudah kita cap sebagai digerakkan atau ditunggangi oleh dalang-dalang politik tertentu. Lebih bijaksana untuk menelitinya secara sosiologis dan kebudayaan dan psikologi kemasyarakatan.

Tidak semua kejutan yang memerihkan ini akan dapat dielakkan. Yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pemimpin masyarakat dan pers adalah ikut meringankan keperihannya dengan memberikan pengertian pada masyarakat bahwa perubah-

89. Wawancara dengan Mochtar Lubis 7 Januari 1993.

an-perubahan yang terjadi adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan dan harus diterima jika kita hendak membina masyarakat modern yang penuh dinamika di atas sendi-sendi masyarakat lama yang seakan statis selama ini.

Menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dan akan terjadi, diperlukan penelitian terus menerus yang seksama agar dapat diambil tindakan-tindakan yang tepat untuk mengatasinya, setiap kali letupan keperihan perubahan ini timbul di tengah masyarakat.

Diperlukan banyak kesabaran dan kebijaksanaan seluas mungkin di kalangan pemimpin-pemimpin pemerintahan dalam menghadapi semua ini. ⁹⁰

Dari tajuk ini Indonesia Raya mau menunjukkan sinyal ekkses modernisasi dan harus diikuti dengan strategi tertentu untuk mengurangi dampak sosial-psikologis masyarakat. Di situ pun jelas koran ini memintakan perhatian pemerintah untuk tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas, terutama masyarakat miskin yang seringkali menjadi korban dari suatu kemajuan jaman.

Perhatian besar koran ini juga ditujukan atas nasib pengusaha pribumi yang dirasa kurang mendapat tempat layak dalam perekonomian Indonesia. Banyak fasilitas disediakan hanya untuk sekelompok kecil saja, dan antara lain juga disebabkan karena masuknya modal asing ke Indonesia. Indonesia Raya menyebutkan tanggung jawab pemerintahlah untuk lebih mengembangkan kemampuan pengusaha pribumi. Simak tajuk rencana di bawah ini:

Perlu sangat kiranya pemerintah lebih memperhatikan keluhan pengusaha-pengusaha pribumi yang semakin sering diucapkan belakangan ini. Mereka amat sangat merasa terdesak oleh banjirnya modal-modal asing yang bergerak di berbagai bidang kegiatan ekonomi seakan tidak ada lagi satupun bidang kegiatan ekonomi yang dilindungi untuk tempat pengusaha-pengusaha pribumi dalam mengembangkan usaha mereka.

90. "Bekerja dengan Perspektif Sejarah", tajuk rencana Indonesia Raya 25 Februari 1972.

Diakui bahwa pengusaha-pengusaha pribumi masih lemah dalam permodalan, kemahiran dan pengalaman. Jika pengusaha pribumi harus bekerja dengan pinjaman bank Dalam Negeri, maka mereka telah harus bekerja dengan uang yang berganda lebih mahal dari modal yang dikerahkan oleh pengusaha-pengusaha asing dari luar Indonesia.

...menghadapi perusahaan-perusahaan asing dengan modal-modal raksasa mereka dibantu oleh kemampuan teknologi dan keahlian pemasaran yang mereka miliki. Maka tidak mengherankan jika pengusaha-pengusaha pribumi akan kalah jika pertarungan dibiarkan secara bebas. Membiarkan pertarungan demikian adalah tidak adil terhadap pengusaha pribumi kita. Kita tidak ingin melihat perekonomian kita berkembang, tapi di dalamnya orang Indonesia hanya menjadi kuli pengusaha asing belaka... 91

Beberapa hari kemudian koran ini masih terus menyoroti masalah kesenjangan sosial lewat tajuk-tajuknya. Indonesia Raya menulis:

Berjalan-jalanlah ke daerah Senen Raya, daerah planit, sepanjang jalan Kereta Api, dan daerah-daerah lain sebangsanya yang berserakan di seluruh kota Metropolitan ini dan orang dengan ngenes akan melihat rakyat jelata yang tidur bertumpukan di pinggir jalan atau yang tinggal di gubuk-gubuk buruk penuh tambalan.

Bagi segelintir kecil orang, Jakarta merupakan suatu kota yang indah yang memberikan segala kemungkinan untuk hidup senang dan penuh kemewahan. Bagi sebagian besar rakyat Jakarta merupakan suatu penghidupan yang penuh keperihan bercampur putus asa dan kegelapan hari esok.

Akan tetapi orang datang juga berduyun-duyun, berdesak-desak memenuhi kota Jakarta, menyangka di sini akan bertemu dengan kesempatan hidup baru yang akan membuka hari depan yang lebih baik. Dari sedikit yang berhasil, lebih banyak yang menemui frustrasi yang tak berobat.

Demikianlah, suatu segi dari wajah ibukota Republik ini dengan kontras-kontras sosialnya yang menyolok dan memerihkan mata. Di mana orang-orang kaya kehilangan hati nurani sosial mereka dan berlomba dengan si miskin, umpamanya dengan mencuri aliran listrik.

Di mana bandit-bandit tak berhati nurani manusia memperdagangkan obat-obat narkotika meracuni jiwa dan badan orang-orang muda.

Herankah kita kalau sesuatu waktu dalam masyarakat demikian pecah kekerasan-kekerasan antara golongan pendu-

91. "Pengusaha-pengusaha pribumi mengeluh", tajuk rencana Indonesia Raya 29 Maret 1972.

Tajuk di atas dengan tajam mengupas sisi gelap kehidupan metropolitan. Kesenjangan sosial dan ekonomi terjadi di dalamnya, dan koran ini membandingkan gaya hidup masing-masing kelas yang berbeda. Dugaan koran ini tentang gejolak sosial bukanlah omong kosong belaka, dan pada pertengahan tahun 1970-an kondisi tersebut laten menyimpan potensi konflik di dalamnya.

Pengasuh koran ini bukannya tidak mengerti kondisi dilematis yang dialami oleh para pembuat kebijakan saat itu, namun demikian koran ini dengan jelas keberpihakannya, yaitu rakyat kecil yang tertindas dan lemah.

Perlu diberikan catatan di sini, bahwa bagaimanapun juga Indonesia Raya adalah institusi media massa, bukan institusi pengambil kebijakan tertentu, sehingga konsepsi yang dilontarkan koran ini lebih mengarah pada suatu penilaian atas kebijakan yang diambil pemerintah saat itu. Koran ini merasa memiliki tugas untuk melakukan *social control* atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Sekali lagi koran ini mengajukan model pertumbuhan ekonomi tawarannya. Pada bulan Mei 1972, dalam salah satu tajuknya, saat mengulas manipulasi bensin yang terjadi saat itu, Indonesia Raya menulis :

...yang menjadi persoalan pokok adalah antara perkembangan

92. "Kepincangan sosial yang mencolok", tajuk rencana Indonesia Raya 3 April 1972.

ekonomi dan keadilan sosial, sebagian berpendapat bahwa perkembangan ekonomi harus didahulukan, baru kemudian keadilan sosial dapat dibina. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa perkembangan ekonomi jangan dilawankan dengan keadilan sosial karena dianggap sebagai satu kesatuan yang harus dikembangkan bersama-sama.

Tentu saja tidak bisa diharapkan bahwa dari sekarang kue-kue yang ada sudah harus dibagi merata, karena itu akan berarti setiap orang hanya akan mendapat sebutir pasir saja, yang tidak ada artinya bagi perkembangan ekonomi sendiri.

Yang dikehendaki adalah agar dalam proses perkembangan ekonomi jangan sampai terjadi hanya selapis kecil dari masyarakat yang mengeruk manfaat bagi diri/golongannya sedang kepentingan rakyat banyak diabaikan terus. Kita dapat menyusun langkah-langkah pertama ke arah keadilan sosial dengan mulai menyusun peraturan-peraturan tentang jaminan sosial...⁹³

Persoalan lain yang sempat mencuat ke permukaan dan menarik perhatian koran ini ketika bulan Agustus 1972 muncul pelarangan praktek LBH (Lembaga Bantuan Hukum)⁹⁴ di daerah-daerah oleh Kopkamtib.

Kopkamtib menginstruksikan agar penguasa-penguasa di daerah tidak mengakui adanya LBH-LBH di daerah, dan cita-cita LBH supaya disalurkan lewat Peradin.⁹⁵

Menanggapi hal itu Indonesia Raya menulis bahwa rakyat di daerah amat membutuhkan bantuan hukum, selain karena mereka sering konflik dengan penguasa setempat, juga acap terjadi konflik antar sesama masyarakat, dan masyarakat daerah termasuk

93. "Perkembangan ekonomi dan Keadilan Sosial", tajuk rencana Indonesia Raya 18 Mei 1972.

94. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH adalah suatu lembaga swadaya masyarakat yang memberikan pertolongan kepada masyarakat di bidang bantuan hukum. LBH adalah satu dari beberapa lembaga swadaya masyarakat pelopor di Indonesia, yang mulai muncul sejak tahun 1970-an.

95. Indonesia Raya 16 Agustus 1972.

tidak mampu untuk membayar bantuan hukum yang diperlukannya. ⁹⁶

Peliputan atas Peristiwa 5 Agustus 1973 di Bandung

Awal bulan Agustus 1973 di Bandung terjadilah suatu insiden yang menjerumuskan pada kerusakan dan pengrusakan terhadap toko-toko yang dimiliki golongan keturunan Tionghoa. Kerusakan ini sendiri sering dianggap sebagai kerusakan rasial, antara golongan pribumi dan golongan keturunan Tionghoa, dan banyak pula yang menyebutkan hal ini sebagai cermin ketidakpuasan golongan pribumi yang secara ekonomi kalah dengan golongan keturunan Tionghoa. ⁹⁷

Peristiwa itu disoroti oleh Indonesia Raya, dan ditampilkan memakan dua pertiga halaman muka pada edisi tanggal 7 Agustus 1973. Sejumlah foto ditampilkan untuk menggambarkan suasana pengrusakan toko-toko yang terjadi di Bandung tersebut. ⁹⁸

96. "Rakyat daerah amat memerlukan bantuan hukum" tajuk rencana Indonesia Raya 30 Agustus 1972.

97. Harold Crouch menulis bahwa aparat keamanan saat itu terlambat datang sementara kerusakan sudah makin meluas. Ia menduga bahwa sejumlah perwira angkatan bersenjata di Bandung simpati kepada pelaku kerusakan, dan beberapa hari kemudian ada sejumlah perwira yang ditangkap, Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia, Cornell University Press, 1978, h.312. Lihat juga TEMPO 27 Oktober 1973.

Menteri Pertahanan dan Keamanan saat itu, Jendral M. Panggabean dalam kesempatan dengar pendapat di DPR mengemukakan bahwa dalang peristiwa 5 Agustus 1973 adalah sisa-sisa G 30 S PKI, dan menurutnya hal tersebut bukan merupakan cetusan ketegangan antar golongan pribumi dan non pribumi. Jawaban ini sebenarnya tidak memuaskan kalangan anggota DPR saat itu. Lihat "Yang Salah PKI", TEMPO 29 September 1973.

98. Wajah halaman pertama surat kabar Indonesia Raya pada edisi 7 Agustus 1973 saat menampilkan pemberitaan tentang Peristiwa Bandung tersebut dapat dilihat pada Atmakusumah ed. Mochtar Lubis: Wartawan Jihad, Jakarta: Harian KOMPAS, 1992, h.75.

Peristiwa itu sendiri bermula ketika seorang tukang gerobak menyerempet mobil VW yang sedang diparkir. Pemiliknya seorang keturunan Tionghoa dan temannya memukul tukang gerobak tersebut hingga pingsan. Isu yang tersebar saat itu adalah tukang gerobak tersebut meninggal, sehingga menyulut amarah massa yang kemudian merusak pertokoan, perumahan dan kendaraan.

Lima tulisan yang diturunkan Indonesia Raya berikut headline yang menyebutkan 300 orang ditangkap pada saat kerusuhan tersebut, 350 kendaraan dan 1000 rumah dan toko dirusak. Dalam rangkaian tulisan tersebut juga dimuat keterangan resmi pemerintah saat itu. Juga ditulis, keadaan ibukota yang disiagakan, agar kerusuhan tidak menjalar ke Jakarta. Dan yang paling penting sebenarnya adalah tulisan yang merupakan hasil wawancara wartawan Indonesia Raya dengan Asep Tosin, sang tukang gerobak.

Ditemui setelah siuan dari pingsannya Asep Tosin mengaku ia bersalah menyerempet mobil yang sedang parkir, namun Asep Tosin tidak mempersoalkan tentang keTionghoan pemilik mobil yang diserempetnya tadi. ⁹⁹

Dikabarkan pula bahwa kota Bandung segera dijaga oleh polisi dan militer. Kerusuhan pun sudah menjalar ke luar kota Bandung, dan Gubernur Jawa Barat, Pangdam Kodam VI Siliwangi serta Kejaksaan Tinggi segera mengadakan rapat kilat untuk menanggulangi

99. Indonesia Raya 7 Agustus 1973. Sebagai sedikit perbandingan bahwa koran seperti KOMPAS memuat berita tentang peristiwa ini hanya 1 kolom di halaman muka pada edisi hari yang sama. Menurut penuturan Atmakusumah, managing editor Indonesia Raya, korannyalah yang paling lengkap memuat liputan tentang peristiwa 5 Agustus di Bandung, jika dibandingkan dengan koran-koran lain di ibukota. Lengkap dalam pengertian Atmakusumah di sini adalah ada keterangan baik dari pemerintah, maupun juga wawancara dengan Asep Tosin tersebut. Wawancara tanggal 15 November 1992.

peristiwa tersebut.

Menteri Penerangan yang baru diangkat saat itu, Mashuri, pun segera memberikan keterangan resmi pemerintah yang menyebutkan bahwa kerusuhan tersebut dilakukan oleh para pengemudi becak dan orang-orang yang berambut gondrong. Gubernur Jawa Barat, Solihin mengaku kecolongan oleh gerilya politik PKI, pencoleng dan berandal yang mengakibatkan kerusakan jiwa, harta benda dan perasaan.

100

Pada hari itu juga Indonesia Raya menurunkan tajuknya yang memberikan ulasan terhadap terjadinya peristiwa di Bandung tersebut. Ditulisnya demikian :

...perkembangan ekonomi di masa Orba ini yang telah menimbulkan gap antara golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat memberikan peluang lagi bagi peristiwa-peristiwa baru yang tidak kita inginkan.

Harian ini sudah berkali-kali mengingatkan pemerintah agar masalah cukong dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada golongan ekonomi lemah untuk bergerak di bidang usaha dagang, industri dll. Janji-janji terlalu banyak diberikan pemerintah buat membantu mereka yang dimasukkan ke dalam golongan ekonomi lemah atau pribumi, tetapi janji-janji ini belum merupakan kenyataan.

Sementara itu pengusaha-pengusaha cukong mendapat pinjaman dari pemerintah sampai berjumlah ratusan milyar rupiah, sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan pengusaha pribumi...

Maka jika ada terjadi insiden kecil seperti yang terjadi di Bandung Minggu siang itu, maka bukanlah suatu pekerjaan yang sulit untuk menghasut rakyat. Suasananya sudah panas dan yang diperlukan hanya sebuah bara kecil buat dijadikan alat pembakar.

Kepada pemerintah kita mengharapkan agar melakukan introspeksi dan meninjau kembali apakah kebijaksanaannya yang selama ini dijalankan di bidang ekonomi cukup adil sesuai dengan Pancasila atau tidak.

Rakyat tidak memerlukan janji-janji dan yang mereka inginkan adalah uluran tangan pemerintah terhadap mereka yang disebut-sebut sebagai golongan ekonomi lemah atau

100. Indonesia Raya Ibid.

golongan pengusaha pribumi yang semenjak jaman penjajahan sampai sekarang setelah 28 tahun merdeka, nasibnya tetap dalam keadaan menyedihkan.

Jika masalah ini tidak ditangani pemerintah secepat mungkin maka kami takut, peristiwa-peristiwa atau insiden-insiden baru bisa saja timbul kembali. Apalagi kita ini sedang menghadapi krisis pangan yang sangat mudah menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial baru yang tidak diinginkan sama sekali. ¹⁰¹

Hari-hari selanjutnya pemberitaan di Indonesia Raya masih membahas tentang peristiwa Bandung tersebut. Dikabarkan pula Gubernur Solihin menaksir kerugian yang mencapai Rp. 1,1 milyar. Dan Mohamad Natsir, seorang tokoh Masjumi, dikabarkan pula dilarang untuk berbicara di Surabaya oleh Kopkamtib, dengan alasan ketakutan terjadinya peristiwa di Bandung terjadi di Surabaya, karena Surabaya pun pernah mengalami kerusuhan serupa pada 21 Oktober 1969. ¹⁰²

Harian ini juga menurunkan tulisan yang mengulas peristiwa 5 Agustus tersebut dari sisi psikologi sosial. Tulisan itu sendiri merupakan terjemahan artikel luar negeri yang diberi judul: "Mengapa Orang Suka Kekerasan?". Terjemahan tersebut dilakukan oleh wartawan berinisial AKA, yang mengungkap budaya kekerasan yang terjadi di Amerika Serikat, dan dimuat dalam dua hari koran ini, tanggal 14 dan 15 Agustus 1973.

Suatu statemen yang ditulis dalam artikel terjemahan tersebut patut untuk diperhatikan karena mengungkapkan juga peranan media massa dalam beberapa aksi kekerasan. Dikatakan bahwa,

101. "Satu Peristiwa yang Sangat Disesalkan", tajuk rencana Indonesia Raya 7 Agustus 1973.

102. Indonesia Raya 10 dan 13 Agustus 1973.

walaupun tanggung jawab sesungguhnya tidak menciptakan iklim kekerasan tapi media massa tidak dapat dibantah memberikan bahan bakar kepada api agresi tersebut, namun media massa tidak menyalakan api tersebut. 103

Tanggal 15 Agustus 1973, Indonesia Raya masih mengulas peristiwa 5 Agustus tersebut. Dalam tajuknya diusulkan untuk membentuk suatu komisi khusus untuk menyelidiki terjadinya peristiwa Bandung tersebut. Koran ini juga menanggapi larangan walikota Bandung R. Otje Djundjunan kepada warga kota untuk memperbincangkan masalah kerusuhan beberapa hari lalu menurut tafsiran masing-masing. Koresponden koran ini yang melaporkan dari Bandung juga menyebutkan larangan Laksus Kopkamtib untuk menyiarkan hasil pertemuan delegasi 5 Dewan Mahasiswa di Bandung dengan Gubernur Solihin. Dalam tajuknya hari itu ditulis :

...kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah sekarang dengan menutup-nutupi kejadian ini dan melarang masyarakat seperti yang terjadi di Bandung mempercakapkan huru hara ini... menurut hemat kami akan menimbulkan efek yang negatif, jadi sebaliknya dari yang diharapkan...

Dalam hubungan ini kami menganjurkan kepada pemerintah agar membentuk suatu komisi yang diberi tugas menyelidiki secara mendalam sebab musabab dari peristiwa sedih ini. Anggota DPR, generasi muda, golongan agama, dan angkatan 45 harus diikutsertakan dalam badan ini sehingga laporan-

103. Wartawan berinisialkan AKA tersebut ternyata adalah Atmakusumah sendiri. Menurutnya ia hanya menyadur tulisan tersebut, namun ia tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat dalam tulisan tersebut. Komentar tersebut relevan sekali mengingat dalam penutupan surat kabar ini disebutkan tuduhan bahwa "Harian Indonesia Raya dengan tulisan-tulisannya dianggap menghasut rakyat, sehingga membuka peluang yang dapat mematangkan / memperuncing situasi ke arah terjadinya kekacauan-kekacauan seperti yang terjadi pada tanggal 15 dan 16 Januari 1974". Lebih jauh lihat bab V tulisan ini.

laporan yang akan dibuat nantinya bersifat obyektif dan tidak memihak.

Dengan melakukan penyelidikan yang mendalam dengan mengikutsertakan wakil-wakil rakyat, maka pemerintah dapat menghindarkan peristiwa ini terjadi lagi di masa datang. Larangan-larangan dan pembatasan-pembatasan bukan merupakan jalan yang bijaksana ditempuh pemerintah untuk tujuan ini.

104

DH Assegaff yang saat itu masih sering menulis untuk koran ini juga menurunkan tulisan yang mempertanyakan upaya pemerintah untuk memberantas atau mencegah desas-desus. 105

Bukan dengan menutup-nutupi saluran informasi, kata Assegaff, namun justru dengan membuka saluran informasi maka efek desas-desus yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat diperkecil. Lebih jauh dikatakan bahwa pertimbangan semata-mata masalah keamanan justru memberikan efek yang buruk karena dengan demikian yang terjadi adalah penghambatan saluran informasi. 106

Koran ini juga memuat penjelasan Gubernur Jawa Barat, Solihin di depan DPRD tentang Peristiwa 5 Agustus tersebut yang berjumlah 23 halaman, dan dimuat bersambung selama 6 hari. Isinya menerangkan kronologis kejadian 5 Agustus tersebut, tindakan pengamanan yang dilakukan serta melaporkan juga kerugian-kerugian yang diderita sehubungan dengan peristiwa 5 Agustus itu. 107

104. "Harus Dibentuk Sebuah Komisi buat Menyelidiki Peristiwa Bandung", tajuk rencana Indonesia Raya 15 Agustus 1973.

105. DH Assegaff, "Sas Sus dan Peristiwa 5 Agustus di Bandung", Indonesia Raya 23 Agustus 1973.

106. Ibid.

107. Dimuat dalam Indonesia Raya pada tanggal 23, 25, 27, 28, 29 dan 30 Agustus 1973.

Pemberitaan tentang Modal Jepang di Indonesia

Indonesia Raya dikatakan banyak pengamat melakukan kampanye besar-besaran menentang modal Jepang di Indonesia, ¹⁰⁸ namun bagaimana sebenarnya pendapat dari para pengasuh koran tersebut, berikut ini akan dipaparkan sejauh ditulis dalam korannya berkenaan dengan masalah modal Jepang.

Prof. Sadli, salah seorang anggota penasihat ekonomi Presiden, mengatakan di awal Februari 1972 bahwa Indonesia mutlak harus kerjasama dengan Jepang, karena peran Jepang sebagai pemberi bantuan luar negeri saat itu sudah menyamai kedudukan Amerika Serikat. Pada tahun 1971 saja Jepang memberikan bantuan sebesar US \$ 155 juta, dan pada tahun-tahun berikutnya diperkirakan angka tersebut akan terus naik. ¹⁰⁹

Keesokan harinya Indonesia Raya menurunkan tajuk rencana yang mempertanyakan ucapan Prof. Sadli tersebut. Tajuk hari itu mengkhawatirkan jika satu saat Indonesia akan menjadi demikian tergantung dengan Jepang, karena ketergantungan secara ekonomi menurutnya hanyalah titik awal untuk menjadi tergantung juga secara politis. Untuk itu koran ini menyarankan:

Dalam hubungan sepihak yang kuat begini, Indonesia perlu cepat-cepat mengembangkan kekuatan ekonomi sendiri. Sebenarnya pula demikian banyak bahan mentah kita yang diperlukan oleh industri Jepang merupakan kartu yang cukup kuat di tangan Indonesia, asal pihak Indonesia dapat belajar mahir mempermainkannya...

Di dalam negeri juga hendaknya pengawasan yang ketat

108. Lihat Hill (1988), Robison (1986)

109. Indonesia Raya 1 Februari 1972.

mengenai susunan pemimpin dan pegawai perusahaan Jepang yang bekerja di Indonesia dalam bidang-bidang usaha yang dibukakan bagi modal asing maupun *joint venture* harus dijalankan.

...baik pemerintah dan masyarakat Indonesia waspada agar negara-negara berindustri maju dengan memindahkan ke Indonesia industri-industri yang meracuni alam selama ini di negara mereka. Hendaknya jika industri demikian akan dimasukkan ke Indonesia, maka haruslah dikenakan kewajiban pada mereka untuk melengkapi industri-industri demikian dengan teknologi yang menghindari peracunan alam Indonesia. 110

Dalam pandangan koran ini diharapkan Jepang tidak hanya membawa pergi bahan-bahan mentah dari bumi Indonesia, namun juga mulai mau mengolahnya di Indonesia sendiri. Lebih dari itu koran ini menandakan bahwa Jepang juga ikut berkepentingan dalam membina perkembangan ekonomi dan industri di Indonesia, karena untuk kepentingan Jepang hal ini berarti menaikkan daya beli yang lebih besar lagi dari satu pasarnya di Asia Tenggara. 111

Seminggu kemudian diturunkan serial tulisan menyoroti untung rugi akibat modal asing di Indonesia, yang dibuat oleh Victor Sihite, wartawan Indonesia Raya yang ikut dalam grup diskusi ekonomi hasil bentukan PWI, Kedutaan Besar Jepang, dan Panitia Tehnis Penanaman Modal Asing. 112

Antara lain tulisan tersebut mengungkapkan keluhan bahwa industri minuman dari luar negeri mematikan industri serupa di dalam negeri seperti Limonade, Markisa, Sirsak dan lain-lain. 113

110. "Mutlak Kerjasama dengan Jepang ?", tajuk rencana Indonesia Raya 2 Februari 1972.

111. Ibid.

112. Seluruhnya ada 5 buah tulisan yang dimuat pada tanggal 9, 10, 11, 12, dan 15 Februari 1972.

113. Lihat juga Yahya A. Muhaimin, Bisnis dan Politik, Jakarta: LP3ES, 1990, h.196.

Juga disebutkan dalam setiap *joint venture*, pihak Indonesia selalu lebih kecil modalnya, dan hanya satu perusahaan di mana Indonesia memegang tapuk pimpinan perusahaan. Selebihnya dikuasai pemilik modal asing. Muncul harapan agar pemerintah dapat menyusun strategi tersendiri dalam menghadapi modal asing tersebut. Muncul juga pertanyaan apakah mungkin Indonesia menyusun kekuatan yang cukup untuk mejadi pemegang saham terbesar dalam *joint venture* yang ada.

Secara skeptis dikemukakan harapan Indonesia itu tadi tidak mungkin, mengingat Indonesia amat lemah dalam hal permodalan, pengetahuan, permasalahan tehnik, hal manajemen dan juga untuk bidang pemasaran hasil produk tersebut.

Menyusul berita tentang pemberian bantuan tanpa ikatan dengan syarat lunak dari Jepang sebesar 62.000 juta Yen (kira-kira sama dengan 72,5 milyar rupiah) ¹¹⁴ Indonesia Raya pun menurunkan tajuknya mengomentari hasil kunjungan Presiden dari Jepang : ¹¹⁵

Bantuan kredit yang kita sebutkan di atas di samping juga janji untuk membantu pembangunan proyek Asahan, semuanya memberikan kesan bahwa di tahun-tahun mendatang hubungan Indonesia-Jepang akan semakin erat.

114. Indonesia Raya 15 Mei 1972.

115. Sedikit catatan tentang hal ini adalah yang ditulis Crouch (1978:308, footnote 2) dengan mengutip Weinstein bahwa pada masa awal Orde Baru setelah penunjukkan sebagai Presiden oleh MPRS, maka Soeharto pergi mengunjungi Jepang yang lewat Alamsjah, salah seorang Sprinya, dikatakan bahwa Jepang sudah siap untuk memberikan bantuan ekonomi untuk Indonesia. Namun kunjungan Presiden tersebut mengecewakan karena Alamsjah memperoleh informasi yang salah mengenai kesiapan Jepang tersebut, dan setelah peristiwa tersebut Alamsjah kemudian dijadikan duta besar di Belanda tahun 1971.

Namun demikian kita harus memperhatikan pula suara-suara sumbang yang terdengar tentang hubungan erat Indonesia - Jepang....

Jika kita mencoba menelaah sedikit hubungan ekonomi kita pada Jepang maka akan tampak bahwa hampir sebagian besar penanam modal asing di bidang pertambangan, semua menjurus pada pemasaran Jepang. Minyak kita tampaknya dalam jumlah besar akan mengalir ke Jepang, sedangkan hasil produksi tembaga dari International Sulphur dan nikel dari pertambangan nikel yang tengah disurvei akan juga menuju Jepang. Belum lama berselang kita masih dapat membaca bahwa sebuah konsorsium pemasaran nikel ke Jepang telah dibentuk.

Kita yakin bahwa untuk memajukan Indonesia kita membutuhkan modal asing demikian pula keahlian yang masih belum kita miliki. Namun kebutuhan kita akan modal dan keahlian hendaknya tidak pula menyebabkan kita lupa akan pengalaman-pengalaman pahit dan ketergantungan kita pada satu atau dua negara. Jika sekarang nada-nada sumbang telah terdengar dengan istilah 'minyak telah diijonkan' kiranya itu merupakan suatu peringatan bagi kita untuk memikirkan usaha mengimbangi ketergantungan kita pada Jepang. 116

Pada bulan Juli 1972, Jepang telah memilih Perdana Menteri nya yang baru, yaitu Kakuei Tanaka. Koran memuat berita itu sebagai headline, 117 dan disebutkan bahwa Indonesia gembira dengan terpilihnya Tanaka, karena ia mempunyai perhatian besar tentang kerjasama Jepang dan Asia Tenggara, dan kunjungan Presiden ke Jepang yang baru lalu telah menunjukkan eratnya hubungan Indonesia-Jepang tersebut.

Namun keesokan harinya Indonesia Raya menampilkan karikatur yang menyindir kepada PM Tanaka untuk tidak memakai saluran-saluran pribadi dalam membuat hubungan dengan Indonesia yang

116. "Ketergantungan Indonesia kepada Jepang ?", tajuk rencana Indonesia Raya 16 Mei 1972.

117. Indonesia Raya 6 Juli 1972.

dikenal dengan praktek 'Indonesian Lobby'. 118

Salah satu proyek besar yang menjadi indikator hubungan ekonomi Indonesia-Jepang dalam jumlah yang begitu besar, adalah proyek Asahan di Sumatera Utara. Proyek ini sendiri dimaksudkan untuk membangun potensi industri di Indonesia bekerjasama dengan konsorsium modal swasta di Jepang, yang pada akhirnya merupakan kerja sama antar 2 pemerintahan negara. 119

Pada saat tender pertama proyek ini mengalami kegagalan, Adam Malik, Menteri Luar Negeri saat itu, menyebutkan perusahaan Jepang dan Amerika tersebut memeras Indonesia. 120 Namun koran ini mengatakan bahwa adalah wajar dalam dunia usaha jika sang investor ingin menanam modal sesedikit mungkin dengan resiko terkecil untuk meraih keuntungan yang sebesar mungkin. Oleh karena itu koran ini secara bijak mengharapkan pada tender kedua proyek ini akan berhasil, sekaligus mengingatkan kembali agar dalam tender tersebut tidak menggunakan saluran-saluran pribadi,

118. Lihat juga dua tulisan Michael Malley, "Soedjono Hoemardani and Indonesian-Japanese Relationship 1966-1974" dalam INDONESIA no.48 (Oktober) 1989, Cornell Modern Indonesia Project, serta "Soedjono Hoemardani dan Orde Baru" dalam PRISMA edisi khusus 20 tahun PRISMA 1971-1991.

119. Lebih jauh tentang proyek Asahan ini bisa melihat pada Francisia SSE Seda, The Politics of Development: A Case Study of The Asahan Project in North Sumatra (Indonesia), tesis master dari Cornell University, Agustus 1989.

120. Indonesia Raya 29 Juli 1972.

namun semata-mata dengan perhitungan ekonomis dan dagang. 121

Yang menarik mengenai Jepang ini adalah salah satu edisi Indonesia Raya yang memuat *Lampiran Khusus Jepang* dan terbit menyambut ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-27, tahun 1972.

Disebutkan bahwa *Lampiran Khusus Jepang* ini merupakan bagian dari terbitan khusus mengenai bangsa dan negara lain tetangga Indonesia, atau yang memelihara hubungan dalam berbagai bentuk dengan Indonesia. Terbitan khusus ini menitikberatkan pada artikel-artikel yang mengulas soal manusia Jepang, serta nilai-nilai budaya Jepang yang telah berabad-abad umurnya. Dalam pengantar edisi khusus ini, yang ditulis oleh Mochtar Lubis sendiri, disebutkan bahwa penerbitannya pada tanggal 17 Agustus 1972 mempunyai simbol sebagai penghormatan orang Jepang pada kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pejabat dari Kedutaan Besar Jepang memberikan sambutan atas edisi khusus ini dengan menulis :

...hubungan Indonesia-Jepang kian hari kian bertambah erat. Kenyataan menunjukkan Jepang merupakan pasar yang terbesar bagi ekspor Indonesia lagipula kerjasama ekonomi pun berkembang melalui kredit, penanaman modal dan lain-lain..

"Manusia hidup bukan dari roti melulu" tidak pada bidang ekonomi saja, tapi juga dengan bidang-bidang kegiatan manusia, termasuk kebudayaan, tradisi, agama, adat istiadat dan lain-lain. Memajukan hubungan dua negara harus juga memajukan kegiatan bidang manusia untuk membina pengertian dan saling kepercayaan... 122

121. "Peristiwa Asahan hanya Soal Biasa", tajuk rencana fIndonesia Raya 4 Agustus 1972.

122. "Sambutan Dubes Jepang atas Penerbitan *Lampiran IR*" ditulis oleh Duta Besar ad interim, Itaru Suge. Indonesia Raya 16 Agustus 1972.

Lampiran Khusus Jepang ini isinya meliputi Sastra modern Jepang, Seni Lukis modern, Seni panggung Kabuki, Cerita-cerita pendek, juga artikel tentang tanaman Bonsai, tentang Mass Media dan juga tulisan yang mengomentari negara Sakura tersebut yang dibuat oleh Anas Maruf, seorang Indonesia yang pernah mengajar di sebuah universitas di Jepang.

Sejumlah iklan pun turut mengisi edisi khusus tersebut, di antaranya adalah iklan dari Toyota, Asahi, Mitsubishi dan lain-lain. Menteri Luar Negeri, Adam Malik, pun ikut memberikan sambutan :

penerbitan khusus IR mengenai Jepang dengan titik berat pada nilai-nilai budaya dan manusia Jepang merupakan imbalan terhadap wajah Jepang yang telah tertanam selama ini di mata banyak orang Indonesia dan moga-moga dapat memberikan gambaran yang seimbang. ¹²³

Simpaty yang ditunjukkan koran ini lewat edisi khusus tersebut, tidak mengurangi kritiknya terhadap permasalahan modal Jepang di Indonesia. Mochtar Lubis menyebutkan :

Kami mau memperlihatkan kami tidak membenci Jepang tanpa alasan. Ada segi-segi lain yang kami anggap banyak yang bagus, seperti budaya, pengetahuan ilmiah, teknologi. Orang Jepang harus tahu kita bisa appreciate itu, namun mereka pun harus tahu bahwa kita punya hak penuh untuk mengkritik, menolak segi-segi yang anti manusia dari budaya Jepang. ¹²⁴

Sikap tersebut dapat menunjukkan bagaimana koran ini kritis dalam melihat phenomena modal Jepang saat itu. Di satu sisi budaya Jepang demikian luhur, dan memiliki kekayaan yang begitu besar, tetapi budaya ekspansi ekonomi masyarakat Jepang merupakan

123. Ibid.

124. Wawancara dengan Mochtar Lubis, 7 Januari 1993.

ancaman bagi negara-negara lain, dan membawa eksese negatif yang tidak kecil. Karenanyalah koran ini tidak tinggal diam melihat eksese-eksese tersebut terjadi di Indonesia.

Salah satu tajuk di akhir tahun 1973 misalnya menyindir sikap orang Jepang dalam menanggapi kritik atas ekspansi ekonomi mereka. Orang Jepang hanya mengangguk-anggukkan kepala terhadap kritik, sementara itu yang lain dekat dengan pusat kekuasaan yang menjadi broker modal Jepang di Indonesia. Lebih jauh disorot koran ini:

Dengan praktek-praktek Jepang serupa ini orang Jepang dan sebagian pembesar-pembesar, janganlah terkejut jika kini timbul suara-suara amat kritis terhadap modal Jepang yang beroperasi di Indonesia.

Kita amat memuji kegiatan-kegiatan mahasiswa (! - garis miring dari penulis) dan harus merasa bangga melihat masih cukup banyak orang Indonesia yang belum terbeli oleh kekuatan ekonomi Jepang yang beroperasi di Indonesia.

Apa yang mereka lakukan adalah untuk melindungi kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Yang kita harapkan adalah kesadaran lebih besar mengenai kepentingan-kepentingan bangsa kita pada teknokrat-teknokrat dan penguasa-penguasa yang mengurus ekonomi bangsa kita ini. ¹²⁵

Keesokan harinya koran ini masih mengulas tindak tanduk modal Jepang di Indonesia. Kali ini berdasarkan laporan dari Economic Cooperation Center for the Asian Pasific Region (Ecocen)

Indonesia Raya menulis :

Tujuan pokok penanaman modal Jepang di berbagai negara di Asia dan Australia mula-mula adalah untuk menjamin sumber bahan mentah bagi industrinya dan menjamin peranan bagi hasil produksi pabrik-pabriknya.

Sebuah laporan yang disusun oleh Ecocen baru-baru ini memuat keterangan bahwa selama tahun 70-an ini, dan mungkin selama tahun 80-an yang akan datang, penanaman modal Jepang juga untuk tujuan menjamin pangkalan-pangkalan pembuat

125. "Modal Jepang Harus Koreksi Diri", tajuk rencana Indonesia Raya 27 November 1973.

barang-barang yang rendah ongkos produksi untuk keperluan dalam negeri Jepang sendiri dan untuk ekspor ke pasaran dunia.

Dengan demikian modal Jepang akan mengarahkan dirinya lebih banyak pada negara-negara di Asia Tenggara dan Amerika Latin.

Sebuah tujuan untuk motivasi lain bagi penanaman modal Jepang, yang tidak disebut dalam laporan Ecocen tersebut adalah pemindahan industri-industri Jepang yang meracun dan mencemarkan alam Jepang ke negara-negara lain di Asia termasuk industri petrokimia, industri kertas dsb.

Kembali pada laporan Ecocen, maka disebutkan bahwa modal Jepang bermaksud untuk memindahkan pembuatan barang-barang tertentu di negara-negara yang punya buruh murah, sedang industri yang lebih *sophisticated* akan ditaruh di negara lain.

Ditinjau dari kepentingan modal Jepang tentu perkembangan serupa ini menguntungkan tetapi apakah akan menguntungkan bagi negara-negara di Asia ?

Karena industri sepotong-sepotong seperti ini tidak memungkinkan suatu negara mengembangkan produksi TV yang lengkap, radio yang lengkap, mobil yang jadi dsb, setiap negara menghasilkan kepingan saja dari suatu barang.

Perkembangan serupa ini sungguh dapat disebut kolonialisme teknologi yang memaksakan kedudukan teknologi rendah terus menerus pada negara-negara sedang berkembang. 126

Terlihat jelas bagaimana koran ini tahu kepentingan ekonomi politik internasional macam apa yang dibawa oleh Jepang, dan kepentingan itulah yang dikritik koran ini.

Indonesia Raya juga menurunkan hasil simposium yang membicarakan tingkah laku Jepang dalam hal investasi di negara-negara Asia-Afrika dan Amerika Latin.

Dikeluhkan bahwa orang-orang Jepang terlalu angkuh dan tidak mau mengerti atau tidak mau tahu tentang budaya dan hubungan sosial negara tempat ia menanam investasinya. Orang Jepang diakui rajin dan tekun, tetapi ia tidak memperhatikan promosi dan pen-

126. "Apa Tujuan Penanaman Modal Jepang di Asia Tenggara ?", tajuk rencana Indonesia Raya 28 November 1973.

didikan untuk orang non Jepang. Tambah lagi karena tingkah laku mereka yang suka merangkul elite kekuasaan untuk kepentingan ekonominya. 127

Koran ini pun mengutip pendapat dari Prof. Yano, guru besar Kyoto Industrial University, yang mengatakan agar modal Jepang di Indonesia jangan masuk lewat saluran yang tidak resmi. 128 Dalam saat yang sama dikabarkan pula bahwa Soedjono Hoemardani, Aspri Presiden bidang ekonomi, menyebutkan tentang lemahnya posisi Indonesia ketika berhadapan dengan Jepang.

Indonesia Raya merasa tidak mengerti apa dasarnya Soedjono berpendapat demikian. Dikatakan koran ini, pernyataan Soedjono tersebut merugikan Indonesia dalam membina hubungan setaraf dengan Jepang, dan secara langsung ditunjuk koran ini bahwa Soedjonolah saluran tidak resmi yang amat penting dalam membina hubungan ekonomi dan politik Indonesia dengan Jepang. Tajuk koran ini mengatakan bahwa Indonesia akan merasa sangat rugi jika terus membiarkan Soedjono melakukan perannya dalam saluran yang tidak resmi tersebut. 129

127. Artikel ini seluruhnya dimuat dalam 6 edisi: tanggal 28 dan 31 Desember 1973, tanggal 2, 3, 5 dan 7 Januari 1974.

128. Lihat Indonesia Raya 8 Januari 1974.

129. "Indonesis Lemah Menghadapi Jepang?", tajuk rencana Indonesia Raya 8 Januari 1974.

Pemberitaan tentang Hubungan Pers dan Pemerintah

Pada awal Januari 1973, Kopkamtib melakukan pencabutan SIC (Surat Ijin Cetak) terhadap harian Sinar Harapan berkenaan dengan pemberitaan pada tanggal 30 Desember 1972 yaitu tentang Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 1973-74 sebesar 826 milyar yang dinilai Kopkamtib merupakan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. 130

Keesokan harinya Menteri Penerangan, Boediarjo, memberikan tanggapan serius atas pencabutan SIC tersebut, karena hal ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan Sinar Harapan dalam tiga tahun belakangan ini. Sementara itu PWI Pusat menyatakan koran tersebut melakukan "Contempt of Parliament" karena dianggap mendahului pemerintah memberikan keterangan tersebut kepada DPR.

Dalam hal ini Indonesia Raya menanggapi, bahwa ada dua pihak yang bertanggungjawab dalam kasus tersebut: wartawan Sinar Harapan yang menyiarkan berita tersebut, dan sumber berita RAPBN itu sendiri. Ditandaskan bahwa jika Sinar Harapan ditindak, maka sumber beritanya juga harus ditindak.

Jika perlu diteliti itikad surat kabar yang menyiarkan sesuatu rahasia negara. Apakah dilakukan untuk kepentingan umum, atau maksud lain? Untuk mempertimbangkan hal serupa ini perlulah kejadian ini dibawa melalui proses pengadilan.
131

130. Indonesia Raya 8 Januari 1973.

131. "Kasus SH", tajuk rencana Indonesia Raya 4 Januari 1973.

Enggak Bahau'ddin ,¹³² wakil pemimpin redaksi Indonesia Raya dalam kolom *Komentor Dalam Negeri Sepekan* pernah mengemukakan pandangannya tentang Surat Ijin Terbit, yang kelahirannya sebenarnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, namun tetap dipakai pada masa Orde Baru. Enggak menuliskan pandangannya ini diilhami pertemuannya dengan seorang wartawan dari Mainichi Shimbun di Jepang.

Wartawan Jepang tersebut menanyakan kepada Enggak mengapa di Indonesia dibutuhkan SIT ? Enggak mengatakan bahwa SIT ditujukan untuk menutup kemungkinan pihak Komunis tidak mengambil kesempatan untuk menerbitkan surat kabar.¹³³ Dan Enggak pun mengatakan bahwa keberadaan SIT tidak akan lama, karena "jika keadaan sudah lebih baik sistem ijin akan dihapus".¹³⁴ Adalah menarik untuk disimak pandangan Enggak ini yang meyakini sifat sementara sistem yang dikenakan pada surat kabar saat itu. Rupanya memang Orde Baru membawa harapan yang besar, dibanding dengan Orde Lama, khususnya untuk kehidupan pers saat itu.

Lebih lanjut dikatakan Enggak bahwa kebebasan pers ada saat itu, jika dibandingkan dengan masa Soekarno dan PKI dulu. Namun

132. Tentang 'Bung Enggak' ini bisa dibaca juga tulisan yang dibuat oleh rekan almarhum, Atmakusumah, "Enggak Bahau'ddin dan Keberanian" dalam Atmakusumah, Kebebasan Pers dan Arus Informasi di Indonesia, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1981.

133. Peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru membawa dampak pada kehidupan pers, di mana sejumlah harian dan majalah yang beraliran Komunis dilarang terbit, serta sejumlah wartawan dipecat karena keterlibatannya dalam Partai Komunis Indonesia. Lihat Tribuana Said Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila, Jakarta: CV Haji Masagung, 1988, h.164-171.

134. "Pers dan 'Appeal' Pemerintah", *Komentor Dalam Negeri Sepekan*, Indonesia Raya 20 Agustus 1973.

Enggak juga mengeluhkan sering adanya *Appeal* dari pemerintah yang meminta berita tertentu jangan dimuat supaya jangan menimbulkan ketegangan dalam masyarakat, demi menjaga kestabilan yang telah tercapai. *Appeal* tersebut dirasa mempersempit ruang gerak pers, sehingga timbul keraguan di kalangan wartawan yang ingin bertugas melindungi rakyat kecil,

Bahwa ketika DPR dirasa tidak menjalankan fungsi penyalur hati nurani rakyat, maka pers masih dianggap masyarakat sebagai yang paling baik dan ampuh untuk menyalurkan keluhan-keluhan rakyat... 135

Enggak berharap agar pemerintah dapat tetap menganggap pers sebagai *partner* 136 yang baik dalam pembangunan dan jangan terlalu banyak dipojokkan dengan berbagai *appeal*.

Untuk kalangan pers, setidaknya pandangan Enggak bisa mewakili pandangan mereka, bahwa kemitraan ataupun *partnership* diberi makna adanya posisi yang setara di antara pers dan pemerintah, namun dalam kenyataannya pers sebagai mitra merasa sering dipojokkan dengan pelbagai himbauan oleh pemerintah untuk tidak memuat berita tertentu dengan alasan-alasan keamanan.

Harapan Enggak itu sendiri apakah menjadi kenyataan atau tidak perjalanan waktulah yang akan menentukannya, tapi tidak lama setelah tulisan itu muncul, justru pers kembali menghadapi

135. Ibid.

136. Pemakaian istilah *partner* oleh Enggak ini selaras dengan istilah yang dipakai dalam konsep Repelita I untuk menunjukkan bentuk hubungan antara pers dan pemerintah. *Partnership* macam apa yang dikembangkan, adalah persoalan yang lain, karena baik dari pers maupun pemerintah mempunyai perbedaan persepsi dan kepentingan dalam hal ini.

himbauan ketika suasana saat itu diramaikan dengan perdebatan mengenai Rancangan Undang-undang Perkawinan di DFR.

Laksamana Soedomo, wakil panglima Kopkamtib pada pertengahan bulan September 1973 memperingatkan pers dan masyarakat :

agar menahan diri dalam tindakan, jangan main hakim sendiri, jangan main intrik politik, jangan bertingkah laku yang dapat menusuk perasaan orang lain, lebih-lebih yang menyinggung masyarakat banyak serta jangan hidup dalam lingkungan sendiri saja, lepas dari lingkungan masyarakat lain. ¹³⁷

Dalam kesempatan yang sama Letjen Daryatmo yang menjabat sebagai kepala staf harian Kopkamtib juga menambahkan:

(agar) jangan melakukan hasutan dan agitasi dalam RUUF dan soal-soal lain mendatang, jangan menimbulkan ketegangan sosial, jangan memecah belah persatuan dan kesatuan, jangan menimbulkan peluang untuk membuka 'tanah subur' bagi G 30 S PKI dan subversif lainnya, jangan mempertentangkan antar suku, agama, ras, golongan dan kelompok sosial, keluhan-keluhan hendaknya disalurkan lewat lembaga-lembaga demokrasi serta dalam menuntut keadilan hendaknya lewat hukum dan peradilan dan lembaga-lembaga demokrasi. ¹³⁸

Mengenai pemberitaan dalam surat kabar, Soedomo memperingatkan dengan keras beberapa koran, tanpa menyebut namanya, agar dalam pemberitaan menyesuaikan diri sebagai pers yang bebas dan bertanggungjawab, dan *jika tidak akan dicabut SIT-nya* (! - garis miring dari penulis).

Indonesia Raya di hari yang sama langsung menurunkan tanggapannya atas pernyataan Soedomo tersebut. Koran ini mengerti dan

137. Lihat Indonesia Raya 15 September 1973.

138. Indonesia Raya Ibid.

paham bahwa korannya masuk hitungan dalam beberapa koran yang dihimbau oleh Kopkamtib tersebut.

Ditulis dalam tajuknya, bahwa bila koran ini menulis berita tentang yang kecil yang teraniaya langsung diangkat dari rakyat yang teraniaya dan Indonesia Raya mengatakan mungkin saja ada yang "merongrong kewibawaan instansi pemerintah" namun koran ini menyiarkannya dalam rangka tugasnya sebagai pelaksana *social control*. 139

Diterangkan oleh koran ini bahwa sebelum pemuatan suatu berita, dilakukan pengecekan kepada instansi yang bersangkutan tapi mereka "diam seribu bahasa", sehingga untuk sejumlah kasus, penilaiannya dikembalikan kepada masyarakat. Dan khusus *appeal* dari Laksamana Soedomo tersebut dikatakan:

Kami dapat memahami seruan Pak Soedomo ini, dalam batas kemampuan kami. Seruan ini akan kami patuhi selama kami merasa bahwa semua ini tidak akan membatasi tugas kami sebagai penyalur suara hati nurani rakyat dan pelaksana *social control* yang bertanggungjawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. 140

Inilah sosok Indonesia Raya dalam karakter aslinya, yang menunjukkan perhatian terutama kepada masyarakat, serta tidak ragu-ragu memperlihatkan keberpihakannya pada kelompok masyarakat yang dirugikan oleh macam-macam bentuk penyelewengan, ketidakadilan maupun penyalahgunaan kekuasaan.

Ideologi koran yang dipahaminya demikian ada dalam konstala-

139. "Appeal dari Kopkamtib", tajuk rencana Indonesia Raya 15 September 1973.

140. Ibid.

si struktur ekonomi, sosial, politik dan budaya yang melingkupinya. Ada konteks yang melatari teks-teks yang ditulis oleh Indonesia Raya, dan di situlah terjadi tarik menarik dimensi internal dan eksternal surat kabar tersebut.

Sebelum dijelaskan lebih jauh kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya macam apa yang terjadi di awal sampai pertengahan tahun 70-an tersebut, maka akan digambarkan bagaimana koran ini mengkonsepkan dirinya sendiri (*self concept*).

Memperingati lima tahun lahir kembalinya koran ini, salah satu tajuk koran ini menulis:

terbit kembali di tahun 1968 harian ini menemukan berbagai kesulitan dan kesukaran, halangan dan hambatan, terutama sekali dari pihak-pihak yang hendak mempertahankan terus *vested interest* mereka dan hanya karena ketabahan para pengasuh dan karyawan, serta kepercayaan dan dukungan para pembaca serta pula kepercayaan berbagai tokoh dalam pimpinan tertinggi pemerintahan terhadap kemurnian cita-cita dan perjuangan harian ini, maka Indonesia Raya dapat mengatasi segala rupa halangan dan hambatan dan hingga hari ini masih terus menjalankan tugasnya di tengah bangsa kita. 141

Koran ini amat sadar bahwa kelahirannya kembali adalah andil banyak orang, dan kesadarannya sebagai media massa yang "punya tugas di tengah bangsa" lekat dalam diri para pengasuhnya. Ada romantika yang ditampilkan koran ini, untuk menyegarkan ingatan para pembacanya akan 'reputasi' koran ini.

Halaman empat koran ini yang biasanya untuk memuat artikel atau opini, 'dikorbankan' untuk menampilkan kembali tajuk rencana

141. "Lima Tahun Lahir Kembali", tajuk rencana Indonesia Raya 30 Oktober 1973.

yang mengawali periode kedua harian ini.¹⁴² Halaman tersebut juga dihiasi dengan karikatur-karikatur lama yang menggambarkan korupsi di Pertamina, skandal Scoopa, perpecahan dalam tubuh PWI, masalah investasi asing, masalah pribumi non pribumi, dan juga tentang pelarangan Lembaga Bantuan Hukum serta Pemilihan Umum 1971.

Dari tampilan tersebut muncul kesan bahwa Indonesia Raya sadar akan reputasinya, dan bagi pembacanya ingin diberikan gambaran bahwa kelahiran kembali koran ini tidaklah mengurangi 'kegarangan' Indonesia Raya dibandingkan dengan periode sebelumnya.¹⁴³

Pada tanggal 29 Desember 1973, Indonesia Raya juga merayakan

142. Kutipan tajuk tersebut, pada tanggal 30 Oktober 1968, bisa dilihat pada Bab I tulisan ini.

143. Sejumlah surat kabar yang muncul sejak tahun 1965, macam KOMPAS dan Harian KAMI dirasa sebagai ancaman terhadap eksistensi koran ini, setidaknya dalam hal oplag. Pada tahun 1972, Indonesia Raya hanya menduduki tempat ke-8 dalam peraihan oplag di Jakarta, di bawah KOMPAS, Harian Indonesia, Pos Kota, Suara Karya, Sinar Harapan, Berita Buana dan Merdeka. Namun masih unggul dibandingkan Abadi, Harian KAMI, Pedoman dan Nusantara. Lihat Hill (1988) h.140 footnote 73, dan Henri Chambert-Loir (1974) terj. h.53.

Tetapi menurut pengakuan Jakob Oetama, Pemimpin Redaksi KOMPAS, sebaliknya ketika Indonesia Raya muncul kembali di tahun 1968, harian yang dipimpinnya juga sempat khawatir, terutama berkenaan dengan jumlah oplag yang mungkin akan turun. Wawancara tanggal 21 Juli 1993.

ulang tahunnya yang ke-24,¹⁴⁴ dan dimuat pelbagai komentar dan ucapan selamat dari sejumlah tokoh masyarakat dan pemerintahan. Pangkopkamtib Jendral Soemitro memuji harian ini sebagai harian yang berani mengoreksi pemerintah dan mengoreksi masyarakat, walaupun ia juga mengingatkan agar koran ini jangan terjebak seperti yang terjadi di Eropa Barat bahwa koran yang menentang pemerintah dijadikan suatu kebanggaan.

Selain Jendral Soemitro, Menteri Sutami juga memberikan sambutannya, tak ketinggalan Gubernur DKI Ali Sadikin, Mohammad Hatta, Gubernur Jawa Tengah Moenadi, Dorodjatun Kuntjorojakti, HM Sulchan.

Tajuk rencana Indonesia Raya edisi pertama, tanggal 29 Desember 1949,¹⁴⁵ juga cerita tentang suka duka para pengasuh surat kabar ini, dan Alfian, seorang peneliti dari LIPI, secara khusus menulis artikel berjudul "Indonesia Raya dan Kritik".

Sosok Pribadi Mochtar Lubis

Tak dapat disangkal lagi pribadi Mochtar Lubis erat sekali dalam surat kabar Indonesia Raya. Sebutan kepada koran ini sebagai *personal journalism* menyiratkan hal tersebut.

144. Perhitungan tahun ini didasarkan oleh keyakinan Mochtar Lubis, bahwa beberapa tahun koran ini tidak terbit, dalam peralihan periode pertama ke periode kedua, tidak mematikan koran ini sendiri, karena ia yakin korannya tetap hidup dalam hati para pembaca dan pengasuhnya. Lihat Atmakusumah (1980) h. 230-31.

145. Kutipan tajuk ini juga bisa dilihat pada Bab I tulisan ini.

Mochtar Lubis untuk harian ini dikenal sebagai Pemimpin Redaksi pada periode pertama, dan kemudian pada periode kedua sekaligus juga menjadi Pemimpin Umum. Ia adalah sosok yang demikian menarik karena bakatnya yang besar dalam dunia jurnalistik, selain ia juga dikenal sebagai seorang sastrawan, pecinta lingkungan hidup, pejuang hak-hak asasi manusia. Bahkan bakatnya yang mengagumkan itu juga menghasilkan sejumlah penghargaan, tidak saja untuk tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional.

Tak heran jika setidaknya 3 orang sarjana dari 3 negara pernah menulis disertasinya tentang sosok Mochtar Lubis itu. Tiga sarjana itu adalah: Henri Chambert-Loir dari Perancis,¹⁴⁶ David T. Hill dari Australia¹⁴⁷ dan Mudji Sutrisno dari Indonesia¹⁴⁸. Dalam tingkat non gelar kesarjanaan pun ada begitu banyak tulisan yang membahas tentang sosok Mochtar Lubis dan juga pembahasan tentang karya-karyanya, terutama dalam dunia sastra.

Reputasi internasionalnya ini dibuktikan dengan penghargaan Ramon Magsaysay Journalism and Literature Award yang diterimanya tahun 1958 dari Philippines Free Press, dan juga Hadiah Pena Emas untuk Kemerdekaan Pers dari Federasi Penerbit Surat Kabar Internasional (Federation Internationale des Editeurs de Journaux at

146. Henri Chambert-Loir, Mochtar Lubis: Une Vision de l'Indonesie Contemporaine Publication de l'Ecole Francaise D'Extreme-Orient, Paris, 1974.

147. David T. Hill, Mochtar Lubis: Author, Editor and Political Actor, disertasi doktor dari Australian National University, Canberra, 1988.

148. Mudji Sutrisno, Man and State in The Works of Mochtar Lubis and Manqunwijaya: An Inquiry into the relations between the 'ideal' and the 'real' in Mochtar Lubis' and Manqunwijaya's political philosophies, disertasi doktor dari Universitas Gregoriana, Roma, 1986.

Publications) pada tahun 1966 di Paris.¹⁴⁹ Selain itu juga Mochtar pernah mendapat penghargaan atas liputan tentang Perang Korea tahun 1950.

Penghargaan atas karya sastranya pun banyak diterimanya, seperti misalnya yang diterimanya dari Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) tahun 1952, tahun 1955-56.¹⁵⁰

Sosok yang disebut oleh Daniel Dhakidae¹⁵¹ sebagai Monumen Hidup Jurnalisme Indonesia, memang dominan dalam tubuh surat kabar ini. Tetapi betulkah ia memiliki pengaruh yang demikian besar dalam surat kabar ini ?

Mochtar Lubis sendiri mengaku tidak berani untuk mengatakan bahwa rekan-rekan lain di Indonesia Raya terpengaruh oleh dirinya: "Dengan rekan-rekan wartawan yang sudah satu-dua tahun bergabung, dan ternyata memiliki nilai kewartawanan yang sama, yah kita jalan. Apakah itu karena pengaruh saya atau bukan, saya tidak berani bilang..." kata Mochtar.¹⁵²

Secara tidak langsung Kustiniyati Mochtar menggambarkan seberapa besar pengaruh Mochtar Lubis dalam koran tersebut, ketika pada pertengahan tahun 1973 diadakan perbaikan manajerial dalam tubuh koran tersebut. Seperti sudah diungkapkan di bagian

149. Lihat Atmakusumah (1992) h.81.

150. Deretan karya sastra yang dihasilkan Mochtar Lubis bisa melihat pada Atmakusumah ed. (1992) h.511-518.

151. Daniel Dhakidae, "70 Tahun Mochtar Lubis: Monumen Jurnalisme Indonesia", KOMPAS 8 Maret 1992.

152. Wawancara dengan Mochtar Lubis 7 Januari 1993.

awal bab ini, bahwa ada kemerosotan mutu cetak koran ini yang berakibat pada turunnya jumlah penjualan koran ini di pasaran. Kustiniyati yang sering sekali mengkritik penampilan koran ini akhirnya terpilih untuk menjadi salah satu anggota direksi baru koran tersebut, dan untuk itu ia memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan manajerial, namun untuk menjamin kewenangannya itu ia meminta dibuatkan akte notaris khusus. Tidak langsung dikatakan oleh Kustiniyati bahwa sebagian anggota redaksi koran ini masih terpusatkan pada Mochtar Lubis, sehingga keputusan apa pun berkaitan dengan koran ini harus menunggu pendapat darinya.

153

Tetapi seperti juga diungkapkan oleh Kustiniyati Mochtar, pada akhir masa hidup koran ini justru Mochtar Lubis seringkali meninggalkan keredaksian koran ini, karena memang Mochtar juga terikat dengan pekerjaan dari Komisi Sean Mac Bride UNESCO di Paris yang menyebabkan ia sering sekali harus berangkat ke luar negeri, belum lagi dengan jabatan lain di Asia Foundation misalnya.

154

Menggantikan posisi redaksi yang sering ditinggalkan oleh Mochtar Lubis, rekannya di Indonesia Raya yaitu: Enggak Bahau'ddin, Kustiniyati Mochtar dan Atmakusumah mengambil alih

153. Wawancara tertulis dengan Kustiniyati Mochtar tanggal 14 Desember 1992.

154. Kustiniyati juga mengaku bahwa ketika perwajahan Indonesia Raya sudah 'mulai membaik', ia sempat menerima kiriman bunga yang ternyata dikirimkan Mochtar Lubis yang saat itu berada di luar negeri. Katanya, Mochtar Lubis kebetulan melihat koran tersebut di Perpustakaan salah satu kampus di Amerika, dan ia melihat betapa cantiknya penampilan Indonesia Raya saat itu.

fungsi Redaktur Pelaksana koran ini.

Setiap kali hendak pergi ke luar negeri, sebisanya Mochtar Lubis menulis tajuk simpanan yang kiranya masih bisa 'terpakai' dalam satu-dua hari berikutnya. Demikian dituturkan oleh Atmakusumah.

Juga oleh Atmakusumah dikatakan bahwa pengaruh Mochtar Lubis ini memang harus diakui besar, tetapi tidak dapat sepenuhnya dikatakan bahwa koran ini adalah semata-mata besar karena kehadiran Mochtar Lubis, sebaliknya sejumlah wartawan dan staf lainnya yang memang satu ide dengan Mochtar turut mengangkat nama koran ini.

Tetapi memang sebagai sosok pribadi, Mochtar Lubis sering dikritik karena ia seorang *lone ranger*. Seperti yang ditulis Arief Budiman¹⁵⁵ dengan mengutip David T. Hill, Mochtar seperti seorang pemain tenis tunggal, bermain sendiri, memukul dengan berani, dengan kekuatan yang hebat serta dengan tujuan yang baik, sehingga bola terlontar ke segala penjuru. Kadang bola itu dapat menghancurkan lawan secara telak, tetapi ia juga bisa 'nyasar' ke mana-mana. Memang menarik untuk melihat pemain seperti ini, terutama bagi orang yang tidak bisa melihat kecanggihan permainan tenis, tetapi yang jelas Mochtar sulit bermain bersama orang lain.

Kerasnya sifat Mochtar Lubis dalam berprinsip, di satu sisi meneguhkan sifatnya itu sendiri, tetapi di sisi lain justru ia

155. Arief Budiman, "Mochtar Lubis Manusia Multidimensional yang Kontroversial", dalam Atmakusumah ed. (1992) h.125-127.

tampak tidak bisa melakukan kompromi apa pun. ¹⁵⁶ Jakob Oetama pun heran bahwa seorang Mochtar Lubis yang juga seorang budayawan seringkali melihat permasalahan secara hitam-putih, dan melupakan kompleksitas masalah-masalah yang dihadapinya. ¹⁵⁷ Namun diakui Jakob bahwa dalam karakternya yang transparan dan kurang kompleks tersebut, ia tampil apa adanya dan terasakan sebagai seorang yang berbudi mulia. ¹⁵⁸

Demikian kiranya sedikit gambaran atas sosok Mochtar Lubis, yang patut diketengahkan di sini, dalam konteks kesatuan antara struktur dan aktor dalam pendekatan historis, di mana Indonesia Raya selain juga terletak dalam bingkai struktur ekonomi, sosial, politik dan budaya tertentu, di dalamnya juga terlibat aktor-aktor puncak yang memberikan warna tersendiri atas sosok surat kabar ini.

156. Yang terakhir menjadi berita adalah percekcoakan dalam tubuh majalah Horison pada tahun 1993, antara Mochtar Lubis dan Goenawan Mohammad, berkenaan dengan upaya perbaikan manajerial majalah budaya tersebut. Tetapi akhirnya upaya perbaikan manajerial tersebut menjadi patah di tengah jalan, karena perselisihan soal pembagian keuntungan dari majalah tersebut.

157. Jakob Oetama, "Mencoba Mewarisi Api Perjuangan Pers Mochtar Lubis", dalam Atmakusumah ed. (1992).

158. Ibid.

BAB IV

PERISTIWA 15 JANUARI 1974

Apa yang disebut sebagai Peristiwa 15 Januari 1974, sampai hampir 20 tahun setelah kejadian itu lewat tetap membuahkan banyak pertanyaan, mengenai apa yang terjadi sebenarnya saat itu, bagaimana latar belakang terjadinya peristiwa tersebut dan siapa pelakunya.

Sejumlah tulisan yang pernah ada mencoba membahas tentang peristiwa itu sendiri dengan masing-masing perspektif. Ada yang melihatnya dalam perspektif ekonomi, yaitu bagaimana terjadinya eksesi penggunaan modal asing di negara berkembang seperti Indonesia, baru memulai pembangunannya sejak Orde Baru, dan masuknya modal asing diperkuat dengan adanya UU Penanaman Modal Asing tahun 1967.¹

Perspektif ini menggambarkan kondisi negara yang membuka peluang terhadap komprador-komprador ekonomi di negara berkembang, macam Indonesia, menimbulkan kesenjangan tidak hanya masalah ekonomi, namun juga masalah sosial dan politik.

1. Misalnya buku dari Yahya A. Muhaimin, Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980, Jakarta: LP3ES, 1991 juga Hal Hill, Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1991 serta Richard Robison, Indonesia: The Rise of Capital, Sydney: ASSA-Allen and Unwin, 1986. Juga bisa dilihat pada Nindarsari, Implikasi Politik Peranan Modal Jepang di Indonesia 1970-1979, skripsi sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 1984, tidak dipublikasikan.

Perspektif ekonomi yang lain menguraikan bagaimana kebijakan ekonomi Indonesia saat itu tampil dari dua kubu, yaitu kelompok yang memilih tipe pertumbuhan ekonomi dan membangun industri yang diorientasikan pada ekspor untuk bersaing di dunia luar. Kelompok ini dipersonifikasikan dengan kelompok tekkokrat Bappenas, yang dimotori oleh Prof. Widjojo Nitisastro dan kawan-kawannya yang sering disebut sebagai 'Mafia Berkeley'. Kelompok lain adalah kelompok yang mengutamakan perekonomian nasionalistik, dengan mengupayakan sumber daya manusia dalam negeri sebagai sasarannya, dan kelompok CSIS lah yang dikenal mewakili kubu lainnya.²

Dalam pengamatan tentang kondisi sosial saat itu maka tergambar bahwa isu ras saat itu cukup kritis, dan menjadi sedemikian parah karena disertai pula sentimen keagamaan yang menyeruak ke permukaan. Ini terlihat ketika terjadi pembahasan kasus Rancangan Undang-undang Perkawinan di DPR. Isu rasial itu sendiri berangkat dari ketidakpuasan melihat kondisi ekonomi yang ada, di mana dilihat bahwa sekelompok kecil masyarakat memiliki *privilege-privilege* tertentu dalam bidang ekonomi, sementara kelompok masyarakat yang lebih besar merasa tidak mendapatkan apa-apa dari 'kue nasional yang saat itu masih kecil'.³

Perspektif gerakan massa, dalam hal ini yang lebih menonjol di sini adalah bagaimana peranan mahasiswa pada masa pertengahan tahun 70-an. Apa yang dilakukan mahasiswa saat itu, agak mirip

2. Tentang kedua kubu ini secara khusus bisa dilihat pada Robison Opcit. h.131-172.

3. Baca Heru Cahyono, Peranan Ulama dalam Golkar 1971-1980: Dari Pemilu hingga Malari, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.

dengan apa yang mereka lakukan pada pertengahan tahun 60-an, dengan menumbangkan komunis dan Presiden Soekarno, yang dibantu oleh kelompok militer. 4

Perspektif yang melihat konflik elite di balik Peristiwa 15 Januari 1974, mengemukakan tentang pengelompokan kekuasaan saat itu dan bagaimana antar kelompok tersebut saling berebut pengaruh. 5

Peristiwa 15 Januari dilihat dalam perspektif hubungan pers dan pemerintah belum banyak ditulis, terutama menyangkut bagaimana kondisi pers setelah terjadinya pembreidelan sejumlah surat kabar dan majalah, yang tentu mengakibatkan retaknya, atau selesainya masa bulan madu antara pers dan pemerintah. 6

4. Lihat Bambang Sulistomo, Aktivitas Politik Mahasiswa dalam Peristiwa 15 Januari 1974, skripsi sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia, 1980. Juga Francois Raillon, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1985, dan juga Andrew H. Gunawan dengan tulisan "The Role of Students in the 15 Januari 1974 Incidents", dalam Southeast Asian Affair, Singapore: Institute of Southeast Asian Affair, 1975.

5. Harold Crouch menuliskan suatu analisa khusus tentang peristiwa tersebut dalam tulisannya The 15 th Januari Affair in Indonesia, Dyason House Papers, 1974, juga dalam bukunya The Army and Politics, Ithaca: Cornell University Press, 1978. Bandingkan dengan tulisan yang dibuat oleh Marzuki Arifin, Peristiwa 15 Januari 1974, Jakarta Publishing House, 1974. Buku yang terakhir ini dengan caranya sendiri menuliskan tentang kelompok mana yang saling berebut pengaruh, dan penulisnya menuding kelompok eks Partai Sosialis Indonesia dan Masjumi, sebagai dalang terjadinya peristiwa kerusuhan tersebut.

6. Tulisan yang kiranya melukiskan kondisi pers setelah peristiwa 15 Januari 1974 dibuat oleh Nasruddin Hars, "Pers Indonesia setelah 15-16 Januari" dalam Pers Indonesia no.1 tahun II, Januari 1976, h.15-20 dan 41. Juga lihat Tjipta Lesmana, "Pers Indonesia dalam Teori dan Praktek" dalam Soebagijo PR et al, Persuratkabaran Indonesia dalam Era Informasi: Perkembangan, Permasalahan dan Perspektifnya, Pustaka Sinar Harapan, 1986, h.366-382

Tulisan ini sendiri akan lebih mengupas bentuk hubungan pers dan pemerintah dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang melatarbelakangi kejadian itu secara makro. Apa yang menjadi sikap surat kabar Indonesia Raya akan dilihat dalam situasi ekonomi, politik dan sosial macam apa kemunculannya. Sikap pemerintah sendiri terhadap pers secara umum, dan Indonesia Raya secara khusus akan ditampilkan juga pada bagian ini. Namun terlebih dahulu hendak dipaparkan bagaimana kondisi perekonomian, serta konstelasi kekuasaan pada dekade 70-an, lalu tinjauan terhadap para aktor yang memegang peranan penting di dalamnya memberi suatu dinamika tersendiri bagi suatu negara yang baru saja melakukan pembangunan ekonomi.

Permulaan pembangunan ekonomi Indonesia

Sejak munculnya Orde Baru pada tahun 1966, seiring dengan terjadinya pergantian kekuasaan nasional, maka pemerintahan baru ini bertekad melaksanakan pembangunan ekonomi, yang pada masa sebelumnya tidak banyak dilakukan.

Presiden yang baru, Jendral Soeharto, yang dikukuhkan lewat Sidang Umum IV MPRS pada bulan Juni 1966, segera melakukan konsolidasi untuk membentuk sebuah tim untuk merancang pembangunan ekonomi, yang terdiri dari sejumlah profesor, yaitu Wijdjojo Nitisastro, Soemitro Djojohadikusumo, Mohammad Sadli dan

sejumlah ekonom lainnya.⁷ Pendekatan ekonomi yang lebih pragmatis dipilih untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, yang dibebani sejumlah hutang luar negeri dan beban inflasi dalam negeri pada masa Orde Lama.

Sejumlah ekonom yang dipilih oleh Presiden Soeharto adalah ekonom lulusan Amerika. Ini mengimplikasikan kebijakan ekonomi macam apa yang dipilih saat itu. Kelompok Widjojo cs yang sering lekat dengan sebutan 'Mafia Berkeley'⁸ lebih menggunakan pendekatan pasar bebas sebagai orientasi pembangunan ekonominya, untuk mempersiapkan negara dalam persaingan dunia internasional. Peran pemerintah di sini diperkecil, atau diterima sejauh mendukung sistem yang hendak dikembangkan, dan peran modal asing di sini menjadi amat vital.⁹

Orientasi pembangunan yang demikian terlihat dari trilogi pembangunan yang dicanangkan dengan mensyaratkan stabilitas nasional sebagai logis pertama, kemudian pertumbuhan ekonomi dan baru kemudian pemerataan sebagai logis selanjutnya.

Untuk mendukung hal itu maka muncul Undang-undang Penanaman Modal Asing nomor 1 tahun 1967, dan juga Undang-undang Penanaman

7. Lihat Yahya A. Muhaimin (1991), h.120; Juga lihat Bruce Glassburner, "Political Economy and the Soeharto Regime" dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies volume XIV no.3/1978, Australian National University, h.24-51

8. Menurut Glassburner Opcit. h.25-27 istilah ini pertama kali dipergunakan oleh David Ransome, dalam tulisannya pada Ramparts Magazine, Oktober 1970

9. Glassburner Ibid. h.27-28. Robison Opcit. h.105-130 memperlihatkan basis teoritikal dari kelompok Widjojo ini yang lebih berorientasi pada pendekatan pasar bebas, berikut kelompok luar yang juga mempengaruhi pola kebijakannya nanti.

Modal Dalam Negeri nomor 6 tahun 1968 yang dimaksudkan untuk membuka perekonomian dan menggiatkan kembali dunia usaha swasta.¹⁰ Kebijakan tersebut dirumuskan dengan bantuan nasihat dari para teknokrat yang selama itu mempunyai hubungan baik dengan Angkatan Darat.¹¹

Setelah masa peralihan kekuasaan berjalan, pemerintah Orde Baru menyiapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun yang dimulai pada tahun 1969, sampai dengan tahun 1974, dan dikenal sebagai Pelita (Pembangunan Lima Tahun) pertama.

Di sini kelembagaan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), yang anggotanya adalah para teknokrat militer dan sipil yang menempati kedudukan strategis di tingkat nasional dan regional, menjadi penting artinya. Para profesional dalam Bappenas ini diberi wewenang untuk menentukan anggaran, termasuk wewenang untuk mengelola bantuan luar negeri yang memungkinkan untuk diterjemahkan ke dalam bidang kegiatan dan anggaran departemen serta badan-badan lainnya, kecuali untuk sektor-sektor tertentu.¹²

10. Muhaimin Opcit. h.52

11. Muhaimin Ibid. lihat juga Dwipayana dan Ramadhan Opcit. h.181. Dikatakan di situ bahwa perencanaan pembangunan tercetuskan lewat Seminar II Angkatan Darat di Bandung tahun 1966 yang merumuskan 'Orde Baru' berdasarkan Undang-undang 1945 dan Pancasila. Lihat juga Hidayat Mukmin, "Suwanto dalam Perjuangan Orde Baru: Militer Pemikir dan Komandan Seskoad 1966-67" dalam PRISMA edisi khusus 20 tahun, 1991, h.132-133 dan Ulf Sundhaussen, Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI, terj. Jakarta: LP3ES, 1988, h.423

12. Muhaimin Opcit. h. 52-53

Strategi pembangunan ekonomi Orde Baru ini bukannya tidak mendapat gangguan. Banyak kecaman ditujukan pada strategi pembangunan yang memunculkan korupsi di mana-mana. Menjangkitnya korupsi itulah yang tetap merupakan keprihatinan surat kabar Indonesia Raya pada kemunculannya kembali di akhir tahun 1968.

Keberatan lain adalah ketergantungan ekonomi dengan dunia Barat dan juga Jepang, yang memberikan keuntungan secara khusus pada orang-orang yang dekat dengan pejabat militer atau pemerintahan, dan menimbulkan kesenjangan ekonomi yang lebar. 13

Perbedaan pandangan dalam strategi perekonomian Orde Baru

Seperti sudah diungkapkan di atas, strategi pembangunan ekonomi yang dirancang oleh Bappenas dengan dimotori oleh Prof. Widjojo Nitisastro dan rekan-rekannya, tidak luput dari kecaman berbagai pihak. Selain yang sudah ditulis di atas, maka kelompok lain yang memiliki cara pandang tersendiri terhadap pembangunan ekonomi saat itu adalah 'kelompok Tanah Abang' atau CSIS (Central Strategic and International Studies).

Perbedaan pandangan dari kelompok yang terakhir ini sering dipersonifikasikan lewat pandangan Panglaykim, seorang ekonom yang juga menjadi pendiri dari lembaga pengkajian tersebut.

Panglaykim menyebutkan bahwa pada prakteknya modal asing beroperasi lewat perusahaan multi nasional yang sering melakukan

13. Ibid. h.63. Tentang sorotan Indonesia Raya pada kasus-kasus korupsi, lihat pada bab sebelumnya.

koordinasi dengan negara asal perusahaan tersebut, dan pada akhirnya sering merugikan negara tempat investasi ditanam. Ia berpendapat bahwa seharusnya pemerintah melakukan peran yang cukup sentral untuk menentukan prioritas penanaman modal, memperkuat infrastruktur ekonomi, memobilisasi keuangan dan modal investasi dalam negeri, serta melakukan koordinasi di dalamnya.

14

Kritik lain yang juga muncul berasal dari Sjafruddin Prawiranegara, bekas Gubernur Bank Indonesia pertama dan Menteri Keuangan pada masa kabinet Hatta dan kabinet Natsir pada tahun 50-an. Eks tokoh Masjumi ini mengkhawatirkan terjadinya penyalahgunaan jabatan akibat tidak adanya pengawasan atas birokrasi dan kedudukan yang lemah dari golongan pengusaha pribumi dalam menghadapi modal dan teknologi asing yang sudah maju akan mengakibatkan kemunduran kelompok ini. 15

Kritik lain juga disampaikan oleh Prof. Sarbini Sumawinata dan Dr. Soedjatmoko, yang berpendapat bahwa strategi ekonomi yang dibawakan Orde Baru akan menghancurkan industri golongan pribumi di dalam negeri dan akan menciptakan suatu daerah kantong dengan pola konsumsi yang asing bagi masyarakat, sementara golongan pribumi tidak mendapat proteksi atau kesempatan untuk bekerja dan menanamkan modalnya.

Strategi *trickle down effect* (efek tetesan ke bawah) yang

14. Robison Opcit. h.148-149. Beberapa karya dari Panglaykim yang dapat memperlihatkan sikapnya terhadap pembangunan ekonomi bisa dilihat pada catatan akhir bab V dari buku Robison, h: 174, endnote no.29.

15. Muhaimin Opcit. h.64

dibawakan oleh Orde Baru terlalu besar biaya politik, sosial dan moralnya. Dan sebagai alternatifnya diajukan usul strategi pembangunan ekonomi yang dipusatkan pada teknologi menengah yang padat kerja, yang akan menghasilkan pemerataan ekonomi yang lebih besar, lebih banyak kesempatan kerja dan kemandirian yang lebih besar terhadap modal asing. Mereka tidak menolak modal asing, namun disarankannya agar modal asing terintegrasi dalam strategi pembangunan nasional yang menyeluruh dan ditentukan oleh orang Indonesia sendiri. ¹⁶

Masih ada beberapa bekas tokoh pemerintahan yang juga mengkritik strategi pembangunan ekonomi Orde Baru, seperti bekas Wakil Presiden pertama, Mohamad Hatta, juga bekas Perdana Menteri Wilopo, serta juga Ir. Slamet Bratanata, bekas menteri Pertambangan pada tahun 1966-67, ¹⁷ namun yang hendak dikemukakan di sini adalah kritik-kritik terhadap strategi pembangunan ekonomi Orde Baru.

Yang juga perlu dipaparkan lebih jauh di sini adalah keberadaan lembaga pengkajian masalah strategis dan internasional yaitu CSIS, yang tidak dapat dipisahkan ketika kita bicara tentang situasi ekonomi dan politik pada tahun-tahun tersebut. Juga pentingnya lembaga ini ditulis berkaitan dengan para tokoh yang ada di belakang lembaga ini, dan juga fungsi yang dibawakan lembaga ini yang sering dianggap sebagai 'think thank' pemerintah

16. Ibid. h.64-65

17. Ibid. h.65

saat itu.

Harry Tjan Silalahi, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Direktur Lembaga Pengkajian ini pernah mengungkapkan:

Dambaan akan kehadiran lembaga yang dapat memberikan konsep-konsep strategis itu pernah benar-benar saya rasakan, ketika saya terlibat bersama generasi muda dan mahasiswa pada akhir tahun 1950-an dan permulaan 1960-an dalam aktivitas kemasyarakatan. Ketika itu pernah ditawarkan, atau sampai batas tertentu boleh dikatakan "setengah dipaksakan", suatu konsep atau program aksi yang benar-benar tidak dapat saya terima karena menurut pendapat saya konsep atau program itu tidak sesuai dengan Pancasila.

Menghadapi kenyataan seperti itu, atas dorongan naluri-alhanya, para pemuda pada waktu itu membentuk kelompok-kelompok untuk menghadapi konsep atau program aksi tadi. Di antara mereka ada yang saling berhubungan langsung dan ada juga yang tidak langsung. Tanpa direncanakan sebelumnya terbentuklah suatu koalisi antar kelompok, bahkan ikut bergabung pula dalam koalisi itu beberapa tokoh TNI-AD. Oleh koalisi ini sempat terpikirkan perlunya suatu konsep atau program tandingan. Saya berada di dalam satu kelompok, termasuk di dalamnya antara lain Saudara Soedjati Djiwandono dan Saudara Lim Bian Kie (Jusuf Wanandi).¹⁸

Ungkapan di atas mungkin cukup untuk menjelaskan latar belakang munculnya CSIS, dan kemudian lembaga ini dikenal erat dengan pemerintah saat itu. Hal ini juga dikarenakan kedekatannya dengan beberapa perwira TNI-AD, yaitu Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani, keduanya menjadi Ketua Kehormatan CSIS.¹⁹

Tentang lembaga pengkajian strategis dan masalah internasional ini, Ali Moertopo berpendapat:

...untuk membangun negara dan bangsa yang modern menghadapi tantangan zaman diperlukan pengorganisasian beberapa sentra yang strategis, di samping adanya lembaga-lembaga kenegaraan

18. Harry Tjan Silalahi, "CSIS Lahir dari Tantangan Jaman", dipetik dari buku CSIS 20 TAHUN, Jakarta: CSIS, 1991.

19. Keterangan seperti yang tertulis dalam buku 20 TAHUN CSIS Ibid.

yang tangguh, sistem organisasi politik yang sehat. Sentra itu meliputi: centre informasi, centre business, centre kebudayaan dan centre pengkajian yang memikirkan masalah nasional dan internasional secara strategis. Oleh karena itu di dalam pengertian itu saya turut mendirikan CSIS ini dan mendukung sepenuhnya. Centre semacam ini harus dapat menyumbangkan produknya bagi pembangunan bangsa dan negara, oleh karena itu centre ini harus menjadi milik bangsa Indonesia. Dari sebab itu dengan tanpa ragu-ragu saya bersama dengan Pak Djono (Soedjono Humardani) melaporkan pendirian Centre ini kepada Pak Harto dan mendapat restunya... 20

Kelompok CSIS ini juga erat kaitannya dengan Organisasi Sosial Politik terbesar, Golkar (Golongan Karya), terutama oleh karena adanya figur Ali Moertopo di situ.

Dilema Modal Asing di Indonesia

Munculnya Undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, merupakan usaha pemerintah Orde Baru sebagai awal untuk melegalkan investasi dari negara luar, sekaligus untuk membiayai pembangunan ekonomi yang akan dilakukan.

Kondisi inflasi yang demikian tinggi, warisan dari jaman Orde Lama, membawa kesulitan tersendiri ketika ingin memulai membuka pintu terhadap modal asing tersebut.

Dalam kondisi yang demikian maka Presiden Soeharto membentuk suatu tim yang merupakan kelembagaan yang ekstra konstitusional, dan disebut sebagai Staff Pribadi (Spri) Presiden, dengan

20. Ali Moertopo, "Centre ini Harus Menjadi Milik Bangsa Indonesia", dalam Ibid.

pembagian bidang-bidang tertentu yang harus ditanganinya.²¹ Dan khusus untuk masalah ekonomi dipegang oleh Brigjen Soedjono Humardani.

Soedjono Humardani bukanlah orang baru dalam menangani masalah ekonomi. Bidang ini sudah digumulinya sejak awal karier militernya sebagai ketua bagian keuangan BPKKP (Badan Penolong Keluarga Korban Perang) pada masa perang kemerdekaan. Pendidikan tentang ilmu ekonomi dan keuangannya juga ia timba dengan mengikuti pendidikan lanjutan selama setahun pada Finance Advance Course, Fort Harrison, Amerika Serikat.²²

Perkenalan Soedjono dengan Soeharto, yang saat itu masih berpangkat Letnan Kolonel, adalah ketika Letkol Soeharto diangkat menjadi kepala staf, dan kemudian panglima divisi Diponegoro, sementara Soedjono sudah lebih dahulu ditugaskan di divisi tersebut.²³

Dengan demikian bagi Soeharto, Soedjono Hoemardani bukanlah orang baru, sehingga tak heran jika kemudian Soedjono masuk dalam

21. Tentang lahirnya Aspri, secara lebih jelas lihat pada Crouch (1978): 307

22. Lebih lengkap tentang diri Soedjono Hoemardani ini bisa melihat pada buku Soedjono Hoemardani: Pendiri CSIS, 1918-1986, Jakarta: CSIS, 1987. Kutipan di atas diambil dari tulisan Harry Tjan Silalahi, "Kata Sebuah Riwayat" Ibid. h.9. Tulisan lain mengenai Soedjono ditulis oleh Michael Sean Malley, "Soedjono Hoemardani dan Orde Baru" dalam Edisi Khusus 20 Tahun Prisma, 1991, h.104-121.

23. Malley (1991). h.105.

anggota Spri dan kemudian juga Aspri,²⁴ dan memiliki tugas untuk memberikan nasihat kepada Presiden Soeharto tentang urusan ekonomi baik dalam maupun luar negeri.²⁵

Setelah kepulangannya dari Amerika dalam mengikuti program pendidikan di bidang keuangan, maka Soedjono pun ikut dalam delegasi diplomatik Indonesia mengunjungi negara Belanda, Amerika Serikat dan Jepang, pada tahun 1966. Dari situ mulailah ia menjalin hubungan dengan sejumlah pengusaha Jepang, sehingga tak heran jika di kemudian hari banyak orang menuduhnya sebagai *Japanese Lobby*, dan menjadi sasaran kritik dari mahasiswa sekitar awal 70-an.²⁶

CSIS, yang ada di bawah naungan Soedjono, otomatis juga erat hubungannya dengan Jepang. Sejak akhir tahun 1973, saat-saat krusial protes mahasiswa dan sejumlah surat kabar terhadap modal Jepang, CSIS memulai dialog rutin dengan negara Jepang dalam bentuk Konferensi Indonesia-Jepang.²⁷

24. Pada awalnya Spri (Staff Pribadi) meliputi sejumlah perwira TNI AD dengan masing-masing tugas yang dibentuk pada masa awal Orde Baru, namun karena ada sejumlah kritik maka terjadi pengurangan jumlah staf tersebut sehingga tinggal Suryo Wiryohadi-putro, Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani. Mereka bertigalah yang kemudian dikenal dengan nama Aspri (Asisten Pribadi). Lihat Crouch (1978): 307. Juga Malley Opcit. h.112.

25. Malley (1991) h.110.

26. Secara khusus tentang peran Soedjono Hoemardani dalam hubungan ekonomi Indonesia-Jepang lihat Michael Sean Malley, "Soedjono Hoemardani and Indonesian-Japanese Relations, 1966-1974" dalam INDONESIA no. 48 (Oktober 1989) h.47-64, juga tulisan Sofjan Wanandi dan J. Soedjati Djiwandono, "Soedjono Hoemardani dan Hubungan Indonesia-Jepang" dalam CSIS Opcit. h.81-90

27. Wanandi dan Djiwandono h.87.

Suatu pertanyaan yang menggelitik di sini adalah, mengapa pilihan untuk bekerja sama di bidang ekonomi ini jatuh ke negara Jepang ? Tidak pada negara-negara seperti Amerika Serikat atau negara-negara Eropa Barat, mengingat fakta bahwa sejak awal tahun 70-an investasi Jepang berhasil menggeser kedudukan Amerika sebagai investor di Indonesia. ²⁸

Dalam perjalanan diplomasi ke Belanda, Amerika serta Jepang di awal masa Orde Baru, khusus dengan negara Jepang, Soedjono mendapat tugas untuk mempersiapkan kunjungan Presiden Soeharto ke Jepang serta memperkenalkan pemerintahan Orde Baru kepada pemerintah Jepang. Disebutkan juga bahwa Soedjono berhasil meyakinkan Jepang, yang saat itu di bawah Perdana Menteri Sato, akan perlunya perbaikan hubungan dengan Indonesia serta membantu usaha pembangunan yang dilakukan pemerintah Orde Baru. ²⁹ Dan untuk itu Jepang bersedia memberikan kredit kepada Indonesia sebesar US \$ 30 juta, sebagai tanda hubungan Indonesia-Jepang akan memulai masa baru.

Harry Tjan sendiri menilai investasi Jepang yang kemudian lebih mendominasi saat itu lebih karena alasan praktis saja. Katanya:

Pada waktu kita membangun ekonomi bisnis, yang paling aktif di Indonesia itu adalah Jepang. Lain dengan kelompok Amerika dan Eropa yang jika mau invest di sini minta stabilitas dulu, jaminan hukum. Jepang itu melihat pasar, lebih aktif konkrit dalam dagang. ³⁰

28. Lihat tabel penanaman modal asing di Indonesia pada lampiran tulisan ini.

29. Wanandi dan Djiwandono Opcit. h.82.

30. Wawancara dengan Harry Tjan Silalahi, tanggal 11 Maret 1993.

Dominasi Jepang dalam perekonomian nasional, rupanya menjadi suatu keprihatinan bagi kalangan cendekiawan dan mahasiswa saat itu. Sejumlah surat kabar juga dengan gencar memberitakan ekkses negatif dari penanaman modal oleh Jepang tersebut.

Indonesia Raya adalah satu dari surat kabar yang melihat modal Jepang secara kritis. Ketika koran ini merasa Indonesia sudah menjadi tergantung secara ekonomi terhadap Jepang, maka itu hanya satu langkah awal saja untuk menjadi tergantung di bidang politik. 31

Bagaimanakah pandangan Mochtar Lubis, pemimpin redaksi Indonesia Raya, terhadap modal Jepang itu sendiri ?

Saya melihat Jepang dengan budaya mereka ketika berhubungan dengan bangsa mana saja. Saya melihat orang Indonesia menganggap Jepang sebagai dewa penyelamat untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Tetapi dari dulu Jepang berperang adalah untuk merebut sumber-sumber daya alam Indonesia, dan merebut pasaran di Indonesia yang besar ini. Nah sekarang Jepang tetap menjadi nomor satu dalam investasi di sini. Saya punya banyak teman orang Jepang, tetapi dengan mereka pun saya katakan bahwa sebagai suatu bangsa atau kekuatan ekonomi Jepang itu berbahaya untuk Asia Tenggara, dan Asia juga...
32

Setidaknya tiga permasalahan yang dikemukakan oleh Nindarsari 33 berkaitan dengan modal Jepang di Indonesia. Pertama, adalah lumpuhnya industri tekstil pribumi akibat penanaman modal

31. "Mutlak Kerjasama dengan Jepang ?" tajuk rencana Indonesia Raya 2 Februari 1972. Secara lebih lengkap lihat pada Bab III dengan sub judul "Pemberitaan tentang Modal Jepang di Indonesia".

32. Wawancara dengan Mochtar Lubis, tanggal 7 Januari 1993.

33. Nindarsari, Implikasi Politik Penanaman Modal Jepang di Indonesia 1970-79, skripsi sarjana Ilmu Politik, FISIP UI, 1984.

asing tersebut. ³⁴ Kedua, adalah hubungan bisnis dari kelompok Jepang ini yang mengambil partner dari WNI keturunan Cina. Dan ketiga, adalah reaksi masyarakat terhadap peristiwa 15 Januari 1974, yang terlihat lebih pada konflik elite antara kelompok Lobby Jepang dengan grup Hankam. ³⁵

Konflik Elite Kekuasaan (?)

Pada akhirnya, setelah lewat 20 tahun usia Orde Baru, maka interpretasi tentang apa yang terjadi di awal Orde Baru itu mulai banyak dipertanyakan kembali. Seperti halnya dengan apa yang sering dianggap adanya rivalitas atau konflik elite di dalam pemerintahan, yang teridentifisir antara kelompok Ali Moertopo di satu pihak dengan kelompok Soemitro di lain pihak. ³⁶

Perbedaan antara dua kelompok memang diakui ada, namun bahwa

34. Bandingkan dengan Richard Robison, "Toward A Class Analysis of the Indonesian Military Bureaucratic State", INDONESIA no. 25 (April) 1978, h.17-39.

35. Nindarsari Opcit. h.119.

36. Contoh mudah untuk memperlihatkan sinyalemen yang ditangkap oleh para analis misalnya buku Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia (1978), juga artikelnya, "The 15th Januari Affair" (1974), serta sederet buku dan tulisan lain yang banyak mengacu pada apa yang sudah ditulis oleh Crouch tersebut. Namun pada saat ditemui untuk kepentingan penulisan ini, maka sejumlah pihak yang terlibat mulai menyangkal terjadinya persaingan di antara dua kelompok tersebut. Sejumlah majalah populer di ibukota terakhir-terakhir ini pun sering memunculkan wawancara dengan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan "persaingan" tersebut. Lihat wawancara dengan eks kepala BAKIN, Jend. (Purn) Sutopo Juwono, Jakarta-Jakarta no. 361, 5-11 Juni 1993; juga wawancara dengan eks Pangkopkamtib Jend. (Purn) Soemitro, TEMPO 6 April 1991.

kemudian muncul rivalitas untuk suksesi kepemimpinan nasional, hal ini ditolak oleh dua kubu tersebut. Mungkin sebagai gambaran bisa dipakai ungkapan dari Harry Tjan Silalahi yang mengatakan bahwa perbedaan antara dua kubu itu memang ada,

"... dan dalam kehidupan politik, perbedaan dua tiga derajat di atas itu, kalau sudah sampai di bawah bisa jadi bedanya jadi beberapa kilometer..."³⁷

atau juga katanya:

"secara subyektif kedua pihak tidak akan mengaku ada persaingan, tetapi obyektif... ya ada..."³⁸

Baik Jend (Purn) Soemitro,³⁹ Jendral (Purn) Sutopo Juwono,⁴⁰ serta Harry Tjan Silalahi⁴¹ mengungkapkan bahwa persepsi yang dilihat pengamat sebagai rivalitas ketika terjadi pembagian tugas yang dilakukan Presiden Soeharto sendiri ke dalam grup BAKIN dan Kopkamtib di satu kelompok, yaitu Soemitro dan Sutopo Juwono, yang menangani masalah keamanan serta Ali Moertopo dan Soedjono Humardani sebagai Asisten Pribadi di kelompok lain, yang menangani masalah ekonomi dan Operasi Khusus (Opsus).

Alasan pembagian dalam dua kelompok tersebut, lewat penuturan Sutopo Juwono, tidak diketahui secara pasti, namun katanya:

sebenarnya adalah hal yang biasa dalam manajemen jika dike-

37. Wawancara dengan Harry Tjan Silalahi, tanggal 11 Maret 1993.

38. Ibid.

39. Wawancara pada tanggal 23 Januari 1993.

40. Wawancara pada tanggal 18 Januari 1993.

41. Wawancara pada tanggal 11 Maret 1993.

nal ada orang yang diposisikan dirinya sebagai institusional dan ada juga yang menjadi *free-willer*. Karena *free-willer* ini dipakai dalam *manage* keadaan krisis, agar dapat menyelesaikannya. Dan antara BAKIN dan Kopkamtib sebagai pihak institusional memang dekat, karena sama-sama mengurus masalah keamanan.⁴²

Harry Tjan Silalahi yang dikenal cukup dekat dengan Ali Moertopo menggambarkan dua figur, Soemitro dan Ali Moertopo, sebagai:

keduanya mempunyai watak pribadi yang ekstrovert, oleh karena itu kadang-kadang ada tumpang tindih dalam wewenang sehingga yang menonjol keluar, setidaknya dinilai pihak luar sebagai rivalitet.⁴³

Dalam suatu wawancara yang dilakukan oleh Majalah TEMPO, Jendral Soemitro pernah mengatakan kepada Ali Moertopo ketika itu, bahwa rivalitas di antara keduanya adalah tidak mungkin,

"Li, suara di luar mengatakan bahwa kamu rival saya. Itu tidak bisa, saya ini masih militer tidak punya tujuan politik. Kamu bintang dua, saya bintang empat, kamu deputi BAKIN, saya Pangkopkamtib dan Wapangab. Jarak kita terlalu jauh untuk jadi rival. Tapi kalau mau jadi presiden, itu hakmu."⁴⁴

Sutopo Juwono sendiri juga menolak isu tentang rivalitas dua kubu tersebut, karena yang memerintahkan pengelompokan demikian adalah Presiden sendiri. Namun secara pribadi ia juga mengatakan curiga bahwa Ali Moertopo memiliki ambisi-ambisi tertentu

42. Wawancara dengan Sutopo Juwono, 18 Januari 1993.

43. Wawancara dengan Harry Tjan Silalahi pada tanggal 11 Maret 1993

44. "Memoar Jendral Soemitro: Lebih Suka Melihat ke Depan", TEMPO 6 April 1991, h.66.

dengan segala tingkah lakunya di lapangan. 45

Apa yang ditangkap oleh media massa saat itu berbeda dengan penjelasan di atas, yang justru menggambarkan rivalitas tersebut, dan akhirnya Soemitro tampak sebagai pihak yang kalah.

Isu mulai berkembang saat itu ketika Soemitro menyebutkan tentang perlunya dilakukan Pola Kepemimpinan Nasional yang Baru, saat ia melakukan kunjungan ke kampus-kampus di Jawa. Banyak orang mengira bahwa hal ini merupakanancang-ancang Soemitro untuk meraih posisi sebagai Pemimpin Nasional yang baru.

Oleh karena itu pada tanggal 2 Januari 1974, setelah bertemu dengan Presiden, yang juga dihadiri oleh Ali Moertopo dan Sutopo Juwono, Soemitro merasa perlu untuk mengeluarkan pernyataan bahwa Pola Kepemimpinan Nasional yang baru tidaklah sama dengan mengganti pemimpin nasional. Soemitro menyatakan kepada para wartawan bahwa ia tidak memiliki ambisi pribadi. 46

Banyak hal memang, yang sudah dilakukan Ali Moertopo pada masa awal Orde Baru, terutama dengan ikut menata kehidupan politik di Indonesia. Pemikiran Ali terangkum dalam buku yang dikenal berjudul "Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun", "Strategi Politik Nasional", dan "Strategi Kebudayaan". 47 Namun sekalipun

45. Wawancara pada tanggal 18 Januari 1993.

46. Francois Raillon Opcit. h.110 Soemitro dalam wawancara pada tanggal 23 Januari 1993 juga menegaskan hal tersebut. Namun Raillon Ibid. menuliskan, "Ucapan Soemitro itu nampaknya menunjukkan kekalahannya terhadap Ali Moertopo di muka publik."

47. Kedua buku ini diterbitkan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

banyak orang yang mengagumi ide-idenya, banyak pula orang yang tidak suka padanya dan menentang pemikirannya. 48

Mulai dari masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, tokoh Ali Moertopo ini berperan aktif. Walau bukan satu-satunya arsitek Orde Baru, namun ia telah mewarnai kehidupan Orde Baru, dan setiap pembicaraan tentang ideologi, sosial budaya bahkan ekonomi, tidak mungkin tanpa menyinggung Ali Moertopo. 49

Untuk menggambarkan betapa luas bidang cakupan yang pernah digarap Ali Moertopo, disebutkan "Dari nasib nelayan, buruh dan tani, Parnpol dan Golkar, perkembangan politik sampai ke ancaman terhadap Republik ini serta perkembangan dunia dicobanya untuk dimengerti, dan bila mungkin dicarikan bentuk-bentuk pemecahannya." 50

Dengan luasnya bidang garapan Ali Moertopo entah dalam kapasitas sebagai Deputi BAKIN ataupun sebagai Asisten Pribadi Presiden, maka tak heran jika di situlah terjadi tumpang tindih dengan kelembagaan-kelembagaan lain, yang digambarkan oleh Sutopo Juwono, "orang institusional, macam menteri-menteri kabinet, tidak pernah akur dengannya".

Tindakan Ali Moertopo yang paling kontroversial adalah ketika ia melakukan pembaharuan tata kehidupan politik berupa penyederhanaan kepartaian dan perubahan sikap mental dari ideologi partai ke ideologi Pancasila. Tindakan ini banyak menimbulkan

48. Lihat Krissantono, "Ali Moertopo di Atas Panggung Orde Baru", dalam Edisi Khusus 20 Tahun PRISMA, 1991, h.136-157.

49. Ibid. h.143

50. Ibid.

reaksi keras di kalangan partai-partai dan masyarakat saat itu.
51

Kronologi Peristiwa 15 Januari 1974

Peristiwa 15 Januari lebih banyak dilihat sebagai eksekusi pergerakan mahasiswa yang saat itu melakukan kritik terhadap strategi pembangunan ekonomi Orde Baru. Momentum pergerakan mahasiswa bukanlah satu-satunya yang menyebabkan terjadinya peristiwa 15 Januari, namun bagian yang cukup dominan untuk dibicarakan.

Di luar aktivitas mahasiswa kala itu juga perlu diperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan juga pergolakan suatu negara yang baru saja memulai pembangunan; serta aparat kenegaraan yang saat itu belum terlalu kuat sehingga muncul banyak praktek kekuasaan yang *extra ordinary*, yang mengimplikasikan gesekan-gesekan kepada masyarakat bawah.

Untuk menyebutkan kapan mulai munculnya kondisi yang melatarbelakangi Peristiwa 15 Januari 1974, adalah suatu hal yang sulit dijawab, karena ada beberapa versi untuk itu.

Marzuki Arifin, seorang bekas pemimpin redaksi Majalah

51. Lihat Brian May, The Indonesian Tragedy, Singapore: Graham Brash, 1978, h. 281-288. Pada masa Pemilihan Umum 1971, Pemilu pertama pada masa Orde Baru dan Pemilu pertama yang diikuti oleh Golkar, muncullah kelompok "Golput" (Golongan Putih) yang memprotes praktek Pemilu yang tidak fair, dengan menggunakan intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh Golkar. Lihat Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia, Pemilihan Umum 1971, Seri Berita dan Pendapat, Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers, 1972, h.125-133.

Ekspres, menuliskan bahwa, "Dian-dian yang memercikkan api sub-versi yang menjurus pada makar - Peristiwa 15 Januari 1974 - bermula di sekitar September dan awal Oktober 1973" 52

Disebutkan Marzuki, dua peristiwa yang merupakan penyebab utama "letupan-letupan keresahan masyarakat - terutama generasi mudanya - yang tanpa sadar telah menjadi titian emas pelaku-pelaku makar dalam usaha mereka menjatuhkan pimpinan nasional Republik Indonesia", yaitu " 1) tulisan-tulisan yang disebarluaskan melalui media massa, membeberkan peranan 'pincang' modal asing, terutama Jepang, di Indonesia dan 2) ucapan Pangkopkamtib Jendral Soemitro bahwa rambut gondrong membuat pemuda *onverschillig*, acuh tak acuh". 53

Francois Raillon menyebutkan bahwa kerusuhan di Bandung yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 1973 adalah peristiwa pendahulu dari Peristiwa 15 Januari 1974 di Jakarta. 54

Penuturan seorang pelaku, Bambang Sulistomo, 55 yang saat itu adalah mahasiswa Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia, menyebutkan sejumlah gerakan protes sosial besar yang terjadi menjelang Peristiwa 15 Januari 1974. Ia menyebutkan peristiwa itu adalah peristiwa 5 Agustus 1973 di Bandung, lalu pergerakan massa oleh beberapa organisasi massa Islam ke DPR pada tanggal 27 September 1973. Juga Petisi 24 Oktober 1973, penyam-

52. Marzuki Arifin Opcit. h.95.

53. Ibid.

54. Raillon Opcit. h.101

55. Bambang Sulistomo, Opcit.

butan ketua IGGI, JP Pronk, pernyataan sikap Dewan-dewan Mahasiswa se Indonesia dalam pertemuan dengan Presiden, serta pencetusan Tritura 1974 dan aksi penolakan dialog dengan PM Jepang, Tanaka.
56

Heru Cahyono, seorang yang menulis tentang kelompok GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam), dalam menerangkan terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974, memberikan ilustrasi tentang gerakan mahasiswa yang sudah mulai berlangsung sejak tahun 1970 yang mengadakan demonstrasi menentang kenaikan harga bensin dan menuntut pemberantasan korupsi. Dikatakan pula bahwa pers terlibat dalam interaksi intens dengan mahasiswa serta pemerintah mengenai isu pemberantasan korupsi tersebut. 57

Lepas dari perbedaan kapan dimulainya kondisi yang melahirkan terjadinya Peristiwa 15 Januari, mulai sejak paruh akhir 1973 dalam situasi nasional terjadi banyak peristiwa yang saling bersilangan; perekonomian awal Orde Baru, gerakan mahasiswa, arus penentangan modal Jepang, liputan surat kabar atas eksekusi negatif modal asing, krisis pangan, suasana 'pertikaian' antara kelompok Soemitro dan kelompok Ali Moertopo.

Pergerakan mahasiswa yang saat itu dimotori oleh mahasiswa UI akhirnya memunculkan statemen yang memberikan penilaian atas perkembangan nasional saat itu. Statemen tersebut dikenal sebagai

56. Ibid. h.81.

57. Cahyono Opcit. h.145.

Petisi 24 Oktober. 58

Protes mahasiswa terhadap modal Jepang semakin memuncak sampai akhirnya mereka mengadakan demonstrasi untuk menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka pada tanggal 14 Januari 1974. Beberapa hari sebelumnya sejumlah mahasiswa yang mewakili pelbagai universitas bertemu Presiden Soeharto dan menyampaikan Deklarasi Mahasiswa Indonesia serta Tuntutan Mahasiswa Indonesia. 59

Di bagian lain, Jendral M. Panggabean yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Keamanan mengatakan bahwa tanggal 14 Januari 1974 sore, ia bersama dengan Soemitro berada di rumah Presiden, jalan Cendana, untuk melapor tentang kemungkinan adanya demonstrasi kepada Presiden. 60

Hariman Siregar, yang saat itu menjadi Ketua Dewan Mahasiswa

58. Lebih jauh tentang aktivitas mahasiswa saat itu, bisa dilihat pada bab III tentang Indonesia Raya dan liputannya atas gerakan mahasiswa saat itu, dan juga bisa dilihat teks lengkap Petisi 24 Oktober tersebut.

59. Lihat Indonesia Raya, 12 Januari 1974, dan tajuk rencana pada hari yang sama, "Dialog Tertutup Presiden dan Para Mahasiswa". Koran ini berharap agar, "...semua yang disampaikan para mahasiswa ini dapat dipakai sebagai bahan oleh presiden untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang dilakukan selama ini di bidang pemerintahan yang mungkin tidak diketahui presiden. Kritik-kritik terhadap pembantu-pembantu terdekat presiden harus ditanggapi dengan positif karena tindakan-tindakan pembantu ini seringkali merusak 'image' masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto tanpa diketahuinya."

60. Lihat M. Panggabean, Berjuang dan Mengabdikan, Pustaka Sinar Harapan, 1993, h.411 Yang mengherankan adalah dalam wawancara dengan Jendral (purn.) Soemitro, tanggal 23 Januari 1993, tegas dan berkali-kali ia mengatakan tidak pernah mengunjungi Presiden bersama dengan Panggabean pada malam sebelum terjadi kerusuhan tersebut.

UI, menjelaskan bahwa pada malam setelah demonstrasi menyambut Tanaka di lapangan udara Halim Perdanakusuma, para mahasiswa mengadakan rapat di UI. Rapat tersebut membahas tentang undangan dialog dengan Tanaka keesokan harinya serta membahas statemen dari Panggabean yang menuduh gerakan mahasiswa sudah menjurus kepada makar. Hasil rapat disebutkan menolak dialog dan tetap mengadakan demonstrasi, serta akan diadakan rapat umum di Universitas Trisakti. Semula rapat hendak dilakukan di Monumen Nasional. 61

Keesokan harinya, tanggal 15 Januari 1974, mahasiswa dan banyak unsur lain, berkumpul di Universitas Indonesia dan bergerak menuju Universitas Trisakti. Dalam perjalanan tersebut mulailah terjadi pembakaran terhadap kendaraan-kendaraan merk Jepang, serta toko-toko. Gedung ASTRA yang mewakili citra perusahaan Jepang tidak luput dari serangan massa. Menurut sumber resmi, korban yang jatuh saat itu meliputi 11 orang meninggal dunia, 17 orang luka berat, 120 luka ringan, kendaraan yang dibakar atau dirusak berjumlah 807 mobil dan 187 motor, serta bangunan yang rusak atau dibakar berjumlah 145 gedung. Dari situ ditahanlah sejumlah 775 orang. 62 Dari sejumlah yang ditahan tersebut terdapat nama-nama seperti: Subadio Sastrosatomo, eks ketua Partai Sosialis Indonesia, juga Prof. Sarbini Sumawinata, Adnan Buyung Nasution, Dorodjatun Kuntjoro Jakti, H. Princen, Imam Walujo,

61. Lihat Wawancara MATRA dengan Hariman Siregar pada Edisi Khusus III, Agustus 1992, h.27.

62. Diambil berdasarkan keterangan resmi pemerintah di depan Dewan Perwakilan Rakyat, dikutip dari Arifin Opcit, h.338-339.

Jusuf AR, Jessy Moningga, Hariman Siregar dan lain-lain.

Siapa yang menjadi pelaku pembakaran dan pengrusakan tersebut sampai saat ini tetap membuahakan pertanyaan. Apakah dari pihak mahasiswa, atau kelompok di luar mahasiswa yang ikut bergabung dengan massa ? Ataukah ada suatu rekayasa tertentu yang bertendensi mendiskreditkan mahasiswa ? Ataukah ini bagian dari pertikaian kelompok elite, untuk saling memukul lawannya ?

Jawaban atas pertanyaan ini pun tidaklah mudah, karena sampai pada peradilan terhadap mahasiswa yang dituduh terlibat dalam peristiwa 15 Januari tersebut, tidak didapatkan jawaban yang cukup memuaskan.

Marzuki Arifin, dengan gamblang menuduh peristiwa 15 Januari adalah perbuatan dari eks Partai Sosialis Indonesia dan Partai Islam, Masjumi. Dan Ali Moertopo pun dengan tegas menyebutkan kedua kelompok tersebut yang menjadi arsiteknya.⁶³

Sementara itu tuduhan yang ditujukan kepada kelompok Ali Moertopo pun tidaklah sedikit. Seperti yang ditulis oleh Bambang Sulistomo dengan mengutip Dey Hong Lee⁶⁴ pelaku kerusakan dan

63. Lihat Arifin Ibid. h.168-170, yang mengutip wawancara majalah EKSPRES dengan Ali Moertopo pada tanggal 21 Januari 1974. Tetapi akhirnya Majalah ini pun tidak luput dari pencabutan SIT dan SIC berkenaan dengan liputannya terhadap peristiwa tersebut.

64. Dey Hong Lee, Indonesia Facing the 1980's: A Political Analysis, Hull, England: Europress, 1979, h.241

pembakaran adalah orang-orang yang dekat dengan Ali Moertopo, seperti Letkol Utomo dan Liem Bian Kie ⁶⁵. Yang terakhir ini juga dikatakan merencanakan untuk membuat gerakan balasan terhadap mahasiswa. ⁶⁶

Selain itu juga muncul tuduhan bahwa terjadinya pembreidelan atas sejumlah penerbitan pers karena tokoh-tokohnya dituduh sebagai otak dari demonstrasi yang mengakibatkan kerusuhan tersebut. ⁶⁷

Penolakan atas tuduhan melakukan konspirasi diungkapkan oleh Rahman Tolleng. Ia mengatakan bahwa para intelektual pembaharu sudah jelas mendukung demonstrasi mahasiswa dan mengkritik strategi pembangunan yang dipakai pemerintah, namun mereka tidak melakukan konspirasi. Kerusuhan yang terjadi pada 15-16 Januari adalah hasil dorongan para agen provokator. Agen ini berusaha

65. Liem Bian Kie atau yang kini dikenal sebagai Jusuf Wanandi adalah sekretaris Ali Moertopo untuk bidang Operasi Khusus. Sedangkan Liem Bian Koen atau Sofyan Wanandi, adik kandungnya, menjadi sekretaris Soedjono Humardani. Kedua bersaudara ini dekat dengan kelompok Aspri, sehingga tak heran jika dalam salah satu demonstrasi mahasiswa pada saat itu, selain patung Soedjono Humardani dibakar, maka patung yang dibuat dalam rupa Liem Bian Koen juga dibakar. Lihat Indonesia Raya 10 Januari 1974. Baik Jusuf Wanandi dan Sofjan Wanandi kini tercatat sebagai Dewan Direktur dan Dewan Penyantun CSIS.

66. Lihat C. van Dijk, "The Hariman Siregar Trial" dalam Review of Indonesian-Malayan Affairs vol. 9 Jan-Dec 1975, h.24-25. Juga keterangan Jopie Lasut dalam peradilan Hariman Siregar, Kompas 8 Oktober 1974.

67. Misalnya adalah Rahman Tolleng, yang dikenal sebagai Pemimpin Mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung, serta Mochtar Lubis, Pemimpin Redaksi Indonesia Raya. Rahman Tolleng setelah ditahan selama enam belas bulan akhirnya dibebaskan karena tidak terdapat bukti-bukti yang cukup, lihat Raillon Opcit. h.113. Yang juga mengherankan adalah penahanan Mochtar Lubis yang baru dilakukan pada tanggal 4 Februari 1975. Namun akhirnya dibebaskan pada 15 April 1975. Lihat Abdurrachman (1980) h.253.

menodai gerakan yang mengecam pemerintah, membungkam seluruh kritik dan memperkuat tesis tentang adanya komplotan PSI-Masjumi, serta menangkapi orang-orang yang dekat dengan partai tersebut.
68

Harold Crouch, seorang pengamat masalah militer di Indonesia mengungkapkan analisisnya tentang peristiwa 15 Januari tersebut,
69 sebagai buah pertikaian dari kubu Soemitro dan Ali Moertopo.

Crouch menilai bahwa kelompok Aspri, yaitu Ali Moertopo, Soedjono Humardani dan Suryo, menjadi anggota lingkungan kepresidenan yang paling dipercaya dan sulit digantikan, oleh karena kecerdikan mereka di bidang keuangan dan hubungan mereka secara pribadi yang lama dengan Soeharto. Walaupun mereka tidak memiliki jabatan-jabatan resmi dalam pemerintahan atau lembaga kemiliteran, tetapi mereka mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengangkatan-pengangkatan dan kebijakan politik dalam bidang pemerintahan maupun di bidang kemiliteran.
70 Disebutkan pula Jendral M. Panggabean, Menteri Pertahanan dan Keamanan, sekaligus Pangab, adalah orang yang dekat dengan Aspri.

Di lain pihak Jendral Soemitro, Pangkopkamtib, semakin hari semakin diakui sebagai juru bicara dari kalangan militer profesional dalam lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan. Sebagai wakil Panglima ABRI dan Pangkopkamtib, Soemitro mempunyai kekua-

68. Raillon Opcit h.114.

69. Harold Crouch, The 15th Januari Affair in Indonesia, Dyason House Papers, 1974.

70. Ibid.

saan resmi yang luas dan hubungannya yang teratur dengan panglima-panglima daerah yang bertindak sebagai pelaksana khusus Kopkamtib di daerah masing-masing. ⁷¹

Crouch pun mencatat bahwa persaingan antara kelompok Aspri dan kelompok Hankam, untuk menyebut nama lain bagi kelompok Soemitro, menjelma dalam bentuk geser menggeser dalam lingkungan dalam elite kekuasaan. Misalnya setelah Ali Moertopo sukses menjadikan Golkar sebagai pemenang pada Pemilu tahun 1971, maka para perwira yang lain berusaha mencegah agar Golkar tidak menjadi landasan bagi Ali Moertopo. Akhirnya dalam kongres pertama Golkar pada bulan September 1973 jabatan-jabatan di dalamnya terbagi dua sama kuat antar dua kelompok tersebut. ⁷²

Fakta lain tergalil dari tulisan Heru Cahyono ⁷³ yang mencoba melihat peranan kelompok GUPPI dalam peristiwa 15 Januari 1974 tersebut. Dalam tulisannya, Heru Cahyono menggolongkan GUPPI sebagai bagian dari pergerakan kelompok Ali Moertopo. ⁷⁴

Tidak sebagai lembaga GUPPI terlibat dalam peristiwa 15 Januari 1974, namun beberapa pengurus dan anggota GUPPI ikut terlibat bahkan sempat menjadi tahanan bersama dengan tahanan lain dari kalangan mahasiswa demonstran. Di sini kemudian muncul apa yang dinamakan sebagai 'Dokumen Ramadi', yang isinya menyebutkan tentang usaha menggulingkan presiden, dan secara jelas

71. Ibid.

72. Ibid.

73. Cahyono Opcit.

74. Ibid. h.153-170.

hendak mengadu domba antara Presiden dengan Soemitro. 75

Disebutkan pula bahwa dalam tahanan kehadiran sejumlah orang yang tergabung dalam kelompok Islam, mengherankan para mahasiswa karena mereka merasa tidak pernah berhubungan sebelumnya dengan kelompok tersebut. 76 Dan tak disadari oleh kelompok mahasiswa adalah keterlibatan beberapa unsur DI/TII dalam peristiwa 15 Januari tersebut. 77

Dari kesaksian pada peradilan terhadap Hariman Siregar terungkap bahwa pada saat kejadian tanggal 15 Januari tersebut, ada rombongan pemuda yang dipimpin oleh Moas, pemimpin Kelompok Pelajar Golkar, yang menyatakan ikut bergabung dengan massa, namun ditolak oleh kelompok mahasiswa. 78 Dan dalam perjalanan menuju ke Trisakti itu pun ada usaha-usaha untuk memecah rombongan mahasiswa. 79 Bahkan dikatakan pula bahwa kelompok mahasiswa lain yang dikenal amat menentang gerakan mahasiswa malah membujuk

75. Lihat Cahyono Ibid. h.156, footnote 28. Soemitro sendiri tidak terlalu menanggapi isi dokumen itu. Ia pun mengatakan bahwa Presiden juga tidak terlalu menanggapi isi dokumen tersebut. Soeharto pun merasa bahwa dokumen tersebut hanya untuk mencemarkan nama baik Soemitro. Wawancara pada tanggal 23 Januari 1993, dan lihat juga Memoar Jendral Soemitro, TEMPO 6 April 1991.

76. Cahyono Ibid. h.164.

77. Ibid. lihat footnote no.53. Sutopo Juwono dalam wawancara tanggal 18 Januari 1993 mengungkapkan bahwa ia sudah sering mewanti-wanti Ali Moertopo agar tidak main-main dengan orang-orang eks DI/TII, "hati-hati, nanti akan memukul you sendiri..." demikian pesan Sutopo Juwono.

78. Lihat kesaksian Jopie Lasut pada sidang Hariman, Kompas 8 Oktober 1974, dan juga Cahyono Ibid. h.160 footnote no.35.

79. Cahyono Ibid. footnote no.35.

massa untuk menuju gedung Pertamina dan Astra. ⁸⁰

Jelas di sini terlihat bahwa kejadian yang menghasilkan kerusakan dan kerusuhan pada tanggal 15-16 Januari 1974 tersebut pada akhirnya bukan tujuan yang hendak dilakukan oleh mahasiswa. Munculnya unsur luar yang ikut dalam massa mahasiswa, ingin mengalihkan sasaran akhirnya memang mencoreng nama baik mahasiswa.

Dengan segala teror yang dialami mahasiswa, juga korban pengrusakan dan pembakaran sejumlah gedung serta kendaraan, maka mahasiswa pun mengeluarkan statemen pada tanggal 16 Januari 1974, yang menyatakan tindakan-tindakan pengrusakan dan pembakaran adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan serta merusak perjuangan mahasiswa dan menyesalkan jatuhnya korban yang mengakibatkan kerugian moral dan materiil. ⁸¹ Namun statemen itu sendiri dikecam oleh aparat keamanan sebagai tindakan cuci tangan mahasiswa terhadap kejadian 15-16 Januari itu. ⁸²

Liputan Indonesia Raya atas Peristiwa 15 Januari 1974

Pada tanggal 14 Januari 1974, Indonesia Raya menurunkan tajuk rencana yang demikian panjang untuk menyambut Perdana

80. Kesaksian Jopie Lasut pada sidang Hariman Kompas 8 Oktober 1974. Lihat juga Cahyono Ibid. h.161 dan van Dijk Opcit. h.24-25

81. Indonesia Raya 17 Januari 1974.

82. Indonesia Raya 17 Januari 1974.

Menteri Jepang, Tanaka. Tajuk itu ditulis oleh Mochtar Lubis sendiri. 83

Sebagai orang Indonesia yang baik dan harus memelihara tradisi Indonesia yang termashur ramah pada tamu, maka kami pun mengucapkan selamat datang pada Perdana Menteri Tanaka.

Kami berharap dia senang berkunjung ke tanah air kita. Kami berharap dia telah mempelajari dengan sungguh-sungguh dan dengan cermat tulisan Prof. Yano di koran Sankei yang telah kita siarkan beberapa hari yang lalu.

Kita berharap setelah berbicara dengan berbagai pimpinan pemerintah di Indonesia, maka Tanaka akan mengambil prakarsa untuk meletakkan saluran-saluran hubungan Jepang dan Indonesia ke tingkat yang wajar dan patut dan tidak lagi campur aduk dengan kepentingan *vested interest Jakarta Lobby* dan *Tokyo Lobby*.

Kita juga berharap Tanaka akan suka meluangkan waktu untuk bertemu dengan pihak-pihak lain di luar pertemuan resminya seperti dengan mahasiswa / pemuda, agar lengkap gambaran dan pandangannya mengenai apa yang hidup di Indonesia dalam hubungannya dengan Jepang.

Sayang Tanaka tidak dapat dibawa melihat ke Kalimantan (hutan-hutan yang dirusak oleh penebang kayu main hantam kromo) atau dibawa ke Ambon melihat cara kerja orang Jepang menangkap udang sewenang-wenang atau ke pabrik-pabrik yang memakai mesin-mesin Jepang bekas pakai dan disunglap menjadi baru. Dan sayang tidak dapat memperlihatkan padanya kelakuan-kelakuan modal Jepang yang mengorupsikan orang di Indonesia.

Yang amat perlu dikenal Tanaka adalah semangat, pikiran, pandangan dan jiwa generasi muda Indonesia yang akan meneruskan pimpinan bangsa Indonesia ini di masa depan. Jiwa Indonesia yang tidak menerima kedudukan Indonesia lebih rendah atau lemah dalam hubungan dengan Jepang. Yang menuntut agar Jepang dan Indonesia harus mengembangkan hubungan yang adil dan sama.

Sementara itu bagi kita sendiri harus menyadari mengapa kini Tanaka datang ke Indonesia dan negara-negara Asean lain? Mengapa ia paling lama di Indonesia? Hanya 3 hari di Filipina, 2 hari di Bangkok, 1 hari di Singapura, 2 hari di Kuala Lumpur, tetapi 4 hari di Indonesia?

Salah sebuah kekurangan Tanaka yang dirasa sendiri oleh orang Jepang (termasuk beberapa penasehatnya) adalah bahwa

83. Menurut keterangan Atmakusumah, kekhasan tajuk yang ditulis oleh Mochtar Lubis adalah menutup tulisan dengan tanda tiga buah bintang yang membentuk segitiga, dan bila Mochtar Lubis sedang bepergian ke luar negeri, ia biasanya membuat tajuk simpanan yang topiknya masih dipakai untuk beberapa hari kemudian. Selain Mochtar Lubis, penulis tajuk yang lain adalah Enggak Bahau'ddin, juga Kustiniyati Mochtar, dan terkadang Atmakusumah juga.

Tanaka tidak punya perhatian pada soal-soal luarnegeri, kecuali yang langsung besar artinya bagi kepentingan Jepang, seperti hubungan dengan AS. Malahan seorang penasehat Tanaka mengatakan bahwa Tanaka tidak ada perhatian sama sekali pada Asia Tenggara, India, Pakistan, Sailand, Afrika dsb.

Perhatian utamanya adalah bagaimana dapat mempertahankan kedudukannya di Jepang, jadinya politik dalam negeri Jepang.

Carlos Romulo, Menlu Filipina, ketika Tanaka akan tiba di Filipina menyinggung kembali gagasan "Marshall Plan" untuk Asia, agar gagasan itu dilaksanakan oleh Jepang. Tetapi ia diguyur air dingin oleh Tanaka yang mengatakan bahwa sudah cukup banyak badan-badan internasional yang mengurus perkembangan Asia seperti Bank Dunia, Asian Development Bank, IMF dsb.

Lalu presiden Marcos menyebut tentang Asian Forum dan Tanaka menolaknya dan menyebut telah ada badan-badan PBB untuk urusan seperti ini.

Mengenai pikiran agar negara-negara di dunia mengakui prinsip arkipelago yakni pengakuan internasional terhadap kedaulatan negara-negara kepulauan atas laut di antara pulau mereka, maka Tanaka juga menolaknya, karena dia hendak melindungi kepentingan penangkapan ikan Jepang.

Jelas sekali bahwa tujuan kedatangan Jepang ke Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura dan Malaysia didorong oleh kekhawatiran Jepang mengenai kemarahan dan kebencian orang-orang di Asia Tenggara yang mereka lihat semakin meningkat terhadap Jepang. Hal ini mereka rasa akan membahayakan sumber-sumber bahan alam dan makanan bagi Jepang di masa depan. Maka Tanaka harus datang menyelamatkan ini. Jadi kedatangan Tanaka didorong oleh keperluan untuk melindungi kepentingan Jepang dan bukan oleh perhatian yang tulus ikhlas untuk membina hubungan yang saling bermanfaat dengan Asia Tenggara.

Kitapun di Indonesia lewat Adam Malik di masa lampau telah memajukan gagasan 'rencana Marshall untuk Asia' juga pada Jepang. Dan hingga kinipun kita tidak mendapat sambutan apapun di Tokyo. Indonesia juga memperjuangkan prinsip pengakuan kedaulatan kita atas lautan antar kepulauan Nusantara.

Pikiran Marcos tentang Asian Forum sebenarnya cukup menarik dan dapat bermanfaat. Tetapi mungkin Jepang merasa tidak berkepentingan untuk ikut dalam Asian Forum demikian. Dia lebih suka masuk klub negara-negara kaya bersama AS dan Eropa Barat.

Semua ini memberi kita satu pelajaran, orang Indonesia, terutama pemimpin bangsa kita harus belajar memperbesar kepercayaan pada diri kita sendiri dan mengembangkan kemampuan bangsa kita untuk lebih baik dapat melindungi kepentingan-kepentingan bangsa kita terhadap siapa saja di dunia ini. Dan jangan mengharap Jepang akan berubah begitu saja.

Setelah mengatakan ini semua, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Tanaka, dan mendoakan semoga orang Jepang dapat lebih memahami lagi tuntutan-tuntutan perbaikan berdasarkan keadilan dan kesamaan dalam hubungan Indonesia-

Jepang yang dicetuskan mahasiswa dan pemuda Indonesia demikian tegasnya di masa terakhir. Dan akhirnya bukan saja memahaminya tetapi merubah sikap-sikap mereka selama ini. 84

Ungkapan panjang lebar yang sengaja ditulis lengkap ini ingin memperlihatkan bagaimana sikap Indonesia Raya atas kedatangan Tanaka, dan policy yang dilaksanakan Perdana Menteri Jepang tersebut. Tampak bahwa Mochtar Lubis bukan orang yang tidak tahu masalah-masalah internasional. Ia dengan kritis hendak memperlihatkan bagaimana peranan Jepang di kawasan Asia Tenggara, serta kepentingan ekonomi politik apa yang dimiliki negara itu.

Mochtar Lubis sendiri ikut aktif dalam berbagai diskusi seputar masalah modal asing, umpamanya seperti yang diselenggarakan di Balai Budaya. Disebutkan bahwa pada diskusi yang berlangsung bulan September 1973 tersebut, Mochtar Lubis mencanangkan tekad untuk memberi pelajaran kepada pihak Jepang. 85

Keesokan harinya, tanggal 15 Januari 1974, Indonesia Raya memuat *headline* tentang demonstrasi mahasiswa menyambut kedatangan Perdana Menteri Tanaka di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma. Ratusan mahasiswa mencoba mendekati Halim, dan sedikitnya 8 orang

84. "Selamat Datang Tanaka-san", tajuk rencana Indonesia Raya 14 Januari 1974.

85. Lihat Cahyono Opcit. h.149. Mungkin apa yang dikatakan Heru Cahyono sebagai 'gerakan anti Jepang' terlalu berlebihan di situ, karena jika mengacu pada wawancara dengan Mochtar Lubis sendiri, ia lebih melihat Jepang berbahaya sebagai suatu kepentingan ekonomi, dan tidak dengan sendirinya lalu menolak Jepang untuk kepentingan yang lain. Lihat Bab III tentang Modal Jepang. Setidaknya dalam kapasitasnya sebagai seorang budayawan pula, Mochtar Lubis punya apresiasi yang tinggi atas budaya bangsa Jepang. Lihat edisi Lampiran Khusus Jepang, Indonesia Raya 17 Agustus 1972.

mahasiswa ditahan oleh kesatuan gabungan Angkatan Bersenjata.

Di bagian lain disebutkan bahwa Menteri Pertahanan Keamanan, Jendral M. Panggabean mengatakan bahwa demonstrasi mahasiswa sudah tidak murni lagi dan dianggap sebagai makar.

Tajuk rencana koran itu pada tanggal 15 memberikan komentar tentang demonstrasi tersebut, dan berharap agar tidak buru-buru menuduh mahasiswa makar, dan mengingatkan tentang adanya pihak-pihak tertentu yang mengadu domba dan berusaha memecah belah mahasiswa.

Edisi hari Rabu, 16 Januari 1974 koran Indonesia Raya kembali mengangkat *headline* seputar kunjungan PM Tanaka. Yang mengejutkan adalah berita bahwa ibukota mendadak dilanda huru-hara serta pengrusakan atas puluhan mobil merk Jepang. Proyek Senen dilaporkan terbakar. Ribuan mahasiswa yang berdemonstrasi berusaha mendekati Istana Negara, tempat dilangsungkannya pertemuan Presiden Soeharto dengan Tanaka. Kerusuhan baru mereda setelah jam 20.00.

Tujuh buah foto ditampilkan oleh koran ini yang menggambarkan demonstrasi mahasiswa dan usaha aparat keamanan untuk menanggulangi kebakaran saat itu.

Dalam liputannya dikatakan bahwa kerusuhan dimulai jam 9, yang dilakukan oleh 'anak muda tidak dikenal' di depan Gedung Kesenian Pasar Baru, lapangan Banteng Jl. Juanda, Istana Negara dan Bina Graha. Indonesia Raya menyebutkan bahwa aksi pengrusakan ini terjadi untuk pertama kalinya sejak demonstrasi menumbangkan Orde Lama, 9 tahun yang lalu. Koran ini pun mensinyalir 'pemuda-pemuda yang agaknya bukan pelajar' mengambil alih aksi-aksi tersebut di daerah Kwitang, Kramat dan Senen.

Jam malam diumumkan berlaku di ibukota selama 12 jam, dimulai pukul 18.00 hingga pukul 06.00 sejak tanggal 15 Januari petang. Seluruh sekolah dinyatakan tutup dan penduduk dilarang berkumpul lebih dari 5 orang. Pengumuman ini disampaikan oleh Panglima Kodam Jaya, GH Mantik.

Sementara itu Pangkopkamtib Jendral Soemitro menyerukan agar generasi muda Indonesia untuk menghentikan demonstrasi. Di hadapan 1000 orang demonstran di depan kedutaan besar Jepang, Soemitro mengatakan pemerintah akan mempertanggungjawabkan seluruh tuntutan mahasiswa. Berita lainnya berasal dari apel mahasiswa di kampus Universitas Trisakti yang menolak pernyataan Panggabean bahwa mahasiswa melakukan makar, dan mahasiswa menganggap pernyataan itu sebagai penghinaan.

Tajuk rencana hari itu ⁸⁶ Indonesia Raya menyimpulkan bahwa gerakan mahasiswa telah ditunggangi oleh oknum-oknum liar yang mengambil kesempatan mengacau dengan maksud meningkatkan ketegangan dalam masyarakat. Ini disesalkan karena merusak image terhadap aksi-aksi mahasiswa yang murni. Lebih lanjut koran ini menulis,

Setelah terjadi ekses-ekses yang sangat merugikan ini kita mengharapkan pemerintah menempuh jalan yang bijaksana

86. "Harus diselesaikan dengan bijaksana", tajuk rencana Indonesia Raya, 16 Januari 1974. Tajuk ini agaknya bukan ditulis oleh Mochtar Lubis, karena tidak ada ciri khas tiga bintangnya. Dan memang ketika terjadi peristiwa 15 Januari 1974, Mochtar Lubis justru harus berangkat ke Eropa untuk menghadiri suatu konferensi internasional. Ia berangkat dari Jakarta sekitar pukul 16.00. Lihat Alex A. Rachim, "Apakah Ia akan Ditangkap Begitu Turun di Kemayoran?" dalam Atmakusumah ed. Mochtar Lubis: Wartawan Jihad, Jakarta: Harian KOMPAS, 1992, h.241-242.

untuk menyelesaikan masalah ini. Pertemuan para utusan mahasiswa dengan presiden beberapa hari yang lalu tidak memuaskan hati mahasiswa karena hal-hal yang diajukan mereka kepada presiden...tidak terjawab...

Kita mengharapkan agar peristiwa-peristiwa yang terjadi di ibukota ini dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan dengan penuh kesadaran bahwa peran mahasiswa ini adalah anak-anak kita yang ingin mengingatkan kita golongan tua supaya jangan melakukan hal-hal yang merugikan negara dan bangsa, karena merekalah yang akan jadi pewaris ini semua di masa datang.

Tajuk lain yang dimuat hari itu adalah tajuk yang dibuat Mochtar Lubis, dengan menguraikan banyak pengalaman tidak enak yang dialami ketika berhubungan dengan Jepang. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka bisa jadi tajuk ini memang dibuat pada saat Mochtar Lubis hendak berangkat ke luar negeri, jadi ini merupakan tajuk simpanan, yang diperkirakan akan tetap relevan untuk beberapa hari setelah penulisannya. Padahal, seandainya Mochtar menulis pada saat melihat perkembangan terakhir di Jakarta, agak sulit rasanya membayangkan tajuk seperti ini tetap ditampilkan Indonesia Raya. Ditulis demikian:

Setelah kami melakukan kewajiban tata krama Indonesia menyambut tamu dengan baik, maka tiba pula waktunya untuk berbicara berpahit-pahit dengan tamu dari utara ini, Perdana Menteri Tanaka.

Kami ingin menegaskan kepada Tanaka, bahwa dalam sejarah hubungan Jepang dengan Indonesia, maka Indonesia hanya mengalami kepahitan yang luar biasa saja. Pengalaman rakyat Indonesia di bawah telapak kaki besi tentara Dai Nippon tidak kalah buruknya dan sakitnya seperti pengalaman rakyat-rakyat Eropa di bawah telapak kaki kaum Nazi Jerman.

Jika hendak kita uraikan kejahatan-kejahatan, perkosaan-perkosaan, pembunuhan, pemerasan dan berbagai kejahatan lain yang telah dengan amat garang dilakukan tentara Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II, maka ia akan menjadi satu buku yang amat tebalnya. Tidak ada pampasan perang Jepang yang begitu besarnya dapat mengganti kehancuran dan kebinasaan yang telah ditimbulkan Jepang pada bangsa Indonesia selama pendudukan Jepang di Indonesia.

Setelah Perang Dunia berakhir, Jepang pun dengan segala kecongkakan kekuatan ekonominya terus mencoba memeras ke-

kayaan Indonesia, dibantu oleh berbagai orang yang hanya memikirkan kepentingan diri mereka, dan membuka pintu bagi mengalirnya kekuatan ekonomi Jepang dengan deras ke tanah air ini.

Riwayat pembayaran pampasan perang Jepang penuh dinodai dengan perbuatan korupsi, proyek-proyek yang tidak ekonomis dan memperkaya orang Jepang sendiri. Di berbagai bagian Nusantara kita melihat saksi-saksi terhadap kegagalan proyek-proyek pampasan. Dapat saja menyalahkan Soekarno mengenai hal ini, tetapi kita melihat betapa orang Jepang tidak kurang bersemangat bekerja sama dengan Soekarno melakukan penipuan besar demikian terhadap rakyat Indonesia.

Setelah Sari Dewi yang menjadi penyalur hubungan ekonomi antara Jepang-Indonesia dulu, maka kita melihat pola lama itu diteruskan dengan pemain-pemain baru, tetapi praktek serupa.

Kritik terhadap praktek-praktek Jepang di Indonesia sudah cukup banyak disiarkan.

Untuk menguji kemurnian sikap Jepang terhadap Indonesia, kita ingin melihat sikap Tanaka terhadap beberapa gagasan Indonesia yang kita harap dikemukakan kepada Tanaka.

Gagasan pertama adalah pengakuan Jepang terhadap wawasan Nusantara. Bersediakah Jepang mengakui kedaulatan Indonesia atas laut antara kepulauan Nusantara kita ? Gagasan kedua ialah kedaulatan Indonesia, Malaysia dan Singapura atas selat Malaka. Bersediakah Jepang mengakui ini ?

Jika Jepang tak bersedia mengakui kedua gagasan ini maka segala ucapan Jepang terhadap kita tidak ada artinya sama sekali. ⁸⁷

Di samping berita tentang kerusuhan itu sendiri, maka diberitakan juga hasil pertemuan Perdana Menteri Jepang, Tanaka dengan Presiden Soeharto, dan dalam judulnya ditulis bahwa Jepang tidak akan mendominasi Indonesia.

Halaman pertama edisi hari itu menampilkan 5/6 ruang khusus untuk memberikan liputan seputar kedatangan Tanaka dan segala yang berkaitan dengan demonstrasi mahasiswa.

Hari Kamis, 17 Januari 1974, Indonesia Raya melaporkan

87. "Pengalaman dengan Jepang selalu Pahit", tajuk rencana Indonesia Raya 16 Januari 1974.

kembali dalam bentuk headline, tentang 200 orang ditangkap menyusul kerusuhan yang terjadi, 30 kendaraan terbakar, 17 kendaraan hancur, dan show room Astra, di jalan Jendral Sudirman habis diamuk massa.

Rektor Universitas Indonesia, Prof. Mahar Marjono dan Ketua Dewan Mahasiswa UI, Hariman Siregar mengeluarkan statemen yang membantah keterlibatan mahasiswa UI dalam huru hara tersebut.

Diberitakan pula harian Nusantara dicabut Surat Ijin Terbitnya. Tiga buah radio siaran di Jakarta: Suara Nenggala, Radio Arief Rahman Hakim dan Siaran Radio Kebebasan, juga dilarang mengudara.

Pangkopkamtib, Jend. Soemitro mengeluarkan pengumuman :

1. Keadaan memaksa kami yang telah sampai pada batas-batas kesabaran kami untuk bertindak tegas dengan di sana-sini terpaksa dengan kekerasan.
2. Mulai hari ini kami mengadakan penangkapan-penangkapan tanpa pandang bulu terhadap siapa dan kekuatan sosial apapun berhubung yang masih belum mengerti keadaan sekarang dan membantu secara langsung/tidak langsung sehingga menambah ketegangan-ketegangan yang ada.
3. Kami terpaksa bertindak tegas dan hal ini cukup kami pertanggungjawabkan terhadap hati nurani kami. ⁸⁸

Tajuk rencana dua buah yang disiapkan hari itu oleh Indonesia Raya, ditulis oleh redaksi saat itu dan juga oleh Mochtar Lubis sebagai tajuk simpanan. ⁸⁹ Tajuk yang 'relevan' saat itu menulis,

Dengan keputusan pemerintah ini kita harapkan tindakan liar

⁸⁸. Indonesia Raya, 17 Januari 1974.

⁸⁹. Mochtar Lubis menulis, "Jangan Pamer Kekayaan", tajuk rencana Indonesia Raya 17 Januari 1974.

oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan perusakan terhadap ratusan gedung/toko dan kendaraan bermotor merk Jepang dapat diatasi dan mereka yang bersalah dapat diseret ke depan pengadilan.

Sementara itu pemerintah harus juga mencari penyelesaian sekitar persoalan dan kepincangan yang menyebabkan para generasi muda/mahasiswa melakukan aksi-aksi tidak saja di ibukota, tapi juga di sekitar kota-kota besar lainnya di tanah air kita. ⁸⁹

Bagian dalam edisi hari itu, Indonesia Raya menampilkan serangkaian foto sekitar kerusuhan tanggal 15 Januari. Dan dimuat pula seruan bersama yang datang dari Dewan Mahasiswa UI, IKIP, Jayabaya, UKI, Muhamadiyah, Unas, Untag, Yapenanta, Unkris, Akademi Teknik Pembangunan, Institut Pelayaran dan Ketua Ikatan Pelajar Sekolah Teknik. Isinya adalah:

1. Tindakan-tindakan perusakan, pembakaran yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan nyata-nyata bertentangan dan merusak perjuangan mahasiswa.
2. Menyesalkan dan sangat prihatin terhadap kejadian tersebut yang telah mengakibatkan kerugian moral dan materiil di kalangan masyarakat.
3. Menyerukan kepada seluruh mahasiswa untuk tetap berada di tempat masing-masing / waspada dan tidak terpancing terhadap provokasi, tindakan emosional yang bersifat destruktif dan supaya tetap memelihara ketertiban.
4. Kepada masyarakat luas diserukan untuk turut membantu menjaga ketertiban demi tercapainya aspirasi dan perjuangan mahasiswa yang murni. ⁹⁰

Ketika Ali Sadikin, Gubernur Jakarta 1966-1977, menulis memoarnya, ⁹¹ di situ disebutkan tentang inisiatifnya untuk mendatangi mahasiswa UI pada saat terjadinya kerusuhan tersebut

89. "Tindakan tegas Pemerintah", tajuk rencana Indonesia Raya, 17 Januari 1974.

90. Sebagaimana yang dikutip pada Indonesia Raya 17 Januari 1974.

91. Ramadhan KH, Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.

dan mengadakan dialog. Ali Sadikin sendiri berpikir untuk memperkecil jumlah korban yang akan jatuh, dan ia khawatir sekali jika kampus-kampus sampai diserbu oleh aparat keamanan.

Oleh karena itu pada tanggal 17 Januari, Ali mendatangi kompleks UI dan akhirnya ia berhasil mengajak Hariman Siregar ke TVRI, serta di depan televisi Hariman Siregar mengumumkan bahwa persoalan yang mereka hadapi sudah selesai. 92

Hari Jumat 18 Januari 1974, Indonesia Raya dalam headlinenya mengungkapkan pernyataan Panggabean bahwa korban yang jatuh berjumlah 11 orang serta kerugian yang tak terhingga.

Menyusul penangkapan atas Imam Walujo dan Princen, maka hari ini Indonesia Raya melaporkan penangkapan Prof. Sarbini, kemudian juga Dorodjatun Kuntjorojakti, dosen Fakultas Ekonomi UI, Marsilam Simanjuntak, Bambang Sulistomo, Gurmilang, dan bekas ketua Partai Sosialis Indonesia, Subadio Sastrosatomo. Juga diberitakan bahwa Radio Suara Kebebasan dan Arief Rahman Hakim diijinkan mengudara kembali.

Lewat Menteri Penerangan, Mashuri, diumumkan langkah-langkah yang diambil pemerintah, setelah sidang kilat Kabinet:

A. menertibkan pelaksanaan hak-hak demokrasi:

1. demonstrasi yang menurut pengalaman Indonesia dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat tidak dibenarkan lagi.

92. Ibid. h.381-382. Disebutkan pula bahwa Soemitro mengetahui inisiatif Ali Sadikin itu, malah kemudian mendukungnya. Lihat juga wawancara Hariman Siregar pada majalah MATRA Opcit. h.25-26. Yang sedikit mengganggu di sini adalah kepastian tentang tanggal bertemunya Ali Sadikin dengan mahasiswa UI tersebut. Dalam buku Memoarnya, Ali Sadikin secara tidak esklusif mengatakan kejadian itu berlangsung tanggal 17 Januari, sementara Hariman Siregar dalam wawancaranya jelas menyebut tanggal 16 Januari .

2. menertibkan pemberitaan dalam pers/surat kabar.
3. menertibkan kehidupan universitas / sekolah agar tidak digunakan untuk kegiatan politik.

- B. mencegah timbulnya tindakan-tindakan yang menjurus dan membuka peluang ke arah makar.
- C. mengembangkan dan mentrapkan saling pengertian antara pemerintah dan DPR atau dengan kelompok sosial politik yang berguna bagi pelaksanaan demokrasi Pancasila.
- D. melakukan tindakan-tindakan pengusutan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas terjadinya eksekusi demonstrasi berdasarkan hukum yang berlaku.
- E. menindak tegas siapapun yang melakukan tindakan kekerasan melawan hukum seperti perampokan, pembakaran, dan tindakan kekerasan lainnya.
- F. segera mengusahakan pulihnya kembali kehidupan di Jakarta Raya khususnya ekonomi. ⁹³

Kolom Pojok Indonesia Raya yang diberi nama *Di Pinggir Jalan* pada edisi hari itu menuliskan kecurigaannya tentang para pelaku pengrusakan pada tanggal 15 dan 16 Januari tersebut:

Berbicara tentang pengrusakan dan pembakaran rumah-rumah, toko-toko atau mobil-mobil Mas Kluyur (demikian pojok ini selalu ditandatangani-pen.) tak habis heran darimana pemuda-pemuda liar ini mendapat mobil-mobil truk yang hilir mudik di jalan daerah Cempaka Putih, Tanah Tinggi, Poncol dll, sehingga dengan gampang dapat melakukan gerak cepat membakar dan merusak mobil-mobil keluaran Jepang yang mereka incer...

Pihak berwajib seharusnya mencari juga di kalangan pemilik-pemilik mobil ini dalang dari tindakan-tindakan destruktif ini... ⁹⁴

Tajuk Rencana hari itu mengulas tentang hasil pertemuan antara Tanaka dan Presiden Soeharto, dan ditulisnya demikian:

Kunjungan Perdana Menteri Tanaka dari Jepang selama 4 hari ke Indonesia mengandung harapan-harapan lebih baik bagi hubungan kedua negara di masa mendatang. Kontak pribadi antara Presiden Soeharto dengan pemimpin pemerintahan Jepang itu telah menimbulkan saling pengertian dan telah menghilangkan berbagai kecurigaan pihak kita terhadap pemerintah

93. Seperti yang dikutip dari Indonesia Raya, 18 Januari 1974.

94. Indonesia Raya 18 Januari 1974.

dan pengusaha-pengusaha Jepang yang beroperasi di Indonesia. Ucapan bahwa Jepang tidak mau menjadi negara penjajah karena konstitusi negara tersebut tidak memungkinkan praktek-praktek ini dan Jepang hanya ingin membantu negara-negara yang meminta bantuannya, cukup segar kedengarannya. Juga janji dan dalam konferensi pers Rabu yang lalu, bahwa ia akan mengoreksi dan memperbaiki kelakuan pengusaha-pengusaha Jepang yang kurang sesuai dengan situasi Indonesia akan disambut oleh setiap manusia Indonesia dengan perasaan gembira.

Pendapat positif tentang demonstrasi-demonstrasi mahasiswa juga sangat simpatik kedengarannya. Demonstrasi-demonstrasi yang ditujukan terhadap Jepang haruslah merupakan introspeksi bagi semua orang Jepang agar mereka dapat mengendalikan diri sendiri dari tindakan kerakusan. Di lain pihak kata Tanaka, demonstrasi-demonstrasi merupakan suatu proses peralihan, ke arah pembinaan hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Dari ucapan-ucapan Tanaka ini dapat diambil kesimpulan bahwa ia sudah cukup mengerti tentang hal-hal yang pincang selama ini yang menyangkut hubungan antara Indonesia-Jepang setelah berbicara dengan Presiden Soeharto dan pemimpin-pemimpin Indonesia lain dan setelah melihat sendiri aksi-aksi mahasiswa yang dilancarkan sebelum dan sesudah ia menginjakkan kaki di bumi Indonesia.

Kita masih memerlukan bantuan dan modal Jepang bagi pembangunan-pembangunan yang kini sedang kita laksanakan, tapi kita tidak menyetujui pelaksanaan dari bantuan dan penanaman modal yang di waktu yang sudah-sudah, karena hanya menguntungkan pihak Jepang dan pengusaha-pengusaha non pribumi.

Presiden Soeharto sendiri waktu menerima beberapa wartawan Jepang sebelum kedatangan Perdana Menteri Tanaka telah menyinggung masalah ini, dan mengharapkan agar pengusaha-pengusaha Jepang lebih banyak melakukan joint venture dengan pengusaha-pengusaha pribumi di masa-masa mendatang.

Kita menyatakan optimisme kita, bahwa akan ada perbaikan-perbaikan yang menguntungkan kedua belah pihak setelah Tanaka kembali ke tanah airnya, sehingga stempel economic animal (binatang ekonomi) tidak akan melekat lagi di tubuh pembesar-pembesar dan pengusaha-pengusaha Jepang. Tetapi bagaimana pun juga semua ini akan tergantung juga dari pelaksanaan janji-janji dan ini yang akan dapat kita lihat dari tingkah laku pengusaha-pengusaha Jepang dalam menjalankan kebijakan-kebijakan mereka ketika berperan di tanah air di waktu-waktu mendatang. ⁹⁵

95. "Kita Lihat Pelaksanaannya Nanti", tajuk rencana Indonesia Raya 18 Januari 1974. Bukan ditulis oleh Mochtar Lubis, karena tidak diberi tanda 3 bintang, dan dari gaya bahasanya pun jelas terlihat beda dengan tajuk hari-hari kemarin yang ditulis oleh Mochtar sendiri.

Terlihat ada perubahan sikap koran ini terhadap Jepang, setelah menyimak hasil pembicaraan Perdana Menteri Tanaka dengan Presiden Soeharto. Ada kelunakan pendapat dari tajuk di atas, dan yang penting koran ini berharap adanya perbaikan nyata *policy* modal Jepang tersebut.

Penangkapan-penangkapan atas sejumlah tokoh pemuda dan mahasiswa terus berlangsung, dan Indonesia Raya edisi Hari Sabtu, 19 Januari 1974 melaporkan penangkapan atas diri Adnan Buyung Nasution, seorang advokat, juga tokoh pemuda, Jusuf AR, Jessy Monintja (keduanya dari Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia - KAPPI)

Dimuat pula pernyataan 18 Januari 1974 yang ditandatangani oleh Dewan-dewan Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Trisakti, Atmajaya, Sekolah Tinggi Olahraga, Universitas Muhamadiyah, Akademi Gizi, IPN, dan wakil eksponen non kampus. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa mahasiswa dan pelajar tidak cuci tangan atas aksi-aksi selama ini walaupun mereka tidak ada maksud dan rencana untuk aksi-aksi pengrusakan dan pembakaran.

Sejumlah foto sekitar peristiwa 15 Januari menghiasi dua per tiga halaman IV Indonesia Raya edisi hari itu. Dan di Jogjakarta didapat kabar bahwa sejumlah mahasiswa di sana mengadakan aksi solidaritas untuk korban-korban mahasiswa di Jakarta.

Tajuk rencana hari itu sudah tidak lagi membahas seputar kerusuhan atau demonstrasi mahasiswa atau hal-hal seputar modal Jepang. Yang menjadi pembahasan saat itu adalah tentang pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Sjarif Thayeb, meng-

gantikan almarhum Prof. Dr. Ir. Sumantri Brodjonegoro. Rupanya koran ini menganggap hal tentang Jepang sudah selesai dan sudah tidak aktual lagi, sehingga isi tajuk pun mengulas peristiwa di luar kejadian tanggal 15 Januari tersebut.

Senin, 21 Januari 1974, adalah edisi terakhir dari koran Indonesia Raya. Sudah tidak banyak tulisan yang mengulas tentang kejadian 15 beberapa hari yang lalu itu.

Enggak Bahau'ddin menulis dalam *Komentor Dalam Negeri Sepekan*, menguraikan nasib yang dialami rekannya sesama surat kabar, Nusantara. Enggak mengatakan bahwa bila pers melakukan pemberitaan yang melanggar susila, berita isap jempol dan fitnah, bisa saja diganjar dengan hukum pidana, asalkan tidak memakai *Haatzai Artikelen*. Tetapi untuk pemberitaan seperti yang dilakukan pers seputar peristiwa 15 Januari Enggak menolaknya.

Harian ini juga mengutip pernyataan Atang Ruswita, Wakil Ketua PWI Pusat, sekaligus Ketua PWI Bandung, yang mengungkapkan kekhawatiran atas keadaan yang makin gelisah, dan ketakutan atas kebebasan pers yang makin sempit. Penerbitan di Jawa Barat, misalnya lewat SK no Kep 02-6/KAMDA/JB/ 74 mulai 20 Januari 1974 penerbitan di Jawa Barat harus memiliki ijin cetak dan mingguan Mahasiswa Indonesia tidak diberi SIC karena dituduh selalu menghasut dan tidak bertanggung jawab.

Indonesia Raya pun memantau perkembangan harga koran yang saat itu demikian melonjak. Surat kabar ini yang biasanya dijual dengan harga Rp. 25, kini bisa menjadi seharga Rp. 100 atau Rp.

Rupanya perkembangan saat itu memang menempatkan surat kabar sebagai barang langka dan demikian dibutuhkan masyarakat. Hukum permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomipun muncul. Namun ini bukanlah suatu indikasi yang cukup untuk mengatakan bahwa surat kabar saat itu mengeksploitasi pemberitaannya sedemikian rupa sehingga menjadi komoditi yang amat laku dijual. Agak sulit untuk menyebutkan bukti bahwa pemberitaan dalam surat kabar melulu didorong motivasi ekonomi, untuk menjadikan korannya barang dagangan yang dibutuhkan masyarakat, dan motif demikian tidak akan sesuai dengan karakter Indonesia Raya.

BAB V

HUBUNGAN PERS DAN PEMERINTAH

SETELAH PERISTIWA 15 JANUARI 1974

"the year 1974 marked the greatest 'blood bath' in New Order history, when the greatest advocates of political journalism which at the same time the greatest advocate the public sphere were sent to death" - Daniel Dhakidae¹

Dalam sejarah pers di masa Orde Baru, Malari (Peristiwa 15 Januari 1974) boleh jadi kenangan yang paling pahit. Wajah pucat pasi pers tercermin sekali dari sepek terjangnya setelah Peristiwa 15 Januari.²

Pers yang selamat cenderung amat berhati-hati, dan secara tidak langsung pemerintah menuduh pers ikut bertanggung jawab

1. Daniel Dhakidae, The State, The Rise of Capital and The Fall of Political Journalism in Indonesia: Political Economy of Indonesian News Industry, tesis doktor dari Cornell University, Ithaca: New York, 1991, h.322.

2. Tjipta Lesmana, "Pers Indonesia dalam Teori dan Praktek", dalam Soebagijo PR et al, Persuratkabaran Indonesia dalam ERA Informasi Perkembangan, Permasalahan dan Perspektifnya, Pustaka Sinar Harapan, 1986, h.374. Dalam tulisan Tjipta ini perlu sedikit dikemukakan perbedaan jumlah surat kabar dan majalah yang ditutup saat itu. Tjipta menulisnya 14, sementara penulis di sini mempercayai bahwa saat itu 12 'saja' yang ditutup. Penulis mengambil sumber tentang jumlah ini dari Abdurrachman S. ed (1980) h.247-253. Tjipta memang tidak memerinci surat kabar dan majalah apa saja yang terhitung sampai 14 tersebut, namun dalam Abdurrachman ed. tersebut, disebutkan nama 12 koran dan majalah yang ditutup tersebut.

atas terjadinya Peristiwa 15 Januari. Paling tidak pers dianggap turut mematangkan situasi politik yang kemudian menimbulkan aksi huru-hara, sehingga wajar kalau sejak peristiwa tersebut, pemerintah memperlihatkan sikap yang keras terhadap pers. Pers nasional dianggap kurang memiliki tanggung jawab, khususnya terhadap stabilitas nasional. 3

Tjipta melukiskan empat karakteristik yang menonjol dalam pers saat ini, yaitu daya kritis yang minim, daya ingat yang nyaris tumpul, keringnya inisiatif dan tidak jalannya fungsi *watch dog*. Tjipta lebih jauh menjelaskan bahwa karakteristik yang tidak menyenangkan itu disebabkan oleh faktor di luar kemampuan pers untuk mengendalikannya.

Dengan mengutip BM Diah, seorang pendiri dari Harian Merdeka, dikatakan bahwa, wartawan kita (Indonesia-pen.) tidak tahu lagi berita atau tulisan apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan sekalipun pers itu jujur sebagai alat sosial kontrol. Satu-satunya jalan ialah wartawan harus memiliki *built* dan *super censor*. Takut kalau surat kabarnya ditutup.

Dengan demikian Tjipta mengambil kesimpulan bahwa dikatakan pers berdaya kritis minim, dangkal daya ingatnya, kering inisiatifnya, dan *watch dog* yang tidak berfungsi, itu dikarenakan pers takut mengambil resiko. 4

Mengontraskan dengan pendapat di atas, maka perlu juga

3. Ibid.

4. Ibid. h.376.

disimak pendapat yang dikemukakan oleh Nasruddin Hars,⁵ seorang wartawan senior dari Angkatan Bersenjata.

Ia mengatakan bahwa, kebebasan yang diperoleh pers Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru merupakan ledakan yang agak sukar dikendalikan, terasa begitu bebas, terutama dalam mengungkapkan kebobrokan Orde Lama. Nasruddin pun menangkap kesan bahwa bagi pers, keruntuhan Orde Lama berarti dapat mengembalikan kedudukan mereka seperti pada masa tahun 1950-an.

Dikatakan pula bahwa tidaklah beralasan untuk mengatakan bahwa sejak Peristiwa 15 Januari 1974 kebebasan pers tidak ada lagi di Indonesia.⁶ Nasruddin mengungkapkan penjelasannya dari telaah psikologis dalam diri pers atas suasana setelah Peristiwa 15 Januari tersebut.

Ia mengakui bahwa setelah terjadinya Peristiwa tersebut, tindakan pemerintah yang menghentikan sejumlah penerbitan menimbulkan kejutan bagi pers Indonesia, dan membuat para pengasuh pers Indonesia mengalami rasa takut dan khawatir kalau-kalau hukuman yang sama juga akan menimpa dirinya.

Di lain pihak, Nasruddin menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah yang dilakukan setelah peristiwa tersebut adalah "meningkatkan kemampuannya untuk lebih menjamin terpeliharanya keamanan, dan adalah dapat dimengerti kalau semua tindakan pemerintah tersebut kemudian dianggap seolah-olah ditujukan untuk pengekang-

5. Nasruddin Hars, "Pers Indonesia setelah 15-16 Januari", dalam Pers Indonesia no.1 tahun II Januari 1976.

6. Ibid. h.19

an kebebasan, termasuk kebebasan pers". 7

Lepas dari dua macam pendapat di atas, fakta menunjukkan bahwa tanggal 21 Januari 1974, adalah hari terakhir harian Indonesia Raya, atau pada awal tahun 1974 itu terjadi "banjir darah" bagi pers Indonesia, suatu kenangan pahit yang sampai hari ini masih tetap dirasakan.

Kompas sebagai harian yang tidak terkena "musibah" penutupan tersebut, dikarenakan sikapnya yang cenderung moderat untuk saat itu, dalam salah satu tajuk rencananya menulis:

Apapun alasan beberapa surat kabar itu dicabut ijin cetaknya, sebagai rekan, kita menyesalkannya. Sudah ditakdirkan manusia itu tidak bisa hidup seorang diri. Hidupnya memasyarakat.

Maka jika rekan-rekan lain menderita, tak bisa tidak, kita ikut merasakannya. Sikap dan pandangan politik kita boleh berbeda-beda, tetapi sebagai sesama surat kabar kita adalah keluarga besar. Hanya pada tempatnya, jika kita menyatakan simpati.

Bukan hanya itu saja, kita juga berseru kepada pemerintah, hendaknya pencabutan izin itu, sementara saja. Kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka bisa kembali mengunjungi pembacanya.

Jatuhnya keputusan di luar dugaan kita. Sebab pengurus pusat PWI oleh Menteri Penerangan baru diberitahu, untuk menyusun bersama kriteria penertiban pemberitaan pers, itupun sesuai dengan keputusan sidang kilat kabinet.

Taruhlah surat kabar itu dinilai berbuat salah. Maka hukuman telah dijatuhkan, yaitu dilarang terbit kita tahu itulah hukuman berat untuk surat kabar.

Karena hukuman telah dijalani, wajar rasanya jika dalam waktu tidak terlalu lama, surat-surat kabar itu diijinkan lagi terbit.

Kita bisa berbicara tentang sarana komunikasi dua arah, ataupun kebebasan yang bertanggung jawab, tapi dalam keadaan ini semua itu memang dianggap tidak relevan, maka kita pun tidak adu argumentasi. Kita sekedar berseru agar hukuman

7. Ibid. h.20

tidak terlalu lama. 8

Pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 1974, dikabarkan bahwa pengurus pusat FWI (Persatuan Wartawan seluruh Indonesia) setelah mendengarkan laporan dari para penerbit yang surat kabarnya ditutup mengeluarkan pernyataan:

1. Merasa prihatin dan mengharapkan penyelesaian sebaik-baiknya.
2. Mengirimkan delegasi bersama SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) untuk menemui Pangkoptib dan Menteri Penerangan untuk membicarakan masalah penutupan surat-surat kabar dan bersama-sama mencari jalan keluarnya.

Delegasi FWI itu terdiri dari Ketua Pembina H. Rosihan Anwar, BM Diah, Jakob Detama, ketua pelaksana Harmoko, dan Sekretaris Umum Sunardi DM. 9

Pada hari yang sama itu juga dimuat pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan FWI dalam rapat pada tanggal 23 Januari 1974, dan ditandatangani oleh ketuanya yaitu Mahbub Djunaidi, serta sekretaris PG Togas. 10

Isi pernyataan tersebut adalah:

1. DK FWI mengkonstantir kenyataan bahwa sebagai kelanjutan dari penertiban dari pemerintah untuk menanggulangi akibat-akibat dari tanggal 15 Januari lalu, beberapa penerbitan pers telah dicabut SIT dan SIC-nya.
2. Dengan menyadari kekurangan-kekurangan pada pihak pers sendiri, Dewan Kehormatan berpendapat bahwa penertiban-penertiban yang dianggap perlu diadakan di kalangan pers itu hendaknya sifatnya sedemikian rupa hingga tidak menjerus ke arah mematikan eksistensi penerbitan itu sendiri untuk mencegah keresahan yang mungkin timbul dalam masyarakat.
3. Dewan Kehormatan juga ingin meminta perhatian bahwa apabila dianggap perlu mengambil tindakan terhadap sesuatu penerbitan

8. "Pencabutan Izin Pers", tajuk rencana Kompas 23 Januari 1974.

9. Lihat Kompas 24 Januari 1974.

10. Lihat Kompas 24 Januari 1974.

pers cara-caranya telah diatur dalam UU Pokok Pers no 11/1966 khususnya pasal 11 beserta penjelasannya, sehingga demi kepastian hukum hendaknya segala tindakan penertiban itu benar-benar diambil sesuai dengan ketentuan dalam UU Pokok Pers tersebut.

4. Dewan berkeyakinan bahwa pencabutan SIC/SIT yang telah terjadi terhadap beberapa penerbitan itu sifatnya hanya untuk sementara saja.
5. akhirnya kepada seluruh pers Indonesia, Dewan Kehormatan PWI menyerukan agar di dalam membuat pemberitaan/ulasan hendaknya kode etik jurnalistik dipegang teguh.

Pasal 11 Undang-undang Pokok Pers yang dirujuk oleh Dewan Kehormatan PWI itu berbunyi sebagai berikut:

Penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila seperti halnya yang bertolak dari faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dilarang.

Sedangkan bunyi penjelasan pasal tersebut adalah:

Djika sesuatu penerbitan pers isinya ternyata bertentangan dengan Pancasila, maka *sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pers*, Pemerintah mengeluarkan suatu keputusan untuk melarang kelangsungan terbitnya. ¹¹ (garis miring dari penulis)

Keberatan yang dikemukakan oleh Dewan Kehormatan PWI adalah diabaikannya peran Dewan Pers di sini dalam memberikan konsultasi kepada pemerintah ketika akan menjatuhkan kebijakan berkaitan dengan penutupan sejumlah penerbitan tersebut.

Dewan Pers adalah sebuah lembaga otonom yang mengatur kegiatan operasional dalam bidang pembinaan pers, yang bertugas untuk mendampingi pemerintah dalam bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. ¹² Dan keanggotaan Dewan Pers terdiri dari Menteri Penerangan, yang sekaligus menjadi Ketua Dewan Pers,

11. Lihat JCT SIMORANGKIR, Undang-undang Pers, Jakarta: Bhratara, 1967, h.11.

12. Lihat Almanak Pers 1978, Departemen Penerangan, 1978, h.1.

dan juga wakil organisasi perusahaan pers, wakil organisasi wartawan, serta Direktur Jendral Pembinaan Pers dan Grafika. 13

Dengan demikian sebagai anggota dari Dewan Pers, PWI dan juga SPS merasa tidak diikutsertakan dalam keputusan kebijakan penutupan sejumlah penerbit, yang merupakan bagian dari asosiasi tersebut.

Serikat Penerbit Surat Kabar dalam rumusan hasil kongres ke XV di Bandung, pada tanggal 5-8 Juni 1974, untuk bidang organisasi, dalam butir IV "Masalah SIT dan SIC" mengemukakan:

2. Hendaknya Pemerintah cq Departemen Penerangan dan Kopkamtib sesudah kongres ke XV, tidak lagi melakukan pencabutan - pencabutan SIT, kecuali terhadap penerbitan yang dibatalkan SIT-nya karena melanggar ketentuan dari Departemen Penerangan yakni: tidak terbit selama enam bulan berturut-turut.
3. Hendaknya Surat Ijin Cetak (SIC) ditiadakan baik di Pusat maupun di Daerah, dan diintegrasikan ke dalam Surat Ijin Terbit (SIT), sehingga hanya ada satu lembaga yang mentackle izin terbit.
5. Hendaknya tindakan terhadap pers hanya dilakukan oleh instansi Pemerintah Pusat saja cq Departemen Penerangan saja. Dalam Undang-undang Pokok Pers yang disempurnakan kewajiban minta SIT supaya ditiadakan. 14

Menteri Penerangan saat itu, Mashuri, mewakili pihak pemerintah dalam tanggapannya atas hasil kongres SPS tersebut mengemukakan:

1. Keputusan Kongres SPS yang menyerukan agar Pemerintah tidak lagi mencabut SIT dan SIC surat kabar, masih sulit untuk diterima, terutama dalam rangka kita masih harus berusaha keras untuk membina kehidupan pers yang betul-betul sehat yakni bebas dan bertanggung jawab. Pencabutan SIT dan SIC akan dapat

13. Ibid.

14. Serikat Penerbit Surat Kabar, Keputusan Konggres SPS ke XV 5-8 Juni 1974 di Bandung Mengenai Bidang Organisasi, dokumen tidak dipublikasikan.

dihindarkan, apabila pers sendiri betul-betul menghayati tata nilai yang berlaku dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara, dan pula dalam menghayati kebebasan yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi tata krama dan nilai-nilai moralitas yang berlaku dalam Demokrasi Pancasila dan kebudayaan bangsa. Untuk maksud ini, maka SPS, PWI, SGP, seperti juga Dewan Pers mengambil peranan penting dalam mengawasi pelaksanaan kode etik untuk bidangnya masing-masing, dan kalau perlu menertibkan anggota-anggotanya sendiri apabila mereka melanggar kode-kode etik yang bersangkutan.

2. Penyatuan SIT dan SIC pun masih sulit dilaksanakan pada saat sekarang mengingat bahwa segi-segi keamanan masih memerlukan pengambilan langkah-langkah yang cepat oleh yang berwajib setempat (Laksusda) bila hal ini diperlukan... 15

Nasib Indonesia Raya setelah Peristiwa 15 Januari 1974

Indonesia Raya secara resmi ditutup sejak dikeluarkan surat pencabutan ijin terbitnya. Pencabutan oleh Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan dan Keamanan dan Ketertiban Daerah Jakarta Raya dan Sekitarnya (Laksus Pangkopkamtibda Jakarta Raya) dilakukan lewat Surat Keputusan Nomor KEP-007-PK/I/1974. 16

Dalam surat tersebut dikatakan bahwa tindakan pencabutan ijin terbit koran ini dengan pertimbangan-pertimbangan:

- a. Surat kabar Indonesia Raya telah melanggar semangat dan jiwa dari Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Tap MPR no. IV/MPR/1973 dan UU no. 11/1966.
- b. Surat kabar Indonesia Raya telah memuat tulisan yang dapat merusak kewibawaan dan kepercayaan Kepemimpinan Nasional.

15. Lihat Tanggapan Pemerintah terhadap Keputusan-keputusan Kongres SPS ke XV di Bandung, tanggal 5-8 Juni 1974. Dokumen tidak dipublikasikan.

16. Salinan dari surat aslinya bisa dilihat pada lampiran tulisan ini.

c. Surat kabar Indonesia Raya dengan tulisan-tulisannya dianggap menghasut rakyat, sehingga membuka peluang yang dapat mematangkan/memperuncing situasi ke arah terjadinya kekacauan-kekacauan seperti pada tanggal 15 dan 16 Januari 1974, dan dapat mengadu domba antara pimpinan satu dengan yang lain (garis miring dari penulis).¹⁷

Surat tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1974. Penandatanganan surat tersebut mengatasnamakan Laksus Pangkoptibda Jakarta Raya, yang dilakukan oleh Sekretarisnya, Kolonel LSM Panggabean SH.

Sementara itu pencabutan Surat Ijin Terbit yang dilakukan oleh Menteri Penerangan baru ditetapkan esoknya, pada tanggal 22 Januari 1974. Surat Keputusan nomor 20/SK/DIRJEN-PG/K/1974 tersebut,¹⁸ ditandatangani oleh Menteri Penerangan yang diwakilkan oleh Direktur Jendral Pembinaan Pers dan Grafika saat itu, Soekarno SH.

Pertimbangan pencabutan Surat Ijin Terbit tersebut disebutkan :

(i) Surat kabar Harian Indonesia Raya telah melanggar semangat dari Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPR (TAP MPR) no. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan Undang-undang no. 11 tahun 1966, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, dimana dijelaskan bahwa mass media umumnya dan sarana pers khususnya harus menjadi sarana pembinaan partisipasi rakyat dalam pembangunan dan sebagai saluran pendapat rakyat yang konstruktif.

(ii) Surat kabar Harian Indonesia Raya telah memuat tulisan-tulisan yang:

1. Pada hakekatnya menjurus ke arah usaha-usaha untuk melemahkan sendi-sendi kehidupan bernegara dan/atau ketahanan Nasional, dengan jalan mengobarkan issue-issue seperti modal asing, korupsi, dwifungsi, kebobrokan-kebobrokan aparat pemerintah, pertarungan tingkat tinggi, masalah

17. Ibid.

18. Salinan dari aslinya juga bisa dilihat pada lampiran tulisan ini.

Aspri - Kopkamtib:

2. Merusak kepercayaan masyarakat pada Kepemimpinan Nasional.
3. Mendengungkan kepekaan-kepekaan tanpa memberikan pemecahan yang tepat dan positif, yang dapat diartikan *menghasut rakyat untuk bangkit bergerak untuk mengambil tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan Negara.*
4. *Menciptakan peluang untuk mematangkan situasi yang menjurus kepada perbuatan makar.* (garis miring dari penulis)

(iii) Sekalipun telah diberikan peringatan-peringatan yang tegas berkali-kali sejak peristiwa 5 Agustus di Bandung oleh Kopkamtib terhadap semua media massa khususnya pers untuk tidak mempertajam dan memperuncing kontras-kontras sosial yang dapat menggoncangkan serta merusak stabilitas nasional yang menjadi syarat mutlak pembangunan, namun ulasan-ulasan, penyajian-penyajian berita maupun tulisan dari surat kabar yang bersangkutan ternyata tidak menghiraukan peringatan-peringatan tersebut.

(iv) Surat Ijin Cetak dari surat kabar harian yang bersangkutan telah dicabut oleh Laksus Pangkoptibda Jaya pada tanggal 21 Januari 1974.¹⁹

Yang menarik adalah pada surat yang sama dituliskan, "bahwa tindakan pencabutan Surat Ijin Terbit (SIT) terhadap penerbitan yang bersangkutan *tidak bertentangan dengan kebebasan pers, melainkan justru menegakkan kebebasan dalam arti sebenarnya dalam rangka tertib demokrasi Pancasila.* (garis miring dari penulis) dimana pers yang sehat yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia

19. Dalam wawancara dengan Soekarno SH, mantan Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika 1972-1987, pada tanggal 30 Maret 1993, dikatakan bahwa secara teknis isi surat pencabutan ijin terbit itu dalam keperiodean awal dipegang oleh Soekarno, pada Januari tahun 1974 itu belum sempurna. Artinya dalam surat tersebut tidak ditunjukkan tulisan mana yang dikatakan 'melemahkan sendi kehidupan bernegara' atau 'menciptakan peluang untuk mematangkan situasi yang menjurus makar'. Dalam keputusan pencabutan Surat ijin pada tahun-tahun berikutnya, misalnya pada peringatan terakhir pada surat kabar Prioritas pada tanggal 26 Januari 1987, yang dilakukan oleh instansi yang sama, Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika (masih dipegang oleh Soekarno SH) disebutkan contoh-contoh tulisan yang dianggap "insinuatif dan berbau sensasional". Lihat pada Tjipta Lesmana, Tragedi Prioritas, Jakarta: Erwin Rika Pers, 1988, h.223-225.

telah dirumuskan dalam konsensus nasional, TAP MPR No. IV/MPR/1973 yaitu 'pers yang bebas dan bertanggung jawab'".

Bagaimana proses penerimaan kedua surat tersebut di atas oleh para pengasuh Indonesia Raya, saat di mana Mochtar Lubis tidak berada di Indonesia waktu itu? Dan bagaimana peristiwa selanjutnya yang dialami oleh para wartawan koran ini? Di bawah ini akan disimak jawabannya.

Alex A. Rachim, salah seorang wartawan Indonesia Raya menuturkan kisahnya pada akhir hidup korannya, yaitu pada saat diterima kabar tentang pencabutan surat ijin cetak dan terbit korannya, menyusul koran-koran lainnya. 20

Sebagai redaktur pelaksana Minggu Indonesia Raya yang biasa terbit hari Jumat, maka pada hari Senin tanggal 21 Januari 1974, Alex Rachim baru pulang meninggalkan kantor redaksi pada jam 17.30 setelah memeriksa sejumlah tulisan. Namun karena pada hari Jumat itu adalah hari libur 1 Muharam 1394 Hijriah, maka Minggu Indonesia Raya harus terbit pada hari Kamisnya.

Senin malam itu Alex Rachim tidak sempat menyetel radio maupun televisi, sampai akhirnya ia diberitahukan oleh seorang tetangganya, wartawan Sinar Harapan, bahwa ia baru saja mendengar warta berita pukul 22.00 yang menyiarkan pengumuman Laksus Pangkoptibda tentang pencabutan surat ijin cetak & surat kabar

20. Lihat Alex A. Rachim, "Apakah Ia akan Ditangkap Begitu Turun di Kemayoran?", dalam Atmakusumah ed., Mochtar Lubis: Wartawan Jihad, Jakarta: Harian KOMPAS, 1992, h. 234-244.

termasuk Indonesia Raya.²¹

Setelah penutupan sejumlah surat kabar termasuk Indonesia Raya, juga dilakukan penangkapan terhadap beberapa wartawan Indonesia Raya, yaitu Mochtar Lubis,²² Enggak Bahau'ddin,²³ dan juga interogasi yang dilakukan kepada Mochtar Lubis, Enggak dan juga Kustiniyati Mochtar²⁴.

Interogasi yang dilancarkan kepada ketiga pengasuh koran tersebut didasarkan atas tuduhan bahwa Indonesia Raya telah mengadakan rapat gelap yang dihadiri pimpinan koran tersebut

21. Ibid. h.235. Oleh Alex Rachim pun dituturkan bahwa sebenarnya ketika ia sudah meninggalkan kantor redaksi Indonesia Raya, Senin sore itu, tanggal 21 Januari, redaksi koran itu mendapat telfon dari Abadi, yang memberitahukan bahwa surat ijin cetak Abadi dicabut dan meminta untuk diberitakan di Indonesia Raya. Dan tidak lama pun Harian KAMI menelfon koran tersebut dengan maksud yang sama. Kemudian Redaktur yang bertugas saat itu, Victor Sihite, menyarankan agar berita tersebut dicek terlebih dahulu kepada Laksus Kopkamtibda. Jawaban dari Laksus tersebut membenarkan berita tersebut, bahkan menambah informasinya dengan mengatakan, "Kami juga baru saja mau memberitakan bahwa Indonesia Raya juga dicabut ijin cetaknya". Ibid. h.237-238.

22. Cukup mengherankan adalah penahanan terhadap Mochtar Lubis baru dilakukan setelah lewat setahun peristiwanya, pada tanggal 4 Februari 1975, sampai akhirnya dibebaskan pada 15 April 1975, lihat Atmakusumah, "Pers dan Malari" dalam Atmakusumah, Kebebasan Pers dan Arus Informasi di Indonesia, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1981, h.125-126. Dalam penahanan pada masa Orde Baru ini, kembali Mochtar Lubis menuliskan catatan harian yang kemudian dibukukan dengan judul: Kampdagboek. Buku ini terbit dalam bahasa Belanda, dan belum ada dalam edisi bahasa Indonesia.

23. Enggak ditahan sejak 21 Juni 1974, dan baru dibebaskan pada tanggal 7 Mei 1975. Namun Enggak tidak berusia lanjut, karena ia meninggal karena sakit leukemia, pada tanggal 1 September 1976. Atmakusumah Ibid. h.125. Lihat juga Atmakusumah, "Bahau'ddin dan Keberanian", TEMPO 11 September 1976.

24. Ibid. h.126. Atmakusumah mencatat bahwa pemeriksaan terhadap diri Kustiniyati Mochtar berlangsung pada Februari hingga Mei 1975. Lihat juga: Kustiniyati Mochtar, "Mochtar Lubis sebagai Pribadi dan Pemimpin Redaksi", dalam Atmakusumah eds. (1992) h.229.

beserta para korespondennya dari berbagai kota di Indonesia. Dalam rapat tersebut, dituduhkan Indonesia Raya menyusun siasat untuk mendiskreditkan pemerintah dengan cara menampilkan pemberitaan yang tendensius. 25

Tuduhan tentang rapat gelap pun muncul dalam memoar Yoga Soegama, 26 kepala BAKIN pengganti Sutopo Juwono. Dalam memoar tersebut dikatakan bahwa, "Hariman (Siregar) juga menghadiri pertemuan di rumah Mochtar Lubis (30 Desember) yang membahas bentuk-bentuk gerakan untuk menjatuhkan Presiden Soeharto." 27

Atas munculnya pernyataan tersebut, Mochtar Lubis pun segera menulis surat lewat majalah TEMPO 28 yang isinya mengatakan:

Sungguh mengherankan bahwa bukunya (milik Yoga Soegama,

25. Kustiniyati Mochtar Ibid. h. 228-229. Dalam tulisan tersebut dikatakan bahwa ternyata belakangan mereka yang diinterogasi rupanya dimaksudkan untuk saling diadu. Keterangan yang dikeluarkan oleh seorang misalnya, dikonfirmasi kepada yang lain. Namun karena sikap yang "berani karena benar, jujur dan mengemukakan apa adanya" akhirnya mereka bertiga tidak ada yang divonis bersalah. Lihat h. 229. Dalam wawancara tanggal 26 November 1992, Kustiniyati membantah terjadinya rapat gelap tersebut, dan mempersilakan si interogator untuk memeriksa pembukuan dari harian tersebut untuk melihat apakah ada pos untuk biaya transportasi para koresponden luar kota ke Jakarta pada waktu yang dituduhkan terjadi rapat gelap tersebut.

Yang juga menarik adalah berita pembebasan tahanan 'Malari' pada tanggal 3 April 1976 (lihat Antara 5 April 1976, dan juga Angkatan Bersenjata 6 April 1976) yang salah satunya adalah Subroto Danusaputro, yang disebutkan sebagai bekas koresponden Indonesia Raya di Surabaya. Atmakusumah, sebagai Redaktur Pelaksana mengaku tidak kenal dengan orang tersebut (lihat surat pembaca Kompas 6 April 1974, dan dikutip pula oleh Angkatan Bersenjata 7 April 1976) sebagai koresponden korannya; wawancara tanggal 15 November 1992.

26. Lihat E. Wiwoho dan Banjar Chaeruddin, Memori Jendral Yoga, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1990, h.247.

27. Ibid.

28. TEMPO 18 Agustus 1990.

maksudnya) yang terbit pada 1990 ini, memuat pernyataan di atas. Padahal...ketika saya dibebaskan dari tempat tahanan Nirbaya...Jaksa Agung Ali Said telah dengan tegas membersihkan diri saya dari segala tuduhan sebagai orang yang terlibat dalam Peristiwa Malari itu... Laporan Yoga ini adalah fiksi belaka, tidak benar sama sekali. Apakah laporan itu juga telah dipergunakan untuk menetapkan kebijaksanaan menahan saya lalu menutup sekian banyak harian dan penerbitan lain hingga hari ini ?

Setelah penutupan Indonesia Raya, para pengasuhnya bukannya tidak berusaha untuk mendapat ijin terbit lagi. Setelah penutupan surat kabar tersebut, Mochtar Lubis pun mendatangi Menteri Penerangan saat itu, Mashuri, dan dari situ yang diterima jawabannya adalah untuk bersabar terlebih dahulu. 29

Mochtar Lubis pun mendatangi Laksamana Soedomo, yang saat itu adalah Wakil Panglima Kopkamtib, dan jawaban yang diterima pun sama, adalah, "yah sabarlah, kita lagi bereskan dengan yang di atas..." 30

Atmakusumah, dalam penuturannya mengatakan bahwa ia beserta beberapa sub editor Indonesia Raya juga berusaha untuk menghubungi Dirjen Pers dan Grafika, Soekarno SH. Ia bermaksud untuk menerbitkan surat kabar ekonomi, tabloid olahraga dan majalah kesehatan, dengan catatan bahwa tak seorangpun dari pimpinan senior, seperti: Mochtar Lubis, Enggak Bahau'ddin, Kustiniyati Mochtar dan Atmakusumah, ikut dalam penerbitan tersebut.

29. Wawancara dengan Mochtar Lubis, 7 Januari 1993. Menurut pengakuan Mochtar, ketika bertemu dengan Mashuri ia mengatakan, "Kok ini mengulangi lagi kelakuan Orde Lama... ya bawa saya ke pengadilan sebagai penanggung jawab biar hakim yang memutuskan jika saya ada salah..." Dan menurut Mochtar, jawaban dari Mashuri adalah, "Oh jangan sampai ke sana, sabar... kami sedang bereskan."

30. Ibid.

Penerbitan itu hanya untuk para wartawan Indonesia Raya saja. 31

Dan jawaban yang didapat hanya, "tunggu.... tunggu...."

Memang pada saat itu juga muncul desas-desus bahwa setelah penutupan beberapa penerbitan itu, sedikitnya 14 wartawan terbitan yang ditutup masuk dalam 'daftar hitam' pemerintah yang tidak pernah diumumkan. 32 Sejumlah wartawan tersebut tidak diperbolehkan untuk mengelola pers lagi, dan termasuk di dalamnya adalah Mochtar Lubis, Enggak Bahau'ddin, Kustiniyati Mochtar dan Atmakusumah sendiri. 33

Namun catatan kecil yang didapat menyebutkan bahwa aktivitas sejumlah staf koran ini setelah penutupan antara lain dengan menerbitkan sejumlah buku komik yang memuat seri gambar yang pernah dimuat atau belum sempat diterbitkan dalam koran tersebut, dan disebut sebagai *Buku Lipat*. 34

31. Wawancara Atmakusumah 15 November 1992.

32. Atmakusumah, "Mochtar Lubis dan Indonesia Raya", dalam Atmakusumah eds. (1992) h.97. Dalam wawancara dengan Kustiniyati Mochtar tanggal 26 November 1992 membenarkan desas-desus tersebut.

33. Atmakusumah Ibid. Ditulis oleh Atmakusumah: "Dua-tiga tahun kemudian Atmakusumah pernah dua kali mendapat tawaran mengelola penerbitan pers. Setiap kali ia (maksudnya si penulis sendiri) mendatangi Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika untuk menanyakan sikap pemerintah jika ia bekerja di pers lagi, Sukarno yang berhati lembut itu mengatakan bahwa ia 'tidak ingin dibuat susah'. Dengan kata lain, dengan berat hati, ia (Sukarno) tidak akan 'mengizinkan' "

34. Lihat Atmakusumah eds. (1992) h.507.

Alasan Penutupan Menurut Pemerintah

Di depan sudah dijelaskan alasan penutupan sejumlah surat kabar pada masa awal tahun 1974, lewat keputusan pencabutan Surat Ijin Cetak dan Surat Ijin Terbit, namun di sini hendak juga dikemukakan argumentasi yang disampaikan secara lisan oleh kedua orang yang mewakili pemerintah saat itu, yaitu bekas Menteri Penerangan, Mashuri dan bekas Direktur Jendral Pembinaan Pers dan Grafika, Soekarno SH.

Menurut Mashuri³⁵ situasi pada tahun 1974 disebutnya sebagai suasana yang kritikal, yang masih rawan, dalam kondisi menghadapi sisa-sisa Orde Lama dan Partai Komunis Indonesia. Ia menekankan kondisi negara saat itu yang berada dalam kondisi darurat, dan hal itu juga ditandai dengan munculnya Surat Perintah 11 Maret yang memungkinkan Jend. Soeharto untuk melakukan apa saja untuk mengamankan kondisi negara saat itu. Kopkamtib adalah salah satu cerminan tentang kondisi negara darurat tersebut, yang dimungkinkan dibentuk berdasarkan Supersemar tersebut. Bahkan kemudian Supersemar ini dikukuhkan menjadi salah satu Ketetapan MPRS dalam Sidang Umum IV pada tanggal 20 Juni 1966, yaitu Ketetapan MPRS no.IX/MPRS/1966.

Ketika ditanyakan tentang alasan penutupan sejumlah penerbitan tersebut, maka secara etimologi ia tidak mengistilahkan itu

35. dalam wawancara tanggal 16 Desember 1992.

sebagai 'pembreidelan', tetapi 'penutupan'. 36

Sukarno SH, seorang Direktur Jendral yang paling lama menduduki jabatan Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika, yang saat itu juga secara otomatis menduduki jabatan sebagai Sekretaris Dewan Pers, mengungkapkan bahwa terjadinya proses penutupan sejumlah penerbitan pada tahun 1974, tanpa melewati mekanisme hukum, dapatlah dilihat sebagai salah satu proses pematangan atau pendewasaan dari pemerintahan Orde Baru untuk sampai pada bentuk hubungan pers dan pemerintah yang ideal. 37

Dikatakannya bahwa pers itu cenderung untuk menjadi liberal, dan ia kemukakan pula bahwa dalam perjalanan sejarah ada korban-korban yang diakuinya "pemerintah sendiri sangat menyesalkan". Soekarno menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang aman, stabil dan menumbuhkan dinamika masyarakat.

Namun ketika ditanyakan kepadanya bagaimana dengan mekanisme konsultasi dengan Dewan Pers, yang saat itu dilupakan oleh pembuat keputusan, ia mengatakan pada saat peristiwa 15 Januari itu

36. Menurutnya pembreidelan adalah wewenang Menteri, namun harus meminta pertimbangan dari Dewan Pers terlebih dahulu. Tetapi yang saat itu terjadi ia mengusulkan kepada Presiden untuk membreidel saja, bahkan ia menanyakan berapa lama akan dibreidel, namun Presiden mengatakan supaya sejumlah penerbitan tersebut ditutup saja. Dengan demikian 'penutupan' tersebut bukan lagi kewenangan Menteri Penerangan, melainkan wewenang Presiden, dan secara hukum, Mashuri mengatakan hal itu dibenarkan karena Presiden saat itu adalah pemegang Supersemar dan bisa melakukan apa saja. Secara pribadi Mashuri sendiri menginginkan kebebasan pers, dan akibat penutupan sejumlah penerbitan itu ia mengaku dirinya adalah Menteri Penerangan yang bopeng. Namun ia pun mengatakan bahwa "Pers juga tidak tahu diri, tidak empan papan (tidak tahu tempat, dan waktunya)".

37. Wawancara tanggal 30 Maret 1993.

keadaannya sudah demikian serius, terjadi pembakaran di mana-mana, dan pers saat itu juga melakukan proses pematangan situasi, maka tidak ada waktu lagi untuk konsultasi dengan Dewan Pers, persoalannya adalah mau menertibkan atau tidak.³⁸ (garis miring dari penulis)

Dengan demikian habislah riwayat surat kabar Indonesia Raya, surat kabar yang kritis dengan perhatian besar terhadap ketidakadilan, pembela rakyat kecil dan sejumlah konsern lain koran ini, yang seperti dilukiskan oleh Daniel Dhakidae, pada masa tahun 1974 itu adalah masa kematian jurnalisme politik yang sekaligus juga kematian surat kabar pembela masyarakat paling depan.

38. Wawancara dengan Soekarno SH, tanggal 30 Maret 1993.

BAB VI

D I S K U S I

Setelah digambarkan pada bab-bab sebelumnya tentang latar sosial, ekonomi, politik dan budaya yang terjadi pada sekitar tahun 1970-an, berikut dengan pergumulan yang terjadi dalam sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta imbasan yang terjadi pada pers, khususnya harian Indonesia Raya, maka bab ini akan mencoba menyoroti permasalahan-permasalahan mendasar di balik hubungan antara pers dan pemerintah pada saat itu.

Kondisi krisis¹ yang ditekankan oleh bekas Menteri Penerangan Mashuri dan juga bekas Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika, Soekarno SH, pada masa awal sampai pertengahan tahun 1970-an, tidaklah dapat dimungkiri. Oleh Negara, peralihan masa Orde Lama ke masa Orde Baru, dianggap belumlah mulus, dibuktikan dengan

1. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Jakob Oetama, Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi harian Kompas, tanggal 21 Juli 1993, Jakob juga setuju bahwa kondisi pada tahun 70-an awal itu adalah situasi krisis, artinya masa peralihan dari jaman Orde Lama ke Orde Baru. Pihak pers sendiri awalnya mengalami masa 'bulan madu', tetapi setelah peristiwa 15 Januari 1974 dengan sejumlah pers ditutup, mengakibatkan pers yang masih hidup menjadi kaget, menjadi lebih berhati-hati, dan itu, "psikologis sekali, dan tidak bisa lain..." menurut Jakob Oetama. Lalu juga peta politik yang berubah, sejumlah pejabat diganti dan ini mempengaruhi pers yang mencoba mencari-cari kembali format yang bergeser tersebut, seberapa jauh pers masih dapat berbuat.

tetap eksistensinya kelembagaan seperti Kopkamtib² dan juga kewaspadaan terhadap 'gerakan yang dilakukan oleh sisa-sisa Orde Lama'.

Pembangunan ekonomi baru dimulai pada akhir dekade enam puluhan, dan pada masa awal hingga pertengahan tahun 70-an adalah masa di mana pembangunan awal Orde Baru mendapat banyak sorotan. Tantangan yang dihadapi saat itu berkenaan dengan strategi modal asing, pertumbuhan ekonomi dan juga krisis beras yang dialami pada pertengahan tahun 70-an. Saat itu merupakan masa-masa sulit di mana pemerintahan yang baru harus membuktikan dirinya sebagai pemerintah yang kompeten untuk menyelenggarakan pembangunan untuk tidak ingin jatuh dalam kegagalan yang dialami oleh Orde sebelumnya.

Kondisi politik nasional saat itu juga memang merupakan masa transisi ke arah pemusatan kekuatan negara, atau pemerintahan yang baru, dan harus dibayar dengan disepakatinya ideologi partai-partai politik, pengecilan jumlah partai, yang dipercaya sebagai biang keladi dinamika politik pada pertengahan tahun 1950-an, dan dianggap sebagai potensi besar suatu ketidakstabilan politik.

Dengan demikian posisi pers saat itu ada dalam suasana menuju ke arah penguatan Negara, pembangunan sistem perekonomian dan pengekangan kekuatan-kekuatan ideologis lain, yang ditambah dengan trauma koup pada tahun 1965. Implikasinya terhadap pers menjadi jelas, bahwa ada tuntutan bagi pers untuk menjadi pendu-

2. Kopkamtib sendiri baru secara resmi dibubarkan pada tahun 1988, dan fungsi koordinasi pemantapan stabilitas nasional dilakukan oleh Bakorstranas.

kung program pemerintahan yang baru, dan terjadilah saling mer-
angkul dalam periode awal Orde Baru tersebut, yang sering disebut
sebagai masa bulan madu, walaupun mungkin suasana saat itu tidak
lebih dari suatu gejala menuju menguatnya Negara.

Sebuah tulisan yang dibuat oleh Bennedict R.O.G. Anderson ³
ingin menunjukkan bagaimana sebenarnya struktur negara Indonesia
ini, secara historis tidak mengalami suatu perubahan yang cukup
berarti, mulai sejak jaman kolonial Belanda hingga pada masa Orde
Baru.

Dalam usaha untuk lebih menjabarkan konsepsi "Negara-
Bangsa", Ben mencoba untuk memperlihatkan kontradiksi yang tajam
di setiap "Negara-Bangsa" antara kepentingan-kepentingan Negara
di satu pihak dengan kepentingan-kepentingan masyarakat yang
lebih populis atau yang lebih partisipatoris dan representatif. ⁴

Ben percaya bahwa kebijakan yang dihasilkan setiap Negara
dan Bangsa, khususnya ketika ia melihat Indonesia di masa Orde
Baru, dapat dipandang sebagai ekspresi maksimal dari kepentingan-

3. Ben Anderson, "Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective". Artikel ini awalnya ditulis pada Journal of Asian Studies 42 (Mei 1983), dan kemudian juga ditulis ulang untuk kumpulan tulisan Ben Anderson yang berjudul Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia, Cornell University Press: Ithaca, 1990. Lihat juga pembahasan karya Ben Anderson ini oleh Vedi R. Hadiz, Politik, Budaya dan Perubahan Sosial: Ben Anderson dalam Studi Politik Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Yayasan SPES, 1992, h.79-85. Lihat juga pembahasan karya Ben ini oleh Farhan Bulkin, "Negara, Masyarakat dan Ekonomi", dalam PRISMA no.8, 1984.

4. Lihat Anderson Opcit. dan juga Vedi R. Hadiz h. 80

kepentingan Negara.⁵ Dan beberapa kebijaksanaan itu dapat dipahami dengan melihat kesinambungan antara Negara Orde Baru dengan Negara Kolonial, dengan melakukan fungsi-fungsi yang lazim dilakukan oleh suatu negara yaitu dengan memelihara tentara, membuat perjanjian, memungut pajak; menindak para pelanggar hukum dan lain-lain.⁶ Dikatakan oleh Ben:

...the state not only has its own memory but harbors self-preserving and self-aggrandizing impulses, which at any given moment are "expressed" through its living members, but which cannot be reduced to their passing personal ambitions.⁷

Pemikiran yang ditulis oleh Ben ini tepat untuk menggambarkan situasi pada awal hingga pertengahan tahun 70-an, gejala menuju arah penguatan Negara. Aktor Negara saat itu mengalami pergantian, namun secara mendasar tidak ada suatu struktur yang berubah, menuju arah pemusatan aktivitas pada Negara, dan pada Orde Barulah ekspresi Negara mengalami puncaknya. Tidak ada perubahan mendasar, justru ada kontinuitas dalam tiga setting yang ditunjukkan oleh Ben: masa Negara Kolonial, Masa Demokrasi Terpimpin dan Negara Orde Baru.

Atau dengan meminjam penjelasan ekonomi politik yang dikemukakan oleh Farchan Bulkin disebutkan, dengan menggunakan perspektif historis dan struktural maka periode pasca 1966, penataan dan penguatan negara telah dimungkinkan oleh: 1. perusahaan negara menjadi lembaga yang relevan untuk mempertahankan stabili-

5. Vedi R. Hadiz Ibid. h.82-83

6. Ibid h.83.

7. Ibid.

tas perekonomian; 2. diberikannya kesempatan kepada pasar untuk mengatur mekanisme perekonomian; 3. dibukanya kesempatan kepada modal, baik dari dalam maupun luar negeri untuk bergiat dalam ekonomi; dan 4. pengintegrasian kembali perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian internasional. ⁸

Dengan demikian untuk memahami interaksi antara pers dan pemerintah saat itu, dasar yang demikian cukup untuk menjelaskannya. Suatu masa yang disebut sebagai bulan madu, tidak lebih dari suatu masa peralihan aktor Negara, menuju stabilitas Negara yang baru. Pers yang saat itu terlihat seolah-olah memiliki keberanian yang lebih besar ⁹, atau seakan lebih bebas - dengan membandingkannya pada masa Demokrasi Terpimpin - adalah masa di mana aktor Negara yang baru justru sedang melakukan konsolidasi di dalamnya untuk mengendalikan Negara yang baru, dan masa tahun 1974, boleh dikatakan Negara beserta dengan aparatnya sudah mulai terkonsolidasi, sehingga pers yang direpresentasikan sebagai salah satu kekuatan masyarakat, mendapatkan tamparan karenanya dalam moment peristiwa 15 Januari tersebut.

Atau dalam bahasa lain, John Bresnan ¹⁰ mengatakan bahwa apa yang terjadi setelah Peristiwa 15 Januari 1974, terhadap dewan

8. Farhan Bulkin, "Negara, Masyarakat dan Ekonomi", PRISMA no.8 1984, h.16.

9. Meminjam istilah yang digunakan oleh Jakob Detama, dalam wawancara tanggal 21 Juli 1993.

10. John Bresnan, Managing Indonesia: The Modern Political Economy, New York: Columbia University Press, 1993, chapter VI "The January 15 'Disaster'", h.135-163.

mahasiswa dan pers nasional, yang saat itu melakukan fungsi artikulasi kepentingan elite dan pendapat umum, dengan peredaman terhadap keduanya justru melemahkan proses politik saat itu, dan pemerintah karenanya menjadi lebih terisolasi dan berkurang penerimaannya informasinya. 11

Teori-teori Pers

Pada tahun 1956, muncullah konsep tentang empat macam teori pers, yang dikemukakan oleh Fred S. Siebert, dan kawan-kawannya, yang sampai kini menjadi suatu konsep klasik, dalam membahas hubungan antara pers dan pemerintah di pelbagai negara di dunia. 12

Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm menyebutkan empat macam teori pers yang berkembang saat itu, yaitu: Teori Pers Otoritarian, Teori Pers Libertarian, Teori Pers Tanggung Jawab Sosial, dan Teori Pers Komunis.

Karya yang mendasarkan pada kondisi dunia di tahun 1950-an, atau beberapa saat setelah usainya Perang Dunia II, dan masuk dalam kondisi Perang Dingin antara Barat dan Timur itu, untuk menjelaskan perkembangan kondisi pers di dunia saat ini sudah harus banyak direvisi dari teori-teori awalnya. Hal ini tampak

11. Ibid. h.163.

12. Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm, Four Theories of the Press, Urbana: University of Illinois Press, 1956. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Putu Laxman Sanjaya Pendi, Empat Teori Pers, Jakarta: Intermedia, 1986.

misalnya dari tulisan Robert G. Picard¹³ yang mengkritik keabsahan model-model klasik tersebut dalam melihat fenomena hubungan pers dan pemerintah pada masa dekade 80-an.

Bahkan sebagai suatu fakta, di akhir 80-an, dunia dicengangkan oleh runtuhnya ideologi Komunis di Eropa Timur, sehingga praktis dari uraian Teori Pers Komunis yang dikemukakan oleh Fred Siebert dan kawan-kawan, telah gugur dan tinggal sebagai catatan sejarah masa lalu saja.

Dan, untuk membandingkan salah satu dari beberapa model teori pers yang ada, dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, maka perlu ada kehati-hatian dalam melihat model mana yang sebenarnya berkembang di Indonesia, sambil melihat historitas macam apa yang terjadi di Indonesia. Sehingga untuk menyebut kondisi di Indonesia dengan menggunakan tipologi di atas, kita harus melacak kondisi historis macam apa yang melatari munculnya model yang dipakai untuk menyebut kondisi di Indonesia.

Secara singkat akan diuraikan di sini empat model klasik yang dikemukakan oleh Fred Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm.

Penyebutan Teori Pers Otoriter sebagai yang pertama, bukanlah tanpa alasan. Model ini yang memang pertama muncul dalam sejarah kehidupan pers, dan berkaitan dengan pandangan filosofis

13. Robert G. Picard, "Revisions of the 'Four Theories of the Press' Model", Mass Communication Review Vol. X no.1 & 2, Winter Spring 1982/1983.

tentang hakikat negara dan masyarakat, 14

Empat postulat dasar yang mendasari pemikiran tentang sistem pers Otoriter, berkaitan dengan hakikat manusia; hakikat masyarakat dan negara; hubungan manusia dengan negara; dan problema filsafat mendasar, tentang pengetahuan dan kebenaran.

Dalam faham ini maka Negara dianggap sebagai ekspresi tertinggi dari organisasi kelompok manusia, mengungguli masyarakat dan individu. Negara merupakan hal terpenting dalam pengembangan manusia seutuhnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa di dalam dan melalui negara, manusia mencapai tujuannya; tanpa negara, manusia tetap menjadi mahluk primitif. 15

Pemikiran tersebut didasari oleh pandangan filsuf Yunani kuno, Plato, yang mengidealkan Negara yang dipimpin oleh sekelompok orang bijaksana atau setidaknya penasehat untuk para pemimpin masyarakat.

Hubungan antara pengelola terbitan, atau pers, dengan Negara pada saat itu ada dalam kerangka yang demikian. Bahkan pada masa awal diketemukannya mesin cetak, Gereja memonopolinya pada abad pertengahan, baru kemudian ada pemberian paten untuk memiliki mesin cetak kepada beberapa kelompok eksklusif saja, seperti yang terjadi di Inggris pada abad ke-16.

Teori Pers Libertarian, sebagai teori kedua, muncul membalikkan pandangan yang sudah berkembang sebelumnya. Dalam menjawab

14. Lihat Empat Teori Pers, terj. h. 10-41.

15. Ibid. h. 11.

postulat yang sama, maka tekanan yang sebelumnya pada konsep Negara, kini beralih kepada individu dan masyarakat. Rasionalitas yang menjadi spirit pada masa abad ke-17 dan 18, melahirkan pemikiran-pemikiran tentang Demokrasi.

Fungsi utama masyarakat adalah untuk memajukan kepentingan anggotanya, dan faham ini meragukan posisi Negara sebagai ekspresi manusia tertinggi.

John Milton, misalnya, sebagai salah satu tokoh pemikir pada masa itu, dalam bukunya *Areopagitica* menulis argumentasi kebebasan intelektual dalam tradisi libertarian. Ia menentang sistem pengawasan otoritarian, dengan sensor yang ketat terhadap tulisan-tulisan dan juga sistem lisensi terhadap barang cetakan.

Menurut Milton, manusia pada dasarnya dengan akal pikirannya dapat membedakan mana yang benar dan yang salah, atau yang baik dan buruk. Untuk menggunakan kemampuannya ini, manusia harus punya hak yang tidak terbatas dalam mendengarkan ide atau pikiran-pikiran orang lain. Ia yakin bahwa kebenaran bersifat pasti dan dapat didemonstrasikan, dan bahwa kebenaran punya kekuatan yang unik untuk bertahan dalam suatu 'pertemuan (ide) yang bebas dan terbuka'.¹⁶

John Stuart Mill yang juga filsuf masa itu, juga pernah mengungkapkan:

Jika semua umat manusia kecuali satu orang, punya satu pendapat yang sama dan hanya satu orang pendapatnya berbeda, maka umat manusia tidak dibenarkan untuk membungkam yang satu orang itu; sama halnya orang yang satu itu, jika punya kekuasaan, tidak dibenarkan membungkam umat manusia.¹⁷

16. Ibid. h.49.

17. Ibid. h.51.

Teori Pers Tanggung Jawab Sosial, sesungguhnya merupakan pengembangan dari Teori Pers Libertarian, dan teori ini muncul dari keprihatinan yang dibawakan oleh Komisi Kebebasan Pers.¹⁸

Teori Tanggung Jawab Sosial ini lahir salah satunya karena revolusi teknologi dan industri yang merubah wajah dan cara hidup bangsa Amerika dan yang mempengaruhi pers juga. Hal lain adalah juga kritik-kritik yang terlontar ketika media massa telah tumbuh semakin besar dan penting peranannya, dan mengandung ancaman terhadap peraturan pemerintah. Di luar itu pun muncul iklim intelektual baru, yang banyak mempertanyakan asumsi-asumsi yang melatari pemikiran libertarian, pada abad 17 dan 18. Serta juga munculnya rasa tanggung jawab dari para industrialis dan bisnis media massa saat itu.¹⁹

Kritik yang ditujukan pada pers saat itu adalah:

1. Pers telah menggunakan kekuatannya untuk kepentingan sendiri. Pemilik perusahaan pers hanya mempropagandakan pendapatnya, terutama dalam masalah politik dan ekonomi, dan mengorbankan pendapat lainnya.
2. Pers telah menjadi alat pemuas bisnis raksasa dan pada satu saat pers membiarkan dirinya dikontrol oleh pemasang iklan yang mempengaruhi kebijakan redaksional.
3. Pers menolak adanya perubahan dalam masyarakat.
4. Pers lebih mengutamakan segi sensasi dangkal daripada segi penting lainnya dalam peliputan peristiwa.
5. Pers berbahaya bagi moral masyarakat.

18. Lihat Ibid. h.83-119.

19. Ibid. h.87-88.

6. Pers melanggar batas-batas kehidupan pribadi tanpa alasan yang tepat.
7. Pers dikontrol oleh kelas sosial ekonomi, yaitu kelas bisnis, dan semakin sulit bagi pendatang baru untuk memasuki dunia industri komunikasi, karenanya pers yang bebas dan terbuka ada dalam kedudukan terancam. 20

Dengan sejumlah tuduhan di atas, maka pers pun melakukan perubahan pemikiran dari dalam, dan kemunculan kode etik pertama pada tahun 1923, mencerminkan adanya perubahan tersebut.

Kode etik itu, yaitu The Canons of Journalism yang diadopsi Masyarakat Penerbit Surat kabar Amerika, menghimbau surat kabar agar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, ketulusan, kejujuran, tidak memihak, bermain seimbang, kesopanan dan menghormati kehidupan pribadi perseorangan. 21

Komisi Kebebasan Pers menggariskan lima hal yang dituntut masyarakat modern terhadap pers, dan merupakan ukuran pelaksanaan kegiatan pers. Lima hal itu adalah:

1. Pertama-tama pers dituntut untuk menyajikan laporan tentang kejadian sehari-hari secara jujur, mendalam dan cerdas. Ini merupakan tuntutan kepada pers untuk menulis secara akurat, dan tidak berbohong.
2. Pers juga dituntut untuk menjadi 'sebuah forum pertukaran komentar dan kritik', yang berarti pers diminta untuk wadah diskusi di kalangan masyarakat, walaupun berbeda pendapat

20. Ibid. h.89.

21. Ibid. h.97.

dengan pengelola pers itu sendiri.

3. Pers hendaknya menonjolkan sebuah gambaran yang representatif kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini mengacu pada se-gelintir kelompok minoritas dalam masyarakat yang juga memili-ki hak yang sama dalam masyarakat untuk didengarkan.
4. Pers hendaknya bertanggung jawab dalam penyajian dan pengurai-an tujuan dan nilai-nilai dalam masyarakat.
5. Pers hendaknya menyajikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh berita sehari-hari. Ini berkaitan dengan kebebasan informasi yang diminta masyarakat. ²²

Yang juga perlu dilihat dalam Teori Pertanggungjawaban Sosial ini adalah bagaimana hubungan antara pers dan pemerintah dipahami.

Pada era Libertarian maka pemerintah dianggap sebagai musuh utama dari kebebasan, tetapi pergeseran pengertian terhadap fungsi pemerintah dalam teori ini melihat bahwa pemerintah tidak hanya harus mengizinkan adanya kebebasan, tapi juga harus mempro-mosikannya. Namun salah satu fungsi pemerintah adalah menjaga ketertiban dan keamanan orang per orangan, oleh karenanya tidak lagi tepat untuk suatu pelaksanaan kebebasan semesta dalam masyarakat modern. Bersama dengan masyarakat, pemerintah adalah badan yang cukup kuat untuk menjamin bahwa kebebasan (pers) dapat dijalankan dengan efektif, sambil ia melindungi kebebasan warga

22. Ibid. h.99-105.

negaranya. ²³

Teori Pers Komunis, tepatnya Teori Pers Komunis Soviet, mengemukakan pemikirannya pada pandangan Karl Marx, dan dikembangkan oleh Stalin dan Lenin.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pers dalam negara Komunis, mempunyai tugas untuk mengabdikan kepentingan partai, dan dengan demikian unsur otoritarian menjadi dominan di sini. Sulit diharapkan adanya suatu polemik ide atau gagasan dalam sistem pers yang demikian.

Tinjauan singkat atas 4 teori klasik yang dikenal dalam dunia pers, untuk masa sekarang harus dilihat secara kritis, karena banyak perkembangan baru yang menyebabkan harus ada suatu perbaikan, atau setidaknya penambahan, atas hasil analisa yang dilakukan pada masa setelah Perang Dunia II tersebut.

Robert G. Picard ²⁴ misalnya, menyebutkan beberapa pendapat lain yang mengajukan tipologi baru dalam melihat sistem pers di dunia ini.

Kritik utama Picard adalah ketidakmampuan studi Fred Siebert dan kawan-kawan untuk menjelaskan fenomena pers di negara berkembang, dan tulisannya itu sendiri ditulis oleh para peneliti yang berasal dari Amerika, dan terpengaruh dengan tradisi Anglo-Ameri-

23. Ibid. h. 108-109.

24. Robert G. Picard Opcit.

ka dan juga memiliki bias dari pengaruh demokrasi liberal. 25

William Hachten misalnya, yang dikutip Picard 26 membagi model pers di dunia dalam tipologi: pers otoriter, pers komunis, pers 'western', pers revolusioner dan pers pembangunan.

Pers otoriter dan pers komunis, dipinjam Hachten dari empat teori pers yang dikemukakan Siebert. Pers 'western' merupakan penggabungan dari teori libertarian dan teori pertanggungjawaban sosial. Menurut Hachten, walaupun keduanya merupakan dua konsep yang berbeda, tetapi keduanya muncul di Barat, dan menampilkan pola pikir Barat.

Sedangkan dua konsep baru yang diajukan Hachten, yaitu pers revolusioner dan pers pembangunan, saat sebelumnya kurang diperhatikan. Dalam pers revolusioner, hubungan pers dan pemerintah lain dengan konsep sebelumnya. Pers revolusioner, kata Hachten, adalah pers dari sekelompok orang yang yakin sekali bahwa pemerintahannya tidak memenuhi kepentingan mereka, dan harus digulingkan, dan untuk sekelompok orang ini tidak ada kesetiaan kepada negara.

Disebutkan pula, bahwa pengganti dari teori pers revolusioner yang dianut oleh para pejuang gerakan kemerdekaan, adalah teori pers pembangunan. Landasan teoritisnya adalah kombinasi dari pemikiran sosialis dan prinsip-prinsip pembangunan, dan media massa di sini dimengerti untuk mendukung pembangunan.

25. Lihat juga John C. Merril, "Freedom of the Press: Changing Concept?" dalam John C. Merril dan Heinz Dietrich Fischer, ed. International and Intercultural Communication, New York: Hasting House Publ., (second edition, reprinted) 1978, h.125-135.

26. Picard Opcit.

Persamaan teori ini dengan teori pers revolusioner adalah sifat peralihannya, tetapi teori pers pembangunan lebih dapat dilaksanakan dalam waktu yang panjang.

Pers itu sendiri, adalah bagian dari institusi yang disebut sebagai media massa, dan pertama sekali media massa mempunyai fungsi untuk bertahan terhadap lingkungannya,²⁷ atau dengan bahasa lain fungsi pertama dari media massa adalah fungsi informasi. Atau Andrew Arno²⁸ lebih menyebut media massa sebagai penutur cerita.²⁹

Arno melihat posisi media massa dalam suatu kerangka sistem yang berkaitan dengan masalah kultur bangsa tertentu dalam menghadapi konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Ia melihat bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat, adalah hal wajar yang sedikit banyak berhubungan dengan komunikasi. Komunikasi yang terjadi dalam konflik, bisa mengakibatkan dua kemungkinan; ataukah konflik menjadi semakin intensif, ataukah

27. Harold Lasswell menyebutkan 3 fungsi media massa, yaitu: "...surveillance of the environment; the correlation of the parts of the society in responding to the environment; and the transmission of the social heritage from one generation to the next". Namun Charles R. Wright menambahkan fungsi lain dari media massa sebagai "entertainment", Lihat pada Werner J. Severin dan James W. Tankard, Communication Theories: Origins, Methods, Uses, New York: Hasting House, 1979, h.212.

28. Andrew Arno, "Communication, Conflict and Storylines: The News Media as Actors in a Cultural Context", dalam Andrew Arno & Wimal Dissanayake ed. The News Media in National and International Conflict, Westview Press: 1984, h.1-15.

29. Diterjemahkan dari kata "...the media as storytellers". Ibid. h.6.

konflik menjadi reda. Dan di sini bisa dilihat bagaimana sebenarnya peran media massa dalam konflik tersebut, namun secara alami bagi media massa, konflik adalah berita. ³⁰

Berita yang menampilkan tentang konflik, bisa saja menjadi suatu fakta yang terdistorsi, tetapi pada dasarnya para pembaca menginginkan informasi yang akurat yang berkaitan dengan konflik atau persoalan-persoalan tertentu. Jika pembaca tidak mendapatkan informasi tersebut dari media massa, maka ia akan mencari sumber informasi yang lain.

Lebih lanjut Arno mengatakan bahwa manajemen konflik menjadi penting artinya, karena konflik bisa membahayakan dan menghancurkan jika tidak dikontrol. Komunikasi di sini jadi penting artinya dalam proses menangani konflik, dan dalam masyarakat modern media massa memegang peran tersebut. Dengan memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan konflik kepada pembaca atau khalayak yang lebih luas maka media massa menjadi sarana opini publik, dan dengan demikian menolong mencarikan pemecahan terhadap konflik tersebut.

Dikaitkan dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dilema yang dialami oleh Indonesia Raya ada dalam kerangka ini. Di satu sisi koran ini punya kesadaran untuk menampilkan informasi apa adanya, jika dapat selengkap-lengkapnyanya, dalam upaya untuk meredam konflik. Misalnya dalam Peristiwa 5 Agustus 1973 di Bandung, dan Peristiwa 15 Januari 1974 di Jakarta ³¹ Indonesia Raya berusaha untuk menampilkan suasana konflik sedemikian rupa

30. Ibid. h.2.

31. Lihat Bab III dan IV tulisan ini.

yang justru menginginkan terselesaikannya konflik tersebut. Tetapi bukan demikian pendekatan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Negara, sehingga pemberitaan koran ini ditanggapi secara politis, dalam arti pendekatan keamanan yang terlebih dahulu dipakai, dan pemberitaan di surat kabar dianggap sebagai potensi untuk mengembangkan konflik.

Kembali pada yang diungkapkan oleh Arno, untuk tidak melihat masalah konflik tersebut secara linear, maka Arno pun menyebutkan bahwa terhadap konflik pun, media massa memiliki kepentingan tertentu pula. Arno mempertanyakan peran apa yang dibawakan oleh media massa ketika ia menemui konflik. Apakah media massa akan berperan sebagai sumber informasi? Ataukah ia menjadi pedagang informasi?

Arno pun mempertanyakan kepentingan media massa tersebut, apakah media massa tidak hendak menjadi corong dari salah satu kepentingan dalam masyarakat? Ataukah sebagai profesi, media massa tidak malah memiliki kepentingan pribadi, yang sama sekali tidak berhubungan dengan kepentingan publik? Bagaimana media massa melihat dirinya sendiri? Bagaimana para pembacanya menilai media tersebut? Dan bagaimana hubungan media massa terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik pada masa itu, serta bagaimana kaitannya terhadap karakter asli media massa tersebut? ³²

Pertanyaan-pertanyaan kritis yang disampaikan Andrew Arno di sini dapat dipakai untuk melihat bagaimana posisi surat kabar

32. Ibid. h.5.

Indonesia Raya, dalam setting sosial, politik dan ekonomi Indonesia pada awal hingga pertengahan tahun 1970-an.

Seperti sudah dituliskan pada bab-bab sebelumnya, bagaimana Indonesia Raya menulis teks-teksnya sebagai tanggapan atas situasi pada masa awal Orde Baru. Potret-potret awal hingga pertengahan tahun 70-an ditampilkan dengan kekhasan karakter koran ini. Namun produksi teks-teks tadi ditanggapi amat politis oleh penguasa Negara, yang akhirnya mengakibatkan ditutupnya koran ini.

Dalam situasi perbaikan ekonomi, menyusun pembangunan, dan juga prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu pemilihan model pembangunan, maka koran ini rupanya harus berhadapan dengan logika kekuasaan ketika ia memproduksi teks-teksnya. Liputannya atas suatu peristiwa hanya menghasilkan tindakan represif terhadap koran ini, dan melihat kompleksnya permasalahan saat itu terlihat pula bagaimana praktek legal-formal rupanya terabaikan dengan pertimbangan politik kekuasaan saat itu. Permasalahan tentang mengamankan situasi, adalah pikiran yang pertama sekali muncul ketimbang menanyakan kepada para pengasuhnya tentang produksi teks-teksnya itu.

Penampilan berita dan opini oleh Indonesia Raya terutama dalam meliput gerakan mahasiswa, korupsi dan penyelewengan, kritik terhadap modal Jepang, rupanya tidak dapat diterima oleh Negara sebagai pertama sekali adalah fungsi informasi yang dilakukan oleh surat kabar, tetapi lebih dianggap sebagai potensi untuk memperbesar konflik. Bahkan secara tidak langsung dikatakan bahwa konflik tersebut berasal dari pemberitaan di surat-surat kabar.

Dalam pengumuman kepentingan dan kekuatan-kekuatan di atas, maka tampak sekali betapa Indonesia Raya, dan sejumlah pers yang lain ada dalam posisi yang demikian lemah. Bahkan hukum sekalipun tidak memberikan peluang baginya untuk membela diri, dan tidak ada posisi tawar menawar di situ. Keputusan telah jatuh dan bagi pers tidak mungkin keputusan itu ditinjau lagi. Pers hanya pasrah dalam kondisi demikian, walaupun FWI dan SPS, sebagai wadah organisasi profesi mencoba untuk menyesali keputusan demikian, tetapi hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan yang sudah jatuh itu.

Bagaimana pun juga penjelasan di atas harus juga dikaitkan dengan identitas surat kabar di negara yang sedang berkembang, di mana Indonesia, pada masa tahun 1970-an tersebut memang tergolong negara yang sedang berkembang. Karenanya penjelasan tentang pers Indonesia, juga erat kaitannya dengan hal pembangunan yang terjadi di negara berkembang, dan ada suatu karakter tertentu yang khas dari negara berkembang, dilihat dari kehidupan persnya.

Pembahasan tentang pers di negara berkembang banyak mengacu pada buku yang ditulis oleh E. Lloyd Sommerlad, yang ditulis pada tahun 1966.³³ Dalam kata pengantar buku tersebut, Wilbur Schramm menulis:

In developing countries, newspapers are born in idealism and live in frustration. Many - most - of them die in frustration. ...In some countries the press is expected to serve as a 'watchdog on government'. On the other hand, in a developing

33. E. Lloyd Sommerlad, The Press in Developing Countries, Sydney University Press, 1966.

country the press is often, if not by control at least by conscience, the government's medium. It must carry, interpret, even propagandize the government's development plan to the people, because the future of the nation hinges on success in the plan. In greater or less degree, every newspaper in a developing country feels this conflict, and the part in the development of its country depends on how it resolves the conflict. ³⁴

Dilema yang dialami oleh pers negara berkembang, juga dialami oleh pers Indonesia pada umumnya. Studi-studi yang dilakukan oleh Edward C. Smith, ³⁵ Oey Hong Lee, ³⁶ Francois Raillon, ³⁷ Kerry Groves ³⁸ dan juga Daniel Dhakidae ³⁹ menyimpulkan bahwa peran pers selalu ada di bawah bayang-bayang kekuasaan negara, dan hampir setiap masa ditunjukkan, sejak jaman kolonial, lalu masuk ke dalam masa kemerdekaan, Demokrasi Terpimpin dan Masa Orde Baru sekalipun, kedudukan pers selalu goyah ketika berhadapan dengan kekuasaan negara, dan pers yang hidup dalam suatu masa pun tidak lepas dari campur tangan negara, bahkan dapat

34. Ibid. h. v-vii.

35. Edward C. Smith, Pembreidelan Pers di Indonesia, terj. Atmakusumah, Jakarta: Grafiti Pers, 1983.

36. Oey Hong Lee, Indonesian Government and Press During Guided Democracy, England: University of Hull, 1971. Lihat juga Oey Hong Lee, "Indonesian Freedom of the Press and the 1971 Elections" dalam Indonesia After 1971 Elections, England: University of Hull, 1971.

37. Francois Raillon, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia, terj. Nasir Tamara, Jakarta: LP3ES, 1985.

38. Kerry Groves, The Press under Indonesia's New Order, tesis BA dari Australian National University, Canberra, 1978.

39. Daniel Dhakidae, The State, The Rise of Capital and The Fall of Political Journalism in Indonesia: Political Economy of Indonesian News Industry, tesis doktor dari Cornell University, Ithaca, New York, 1991.

dikatakan pers yang bisa hidup di suatu masa adalah pers yang sudah terseleksi sedemikian rupa oleh kekuasaan negara.

Pers dan Dampak Modernisasi

Bagian ini sedikit ingin juga menelaah bagaimana kehidupan pers di Indonesia, juga terkena dampak dari ideologi Modernisasi atau yang dibahasakan menjadi ideologi Pembangunan atau Developmentalisme.

Relevansi telaah ini adalah bahwa Indonesia pada masa tahun 1970-an juga melakukan pembangunan ekonomi yang ingin melakukan perbaikan-perbaikan atas situasi yang terjadi pada masa sebelum tahun 1965, dan pada saat itu pula Indonesia beserta dengan sejumlah negara lain di Asia, Afrika maupun Amerika Latin melakukan hal yang sama, dan lebih banyak atas faktor dekolonialisasi yang terjadi di sebagai besar negara tersebut.

Modernisasi atau yang kemudian juga dikenal sebagai Development, pada masa pertengahan abad 20 menjadi suatu pola pemikiran tersendiri yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dan politik pada masa itu. Negara-negara di dunia pada masa itu baru saja menyelesaikan Perang Dunia II dan diiringi dengan kemerdekaan banyak negara-negara baru di Amerika Latin, Asia dan Afrika dengan cepat melakukan pembaharuan di dalam negerinya untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 40

Pada perkembangannya, modernisasi ini menjadi suatu paradigma berpikir yang terutama banyak dikembangkan oleh para sarjana ilmu sosial di Amerika untuk menjelaskan dan merencanakan perubahan sosial di negara-negara berkembang. 41

Dalam menelaah perkembangan teoritiknya, serta implikasinya terhadap kehidupan di Indonesia, ditunjukkan oleh Benny Subyanto 42 bahwa teori modernisasi di Indonesia menjadi semakin penting artinya setelah tahun 1966, dengan pergantian kekuasaan politik dari Orde Lama ke Orde Baru, di mana arus masyarakat bawah pada masa sebelumnya, yaitu kelompok intelektual non komunis dan juga militer, kini menjadi kekuatan penentu pada masa Orde Baru. 43 Dan orang seperti Ali Moertopo misalnya, yang dikenal sebagai salah satu arsitek Orde Baru, dengan jelas menggambarkan konsepnya sendiri tentang pembangunan di Indonesia dalam buku "Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun".

Dari situ jelas dilihat bahwa modernisasi yang hendak dilakukan di Indonesia juga membutuhkan beberapa syarat mutlak untuk menjalankannya, yaitu stabilitas politik dan pembangunan ekonomi.

40. Tentang kelahiran teori modernisasi dan latar belakang historisnya lihat Suwarsono dan Alvin Y. So, Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1991, khususnya bab I "Perspektif Modernisasi" h.5-92.

41. Lihat Benny Subyanto, Pengaruh Teori-teori Modernisasi dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Pemikiran Politik di Indonesia, Monograph dari SPES (Society for Political Economic Studies), Jakarta: 1991, h.5.

42. Ibid.

43. Ibid. h.62-63.

Ini yang dapat dilihat pula dalam konsep trilogi pembangunan, yang persis mengadopsi pemikiran dalam paradigma Modernisasi ini.

Implikasinya terhadap pers jelas sekali, bahwa dalam pertimbangan stabilitas, pemberitaan di surat kabar jika dirasakan mengganggu stabilitas, ⁴⁴ tidak segan-segan upaya pengamanan dilakukan terhadap pers.

Dalam paradigma ini maka stabilitas adalah harga yang harus dibayar untuk tetap melakukan pembangunan ekonomi, dan karenanya setiap gerakan masyarakat dilihat dalam pertimbangan, apakah mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi, atau tidak.

Tentunya paradigma modernisasi ini sendiri tidaklah lepas dari kritik-kritik terhadap pendekatan Tersebut, dan memunculkan konsep-konsep tandingannya, namun bukan pada tempatnya jika hal ini dibahas lebih jauh. ⁴⁵

Dengan demikian maka melihat peran pers dilihat lebih dalam peran sebagai agen pembangunan, agen perubahan sosial, pembawa informasi tentang pembangunan. Itulah semua yang diinginkan oleh banyak pemerintah negara berkembang, termasuk Indonesia, seperti yang ditunjukkan dalam karya E. Llyod Sommerlad di atas.

Sementara itu di pihak lain, justru pertama sekali bukan itu

44. Lihat konsiderans pencabutan SIT dan SIC surat kabar Indonesia Raya, pada bab V.

45. Sekedar untuk memberikan gambaran tersebut maka bisa dilihat uraian sederhana dari Arief Budiman, Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1989, h.44-55, juga bisa melihat Suwarsono dan Alvin Y. So Opcit; Magnus Blomstrom & Bjorn Hettne, Development Theory in Transition: The Dependency Debate & Beyond: Third World Responses London: Zed Books, 1984.

yang ingin dilakukan oleh pers. Bobot ideologis 'pembangunan' memang tidak dikenal pers sebelumnya. Pelacakan historis terhadap kehidupan pers memperlihatkan bahwa pemberian bobot ideologis macam itu tidaklah memberikan peluang yang cukup besar bagi pers untuk berkembang, seperti ketika pers di jaman Demokrasi Terpimpin harus menjadi pers yang mendukung Nasakom dan Manipol.

Dan menarik sekali di sini, jika kita uraikan juga konsepsi pembangunan macam apa yang dimengerti oleh koran ini, dan bagaimana institusi media massa seperti Indonesia Raya ingin berpartisipasi dalam pembangunan Orde Baru.

Di sini kembali dikutipkan isi tajuk rencana koran ini dalam terbitan perdana periode keduanya, yang menunjukkan dukungan eksplisit kepada pemerintah Orde Baru:

Harian ini memberikan dukungannya pada pemerintah Suharto dan akan memberikan sumbangan sebesar mungkin menciptakan iklim yang sehat dan konstruktif di negeri kita, agar program-program pembangunan ekonominya untuk kemakmuran rakyat yang merata dan adil mendapat sukses sebesar mungkin. 46

Lalu inilah 'sumbangan' Indonesia Raya untuk pembangunan ekonomi saat itu:

Akan tetapi kami juga akan memberikan kritik-kritik di mana dan apabila kami anggap perlu dengan tujuan senantiasa supaya pemerintah kita yang sekarang, pimpinan nasional kita yang baru, berhasil dalam tugas berat mereka memperbaiki kehancuran dan kerusakan di segala bidang kehidupan yang telah ditimbulkan oleh bekas rejim Sukarno.

Kami akan bekerja menyadarkan pendapat umum rakyat kita pada kenyataan bahwa pekerjaan yang berat ini akan meminta waktu yang cukup lama, akan meminta disiplin sosial dan nasional yang tinggi, rasa tanggung jawab sosial dan nasional yang sebesar-besarnya, kerja keras dan pengabdian yang seluhur-

46. Tajuk Rencana Indonesia Raya 30 Oktober 1968.

/ luhurnya dari setiap kita, pemimpin maupun rakyat umum. 47

Di sinilah terjadi tarik menarik antara pers dan pemerintah, berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, dan bidang mana yang harus disepakati sebagai mendukung pembangunan tersebut.

Indonesia Raya justru ingin menjadi instansi kritis di sini, dalam posisinya sebagai pengamat perkembangan pembangunan, dan memberikan kontribusi dalam perannya sebagai pembawa informasi, yang tidak melulu mendukung keberhasilan pembangunan, tetapi juga memberikan perhatian atas dampak, atau sisi gelap dari pembangunan yang sedang berjalan itu.

Mengapa fungsi informasi pers, mendapat bobot politis yang demikian besar oleh pemerintah, sehingga ketakutan tentang bahaya instabilitas membesar dengan pemberitaan di surat kabar? Itulah agenda yang penting dan tetap relevan untuk terus dibicarakan, karena di situ juga erat terkait dengan konsep efek media terhadap pembacanya.

Sejauh ilmu Komunikasi mempelajari tentang efek media massa maka terlihat ada suatu perkembangan pemikiran terhadap efek media massa tersebut, dan era teori 'jarum suntik' sudah lama ditinggalkan oleh para ahli komunikasi.⁴⁸ Tetapi tidak demikian rupanya yang dimengerti oleh Negara.

47. Ibid.

48. Lihat Severin and Tankard Opcit. khususnya "The Effects of Mass Communication", h.246-266.

BAB VII

P E N U T U P

Hubungan antara pers dan pemerintah, akan selalu menjadi perbincangan yang aktual. Ada pergeseran-pergeseran dalam menganalisisnya dari waktu ke waktu, ada tarik menarik, yang satu saat ke arah kutub yang satu, dan pada masa yang lain ditarik ke kutub yang lain. Dinamika ini tentu tidak dapat dilepaskan dalam konteks atau struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya yang berlangsung pada masanya.

Bila terasa selama ini tarik menarik tersebut lebih condong pada sisi pemerintah, hal ini merupakan hasil dari kesejarahan yang kemudian terlegitimasi lewat hukum formal, yang mendudukan pers dalam posisi tersudut.

Kiranya tulisan ini hendak merefleksikan titik balik sejarah pada pertengahan tahun 1970-an di mana pers dengan seluruh potensi yang hendak dikembangkannya justru masuk dalam situasi negara yang tengah menguat dan membutuhkan legitimasi untuk melaksanakan pemerintahannya.

Catatan sejarah yang hendak disodorkan ini setidaknya ingin mencoba menggali atau menelusuri kehidupan pers pada tahun 1970-

an, dinamika internal dan eksternal macam apa yang dihadapinya, serta implikasi apa yang sampai sekarang terus terasa.

Pers Indonesia pada era 1990-an tidak memiliki bobot ideologis sekental pers 20 tahun yang lalu, banyak pergeseran yang terasa, seiring dengan perkembangan lingkungan luar pers. Modal raksasa kini masuk dalam tubuh Pers Indonesia dan sejumlah pengusaha besar berlomba menanamkan investasinya dalam bisnis media massa. Walaupun secara bisnis, pers tidaklah terlalu menguntungkan, tetapi nilai strategis industri pers ini sungguh diakui. ¹

Akan kemanakah kehidupan Pers Indonesia selanjutnya? Itulah pertanyaan yang perlu dijawab secara sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di sini dalam artian ia (pers) harus dicermati, dianalisa secara menyeluruh dalam perubahan jamannya. Pada akhirnya pers, atau media cetak, bukan lagi sekedar sekedar produsen makna atau teks-teks, tetapi ia juga adalah suatu institusi bergengsi yang juga membawa ide-ide pembaharuan dalam masyarakat, sama halnya ketika pada masa awal Pers Indonesia, ia berperan sebagai pembawa kesadaran tentang dominasi pemerintahan kolonial. ²

Setidaknya sebagai lembaga, maka pers berisikan individu-

1. Lihat tulisan muktahir dari David T. Hill, "The Press in a Squeeze: Operating Hazards in the Indonesian Print Media", Southeast Asian Journal of Social Sciences, Vol.20, No.2 (1992).

2. Lihat tulisan Razif, "Marco Kartodikromo: Perintis Jurnalis Pemegang Prinsip Pergerakan", PRISMA 7, September 1991.

individu dengan latar belakang kelas menengah,³ sehingga sebagai lembaga ada juga yang mengharapkan pers sebagai 'pengelola ruang publik', yang adalah kewajiban pers untuk memperlihatkan transparansi politik, demi memajukan demokrasi.⁴

Inilah kiranya bahan renungan yang dapat memperlihatkan bahwa pers tidaklah semata-mata memproduksi teks, atau menyalurkan informasi, ia juga merupakan suatu kelembagaan, di mana begitu banyak kepentingan ingin merasuki dirinya.

3. Walaupun masih belum ada kesepakatan tentang konsep Kelas Menengah di Indonesia, karena ada keberatan-keberatan atas konsep yang mengatakan bahwa kelas menengah di Indonesia tidak sejati, karena ia tidak mandiri dalam posisinya terhadap Negara, tetapi setidaknya bisa disimak tulisan-tulisan yang mencoba memperkenalkan ide tentang kelas menengah di Indonesia ini; Richard Tanter dan Kenneth Young, Politik Kelas Menengah Indonesia, terj. Nur Iman Subono, Arya Wisesa dan Ade Armando, Jakarta: LP3ES, 1993.

4. Lihat pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Forum Demokrasi menyambut Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1993. Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Abdurrachman Wahid, sebagai Ketua Kelompok Kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

B U K U :

- Anwar, Rosihan, Menulis dalam Air: Sebuah Otobiografi, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983.
- Arifin, Marzuki, Peristiwa 15 Januari 1974, Jakarta: Publishing House Indonesia, 1974.
- Atmakusumah, Kebebasan Pers dan Arus Informasi di Indonesia, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1981.
- Atmakusumah, ed. Mochtar Lubis: Wartawan Jihad, Jakarta: Harian Kompas, 1992.
- Blomstrom, Magnus, Bjorn Hettne, Development Theory in Transition: The Dependency Debate and Beyond: Third World Responses, London: Zed Books, 1984.
- Bresnan, John, Managing Indonesia: The Modern Political Economy, New York: Columbia University Press, 1993.
- Budiman, Arief, Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Cahyono, Heru, Peranan Ulama dalam Golkar: Dari Pemilu sampai Malari, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Centre Strategic and International Studies, CSIS 20 Tahun, Jakarta, 1991.
- , Soedjono Hoemardani, Pendiri CSIS, 1918-1986, Jakarta, 1987.
- Chambert-Loir, Henri, Mochtar Lubis: Une Vision de l'Indonesie Contemporaine, Paris: Publication de l'Ecole Francaise D'Extreme Orient, 1974. (tesis doktor, tidak dipublikasikan)
- Chaniago, JR, et al, Ditugaskan Sejarah: Perjuangan Merdeka 1945-1985, Jakarta: Pustaka Merdeka, 1987.
- Cipta Loka Caraka, Kritis Mengupas Surat Kabar, Jakarta, 1970.
- , Ensiklopedi Populer Pembangunan Politik Pancasila, 4 jilid, Jakarta, 1973.
- Crouch, Harold, The Army and Politics in Indonesia, Ithaca: Cornell University Press, 1978.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Sejarah Taman Mini Indonesia Indah, 1989.

- Departemen Penerangan, Almanak Pers 1978, Dewan Pers, 1978.
- , Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama 1969-1974
- Dhakidae, Daniel, The State, The Rise of Capital and The Fall of Political Journalism in Indonesia: Political Economy of Indonesian News Industry, Ithaca, New York: Cornell University, 1991. (tesis doktor, tidak dipublikasikan)
- Diah, BM, Meluruskan Sejarah, Jakarta: Pustaka Merdeka, 1987.
- Feith, Herb, The Decline of Constitutional Democracy, Ithaca: Cornell University Press, 1962.
- Gandhi, ML, Undang-undang Pokok Pers, Proses Pembentukan dan Penjelasannya, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Gottschalk, Louis, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 1986 (cetakan kelima).
- Groves, Kerry, The Press Under Indonesia's New Order, Canberra: Australian National University, 1978. (tesis, tidak dipublikasikan)
- Hadiz, Vedi R., Politik, Budaya dan Perubahan Sosial: Ben Anderson dalam Studi Politik Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Yayasan SPES, 1992.
- Harvey, Barbara Silars, Permesta: Pemberontakan Setengah Hati, terj. Inkultura, Jakarta: Grafiti Pres, 1983.
- Hill, David T., Mochtar Lubis: Author, Editor and Political Actor Canberra: Australian National University, 1988. (tesis doktor, tidak dipublikasikan)
- Hill, Hal, Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia, terj. Burhanuddin Abdullah, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia, Seri Berita dan Pendapat: Pemilihan Umum 1971, Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers, 1972.
- IN, Soebagijo, Abdurrachman Surjomihardjo, P. Swantoro, Lintasan Sejarah PWI, Jakarta: PWI Pusat dan Departemen Penerangan, 1977.
- IN, Soebagijo, Jagat Wartawan Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1981.
- KH, Ramadhan, ed. Bang Ali: Demi Jakarta: 1966-1977, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1992.
- Kartodirdjo, Sartono, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

- Leirissa, RZ, PRRI-Permesta: Strategi Membangun Tanpa Komunis, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991.
- Lesmana, Tjipta, Tragedi Prioritas, Jakarta: Erwin Rika Pers, 1988.
- Lubis, Mochtar, Catatan Subversif, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1980.
- May, Brian, The Indonesian Tragedy, Singapore: Graham Brash, 1978
- Moleong, Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Muhaimin, Yahya A. Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-80, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Nasution, Adnan Buyung, The Aspiration for Constitutional Democracy in Indonesia: A Socio Legal Study of Indonesian Konstituante 1956-1959, Den Haag: Utrecht, 1992. (tesis doktor, diterbitkan Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992)
- Nasution, AH, Memenuhi Panggilan Tugas, jilid 3, Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- Nindarsari, Implikasi Politik Peranan Modal Jepang di Indonesia 1970-1979, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 1984. (skripsi sarjana Ilmu Politik, tidak dipublikasikan)
- Oey Hong Lee, Indonesian Government and Press During Guided Democracy, Switzerland: University of Hull, Monographs on Southeast Asia, 1971.
- , Indonesia Facing the 1980's: A Political Analysis, Hull England: Europress, 1979.
- PR, Soebagijo, et al ed. Persuratkabaran Indonesia dalam Era Informasi, Kumpulan Tulisan Menyambut 25 Tahun Harian Sinar Harapan, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1986.
- Panggabean, M., Berjuang dan Mengabdikan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Rachim, Alex A. ed., Pornografi dalam Pers Indonesia: Suatu Orientasi, Jakarta: Dewan Pers, 1977.
- Raillon, Francois, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia, terj. Nasir Tamara, Jakarta LP3ES, 1985.
- Robison, Richard, The Rise of Capital, Sydney: ASAA-Allen Unwin, 1986.
- Said, Tribuana, DS. Moeljanto, Perlawanan Pers Indonesia BPS

- terhadap Gerakan PKI, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983.
- Said, Tribuana, Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila, Jakarta: Haji Masagung, 1988.
- Seda, Francisia SSE, The Politics of Development: A Case Study of Asahan Project in North Sumatera, Indonesia, New York: Cornell University, 1989. (tesis master, tidak dipublikasikan)
- Seno Adjie, Demar, Pers: Aspek-aspek Hukum, Jakarta: Erlangga, 1977.
- Serikat Penerbit Surat kabar, Keputusan Konggres SPS ke XV, Juni 1974 di Bandung, Mengenai Bidang Organisasi, (dokumen SPS, tidak dipublikasikan).
- Serevin, Werner J., James W. Tankard, Communication Theories: Origins, Methods, Uses, New York: Hasting House, 1979.
- Siebert, Fred. S., Theodore Peterson, Wilbur Schramm, Four Theories of The Press, University of Illinois Press, 1956.
- , Empat Teori Pers, terj. Putu Laxman Sanjaya Pedit, Jakarta: Intermasa, 1986.
- Simorangkir, JCT, Undang-undang Pokok Pers, Jakarta: Penerbit Bhratara, 1967.
- , Pers, SIUPP dan Wartawan, Jakarta: Gunung Agung, 1986.
- Siregar, Amir Effendi, Pers Mahasiswa Indonesia: Patah Tumbuh Hilang Berganti, Jakarta: Karya Unipress, 1983.
- Smith, Edward C., Sejarah Pembreidelan Pers di Indonesia, terj. Atmakusumah et al, Jakarta: Grafiti Press, 1983.
- Soe Hok Gie, Catatan Seorang Demonstran, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Sofinas, AW, Hidup dan Matinya Harian Nusantara, Jakarta: Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia, 1979. (skripsi sarjana Ilmu Komunikasi, tidak dipublikasikan)
- Sommerlad, E. Llyod, Press in Developing Countries, Sydney University Press, 1966.
- Subyanto, Benny, Pengaruh Teori-teori Modernisasi dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Pemikiran Politik di Indonesia, Monograph SPES (Society for Political and Economic Studies), Jakarta, 1991. (tidak dipublikasikan)
- Sulistomo, Bambang, Aktivitas Politik Mahasiswa dalam Peristiwa 15 Januari 1974, Jakarta: Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia, 1980. (skripsi sarjana Ilmu Politik, tidak dipublikasikan)

- Sundhaussen, Ulf, Politik Militer Indonesia 1945-1965: Menuju Dwi Fungsi ABRI, terj. Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Surjomihardjo, Abdurrachman ed., Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, Jakarta :LEKNAS LIPI dan Deppen RI, 1988.
- Sutrisno, FX Mudji, Man and State in the Works of Mochtar Lubis and Manqunwijaya: An Inguriy into the Relations between the 'Ideal' and the 'Real' in Mochtar Lubis' and Manqunwijaya's Political Philosophies, Roma: Gregorinan University, 1986. (tesis doktor, tidak dipublikasikan)
- Suwarsono, Alvin Y. So, Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Tanter, Richard, Kenneth Young, Politik Kelas Menengah Indonesia, terj. Nur Iman Subono, Arya Wisesa dan Ade Armando, Jakarta: LP3ES, 1993.
- Toer, Pramoedya Ananta, Sang Pemula, Jakarta: Hasta Mitra, 1985.
- Tosh, John, The Pursuit of History, England: Longman House, 1984.
- Wiwoho, B., Banjar Chaeruddin, Memoar Jendral Yoqa, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1990.
- Wright, Charles R., Mass Communication: A Sociological Perspective, New York: Random House, 1975.
- 30 Tahun Indonesia Merdeka, 4 jilid, Jakarta: Tira Pustaka, 1981 (cetakan keempat).

A R T I K E L :

- Anderson, Ben, "Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspectives", Journal of Asian Studies, no.42 May 1983.
- Arno, Andrew, "Communication, Conflict and Storylines: The News Media as Actors in a Cultural Context", The News Media in National and International Conflict, Andrew Arno and Wimal Dissanayake eds., Westview Press: 1984.
- Atmakusumah, "Mochtar Lubis dan *Indonesia Raya*", dalam Atmakusumah (ed.), 1992.
- Budiman, Arief, "Mochtar Lubis, Manusia Multidimensional yang Kontroversial", dalam Atmakusumah (ed.), 1992.
- Bulkin, Farchan, "Negara, Masyarakat dan Ekonomi", PRISMA no.8, 1984.

- Chambert-Loir, Henri, "Indonesia Raya: Suatu Gambaran Keaktualan" terj. LEKNAS LIPI, tanpa tahun.
- Comstock, Donald E., "A Method for Critical Research: Investigation The World to Change It" Red Feather Institute for Advanced Studies in Sociology, 1980.
- Crouch, Harold, "The 15 th January Affair in Indonesia", Dyason House Papers, 1974.
- Dhakidae, Daniel, "70 Tahun Mochtar Lubis: Monumen Jurnalisme Indonesia", KOMPAS 8 Maret 1992.
- Feith, Herb, "Dynamics of Guided Democracy", Indonesia, Ruth Mc Vey ed., New Heaven: Yale University, 1967.
- Glassburner, Bruce, "Political Economy and The Suharto Regime", Bulletin of Indonesia Economic Studies, Australian National University, vol.XIV no.3, 1978.
- Gunawan, Andre H., "The Role of Students in the 15 Januari 1974 Incident", Southeast Asian Affair, Singapore: Institute of Southeast Asian Affair, 1975.
- Hars, Nasruddin, "Pers Indonesia setelah 15-16 Januari", PERS INDONESIA no.1 tahun II, Januari 1976.
- Hill, David T., "Press Challenges and Government Responses", The Indonesian Press: Its Past, Its People and Its Problems, Paul Tickell ed., Annual Lecture Series no. 12, Monash University, 1987.
- , "The Press in a Squeeze: Operating Hazards in the Indonesian Print Media", Southeast Asian Journal of Social Sciences, Vol.20, no.2, 1992.
- Kartodirdjo, Sartono, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen", Metode-metode Penelitian Masyarakat, Koentjaraningrat ed., Jakarta: Gramedia, 1977.
- Kasenda, Peter "Tahi Bonar Simatupang: Pejuang, Prajurit dan Pemikir", PRISMA no.2, 1991.
- Krissantono, "Ali Moerotopo di Atas Panggung Politik Orde Baru", PRISMA edisi khusus 20 tahun, 1991.
- KOMPAS, "Perlu direvisi, Ayat h pasal 33 Peraturan Menpen tentang SIUPP", 13 Juni 1993.
- Lesmana, Tjipta, "Pers Indonesia dalam Teori dan Praktek", dalam Soebagijo PR (ed.), 1986.
- Lubis, Mochtar, "Etos Pers Indonesia", PRISMA no.11 Desember, 1978.

- , "Etos Pers Indonesia", dalam Atmakusumah (ed.), 1992.
- Malley, Michael Sean, "Soedjono Hoemardani and Indonesian - Japanese Relationship 1966-1974", INDONESIA Cornell Modern Indonesia Project no.48 October, 1989.
- , "Soedjono Hoemardani dan Orde Baru", PRISMA edisi khusus 20 tahun, 1991.
- Merril, John C., "Freedom of the Press: Changing Concept?", International and Intercultural Communication, John C. Merrill and Heinz Dietrich Fisher, second edition, New York: Hasting House Publ., 1978.
- Mochtar, Kustiniyati, "Mochtar Lubis sebagai Pribadi dan Pemimpin Redaksi", dalam Atmakusumah (ed.), 1992.
- Moertopo, Ali, "Centre ini Harus Menjadi Milik Bangsa Indonesia", dalam CSIS 20 Tahun, 1991.
- Muis, A., "Memahami Hukum Pers Indonesia", KOMPAS 20 November 1992.
- Mukmin, Hidayat, "Suwanto dan Perjuangan Orde Baru: Militer Pemikir dan Komandan Seskoad 1966-67", dalam PRISMA edisi khusus 20 Tahun, 1991.
- Oetama, Jakob, "The Indonesian Press and Development", Indonesian Quarterly Vol I no.3, April 1973.
- , "Mencoba Mewarisi Api Perjuangan Pers Mochtar Lubis", dalam Atmakusumah (ed.), 1992.
- Oey Hong Lee, "Indonesian Freedom of the Press and the 1971 Elections", Indonesia After 1971 Elections, England: University of Hull, 1971.
- Paget, Robert K., "Jakarta Newspaper 1965-67", INDONESIA Cornell Modern Indonesia Project no. 4, October 1967.
- Picard, Robert G., "Revisions of the 'Four Theories of the Press' Model", Mass Communication Review vol.X no. 1 & 2, Winter-Spring 1982/3.
- PRISMA, "Dialog Orang Muda nan Tak Kunjung Mencapai Pantai", no. 12, Desember 1977.
- Pye, Lucian W., "Communication, Institution Building and the Reach of Authority", Communication and Change in Developing Countries, Honolulu: East West Centre, 1967.
- Rachim, Alex A., "Apakah Ia akan Ditangkap Begitu Turun di Kemayoran?" dalam Atmakusumah (ed.), 1992.

- Razif, "Marco Kartodikromo: Perintis Jurnalis Pemegang Prinsip Pergerakan", PRISMA no.9 September 1991.
- Robison, Richard, "Toward A Class Analysis of the Indonesian Military Bureaucratic State", INDONESIA Cornell Modern Indonesia Project, no.25, April 1978.
- Silalahi, Harry Tjan, "CSIS Lahir dari Tantangan Jaman", dalam CSIS 20 Tahun, 1991.
- Soeharto, "Pers sebagai Kekuatan dan Alat Perjuangan", Bunga Rampai Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia, T. Atmadi (ed.), Jakarta: Pantja Simpati, 1985.
- Suryadinata, Leo, "Sejarah Singkat Pers Tionghoa di Indonesia", Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia, terj. Dede Oetomo, Jakarta: Gramedia, 1988.
- TEMPO, "Jendral Soemitro: Lebih Suka Melihat Ke Depan", Memoar, 6 April 1991.
- TEMPO, "Djatikusumo: Prajurit dari Kraton", Memoar, 18 Juli 1992.
- Van Dijk, C., "The Hariman Siregar Trial", Review of Indonesian and Malayan Affairs vol.9, Jan-Dec 1975.
- Wanandi, Sofjan, Soedjati Djiwandono, "Soedjono Hoemardani dan Hubungan Indonesia-Jepang", dalam Soedjono Hoemardani sendiri CSIS, 1987.
- Wibisono, Christianto, "Dilema Pers Negara Berkembang", Sinar Harapan, 26 Agustus 1986.

tabel 1

tabel oplag
surat kabar Indonesia Raya
1949-1958

tahun	jumlah oplag
1949 (Desember)	5.000
1951 (Oktober)	3.500
1954	10.000
1955	22.000
1956	24.000
1957	40.000
1958 (awal)	45.000
1958 (pertengahan)	47.500
1958 (akhir)	18.000

Sumber :

Henri Chambert-Loir, Mochtar Lubis: Une Vision de l'Indonesie Contemporaine, 1974, sebagaimana dikutip oleh Daniel Dhakidae, The State, The Rise of Capital and The Fall of Political Journalism in Indonesia: The Political Economy of Indonesian News Industry, tesis doktor dari Cornell University, 1991, h.166 (tidak dipublikasikan).

tabel 2

tabel oplag
surat kabar Indonesia Raya
1968-1974

tahun	jumlah oplag
1968	20.000
1969	22.000
1970	40.000
1971	26.000
1972	23.000
1973 (Jan-Mei)	20.000
1973 (Juni-Agustus)	12.000
1974 (Januari)	41.000

Sumber:

1. Henri Chambert-Loir, Indonesia Raya: Suatu Gambaran Keaktuilan, terj. LEKNAS LIPI, tanpa tahun.
2. Cipta Loka Caraka, Kritis Menqupas Surat Kabar, Jakarta, 1970.
3. Wawancara dengan Kustiniyati Mochtar
4. Wawancara dengan Atmakusumah

tabel 3

Tabel Penanaman Modal Asing di Indonesia
yang disetujui oleh Pemerintah
menurut negara asalnya

Negara Asal	t a h u n 1 9 6 7 - 7 8	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
AMERICA	118	931.8
* U S A	105	800.3
* Canada	4	85.9
* Panama	6	34.2
* Bahamas	3	11.4
EUROPE	171	846.1
* West Germany	30	205.6
* United Kingdom	43	101.3
* Netherlands	49	230.5
* Others	49	308.7
ASIA	454	4047.2
* Japan	203	2534
* Hongkong	118	722.2
* Singapore	40	130.9
* Others	92	660.1
AUSTRALIA/ NEW ZEALAND	44	217.6
COMBINATION OF SOME COUNTRIES	18	1080.9
t o t a l	805	7123.6

(dalam jutaan dollar US)

Sumber : JETRO, List of Japanese Investment Projecit in Indonesia
April, 1980.

Dikutip dari : Nindarsari, Implikasi Politik Peranan Modal
Jepang di Indonesia 1970-1979, Skripsi sarjana Ilmu
Politik, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia
1980.

SUSUNAN REDAKSI INDONESIA RAYA

SELASA, 15 JANUARI 1974

INDONESIA RAYA	
Diterbitkan	: P.T.BADAN PENERBIT INDONESIA RAYA sejak 29 Desember 1949.
Dir e k s i	: Mochtar Lubis - Koestinijadi Mochtar
Pemimpin Redaksi	: Mochtar Lubis.
Pimp.Red.Se-hari2	: E.Bahau'ddin - Koestinijadi Mochtar
Redaktur Pelaksana	: Atmakusumah
R e d a k s i	: Victor Sihite - Maskun Iskandar - S.Soeharto - Mohamadnoer.
Staf Redaksi	: Roestam Effendy - M.B.Aribowo - Soekarya - Tabarani - Jus Soema Di Pradja - M.S.Hendrowijono.
Pembantu Tetap	: M.T.Zen (ITB) - S.M.Latif (Bogor) - Khoe Hak Liep (Singapura).
Penasihat Hukum	: Mr.Hafil St.Hidajat.
Alamat Redaksi	: Jalan Letjen Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta, Telepon 52348 -49562.
Pencetak	: P.T. "SURYA PRABHA"
Isi di luar tanggung jawab Percetakan.	

KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0632/SK/DIR.PDLN/SIT/1968
PEMBERIAN IDZIN TERHADAP PENERBITAN
Sk. Harian
"INDONESIA RAYA"

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Permohonan Pemimpin Redaksi dan Direktur P.T. Indonesia Raya Djakarta, tgl. 31 Mei 1966 No. C/394 dan tgl. 11 Februari 1967 No. 01/67 untuk menerbitkan kembali Harian INDONESIA RAYA surat kabar mana selama ini terhenti penerbitannya karena Pemimpin Redaksinya dipendjarakan selama 9 tahun oleh rezim Orde Lama.
- Menimbang : bahwa tjukup alasan untuk memberikan peridzinan tersebut.
- Mengingat : Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No. 22/SK/M/1966, 23/SK/M/1966, 24/SK/M/1966 jo UU Pokok Pers No. 11/1966.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- I. Memberikan idzin kepada : P.T. BADAN PENERBIT INDONESIA RAYA untuk menerbitkan : surat kabar harian 7 kali seminggu 4 halaman
1. Nama penerbitan : Harian "INDONESIA RAYA"
(dengan mempergunakan djatah kertas koran SIPK DEPPEN)
2. Pemimpin Redaksi / Penanggungjawab : MOCHTAR LUBIS
3. Alamat : Jl. Bonang 17 Djakarta III/20
4. Organ resmi/golongan : INDEPENDENT
5. Dengan Ketentuan :
- a. bahwa idzin penerbitan ini sewaktu-waktu dapat ditjabut apabila kewajiban-kewajiban dan ketentuan dalam Sk. Menpen R.I. No.22/SK/M/66 tidak dipenuhi sebagaimana mestinya dan apabila yang berwadjib menganggap perlu;
- b. nomor dan tanggal dari Keputusan ini dan nama pertjetakan jang mentjetak penerbitan tersebut supaja ditjantumkan dalam tiap penerbitan.
- c. menjampaikan nomor bukti dari penerbitan tersebut sebanyak 15 (lima belas) lembar pada Departemen Penerangan c.q. Direktorat Perkembangan Pers.
- II. Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 Djuli 1968

MENTERI PENERANGAN
u.b.

Direktur Djendral Pendalu
Direktorat Perkembangan Pers
Direktur

ttd. (dan cap)

ANWAR LOETHAN

Kepada: Jang Bersangkutan
dengan tembusan kepada :

1. Presidium Kabinet
2. Djaksa Agung R.I.
3. Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian
4. Pepelrada Setempat
5. Gubernur / Kepala Daerah Tingkat I Setempat
6. Kepala Kedjaksanaan Daerah Tingkat I Setempat
7. Kepala Kepolisian Komisariat Daerah Tingkat I
8. Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Setempat
9. Pimpinan S.P.S. - O.P.S. Pers Pusat
10. Komisariat S.P.S. - O.P.S. Pers Daerah Setempat
11. Pimpinan Pusat P.W.I.
12. Pimpinan Tjabang P.W.I. setempat
13. A r s i p

sumber: Abdurrachman Surjomihardjo (ed.), Beberapa Segi Perkem-
bangan Sejarah Pers di Indonesia, Jakarta: LEKNAS LIPI
dan Deppen RI, 1980 (lampiran H-1).

PELAKSANA KHUSUS
PANGLIMA KOMANDO OPERASI
PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DAERAH JAKARTA RAYA DAN SEKITARNYA

K E P U T U S A N
Nomor: KEP.063 PK/IC/VIIII/1973

T e n t a n g

PEMBERIAN IZIN CETAK

Majalah/Surat Kabar/Mingguan/Bulletin/dll.

- MENIMBANG : Bahwa terdapat tjukup alasan untuk memberikan izin percetakan atas Majalah/Surat kabar/Mingguan/Bulletin dan lain-lain tersebut di bawah ini:
- MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Presiden RI no.19 Tahun 1961 tentang KOMANDO OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN;
2. Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB No. KEP-042/KOPKAM/7/1967, tentang penunjukan PANGDAM V/JAYA selaku LAKSUS PANGKOPKAMTIB untuk daerah Jakarta Raya dan sekitarnya;
3. Surat keputusan LAKSUS PANGKOPKAMTIB/JAYA No. KEP-008/PK/3/1969 tentang susunan organisasi dan Tatakerja LAKSUS PANGKOPKAMTIB untuk daerah Jakarta Raya dan sekitarnya;
4. Keputusan MENPEN R.I. tentang pemberian izin penerbitan No: 0632/Per/DIR.PP/SIT/1971
5.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Surat Ijin Cetak No: KEP 110-PC/X/1971 tgl.28 Oktober 1971

MENETAPKAN:

PERTAMA : Kepada P.T. BADAN PENERBIT "INDONESIA RAYA"
Jln. Veteran I no.28 Jakarta

DIBERIKAN IZIN UNTUK MENCETAK / MENERBITKAN :

Surat kabar harian: "INDONESIA RAYA"
Terbit 7 (tujuh) kali seminggu, ditambah lembaran berbahasa Inggris sekali seminggu

Pimpinan Umum : MOCHTAR LUBIS
Pim.Red/Pen. Jawab : MOCHTAR LUBIS
Dicetak pada : Percetakan P.T. Surya Prabha

(pindah cetak -1)

- KEDUA : A. Mewajibkan mencantumkan No. Izin Cetak ini, nama perusahaannya pada tiap-tiap penerbitan.
B. Mewajibkan memberitahukan bilamana tidak terbit/cetak dan pindah percetakan.
C. Mewajibkan menyampaikan nomor bukti cetakan tiap kali penerbitannya sebanyak 10 (sepuluh) expl. kepada SATGAS MASS MEDIA LAKSUS PANGKOPKANTIBDA JAYA, Jl. Lapangan Banteng Barat no.26 - JAKARTA.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Agustus 1973

a.n. PELAKSANA KHUSUS
PANGLIMA KOMANDO OPERASI
PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DAERAH JAKARTA RAYA DAN SEKITARNYA

Sekretaris,

ttd (dan cap)

L.S.M. PANGGABEAN S.H.
KOLONEL CKH NRP.12151

Kepada : YANG BERSANGKUTAN

Tembusan :

1. DEPPEN c.q. DIR. PEMBINAAN PERS
- 2.
- 3.
- 4.
5. PERCETAKAN P.T. Surya Prabha
6. Arsip (SATGAS MASSMED & SEK. LAKSUS)

sumber: Abdurrachman Surjomihardjo (ed.), Beberapa Segi Perkembangan Pers di Indonesia, Jakarta, LEKNAS LIPI dan Deppen RI, 1980, lampiran H-2.

(dalam keterangan buku tersebut, surat keputusan pemberian cetak tersebut yang diberikan ketika Indonesia Raya pindah percetakan untuk beralih ke proses cetak offset, pada pertengahan tahun 1973.)

PELAKSANA KHUSUS
PANGLIMA KOMANDO OPERASI
PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DAERAH JAKARTA RAYA DAN SEKITARNYA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP-007/PK/I/74

TENTANG PENCABUTAN IZIN CETAK
SURAT KABAR HARIAN "INDONESIA RAYA"

PELAKSANA KHUSUS PANGLIMA KOMANDO OPERASI PEMULIHAN
KEAMANAN DAN KETERTIBAN DAERAH JAKARTA RAYA
DAN SEKITARNYA

- MENIMBANG :
1. Bahwa dipandang perlu untuk mengambil tindakan terhadap Surat kabar harian "INDONESIA RAYA" dengan pencabutan Surat Ijin Cetak No. KEP.063.PK/IC/VIII/1973 tanggal 1 Agustus 1973 yang diberikan kepada P.T. BADAN PENERBIT "INDONESIA RAYA" Jln. Veteran I no.28 - Jakarta.
 2. Tindakan pencabutan Surat Izin Cetak tersebut atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 - (a) Sk. Harian INDONESIA RAYA telah melanggar semangat dan jiwa dari Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam TAP MPR No. IV/MPR/1973 dan UU no. 11 Th. 1966;
 - (b) Sk. Harian INDONESIA RAYA telah memuat tulisan yang dapat merusak kewibawaan dan kepercayaan kepemimpinan Nasional;
 - (c) Sk. Harian INDONESIA RAYA dengan tulisannya dianggap menghasut rakyat, sehingga membuka peluang yang dapat mematangkan/memperuncing situasi ke arah terjadinya kekacauan-kekacauan seperti pada tanggal 15 dan 16 Januari 1974 dan yang dapat mengadu domba antara pimpinan yang satu dengan yang lain;

- MENINGAT :
1. Keputusan Presiden RI No. 19 th. 1969;
 2. Kpts. PANGKOPKAMTIB/JAYA No. KEP. 008.PC/11/1967 tanggal 11 November 1967;
 3. Kpts. LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA/JAYA No. KEP.015.PC/3/1969 tanggal 31 Maret 1969;
 4. Kpts. LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA/JAYA No. KEP.063-PK/IC/VIII/1973 tanggal 1 Agustus 1973

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan LAKSUS PANGKOPKAMTIBD/JAYA No.KEP.063-PK/IC/VIII/1973 tanggal 1 Agustus 1973, perihal izin cetak Sk. Harian INDONESIA RAYA yang diberikan kepada P.T. BADAN PENERBIT INDONESIA RAYA (Jl. Veteran I No. 28 - Jakarta) yang dicetak pada Percetakan P.T. Surya Prabha Jln. Asemka 29-39 Jakarta.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku mulai saat ditetapkan.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada P.T. BADAN PENERBIT INDONESIA RAYA Jln. Veteran I no.28 - Jakarta, untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 21 Januari 1974

AN. PELAKSANA KHUSUS
PANGLIMA KOMANDO OPERASI
PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DAERAH JAKARTA RAYA DAN SEKITARNYA

Sekretaris,

ttd (dan cap)

L.S.M. PANGGABEAN S.H.
KOLONEL CKH. NRP. 12151

Tembusan:

1. PANGKOPKAMTIB
2. MENPEN R.I. c/q DIRJEN PPG
3. KEJAKSAAN AGUNG
4. B A K I N
5. DAN SATGAS MASSMED KOPKAMTIB
6. SPS PUSAT
7. PWI PUSAT
8. PWI JAYA
9. P.T. SURYA PRABHA
10. DAN SATGAS MASSMED LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA/JAYA
11. A R S I P.

sumber: Abdurrachman Surjomihardjo (ed.), Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, Jakarta : LEKNAS LIPI dan Deppen RI, 1980 (lampiran I-1).

MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 20/SK/DIRJEN-FG/K/1974

TENTANG PENCABUTAN SURAT IJIN TERBIT (SIT)
SURAT KABAR HARIAN "INDONESIA RAYA"

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG

- : a. bahwa dipandang perlu untuk mengambil tindakan terhadap surat kabar harian "Indonesia Raya" dengan pencabutan Surat Ijin Terbit (SIT) No. 0632/SK/DirFP/SIT/1968, tanggal 24 Juli 1968-0632/Per/SK/DirFP/SIT/1971, tanggal 18 Juni 1971, yang diberikan kepada P.T. Badan Penerbit "INDONESIA RAYA" alamat Jl. Bonang 17 Jakarta.
- b. bahwa tindakan pencabutan Surat Ijin Terbit (SIT) tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
- (i) Surat kabar harian "INDONESIA RAYA" telah melanggar semangat dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPR (TAP MPR) NO. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan Undang-undang no. 11 Tahun 1966, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, dimana dijelaskan bahwa mass media umumnya dan sarana pers khususnya harus menjadi sarana pembinaan partisipasi rakyat dalam pembangunan dan sebagai saluran pendapat rakyat yang konstruktif.
 - (ii) Surat kabar Harian "Indonesia Raya" telah memuat tulisan-tulisan yang :
 1. Pada hakekatnya menjurus kearah usaha-usaha untuk melemahkan sendi-sendi kehidupan nasional, dengan jalan mengobarkan issue-issue seperti modal asing, korupsi, dwifungsi, kebobrokan-kebobrokan aparat pemerintah, pertarungan tingkat tinggi, masalah Aspri-Kopkamtib.
 2. Merusak kepercayaan masyarakat pada Kepemimpinan Nasional.
 3. Mendengungkan kepekaan-kepekaan tanpa memberikan pemecahan yang tepat dan

positif, yang dapat diartikan menghasut rakyat untuk bangkit bergerak untuk mengambil tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan negara.

4. Menciptakan peluang untuk mematangkan situasi yang menjurus pada perbuatan makar.

(iii) Sekalipun telah diberikan peringatan-peringatan yang tegas dan keras berkali-kali sejak peristiwa 5 Agustus di Bandung oleh Kopkamtib terhadap semua mass media khususnya pers untuk tidak mempertajam dan memperuncing kontras-kontras sosial yang dapat menggoncangkan serta merusak stabilitas nasional yang menjadi syarat mutlak pembangunan, namun ulasan-ulasan, penyajian-penyajian berita maupun tulisan dari surat kabar yang bersangkutan ternyata tidak menghiraukan peringatan-peringatan tersebut.

(iv) Surat Ijin Cetak dari surat kabar Harian yang bersangkutan telah dicabut oleh Laksus Pangkoptibda Jaya pada tanggal 21 Januari 1974.

c. bahwa perbuatan Surat kabar Harian "INDONESIA RAYA" itu bertentangan dengan dan merupakan pelanggaran terhadap fungsi dan tanggung jawab pers, sebagaimana dimaksud dalam TAP MPR No. IV/MPR/1973, Undang-undang No. 11/1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan Menteri Penerangan R.I. no. 03/1969 BAB III, pasal 7d.

d. bahwa tindakan pencabutan Surat Ijin Terbit (SIT) terhadap penerbitan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan kebebasan pers, melainkan justru menegakkan kebebasan dalam arti sebenarnya dalam rangka tertib demokrasi Pancasila, dimana pers yang sehat yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia telah dirumuskan dalam konsensus nasional, TAP MPR No. IV/MPR/73, yaitu "pers yang bebas dan bertanggung jawab".

MENINGGAT :

1. TAP MPR NO. IV/MPR/1973
2. Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, khususnya BAB VI, ayat (I) sub c dan d.
3. Peraturan Menteri Penerangan R.I. No. 03/1969, khususnya BAB III pasal 7d.
4. Pernyataan Pers Pemerintah - tanggal 17 Janu-

ari 1974.

MEMPERHATIKAN : Pernyataan Pengurus PWI - Pusat di Jakarta tanggal 19 Januari 1974.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERTAMA : Mencabut Surat Ijin Terbit (SIT) Surat-kabar Harian "INDONESIA RAYA", yakni Surat Ijin Terbit No. 0632/SK/Dir.PDLN/SIT/1968, tgl 24 Juli 1968 - 0632/Per/SK/Dir.PP/SIT/1971, tgl 18 Juni 1971, dan karenanya mengenakan larangan terbit bagi surat kabar harian yang bersangkutan.

KEDUA : Larangan terbit sebagai dimaksud diktum pertama meliputi larangan menerbitkan, larangan mencetak dan larangan mengedarkan.

KETIGA : Sejak tanggal mulai berlakunya keputusan ini, segala fasilitas penerbitan yang bersumber pada Surat Ijin Terbit (SIT) surat kabar harian "INDONESIA RAYA" di Jakarta dicabut.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata dikemudian hari terjadi kesalahan akan diadakan pembetulan/perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Januari 1974 .

MENTERI PENERANGAN R.I.
u.b.

DIREKTUR JENDRAL PEMBINAAN
PERS DAN GRAFIKA

ttd (dan cap)

SDEKARNO, SH

Tembusan kepada Yth.

1. Laksus Pangkoptibda Jaya
2. A r s i p

sumber: Abdurrachman Surjomihardjo (ed.), Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, Jakarta: LEKNAS LIPI dan Deppen RI, 1980 (lampiran I-2).